

The background of the cover is a deep blue. In the upper left, a light blue globe shows the continents of Asia and Australia. Three satellites are depicted in orbit around the globe, connected by dashed white lines. Concentric white circles radiate from the globe, representing signal waves. In the lower right, a tall, red and white lattice communication tower stands prominently. It has several white satellite dishes and antenna arrays mounted on it. The tower casts a long, dark shadow towards the bottom left. The overall theme is global connectivity and telecommunications.

JOURNEY TO DRIVE CONNECTIVITY

2023 Laporan Tahunan
Annual Report

JOURNEY TO DRIVE CONNECTIVITY



Dalam lanskap telekomunikasi yang terus berkembang, mewujudkan konektivitas bukan hanya sebuah misi, melainkan perjalanan. Melalui penyewaan menara dan layanan tambahan, STP menyediakan konektivitas terbaik kepada pelanggannya dan, dengan demikian, kepada jutaan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2023, STP mengambil langkah maju yang signifikan dengan secara strategis terus mengoptimalkan penyewaan menara kolokasi dan membina hubungan dengan operator telekomunikasi untuk memperkuat kemitraan jangka panjang yang menjadi kunci kesuksesan.

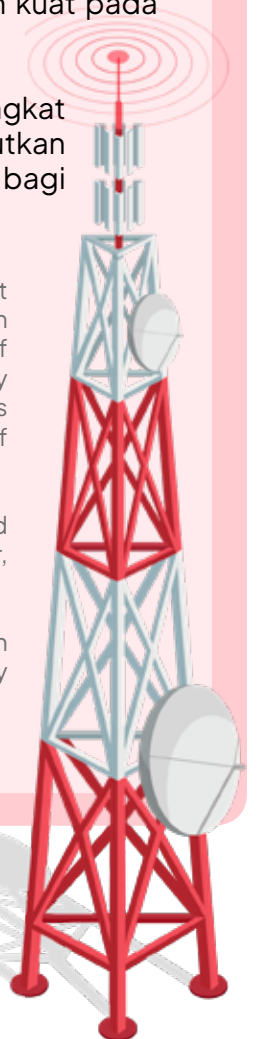
STP tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai yang terdepan di industri tetapi juga mencapai pertumbuhan yang membanggakan pada tahun 2023. Perseroan berkomitmen untuk menjadi entitas yang lebih baik dan kuat pada tahun 2024 dan seterusnya.

Kedepan, prospek permintaan konektivitas sangat positif dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi di Indonesia. STP siap untuk melanjutkan *Journey to Drive Connectivity* dan menghadirkan transformasi bagi masyarakat.

In the ever-evolving landscape of telecommunications, driving connectivity isn't just a mission; it's a journey. Through tower leasing and ancillary services, STP have been providing the best connectivity to its customers and, by extension, to millions of Indonesians. In 2023, our journey took a significant stride forward as we strategically continued to optimize colocation tower leasing and cultivate close relationships with telco operators to cement long-term partnerships that serve as the bedrock of our success.

STP has not only secured its place at the forefront of the industry but also achieved remarkable growth in 2023. The Company is committed to becoming an even better, stronger entity in 2024 and beyond.

Looking ahead, the outlook for connectivity demand is exceedingly positive with high internet penetration rate in Indonesia. STP is well poised to continue its Journey to Drive Connectivity and transforming communities along the way.



Disclaimer

Laporan Tahunan ini dapat dibaca secara bersamaan dengan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang komitmen dan program keberlanjutan Perseroan. Dalam Laporan ini, setiap rujukan kepada "Perseroan", "Kami", "Grup STP", atau "Grup", berarti merujuk pada STP dan entitas anak Perseroan.

This Annual Report can be read in conjunction with the Company's Sustainability Report to provide a holistic understanding of the Company's commitment and sustainability programs. In this Report, any reference to "the Company", "We", "STP Group", or "Group", refers to STP and its subsidiary entities.



DAFTAR ISI

Table of Content

DAFTAR ISI
Table of Content

Ikhtisar Utama Performance Highlights

06	RINGKASAN KINERJA 2023 2023 Performance Highlights
08	IKHTISAR KINERJA KEUANGAN Financial Performance Highlights
11	KINERJA SAHAM Stock Performance
13	AKSI KORPORASI Corporate Actions
13	INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUPENSION) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING) Suspension And/Or Delisting
13	IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI Bonds, Sukuk or Conversion Bonds Highlights
14	PERISTIWA PENTING Event Highlights

Laporan Manajemen Management Reports

20	LAPORAN DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Report
26	LAPORAN DIREKSI Board of Directors Report
36	PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 Statements of Responsibility of The Board of Commissioners and The Board of Directors Regarding The 2023 Annual Report

Profil Perusahaan Company Profile

40	IDENTITAS PERUSAHAAN Corporate Identity
42	JEJAK LANGKAH Milestones
46	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN Company In Brief
48	VISI, MISI & NILAI-NILAI PERSEROAN Vision, Mission & Corporate Value
50	LOGO PERUSAHAAN Company Logo
51	KEGIATAN USAHA Line of Business

51	LAYANAN KAMI Our Service
52	WILAYAH OPERASIONAL Operational Areas
54	STRUKTUR ORGANISASI Organization Structure
56	KEANGGOTAAN ASOSIASI Association Membership
57	KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Composition
65	KOMPOSISI DIREKSI Board of Directors Composition
76	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM Shareholders Composition
78	STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2023 Shareholders Structure As of December 31, 2023
80	INFORMASI ENTITAS ANAK Information on Subsidiaries
83	KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM Stock Listing Chronology
85	INFORMASI PENCATATAN EFEK LAINNYA Other Stock Listing Information
86	LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Capital Market Supporting Institutions & Professions
86	PENGHARGAAN & SERTIFIKASI Awards & Certifications
88	INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN Corporate Website Information

Analisis & Diskusi Manajemen Management Discussion & Analysis

92	TINJAUAN PEREKONOMIAN Economic Overview
95	TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI Telecommunications Industry Review
98	STRATEGI USAHA Business Strategy
100	ASPEK PEMASARAN Marketing Aspect
101	PROSPEK USAHA Business Prospect
102	TINJAUAN OPERASIONAL SEGMENT USAHA Operational Segment Review
103	TINJAUAN KEUANGAN Financial Review
123	SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources
141	TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

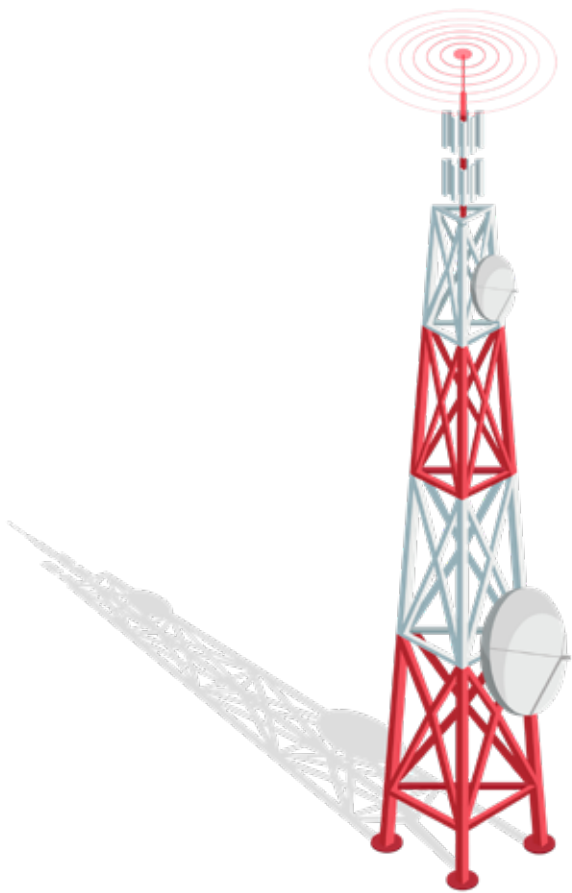
248

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

154	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance
165	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders
182	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners
198	DIREKSI Board of Directors
210	ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Supporting Organs
211	KOMITE AUDIT Audit Committee
221	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Remuneration and Nomination Committee
228	SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary
232	UNIT KEBERLANJUTAN Sustainability Unit
233	DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL Internal Audit Department
239	AKUNTAN PUBLIK Public Accountant
240	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System
242	MANAJEMEN RISIKO Risk Management
252	PERMASALAHAN HUKUM Legal Matters
253	AKSES INFORMASI Information Access
256	PENGADAAN BARANG DAN JASA Procurement of Goods and Services
258	PEDOMAN PERILAKU Code of Conduct
260	KEBIJAKAN ANTIKORUPSI Anti-Corruption Policy
261	KEBIJAKAN PERUSAHAAN UNTUK MEMENUHI HAK KREDITUR Company Policy on Creditor's Rights
262	KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI Policy on the Utilization of Information Technology for Information Transparency
263	PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN Employee and/or Management Shares Option Programs
264	WHISTLEBLOWING SYSTEM Whistleblowing System

266	KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard
288	DAFTAR INDEKS SEOJK 16/2021 SEOJK 16/2021 Index List

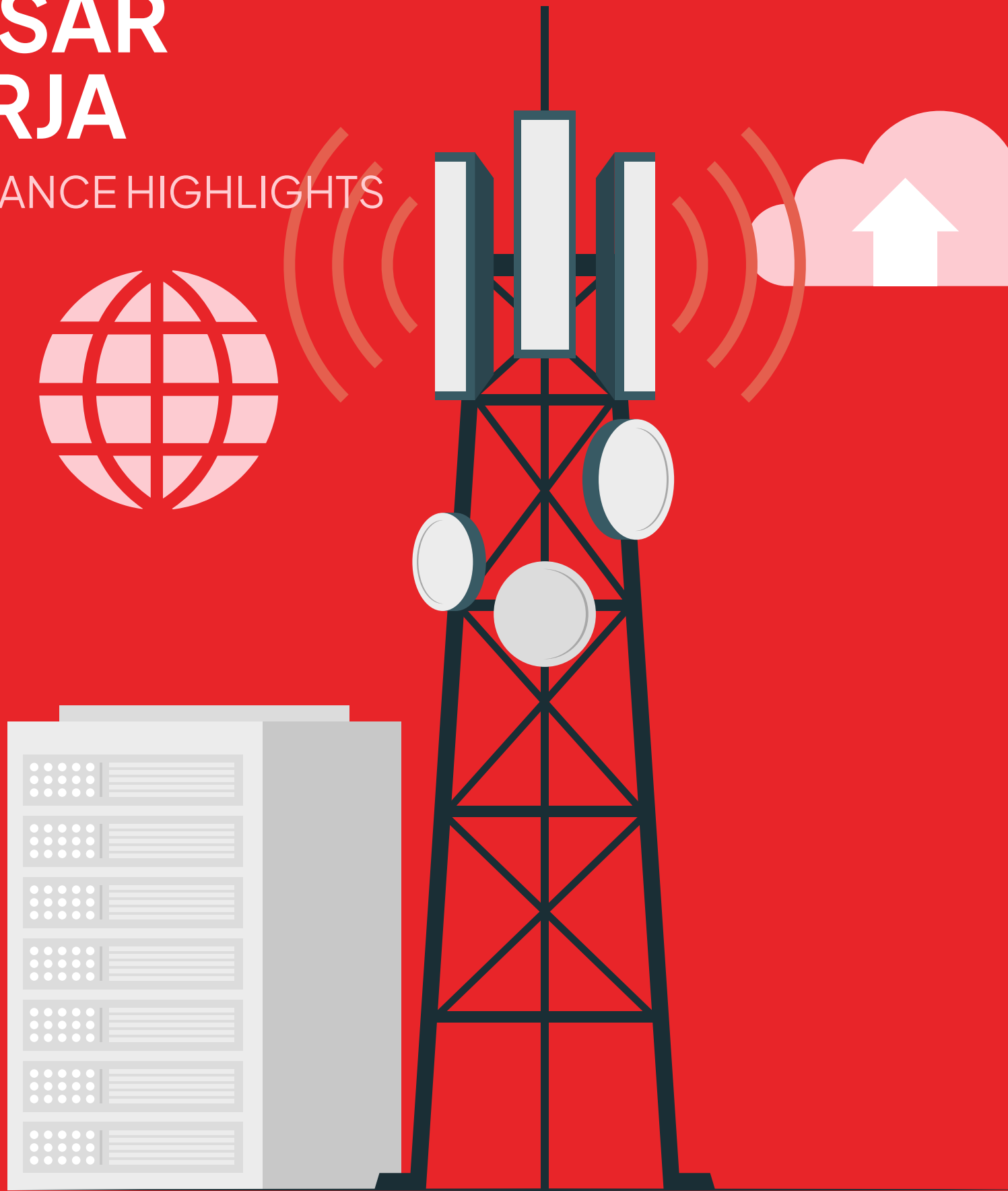
Laporan Keuangan Konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Anak Perusahaan Consolidated Financial Statments of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and Its Subsidiaries



01.

IKHTISAR KINERJA

PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Ekspansi bisnis Perseroan yang berhasil meningkatkan kinerja profitabilitas di tahun 2023 mampu meningkatkan ekuitas Perseroan menjadi

Rp5,71 triliun

dengan **pertumbuhan** sebesar

24,68% yoy.

The Company's successful business expansion, which improved profitability performance in 2023, was able to increase the Company's equity to Rp5.71 trillion, with a growth of 24.68% yoy.

RINGKASAN KINERJA 2023

2023 Perfomance Highlights

Pendapatan Revenues

Rp1.89 triliun | trillion

Total Pendapatan naik sebesar 0,20% menjadi Rp1,89 triliun di tahun 2023 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,89 triliun.

Total Revenues increase by 0.20% to Rp1.89 billion in 2023 from Rp1.89 trillion in the previous year.

Laba Tahun Berjalan Income for the Year

Rp1,13 triliun | trillion

Laba Tahun Berjalan meningkat sebesar 20,51% menjadi Rp1,13 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,94 triliun.

Income for the Year was Rp1.13 trillion, increased by 20.51% from Rp0.94 trillion in 2022.

EBITDA EBITDA

Rp1,74 triliun | trillion

EBITDA tercatat sebesar Rp1,74 triliun, **naik** 1,68% dibanding tahun 2022 sebesar Rp1,71 triliun

EBITDA disbursement was recorded at **Rp1.74 trillion**, an increase of 1.68% from 2022 of Rp1.71 trillion

Laba Usaha Operating Profit

Rp1,32 triliun | trillion

Laba Usaha tercatat sebesar Rp1,32 triliun, **naik** 1,16% dibanding tahun 2022 sebesar Rp1,31 triliun.

Operating Profit stood at Rp1.32 trillion, an increase of 1.16% from 2022 of Rp1.31 trillion.

RINGKASAN KINERJA 2023 2023 Perfomance Highlights

Jumlah Aset Total Asset

Rp9,89 triliun | trillion

Jumlah Aset naik sebesar 2,96% menjadi Rp9,89 triliun di tahun 2023 dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,60 triliun.

Total Assets increased by 2.96% to Rp9.89 trillion in 2023 from Rp9.60 trillion in the previous year.

Jumlah Aset Lancar Total Current Asset

Rp0,95 triliun | trillion

Aset Lancar meningkat sebesar 29,98% menjadi Rp0,95 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,73 triliun.

Current Assets stood at Rp0.95 trillion, increased by 29.98% from Rp0.73 trillion in 2022.

Jumlah Ekuitas Total Equity

Rp5,71 triliun | trillion

Jumlah Ekuitas sebesar Rp5,71 triliun di tahun 2023, **meningkat** sebesar 24,68% dari Rp4.58 triliun di tahun 2022.

Total Equity reached Rp5.71 trillion in 2023, increased by 24.68% from Rp4.58 trillion in 2022.

Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Rp4,17 triliun | trillion

Total Liabilitas mencapai Rp4.17 triliun, menurun sebesar 16,86% dari tahun 2022 sebesar Rp5.02 triliun.

Total Liabilities reached **Rp4.17 trillion**, decreased by 16.86% from Rp5.02 trillion in 2022.

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Highlights

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

dalam miliar Rupiah | in billion Rp

Uraian	2023	2022	2021	Description
Jumlah Aset Lancar	946,2	728,0	1.932,7	Total Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.939,3	8.873,6	9.702,3	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset	9.885,5	9.601,5	11.635,1	Total Assets
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.363,7	2.145,8	2.700,6	Total Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	810,2	2.874,6	5.724,0	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	4.173,9	5.020,4	8.424,6	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	5.711,6	4.581,1	3.210,5	Total Equities
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	9.885,5	9.601,5	11.635,1	Total Liabilities and Equities

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

dalam miliar Rupiah | in billion Rp

Uraian	2023	2022	2021	Description
Pendapatan	1.892,1	1.888,3	2.076,0	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	465,2	443,2	598,9	Cost of Revenues
Beban Usaha	102,3	135,6	201,8	Operating Expenses
Beban Lain-lain – Bersih	(177,2)	243,9	1.663,1	Other Expenses – Net
EBITDA	1.742,3	1.713,5	1.770,9	EBITDA
Laba Bruto	1.426,8	1.445,0	1.477,1	Gross Income
Laba Usaha	1.324,6	1.309,4	1.275,2	Operating Income
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Penghasilan	1.147,4	1.065,4	(387,9)	Profit before Final Tax and Income Tax Expense
Manfaat (Beban) Pajak Final dan Penghasilan	(19,1)	(129,1)	318,8	Final tax and Income Tax Benefit (Expenses)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.128,3	936,3	(69,1)	Income (Loss) for the Year
Laba Penghasilan Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	1.128,3	936,3	(69,0)	Equity Holders of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	0,005	-	(0,1)	Non-controlling Interest
Jumlah	1.128,3	936,3	520,6	Total
Total Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	1.130,6	936,9	520,7	Equity Holders of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	0,005	-	(0,1)	Non-controlling Interest
Jumlah	1.130,6	936,9		
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	992	823	(61)	Basic earnings per share attributable to owners of the parent entity (in full amount)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

dalam miliar Rupiah | in billion Rp

Uraian	2023	2022	2021	Description
Kas Neto Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.639,2	1.608,3	1.567,3	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
Kas Neto Yang Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(245,4)	1.032,6	65.365	Net Cash Flows Provided by Investing Activities
Kas Neto Yang (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.391,0)	(3.234,3)	(1.275,6)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	2,9	(593,3)	357,0	Net Increase (Decrease) in Cash on Hand and in Banks
Pengaruh Perubahan Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas	(0,0)	2,2	(0,8)	Effects of Changes in Foreign Exchange Rate on Cash on Bank and in Banks
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2,4	593,4	237,2	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	5,3	2,3	593,4	Cash and Cash Equivalents at The End of Year

RASIO KEUANGAN PENTING

KEY RATIOS

Uraian	2023	2022	2021	Description
Marjin EBITDA	92,1%	90,7%	85,3%	EBITDA Margin
Marjin Laba Usaha	70,0%	69,3%	61,4%	Operating Income Margin
Marjin Laba Tahun Berjalan	59,6%	49,6%	(3,3%)	Profit for the Year Margin
Rasio Laba terhadap Total Ekuitas	19,8%	20,4%	(2,2%)	Return on Equity
Rasio Laba terhadap Total Aset	11,4%	9,8%	(0,6%)	Return on Assets
Rasio Lancar (X)	0,3	0,3	0,7	Current Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap Ekuitas (X)	0,5	0,7	1,6	Net Debt to Equity Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap Aset (X)	0,3	0,4	0,4	Net Debt to Asset Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA* (X)	1,4	2,0	3,0	Net Debt to LQA EBITDA* Ratio (X)

*) EBITDA Kuartal terakhir yang disetahunkan

*) Annualized latest quarter EBITDA

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Highlights

KINERJA SAHAM

Stock Performance

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Uraian	2023	2022	2021	Description
Site Portofolio Tower				Tower Portfolio Site
Jumlah Site Menara	6.851	6.903	6.949	Total Tower Site
Site Portofolio Non-Tower				Non-Tower Portfolio Site
Site Indoor DAS	15	37	37	Indoor DAS Site
Jaringan Kabel Serat Optik (km)	-	-	9.897	Fiber Optic Cable Network (km)
Penyewaan Site Menara	12.954	12.842	12.846	Tower Site Tenancie
Rasio Penyewaan Menara	1,89x	1,86x	1,85x	Tower Tenancy Ratio
Penyewaan Portofolio Non-Tower				Non-Tower Portfolio Tenancies
Site Indoor DAS	26	42	57	Indoor DAS Site

Informasi Kinerja Saham

Saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) sampai dengan 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 1.137.579.698 lembar saham, di mana pergerakannya mencapai harga tertinggi Rp41.450 pada bulan Februari 2023 dan harga terendah Rp33.900 pada bulan Mei 2023. Hingga akhir tahun 2023, seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Berikut informasi saham Perseroan:

Share Performance Information

As of December 31, 2023, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP) shares were recorded at 1,137,579,698 shares, where the movement reached the highest price of Rp41,450 in February 2023 and the lowest price of Rp33,900 in May 2023. Until the end of 2023, all of the Company's shares have been listed on the Indonesia Stock Exchange. The following is information on the Company's shares:

Harga, Volume, Nilai dan Kapitalisasi Saham 2023 & 2022

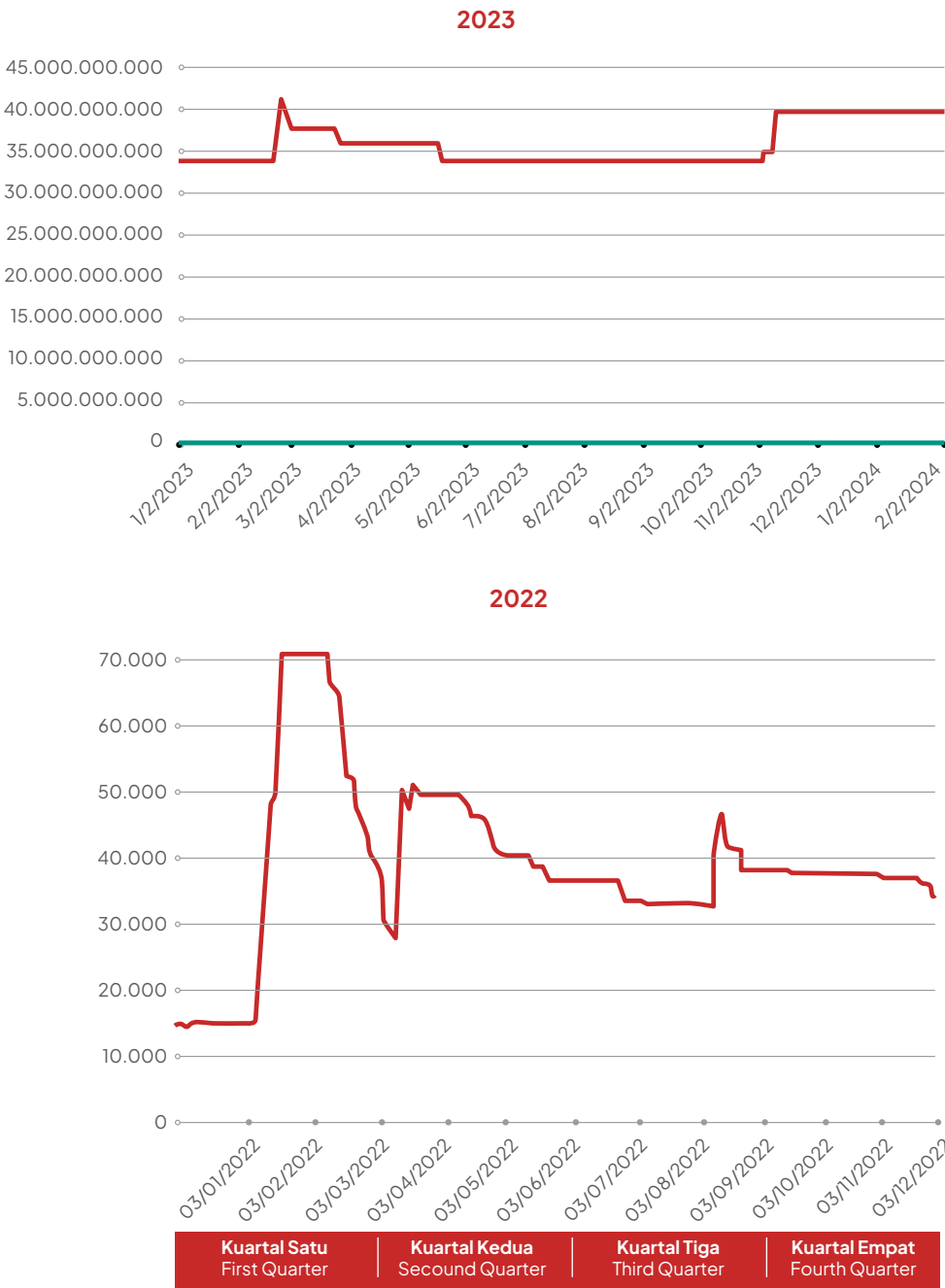
Share Price, Volume, Values and Market Capitalization 2023 & 2022

2023						
Kuartal Quarter	Tertinggi Highest (Rp)	Terendah Lowest (Rp)	Penutupan Closing (Rp)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Rp Juta Rp Million)	Volume Perdagangan (Ribu Saham) Transaction Volume (Thousand Shares)	Nilai Perdagangan Transaction Value (Rp Juta Rp Million)
I	41.450	34.000	36.000	40.952.869	4,7	1.777
II	36.000	33.900	34.000	38.677.710	0,3	10,4
III	34.000	34.000	34.000	38.677.710	0,1	3,4
IV	39.900	34.000	39.900	45.389.430	0,6	22,9

2022						
Kuartal Quarter	Tertinggi Highest (Rp)	Terendah Lowest (Rp)	Penutupan Closing (Rp)	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Rp Juta Rp Million)	Volume Perdagangan (Ribu Saham) Transaction Volume (Thousand Shares)	Nilai Perdagangan Transaction Value (Rp Juta Rp Million)
I	70.975	15.600	47.500	54.035.036	38	1.720
II	50.875	28.525	36.700	41.749.175	59	2.477
III	47.950	33.550	38.675	43.995.895	15	643
IV	38.675	34.000	34.000	38.677.710	4	135

KINERJA SAHAM
 Stock Performance

Pergerakan Harga Saham (dalam Rupiah)
 Share Price Movement (in Rupiah)



AKSI KORPORASI
 Corporate Actions

Sampai dengan akhir tahun 2023, STP tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham dalam 2 (dua) tahun terakhir (2022–2023).

As of the end of 2023, STP did not executed corporate actions such as stock split, reverse stock, bonus share, or share par value decrement within the last 2 (two) years (2022–2023).

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA
 PERDAGANGAN SAHAM (*SUPENSION*) DAN/
 ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM
 (*DELISTING*)

Suspension And/Or Delisting

Sampai dengan akhir tahun 2023, tidak ada penghentian sementara dan/atau penghapusan pencatatan saham dari otoritas terkait kepada STP.

Until the end of 2023, no temporary suspension and/ or delisting of shares from the relevant authority given to STP.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI
 KONVERSI

Bonds, Sukuk or Conversion Bonds Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2023, STP tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya di bursa efek maupun.

Until the end of 2023, STP did not executed any listing for bonds, sukuk or conversion bonds or other stock listing at any other stock exchanges.

PERISTIWA PENTING

Event Highlights

PERISTIWA PENTING Event Highlights

14 April 2023

Perseroan dengan Protelindo, Iforte, dan KIN sebagai peminjam telah menandatangani Perjanjian Perubahan No. 298/AMD/MZH/0423 atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 9 Desember 2022 dengan PT Bank Mizuho Indonesia (Perjanjian Perubahan Mizuho). Sehubungan dengan Perjanjian Mizuho ini, para pihak telah sepakat untuk meningkatkan nilai fasilitas menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000. Perseroan dan Protelindo masing-masing telah menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan Penggantian Kerugian Perusahaan tanggal 9 Desember 2022 untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Perubahan Mizuho.

The Company with Protelindo, Iforte, and KIN as borrower signed Amendment Agreement No. 298/AMD/MZH/0423 to the Facility Agreement dated December 9, 2022 with PT Bank Mizuho Indonesia (Mizuho Amendment Agreement). In connection with Mizuho Amendment Agreement, the parties have agreed to increase the facility limit to become Rp1,000,000,000,000. The Company and Protelindo as guarantor, respectively has signed Amendment Agreement to the Corporate Guarantee and Indemnity Agreement dated December 9, 2022 to guarantee all obligations under Mizuho Amendment Agreement.

5 Mei | May 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris SUPR efektif per tanggal 5 Mei 2023, untuk periode selama 3 tahun.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders approved the re-appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners effective as of May 5, 2023, for 3 years term.

29 Mei | May 2023

Perseroan sebagai peminjam telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 44, dibuat dihadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (*Business Law*) dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.000 (Perjanjian Kredit CIMB). Protelindo sebagai penjamin telah menandatangani Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 45 dihadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (*Business Law*) untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban SUPR berdasarkan Perjanjian Kredit CIMB.

The Company as the borrower signed the Deed of Credit Agreement No. 44, drawn before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (*Business Law*) with PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Credit Agreement) in the amount of Rp1,000,000,000,000 (CIMB Credit Agreement). Protelindo as the guarantor signed the Deed of Corporate Guarantee Number 45 drawn before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (*Business Law*) to guarantee SUPR's obligation under CIMB Credit Agreement.

12 Juni | June 2023

Perseroan dengan Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR dan GIK telah menandatangani Perubahan Keempat belas atas Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Central Asia Tbk. Perjanjian Perubahan Keempat belas ini merupakan perubahan atas fasilitas kredit berdasarkan Rp500.000.000.000 *Revolving Loan Facility Agreement* tertanggal 21 Desember 2016 dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Perubahan Ketigabelas atas Perjanjian Fasilitas tanggal 9 November 2022. Sehubungan dengan Perubahan Keempat belas ini, para pihak telah sepakat untuk menambahkan fasilitas kredit investasi (Fasilitas K) sejumlah Rp3.400.000.000.000 dan penambahan nilai fasilitas *money market* yang keseluruhannya menjadi Rp1.500.000.000.000 untuk Perseroan dengan Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR dan GIK.

The Company with Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR and GIK have signed the Fourteenth Amendment Agreement with PT Bank Central Asia Tbk (BCA). This Fourteenth Amendment Agreement is an amendment of facility credit based on Rp500,000,000,000 Revolving Loan Facility Agreement dated December 21, 2016 which is subsequently amended for several times as lastly amended by Thirteenth Amendment Agreement dated November 9, 2022. In connection with the Fourteenth Amendment Agreement, parties have agreed to provide additional investment facility (Facility K) in the amount of Rp3,400,000,000,000 and increment of money market facility in the amount of Rp1,500,000,000,000 for the Company with Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR and GIK.

13 Juni | June 2023

Perseroan, Protelindo dan Iforte sebagai peminjam telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 dan Akta Perjanjian Nomor 18, keduanya dibuat dihadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (*Business Law*) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk pinjaman jangka pendek dan Rp1.000.000.000.000 untuk pinjaman jangka panjang (Perjanjian Kredit BNI). Protelindo sebagai penjamin telah menandatangani Perjanjian Penanggungan Perusahaan No. 19 dihadapan Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (*Business Law*) untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit BNI.

The Company, Protelindo and Iforte as the borrower signed the Deed of Credit Agreement No. 17 and Deed of Credit Agreement No. 18, both drawn before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (*Business Law*) with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI Credit Agreement) in the amount of Rp1,000,000,000,000 for short term loan and Rp1,000,000,000,000 for long term loan (BNI Credit Agreement). Protelindo as the guarantor signed the Deed of Corporate Guarantee Number 19 drawn before Notary Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp., M. Com (*Business Law*) to guarantee all obligation under BNI Credit Agreement.

PERISTIWA PENTING Event Highlights

28 Agustus | August 2023

Perseroan sebagai penjamin, dengan Protelindo dan Iforte sebagai peminjam telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 12 dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H., dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp1.500.000.000.000, - (Perjanjian Kredit dan Penanggungan). Berdasarkan Perjanjian Kredit dan Penanggungan, maka Perseroan akan menjamin kewajiban dari Protelindo dan Iforte sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan Penanggungan.

The Company as a guarantor, with Protelindo and Iforte as borrowers signed the Deed of Credit Agreement No. 12 drawn before Notary Mutiara Siswono Patiendra, S.H., with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., for the facility in the amount of IDR1,500,000,000,000 (Credit Agreement and Corporate Guarantee). Under the Credit Agreement and Corporate Guarantee, the Company will guarantee Protelindo and Iforte's obligations in relation with the Credit Agreement and Corporate Guarantee.

4 Oktober | October 2023

Perseroan dengan Protelindo, dan Iforte sebagai para peminjam telah menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 dengan MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta (Perjanjian Fasilitas MUFG). Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas MUFG ini, para pihak telah sepakat untuk meningkatkan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp1.350.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang. Protelindo, Iforte dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap seluruh kewajiban yang ada.

The Company with Protelindo, and Iforte as the borrowers has signed Amendment and Restatement Agreement dated February 28, 2017 with MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch (MUFG Facility Agreement). In connection with MUFG Facility Agreement, the parties have agreed to increase the credit facility to become IDR1,350,000,000,000 or its equivalent to the United States Dollar currency or Japanese Yen. Protelindo, Iforte and the Company are jointly and several liability to their obligations thereof.



02.

Laporan Manajemen

Management
Reports



Dengan langkah penghematan biaya dan sinergi aset serta operasional menara, Perseroan berhasil mencatat pencapaian sesuai target dan rencana anggaran di tahun 2023.

Backed by cost-saving measures and synergy in asset and tower operations, the Company successfully achieved its targets and budget plans in 2023.



KUSMAYANTO KADIMAN

Komisaris Utama
(Komisaris Independen)
President Commissioner
(Independent Commissioner)

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report



Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah memberikan respons yang tepat terhadap lingkungan bisnis saat ini, dengan strategi operasional dan keuangan yang terarah agar pertumbuhan tetap terjaga dan mempertahankan stabilitas posisi keuangan di tengah pasar yang kompetitif.

In the Board of Commissioners' view, the Board of Directors appropriately responded to the business environment with appropriate operational and financial strategies, facilitating business expansion while maintaining financial stability in a competitive landscape.

Pemegang Saham yang terhormat,

Di tengah fluktuasi ekonomi global dan kompleksitas geopolitik, perekonomian Indonesia tetap tangguh sepanjang tahun 2023. Indonesia menunjukkan kemampuan bertumbuh yang konsisten, stabilitas makroekonomi, dan ketahanan keuangan. Lebih jauh, Indonesia mempertahankan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kumulatif sebesar 5,05% pada tahun 2023, sementara tingkat inflasi tetap stabil pada 2,61% secara tahunan per Desember 2023.

Ketahanan ekonomi Indonesia didukung oleh berbagai sektor. Dari sisi pengeluaran, belanja rumah tangga masih menjadi kontributor yang dominan. Sementara itu, sektor informasi dan telekomunikasi (infokom) tercatat tumbuh kuat sebesar 7,59% secara tahunan atau bahkan melampaui kenaikan PDB secara keseluruhan. Sektor ini berkontribusi signifikan sebesar 4,23% terhadap PDB, hal yang menggarisbawahi nilai penting sektor infokom di tengah masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan komunikasi digital yang ditopang oleh konektivitas internet yang meluas. Data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan penetrasi internet telah melebihi 78%, dengan paritas akses dari sisi gender dan geografis perkotaan-perdesaan. Konsumsi layanan

Dear Distinguished Shareholders,

Amidst the backdrop of global economic fluctuations and geopolitical complexities, Indonesia's economy remained resilient throughout 2023, demonstrating consistent growth, macroeconomic stability, and financial robustness. Notably, Indonesia sustained a cumulative gross domestic product (GDP) growth rate of 5.05% in 2023, while the inflation rate remained stable at 2.61% year-on-year as of December 2023.

The nation's economic resilience was bolstered by various sectors. In terms of spending, household consumption remained as the leading growth contributor. Meanwhile, the information and telecommunication sector posted a notable 7.59% year-on-year growth, surpassing the overall GDP expansion. This sector's significant contribution of 4.23% to the GDP underscored its growing importance in society, particularly in digital communication enabled by widespread internet connectivity. Recent data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) revealed over 78% internet penetration, with almost access parity across gender and urban-rural settings. Additionally, Indonesian telecom operators experienced an increase in average revenue per user (ARPU), indicative of

LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

infokom yang meningkat dan daya beli konsumen yang tetap solid juga ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) oleh operator telekomunikasi.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP" atau "Perseroan") bangga akan perannya di tengah-tengah kemajuan ini sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terdepan. Kami bersyukur atas keberhasilan Perseroan menghadapi tantangan tahun 2023, sebagaimana diuraikan dalam laporan tahunan ini.

PANDANGAN ATAS KINERJA DIREKSI PERSEROAN

Sejalan dengan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan cermat mengikuti perkembangan Perseroan sepanjang tahun 2023. Untuk itu, Dewan Komisaris rutin bertemu guna mengetahui kemajuan implementasi rencana bisnis, memberikan wawasan tentang perkembangan industri, dan mengatasi tantangan usaha sesuai dengan lingkup tanggung jawab kami. Pengawasan Dewan Komisaris juga dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mencatat, dengan adanya tantangan seperti kenaikan suku bunga acuan, Direksi telah melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi industri, tantangan bisnis, dan peluang. Pengelolaan liabilitas secara hati-hati, serta pelaksanaan belanja operasional dan modal yang strategis, memastikan pertumbuhan bisnis yang kuat di tengah tantangan ini.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah memberikan respons yang tepat terhadap lingkungan bisnis saat ini, dengan strategi operasional dan keuangan yang terarah agar pertumbuhan tetap terjaga dan mempertahankan stabilitas posisi keuangan di tengah pasar yang kompetitif. Di antara strategi yang dijalankan adalah melakukan sinergi dan efisiensi berkelanjutan, memperluas penawaran jasa, memaksimalkan pertumbuhan sewa kolokasi, memperkuat hubungan dengan operator telekomunikasi, dan memprioritaskan kecepatan eksekusi strategi dan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja operasional. Semua

heightened consumption of telecommunication and information services alongside robust consumer purchasing power.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP" or the "Company") takes pride in its role amidst these advancements as a premier telecommunication infrastructure provider. We express gratitude for successfully navigating 2023, as detailed in this annual report.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Align with the oversight and advisory responsibilities of the Board of Commissioners, we closely followed the Company's development throughout 2023. This entailed conducting regular meetings to assess progress against business plans, providing insights on industry developments, and addressing key challenges within our purview. The Board of Commissioners also optimizing the role of committees under the Board of Commissioners in carrying out its supervisory role.

We noted that under challenges such as the elevated benchmark interest rate, the Board of Directors conducted thorough analyses of industry conditions, business challenges, and opportunities. Prudent management of liabilities, along with strategic execution of operational and capital expenditures, ensured robust business growth.

The Board of Directors appropriately responded to the business environment with appropriate operational and financial strategies, facilitating expansion while maintaining financial stability in a competitive landscape. These strategies included continuous synergy and efficiency initiatives, expanded service offering, maximizing colocation growth, strengthening relationships with telecom operators, and prioritizing speed of execution and continuous improvement in operational performance. These efforts yielded tangible results, as evidenced by the Company's ownership and operation of numerous telecommunication towers, serving a

upaya ini membuahkan hasil nyata, sebagaimana tampak dari kepemilikan dan pengoperasian menara telekomunikasi Perseroan yang melayani sejumlah besar penyewa dengan rasio sewa yang sangat baik per 31 Desember 2023.

Dalam hal aset, Perseroan melaporkan pertumbuhan 2,96% secara tahunan menjadi Rp9,89 triliun pada tahun 2023. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan aset lancar. Sementara itu, ekuitas menunjukkan peningkatan 24,68% year-on-year dari Rp4,58 triliun pada 2022 menjadi Rp5,71 triliun pada 2023. Segmen usaha utama Perseroan, sewa menara yang menyumbang 100% dari pendapatan Perseroan, menghasilkan Rp1,89 triliun atau tumbuh 0,20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp1,32 triliun atau meningkat 1,16% secara tahunan dibandingkan Rp1,13 triliun pada tahun sebelumnya berkat efisiensi operasional yang dijalankan.

Dewan Komisaris menilai, pencapaian ini secara strategis memposisikan STP untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Permintaan akan layanan dan infrastruktur di sektor informasi dan komunikasi Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap konektivitas nasional, seperti yang ditunjukkan dalam Visi Indonesia Digital 2045. Visi yang baru diluncurkan ini menegaskan bahwa industri telekomunikasi dan informasi akan kian penting di tahun-tahun mendatang.

Dalam jangka pendek, perkiraan pertumbuhan Indonesia 2024 secara umum tetap positif, diproyeksikan sekitar 5,2%. Pertumbuhan ini didorong oleh belanja negara di berbagai sektor dan konsumsi rumah tangga yang kuat. Selain itu, prospek bisnis yang menguntungkan bagi Perseroan didorong oleh meningkatnya penetrasi internet di seluruh Indonesia.

Menimbang hal di atas, Dewan Komisaris sejalan dengan pandangan Direksi bahwa Perseroan berada pada posisi yang baik untuk prospek bisnis

LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

significant number of tenants with a strong tenancy ratio as of December 31, 2023.

In terms of assets, the Company achieved 2,96% year-on-year growth to Rp9.89 trillion in 2023, driven primarily by increases in current assets. Meanwhile, equity showed a 24.68% year-on-year increase from Rp4.58 trillion in 2022 to Rp5.71 trillion in 2023. The Company's primary business segment, tower lease, accounted for 100% of the Company's revenue, generating Rp1.89 trillion or grew by 0.20% compared to the previous year. Overall, the Company booked Rp1.32 trillion in operating income, or up 1.16% year-on-year from Rp1.13 trillion in the previous year, thanks to its operational efficiency initiatives.

The Board of Commissioners considers these achievements strategically positioning STP for sustained growth.

BUSINESS PROSPECTS

Demand for services and infrastructure in the Indonesian information and communication sector is expected to continue growing, in line with the Indonesian Government's commitment to national connectivity, as demonstrated in the Indonesia Digital Vision 2045. This newly launched vision affirms that the telecommunications and information industry will become increasingly important in the coming years.

In the short term, Indonesia's 2024 growth forecast remains generally positive, projected at approximately 5.2%. This growth is driven by public spending in various sectors and robust household consumption. Additionally, favorable business prospects for the Company are fueled by the increasing internet penetration across Indonesia.

Given this outlook, the Board of Commissioners shares the perspective of the Board of Directors that the Company is well-positioned for extensive

LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

masa depan yang luas di sektor informasi dan telekomunikasi.

Ke depan, Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dari semua strategi bisnis yang dirancang oleh Direksi, memastikan Perseroan mampu memberikan nilai yang optimal kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

PANDANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris mengapresiasi kepatuhan Perseroan yang konsisten terhadap standar tertinggi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Menyadari peran penting penerapan GCG dalam memastikan kelangsungan usaha, Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip manajemen yang etis, menyeimbangkan tujuan keuangan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka tatakelola Perusahaan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk memenuhi perannya sebaik mungkin. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan 6 (enam) kali pertemuan dan berpartisipasi dalam 6 (enam) rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas masalah bisnis strategis. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Peran ini menunjukkan komitmen Dewan Komisaris terhadap tanggung jawabnya dalam memberikan nasihat, pengawasan, dan masukan untuk kepentingan terbaik Perusahaan. Dalam pandangan Dewan Komisaris, penerapan GCG telah berjalan baik, antara lain ditunjukkan oleh reputasi Perseroan yang terjaga di mata masyarakat.

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei tahun 2023.

future business prospects in the information and telecommunication sector.

Looking ahead, the Board of Commissioners remains committed to facilitating the effective execution of all business strategies devised by the Board of Directors, ensuring the generation of optimal value for shareholders and stakeholders.

VIEWS ON THE CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners acknowledges the Company's consistent adherence to best practices in Good Corporate Governance (GCG). Recognizing the pivotal role of GCG implementation in ensuring business continuity, the Company upholds ethical management principles, balancing financial objectives with corporate responsibilities towards communities and the environment.

As an integral part of the Company's governance framework, the Board of Commissioners is committed to fulfilling its role to the best of its ability. In 2023, the Board of Commissioners convened 6 (enam) times and participated in 6 (six) joint meetings with the Board of Directors to address strategic business matters. Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee, also demonstrated sound performance of their role and responsibilities.

These engagements represent the Board of Commissioners' commitment to its advisory and supervisory responsibilities, providing valuable insights in the Company's best interests. In our view, the Company had a sound GCG practices, as evident from its excellent public reputation.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

As of December 31, 2023, up to the date of this annual report, there have been no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners as approved in the Company's Annual General Meeting of Shareholders on May 5, 2023.

APRESIASI

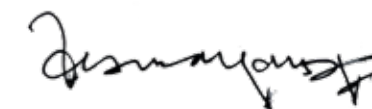
Prestasi Perusahaan selama bertahun-tahun telah dicapai melalui dukungan yang teguh dari semua pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan Direksi atas dedikasi mereka dalam menjalankan perannya masing-masing. Kami juga menyampaikan penghargaan tulus kepada seluruh karyawan yang kerja keras serta komitmennya telah memainkan peran penting bagi Perseroan. Kami juga dengan tulus berterima kasih kepada pelanggan yang telah mempercayakan STP untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang andal.

APPRECIATION

The Company's accomplishments throughout the years have been made achievable through the steadfast support of all stakeholders. We express our gratitude to the shareholders and Board of Directors for their dedication to their respective roles. We extend our heartfelt appreciation to the employees whose hard work and commitment have played a pivotal role. Last but not least, we sincerely thank our customers for entrusting STP to meet their needs for reliable and telecommunications infrastructure.

Jakarta, April 2024

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners



Kusmayanto Kadiman
Komisaris Utama (Komisaris Independen)
President Commissioner (Independent Commissioner)

Juliawati Gunawan Halim

Direktur Utama
President Director



LAPORAN DIREKSI

Report of The Board of Directors



Sepanjang tahun 2023, Perseroan terus berkomitmen untuk memperkuat jaringan operasionalnya. Upaya ini, disertai langkah konsisten untuk menyediakan layanan terbaik dan pengambilan keputusan strategis, memberikan hasil yang membanggakan. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja Perseroan, terutama tercermin dalam pertumbuhan aset dan laba kotor.

Throughout 2023, the Company remained committed to bolstering its operational network. This effort, coupled with a relentless pursuit of excellence in service provision and strategic decision-making, yielded commendable outcomes. The Company's performance stood testament to its endeavors, reflected notably in the growth of assets and gross profit.

Pemegang Saham yang terhormat,

Dengan gembira kami menyajikan pencapaian Perseroan untuk tahun buku 2023. Sepanjang tahun tersebut, setiap langkah dan keputusan diambil untuk mewujudkan visi menciptakan nilai dan membuat perbedaan. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan yang telah memungkinkan kami untuk menjadi entitas bisnis yang inovatif, mengutamakan kualitas dan komitmen untuk mempertahankan pertumbuhan sepanjang tahun.

TINJAUAN MAKROEKONOMI

Situasi makroekonomi pada tahun 2023 ditandai oleh perkembangan global yang signifikan dan sangat dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik. Ketegangan ini kemudian memicu kenaikan biaya kebutuhan penting seperti pangan dan minyak, dan berkontribusi terhadap tekanan inflasi dunia. The Federal Reserve merespons kondisi ini dengan menaikkan Fed Fund Rate (FFR) dari 4,50% per akhir 2022 menjadi 5,50% pada Oktober 2023 serta mempertahankan tingkat suku bunga tersebut hingga akhir tahun. Dengan perkembangan ini, dolar AS mengalami penguatan yang signifikan, didorong oleh arus modal keluar dari negara berkembang ke negara maju dan ke arah aset yang lebih likuid.

Dear Esteemed Shareholders,

We are pleased to present the Company's achievements in the fiscal year 2023. Our vision of creating value and making a difference has guided our actions and decisions. We extend our heartfelt gratitude for the support that has enabled us to be innovative, putting quality and commitment first to sustain growth throughout the year.

MACROECONOMIC REVIEW

The macroeconomic landscape of 2023 was marked by significant global developments, heavily influenced by geopolitical tensions. These tensions, in turn, precipitated escalations in the costs of essential commodities such as food and oil, contributing to inflationary pressures on a worldwide scale. The Federal Reserve responded to economic conditions by increasing the Federal Funds Rate (FFR) from 4.50% at the close of 2022 to 5.50% in October 2023, maintaining this rate until the year's end. Consequently, the US dollar experienced a significant strengthening, driven by the reversal of capital flows from emerging market economies (EMEs) to developed nations and more liquid assets.

LAPORAN DIREKSI Report of The Board of Directors

Dinamika di atas, ditambah dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang meluas, membuat pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat pada tahun 2023. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diperkirakan mencapai 3,0% pada tahun 2023, turun dari 3,50% yang tercatat pada tahun sebelumnya.

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) merespons dengan langkah hal serupa, yaitu menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) secara berturut-turut menjadi 5,75% pada Januari 2023 dan selanjutnya menjadi 6,00% pada Oktober 2023 untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Terlepas dari tantangan yang ada, nilai tukar rupiah tetap cukup stabil dibandingkan dengan mata uang negara berkembang lainnya dan perekonomian Indonesia tetap berada pada zona pertumbuhan, meskipun terlihat moderasi pertumbuhan PDB menjadi 5,05% pada tahun 2023 atau turun dari 5,31% pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, ekonomi tetap kuat pada kisaran 5%. Pencapaian ini melampaui proyeksi awal sekaligus dan menggarisbawahi ketahanan perekonomian nasional.

Dilihat dari sektor industri, patut diapresiasi bahwa semua sektor tumbuh selama tahun 2023 dengan sektor pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi menjadi penyumbang utama PDB. Sektor informasi dan telekomunikasi (infokom) juga mengikuti tren positif ini dengan tingkat pertumbuhan 7,59% secara tahunan dan menyumbang 4,23% terhadap PDB nasional.

Kinerja cemerlang sektor infokom yang konsisten melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dikaitkan dengan adopsi dan peningkatan teknologi yang cepat. Sesuai data terbaru dari survei APJII, penetrasi internet telah mencapai tingkat signifikan sebesar 78,19%, meningkat 1,17% dari tahun sebelumnya. Dengan populasi besar 275 juta orang, kenaikan ini menunjukkan kehadiran digital yang terus meluas di kalangan masyarakat Indonesia dan kebutuhan akan infrastruktur komunikasi yang kuat.

KENDALA YANG DIHADAPI

Bagi dunia usaha, kenaikan suku bunga acuan BI berdampak terhadap pinjaman-pinjaman berbunga mengambang, meski kestabilan nilai tukar rupiah

These dynamics, coupled with escalating geopolitical tensions and broader global economic uncertainty, are shaping projections of a deceleration in global economic growth for 2023. According to estimates by the International Monetary Fund (IMF), global GDP growth is expected to reach 3.0% in 2023, a decrease from the 3.50% recorded in the previous year.

In Indonesia, Bank Indonesia (BI) took a similar response, namely by instituting successive increases in its benchmark interest rate (BI7DRR) to 5.75% in January 2023 and further to 6.00% in October 2023 to bolster the stability of the rupiah exchange currency. Despite these headwinds, rupiah exchange rate was stable compared to the currencies of other developing countries and Indonesia's economy maintained a robust trajectory, albeit with a discernible moderation in gross domestic product (GDP) growth to 5.05% in 2023, down from 5.31% recorded in the previous year. Nonetheless, the economy remained firmly within the 5%-zone, surpassing initial projections, and underscoring its resilience.

By industry sector, notably all sectors expanded during 2023 with manufacturing, trade, agriculture, mining, and construction being the leading GDP contributors. The information and telecommunication sector followed this positive trend, growing 7.59% yoy and accounting for 4.23% to the nation's GDP.

This sector's sustained outperformance vis-à-vis the broader economy can be attributed to the rapid adoption and enhancement of technology. As per the latest data of the APJII survey, internet penetration has reached a substantial 78.19%, reflecting a notable increase of 1.17% from the previous year. With a vast population of 275 million people, this rise indicates a growing digital presence among Indonesians and the need for robust communication infrastructure.

CHALLENGES

For businesses, BI's decision to increase benchmark interest rate affected liabilities with floating interest rates, albeit exchange rate stability minimized

membantu menjaga pelaku usaha dari fluktuasi mata uang asing. Kondisi ini menciptakan tantangan dalam hal menjaga kondisi keuangan yang stabil sekaligus mengupayakan ekspansi.

Perseroan mengatasi tantangan tersebut dengan kebijakan dan manajemen keuangan yang disiplin, penghematan biaya operasional dan biaya belanja modal, memperluas akses permodalan, dan menguatkan sinergi seluas mungkin di lini-lini usaha antar grup Perseroan. Perseroan juga memperkenalkan *shared KPI* untuk mengeratkan kerja sama di seluruh fungsi Perseroan.

Tantangan lain yang kami catat adalah konsolidasi dua operator menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH) yang terlaksana pada tahun 2022. Sebagai kelanjutan dari langkah merger ini, pada tahun 2023 IOH melakukan restrukturisasi sewa menara Perseroan untuk menghilangkan duplikasi. Perseroan berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk mengakomodasi kebutuhan IOH selaku pengguna jasa, termasuk melaksanakan pembangunan 4.000 menara baru bersama dengan Grup Perseroan dalam rangka relokasi menara yang mengalami duplikasi. Dalam hal ini, Perseroan memilih berkontribusi positif terhadap konsolidasi di industri dan mengupayakan nilai tambah dari aset baru yang dimiliki.

STRATEGI UNTUK MENGATASI TANTANGAN

Lebih jauh tentang strategi operasional, Perseroan beroperasi di dua segmen bisnis utama, yaitu penyewaan menara dan layanan tambahan. Untuk mengoptimalkan efektivitas operasionalnya, Perseroan memiliki beberapa strategi. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan sewa kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi yang sudah ada. Hal ini penting bagi upaya Perseroan untuk meningkatkan pendapatan dan margin profitabilitas. Dengan memanfaatkan posisi strategis menara telekomunikasi dan kapasitas yang tersedia untuk kolokasi tambahan, Perseroan mengharapkan pertumbuhan pendapatan dan laba operasional yang berkelanjutan. Patut dicatat bahwa sebagian besar biaya operasi terkait menara telekomunikasi telah ditetapkan sejak saat konstruksi, sehingga memaksimalkan potensi optimalisasi margin melalui peningkatan kolokasi.

companies' exposure to currency fluctuation. This condition nevertheless created challenges in terms of maintaining a solid financial position while pursuing business expansion.

To mitigate these challenges, the Company applied disciplined financial policies and management, increased efficiency in operating costs and capital expenditure, expand access to capital, and enhanced synergy between business lines within the Company's groups. The Company also introduced *share KPI* to cultivate stronger collaboration across functions.

Another challenge that we noted was the merger of two operators to become PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH) that took place in 2022. Continuing this merger, in 2023, IOH restructured their tower lease from the Company to eliminate redundancies. The Company was committed to provide the best services and cater to the needs of IOH as our customer, including by implementing the construction of 4,000 new towers jointly with the Group to relocate duplicate towers. In this situation, the Company chose to contribute positively to industry consolidation by pursuing added value from its new assets.

STRATEGIES TO OVERCOME CHALLENGES

Within the framework of its operational strategy, the Company operates across two primary business segments, namely tower rental and ancillary services. To optimize its operational efficacy, the Company has several strategies. First, maximizing the growth of colocation lease in existing telecommunications tower portfolios. This is central to the Company's endeavors to augment its revenue and profitability margin. Leveraging the strategic positioning of its telecommunications towers and the available capacity for additional colocation, the Company anticipates sustained growth in revenues and operating income. It is noteworthy that the majority of operating costs associated with telecommunications towers are fixed at the time of construction, thereby accentuating the potential for margin expansion through increased colocation.

LAPORAN DIREKSI Report of The Board of Directors

Kedua, terus memperkuat hubungan dengan operator telekomunikasi. Menyadari peran penting operator telekomunikasi dalam perluasan infrastruktur jaringan, Perseroan berkomitmen untuk selalu membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan utama dan untuk meningkatkan jumlah situs telekomunikasi sewaan dalam portofolionya. Dengan menjaga kemitraan yang saling menguntungkan dengan operator telekomunikasi, Perseroan dapat mengidentifikasi peluang sewa dan penyediaan layanan, seperti konstruksi *build-to-suit* atau akuisisi strategis, yang selaras dengan tujuan pertumbuhan secara keseluruhan.

Ketiga adalah fokus pada kecepatan eksekusi dan peningkatan kinerja operasional yang berkelanjutan. Dalam pasar yang dinamis dan berkembang pesat, sebagaimana ditandai oleh persaingan yang meningkat dan preferensi pelanggan yang berkembang, kecepatan memasuki pasar dan keandalan operasional merupakan penentu penting kesuksesan. Untuk itu, Perseroan telah memprioritaskan eksekusi strategi secara cepat dan peningkatan kinerja operasional yang berkelanjutan sebagai landasan strategi operasionalnya. Perseroan juga melengkapi keunggulan layanannya dengan menyediakan layanan pemeliharaan menara dan memastikan tanggapan yang cepat terhadap keluhan pelanggan.

Dengan mempertahankan tingkat infrastruktur dan kualitas layanan tertinggi, Perusahaan mampu menavigasi pasar yang kompetitif dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Direksi memegang peranan penting dalam mengarahkan langkah strategis Perseroan. Melalui proses evaluasi yang ketat dan analisis akar masalah dari tantangan yang dihadapi Perseroan, Direksi telah dengan sangat baik menavigasi peluang dan tantangan yang ada untuk merumuskan langkah strategis yang selaras dengan tujuan menyeluruh Perseroan.

Direksi juga memastikan semua kebijakan strategis, mulai dari aspek biaya, operasional, hingga belanja

Secondly, continuing to strengthen relationships with telco operators. Recognizing the pivotal role of telecommunications operators in the expansion of network infrastructure, the Company was always committed to fostering robust relationships with key stakeholders and to increasing the number of leased telecom sites within its portfolio. By nurturing symbiotic partnerships with telco operators, the Company was able to identify lease and service provisioning opportunities, such as the build-to-suit construction or strategic acquisitions, that align with its overarching growth objectives.

Third is focusing on speed of execution and continuous improvement of operational performance. In a dynamic and rapidly evolving marketplace, characterized by heightened competition and evolving customer preferences, speed-to-market and operational reliability are pivotal determinants of success. To this end, the Company has prioritized expeditious execution and the continual enhancement of operational performance as cornerstones of its operational strategy. The Company complements its service excellence by providing tower maintenance services and ensuring prompt responses to customer grievances.

By maintaining the highest level of infrastructure and service quality, the Company was able to navigate a competitive market and preserved its position as an industry leader.

BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

The Board of Directors takes a pivotal role in steering the strategic trajectory of the Company. Through a rigorous evaluation process and root cause analysis of the Company's challenges, the Board of Directors has adeptly navigated prevailing opportunities and challenges to formulate strategic measures that align with the Company's objectives.

The Board of Directors ensure that all strategic policies, from costs, operations, to capital expenditure and

modal dan pengelolaan keuangan dilaksanakan seefisien mungkin sehingga memberikan *value* dan berdampak terhadap profitabilitas Perseroan.

Selain itu, Direksi memiliki kerangka kerja yang kuat untuk memantau pelaksanaan inisiatif strategis, melakukan penilaian rutin untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi potensi hambatan, dan melakukan koreksi secara tepat waktu. Proses berulang ini menggarisbawahi komitmen Perusahaan terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan operasional.

Lebih jauh, Direksi juga mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris, yang terbukti sangat berharga dalam pengambilan keputusan strategis.

TINJAUAN KINERJA

Melalui implementasi strategi yang diuraikan di atas, per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 6.851 menara telekomunikasi, melayani 12.954 penyewaan di Indonesia dan dengan rasio sewa 1,89x.

Sewamenarasebagai segmen usaha utama Perseroan dan menyumbang 100% dari pendapatan Perseroan, menghasilkan Rp1,89 triliun atau tumbuh 0,20% dari tahun sebelumnya. Laba usaha tumbuh sebesar 1,16% yoy dari Rp1,13 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,32 triliun pada tahun 2023. Berdasarkan profil pelanggan, XL Axiata memberikan kontribusi pendapatan tertinggi disusul Indosat, Telkomsel, dan Smart Telecom. Kontribusi masing-masing keempat operator telekomunikasi tersebut pada tahun 2023 adalah 36%; 35%; 18%; dan 10%.

Dari sisi aset, Perseroan membukukan pertumbuhan 2,96% yoy menjadi Rp9,89 triliun pada tahun 2023. Dibandingkan dengan aset pada tahun sebelumnya, peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan aset lancar sebesar 29,98% yoy dari Rp727,96 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp946,20 miliar pada tahun 2023. Sementara itu, ekuitas Perseroan menunjukkan peningkatan sebesar 25,68% yoy dari Rp4,68 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp5,71 triliun pada tahun 2023.

financial management were implemented as efficient as possible to provide added value and impactful to the Company's profitability.

Furthermore, the Board of Directors has a robust framework for monitoring the execution of strategic initiatives, conducting regular assessments to gauge progress against predefined objectives, identify potential impediments, and carry out course corrections in a timely manner. This iterative process underscores the Company's commitment to sustained growth and operational excellence.

Furthermore, the Board of Directors also takes into account insights from the Board of Commissioners, whose counsel has proved invaluable in taking strategic decision-making.

PERFORMANCE REVIEW

Through the implementation of the strategies outlined above, as of December 31, 2023, the Company owned and operated 6,851 telecommunication towers and served 12,954 tenants in Indonesia with tenancy ratio of 1.89x.

Tower lease as the Company's primary business segment and accounting for 100% of the Company's revenue, generated Rp1.89 trillion or up 0.20% from the previous year. Operating income grew by 1.16% yoy from Rp1.13 trillion in the previous year to Rp1.32 trillion in 2023. By customer profile, XL Axiata contributed the highest revenue, followed by Indosat, Telkomsel, and Smart Telecom. The contribution of these telecommunication operators was 36%; 35%; 18%; and 10% respectively in 2023.

In terms of asset, the Company posted 2.96% yoy growth to Rp9.89 trillion in 2023. Compared to the previous year's total assets, this increase was mainly driven by the increase in current assets by 29.98% yoy from Rp727.96 billion in 2022 to Rp946.20 billion in 2023. Meanwhile, the Company's equity showed an increase of 25.68% yoy from Rp4.68 trillion in 2022 to Rp5.71 trillion in 2023.

LAPORAN DIREKSI
Report of The Board of Directors

LAPORAN DIREKSI
Report of The Board of Directors

REALISASI TARGET

Dapat kami laporkan bahwa langkah penghematan biaya dan sinergi aset serta operasional menara menghasilkan pencapaian sesuai target dan rencana anggaran.

Perseroan mengukur kinerja tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Indikator Keuangan Financial Indicators	Target 2023 2023 Targets (RpTriliun RpTrillion)	Realisasi 2023 2023 Actual (RpTriliun RpTrillion)
Pendapatan Revenue	1,9	1,9
EBITDA EBITDA	1,7	1,7

TINJAUAN OPERASIONAL

Sumber daya manusia adalah salah satu aset kami yang paling berharga dan landasan bagi kesuksesan Perseroan. Untuk mendukung sumber daya manusia, Perseroan memberikan paket kompensasi yang kompetitif dan tunjangan kesejahteraan, termasuk perlindungan asuransi kesehatan, persalinan, jiwa, dan kecelakaan diri yang komprehensif. Selain itu, kami menyediakan akses ke program pelatihan dan pengembangan internal dan eksternal yang disesuaikan dengan fungsi pekerjaan peserta.

Pada tahun 2023, kami mengelola sejumlah 190 karyawan. Berkomitmen untuk memberdayakan seluruh sumber daya manusia Perseroan, Perseroan menyediakan beragam program pelatihan yang dipantau secara berkala. Peserta pelatihan mencapai 164 orang pada tahun 2023, dengan jumlah jam pelatihan 1,934 jam. Perseroan juga terus berupaya meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja karyawan melalui wadah komunikasi seperti *townhall* dan dengan melibatkan karyawan di dalam proses evolusi dan transformasi Perseroan, termasuk melalui ajakan untuk berkontribusi kepada kegiatan-kegiatan terkait keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen untuk pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan tersebut selaras dengan misi Perseroan untuk menjadi entitas inovatif dan upaya kami untuk memberikan keunggulan layanan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia diperkuat melalui penanaman nilai-nilai dan budaya perusahaan. Perseroan juga berfokus pada perencanaan suksesi, rekrutmen kampus, dan kegiatan *in-house* pada tahun 2023.

TARGET REALIZATION

We are able to report that through cost-saving initiatives, asset synergy, and tower operations, the Company met its targets aligned with our budget plan.

The Company measured its 2023 performance based on its Corporate Work and Budget Plan (RKAP), as shown in the following table.

OPERATING REVIEW

The Company's workforce is one of our most invaluable assets, serving as a cornerstone of the Company's success. To support our employees, the Company offers competitive benefits and welfare packages, including comprehensive health, maternity, life, and personal accident insurance coverage. Additionally, the Company provides access to both internal and external training and development programs tailored to specific job functions.

In 2023, we employed a total of 190 employees. Committed to empowering our employees, we provided various training programs that were regularly monitored. Total number of training participants reached 164 in 2023, with a total of 1,934 training hours. The Company also continuously strived to enhance company engagement and satisfaction through communication channels such as *townhall*, and by involving employees in the Company's evolution and transformation. The employees were also invited to contribute to the Company's sustainability and good corporate governance programs.

This commitment to ongoing learning and development is aligned with our mission of being an innovative entity and our pursuit of delivering service excellence. Additionally, the calibre of our human resource was reinforced through the cultivation of values and corporate culture. The Company also focused on succession planning, campus recruitment, and *in-house* activities in 2023.

Selain sumber daya manusia, operasi kami juga didukung oleh sistem informasi dan teknologi (TI) yang kuat. Dalam lanskap bisnis saat ini, TI memainkan peran penting dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing dalam perusahaan modern. Kini, TI peran tidak bisa dipisahkan bagi perusahaan yang ingin beradaptasi dan berkembang di dunia yang semakin digital, karena berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan dan transformasi. Pada tahun 2023, inisiatif TI kami meliputi peningkatan efisiensi dan akurasi operasional, antara lain ditunjukkan oleh peningkatan rasio karyawan terhadap menara menjadi 1:30 dan pengurangan konsumsi kertas.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Selain itu, Perseroan menyadari pentingnya memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang kuat serta penerapannya yang kuat. Perseroan percaya bahwa penerapan GCG memberikan nilai tambah dan transparansi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pedoman GCG berfungsi untuk memberikan keyakinan bahwa strategi bisnis dijalankan dengan proses pengambilan keputusan dan pengendalian yang tepat untuk mendukung pembangunan bisnis yang berkelanjutan.

Untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG, pada tahun 2023 Perseroan telah melakukan *benchmarking*, analisis kesenjangan, penguatan komunikasi internal untuk memastikan koordinasi berjalan baik, dan menjalankan fungsi komunikasi eksternal secara teratur untuk memastikan pemangku kepentingan mengetahui komitmen dan aksi GCG Perseroan.

Secara umum, Perseroan memandang praktik GCG telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Perseroan terus melakukan pengawasan dan asesmen untuk menyempurnakan praktik tata kelolanya agar selalu sejalan dengan peraturan yang berlaku dan standar praktik terbaik.

Sebagai perusahaan yang mematuhi GCG, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 5 Mei 2023. Berdasarkan RUPST 2023, tidak ada perubahan terhadap susunan Direksi Perseroan.

Aside from manpower, our operations were also supported by robust information and technology (IT) system. In today's business landscape, IT plays a pivotal role in driving efficiency, innovation, and competitiveness within modern companies. IT has become indispensable for companies seeking to adapt and thrive in an increasingly digital world, serving as a catalyst for growth and transformation. In 2023, our IT initiatives included initiatives to increase operational efficiency and accuracy, such as evident from improved employee to tower ratio to 1:30 and lower paper consumption.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Moreover, STP is aware of the importance of having a strong good corporate governance (GCG) system in place as well as its robust implementation. The Company believes that implementation of GCG provides added value and transparency for the shareholders and stakeholders. GCG Guideline serves to provide assurance that business strategy is executed by an appropriate decision-making and control process to support building a sustainable business.

To continue enhancing GCG practices, in 2023 the Company carried out benchmarking activities, gap analysis, and strengthened internal communication to ensure seamless coordination and carried out external communication function regularly to make sure that all stakeholders are well informed about the Company's GCG commitment and actions.

Overall, the Company views that it has a sound GCG practices. However, the Company continued to monitor, assess, and refine GCG implementation to ensure alignment with applicable regulations and best practice standard.

A GCG-compliant company, STP held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 5, 2023. Based on the 2023 AGMS, there were no changes made to the composition of the Company's Board of Directors.

LAPORAN DIREKSI Report of The Board of Directors

LAPORAN DIREKSI Report of The Board of Directors

KOMITMEN TERHADAP KEBERLANJUTAN

Sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Perseroan sangat berkomitmen memberikan dampak positif kepada masyarakat. Salah satu cara yang kami upayakan untuk mencapai hal ini adalah melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). STP telah melakukan beberapa inisiatif yang berkisar pada empat bidang utama.

Meyakini kekuatan transformatif pendidikan, Perseroan secara aktif mendukung inisiatif yang bertujuan mempromosikan akses ke pendidikan berkualitas untuk semua. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam, Perseroan siap memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak, membantu mereka dalam upaya untuk membangun kembali dan memulihkan kehidupan. Pelestarian lingkungan adalah prioritas penting bagi Perseroan, dan Perseroan berkomitmen terhadap upaya konservasi yang bertujuan menjaga warisan alam Indonesia yang kaya. Selain itu, kesehatan dan kesejahteraan komunitas sangat penting, dan Perseroan mendukung inisiatif yang mempromosikan akses dan kesadaran pentingnya kesehatan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja kesehatan masyarakat.

Melalui upaya CSR yang berkelanjutan, Perseroan berusaha untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa saling menghormati dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Aktivitas CSR Perseroan sepanjang tahun 2023 meliputi, antara lain, perbaikan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan, penanaman bibit mangrove untuk melestarikan wilayah pesisir. Menyadari perannya di dalam ekosistem lingkungan hidup, Perseroan juga mulai memantau intensitas konsumsi energi dan berkomitmen mengupayakan penurunan emisi demi Bumi yang lebih hijau.

PANDANGAN KE DEPAN

Prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2024 positif, dengan tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sebesar 5,2%. Pertumbuhan ini diperkirakan akan didorong secara signifikan oleh belanja negara di berbagai sektor, yang diharapkan dapat memicu kegiatan ekonomi dan peningkatan konsumsi. Selain itu, pendapatan rumah tangga pada umumnya diperkirakan meningkat sehingga turut memacu ekspansi di sektor teknologi dan komunikasi.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

As a prominent telecommunications infrastructure provider in Indonesia, the Company is deeply committed to making a positive impact on the society. One avenue through which the Company strives to achieve this is the corporate social responsibility (CSR) initiatives. STP has undertaken several initiatives that revolve around four main areas.

Believing in the transformative power of education, we actively support initiatives aimed at promoting access to quality education for all. Additionally, in times of natural disasters, the Company stand ready to provide assistance and support to affected communities, aiding them in their efforts to rebuild and recover. Environmental preservation is a core priority for the Company, and we dedicate ourselves to conservation efforts aimed at safeguarding Indonesia's rich natural heritage. Furthermore, the health and well-being of our communities are paramount to the Company, and the Company supports initiatives that promote healthcare access and awareness, thereby contributing to improved public health outcomes.

Through our ongoing CSR endeavours, the Company strive to strengthen our ties with the communities we serve, fostering mutual respect and benefit for all stakeholders involved. In 2023, the Company carried out CSR initiatives, among others, public facility repair such as roads and bridges and planted mangrove seeds to preserve coastlines. Aware of its role in the environmental ecosystem, the Company also started to monitor its energy consumption intensity and is committed to pursue emission reduction for a greener earth.

OUTLOOK

The outlook for the country's economy in 2024 is optimistic, with a projected growth rate of 5.2%. This growth is anticipated to be driven significantly by public spending in a variety of sectors, resulting in increased economy and consumption. Moreover, it is foreseen that household incomes will generally rise, consequently fueling expansion in the technology and communication sectors.

Lebih jauh, suku bunga diperkirakan akan turun sehingga memicu investasi oleh dunia usaha. Bersamaan dengan itu, Perseroan memperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan terhadap infrastruktur telekomunikasi, didorong oleh pertumbuhan operator telekomunikasi di seluruh Indonesia dan kemajuan teknologi. Perseroan juga menilai masih terdapat kemungkinan terjadi konsolidasi di berbagai sektor telekomunikasi, termasuk di antara penyedia infrastruktur telekomunikasi.

Ke depan, Perseroan akan terus menjalankan langkah strategis untuk menguatkan daya saing dan mempertajam kemampuannya untuk mengidentifikasi masalah serta tantangan secara jelas. Perseroan juga akan memastikan sumber daya manusia berkontribusi secara optimal dalam pencapaian target.

Perseroan berkomitmen untuk mendukung perkembangan sektor infokom di Indonesia dengan menyediakan infrastruktur terbaik dan layanan bernilai tambah untuk seluruh pelanggannya di Indonesia.

PENUTUP

Sebagai penutup, Perseroan menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan saran-sarannya yang berharga, serta kepada seluruh pemegang saham atas dukungan yang selama ini diberikan. Perseroan juga sangat menghargai dedikasi dan kerja keras setiap karyawan, dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan pelanggan atas dukungan selama ini, yang telah berkontribusi kepada pertumbuhan Perseroan sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia.

Furthermore, interest rates are forecasted to decrease, incentivizing businesses to make investments. Concurrently, the Company foresees a growing demand for telecommunications infrastructure, fueled by the growth of telco operators across Indonesia and technological advancement. The Company also anticipates more consolidation in the telecommunication sector, including among infrastructure providers in the sector.

Going forward, the Company will maintain strategic steps to strengthen competitiveness and sharpen ability to clearly identify problems and challenges. The Company will also ensure optimal contribution of its employees to target realization.

The Company is committed to support the development of Indonesia's telecommunication sector by providing the best infrastructure and value-added services to all customers in Indonesia.

CONCLUSION

In conclusion, the Company extends its sincere appreciation to the Board of Commissioners for their invaluable oversight and guidance, as well as to all shareholders for their unwavering support. The Company also deeply appreciates the dedication and hard work of each employee, and the Company expresses gratitude to all other stakeholders and customers for their ongoing support, which has contributed to its growth as Indonesia's premier telecommunications infrastructure provider.

Jakarta, April 2024

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors



Juliawati Gunawan Halim
Direktur Utama
President Director

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

Statements of Responsibility of The Board of Commissioners and The Board of Directors Regarding The 2023 Annual Report

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“Perseroan”) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Kusmayanto Kadiman
Komisaris Utama (Komisaris Independen)
President Commissioner (Independent Commissioner)



Harry Mozarta Zen
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Eko Santoso Hadiprodjo
Komisaris
Commissioner

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

Statements of Responsibility of The Board of Commissioners and The Board of Directors Regarding The 2023 Annual Report

We, the undersigned, hereby declare that all material information contained in this Annual Report of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “Company”) for the year 2023 has been completely presented and we are fully responsible for the correctness of the contents of the Company’s annual report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 2024

Direksi Board of Directors



Juliawati Gunawan Halim
Direktur Utama
President Director



Wong Tjin Tak
Direktur
Director



Hartono Tanuwidjaja
Direktur
Director

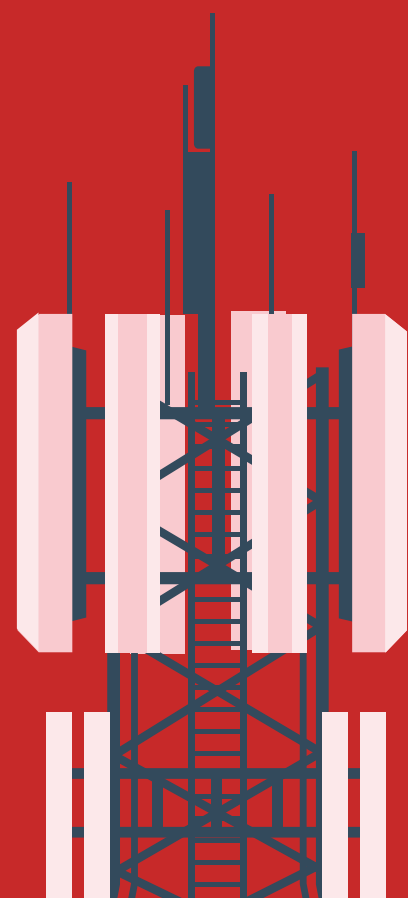


Wellington
Direktur
Director

03.

Profil Perusahaan

Company Profile



Di tahun 2023, Perseroan tercatat memiliki

6.851 menara

12.954 penyewaan

dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,89x.

Perseroan juga memiliki **26 jaringan Indoor DAS.**

In 2023, the Company owned and operated **6,851 towers** with **12,954 tenants**, for a tenancy ratio of 1.89x. In addition, the Company also owns **26 Indoor DAS networks.**

IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

IDENTITAS PERUSAHAAN
Corporate Identity



Nama Perusahaan
Company Name

PT Solusi Tunas Pratama Tbk



Bidang Usaha
Type of Business

Perseroan bergerak di bidang usaha penyediaan layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.

The Company is an independent telecommunication infrastructure provider, which among others leases and manages telecommunication sites, either directly or through subsidiaries.



Informasi Perubahan Nama
Change of Name

Tidak Ada
None



Tanggal Pendirian
Establishment Date

27 September 2006
September 27, 2006



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Ridjqi Nurdiani, S.H. No. 5 tanggal 25 Juli 2006. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241/2007. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 10 tanggal 1 Maret 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan o. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022.

The Company was established based on Notarial Deed No. 5 of Ridjqi Nurdiani, S.H. dated July 25, 2006. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W8-00259HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241/2007. The Company's articles of association has been amended several times, the latest of which is covered by Notarial Deed No. 10 of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn. dated March 1, 2022 concerning the changes of the Company's purposes and objectives. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 10, 2022.



Kepemilikan Saham
Shares Ownership

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
99,96%

Masyarakat Public
0,04%

Susunan Permodalan
Capital Structure

Modal Capital	Nominal Saham Share Nominal @Rp100	Jumlah (Rp) Total (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	2.000.000.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid up Capital	1.137.579.698	113.757.969.800

Tanggal Pencatatan Saham di Bursa
Stock Listing Date

11 Oktober 2011
October 11, 2011

Kode Saham
Stock Symbol

SUPR

Tempat Pencatatan Saham
Stock Listing

Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Alamat Perseroan
Company Address

Kantor Pusat | Head Office
Jl. Tanjung Karang Nomor 11, Kudus, Indonesia
Telp : +62 291 431905
Fax : +62 291 431718

Kantor Cabang | Branch Office
Menara BCA, 49th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Telp : +62 21 23585555
Fax : +62 21 23586446

Kontak Alamat
Contact Address

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary:
corporate.secretary@stptower.com

Pemasaran | Marketing:
marketing@stptower.com

Para pemangku kepentingan Perseroan dapat memberikan masukan atau pertanyaan melalui detail alamat sebagaimana disebutkan di samping.

The Company's stakeholders can provide input or questions through the address details as stated herein.

Alamat Situs Web
Website

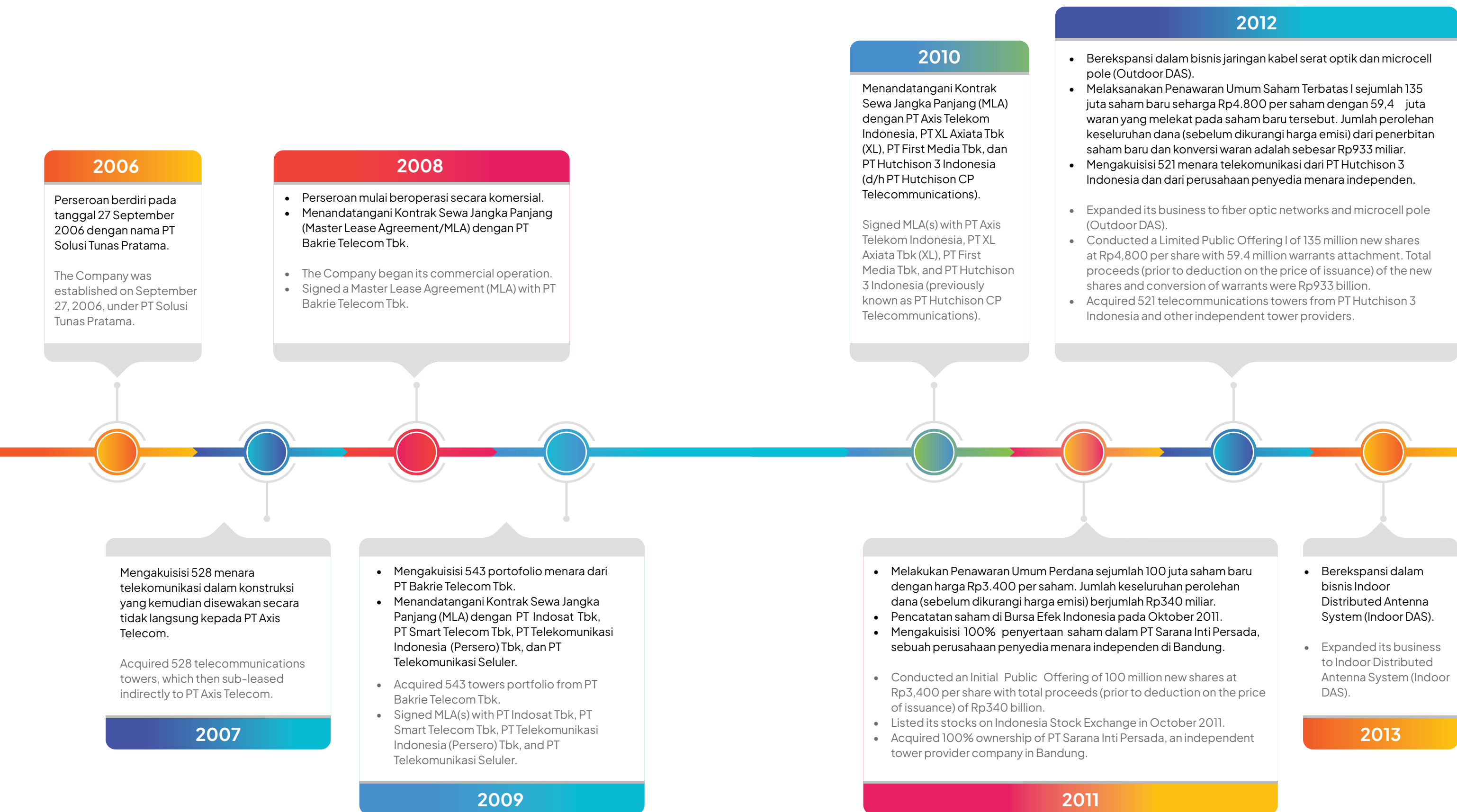
www.stptower.com

JEJAK LANGKAH

Milestones

JEJAK LANGKAH

Milestones



JEJAK LANGKAH Milestones

JEJAK LANGKAH Milestones

2014

- Perseroan mengakuisisi 3.500 menara telekomunikasi dari PT XL Axiata dan 142 menara telekomunikasi dari perusahaan menara independen.
- Perseroan mendapat Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 Desember 2014 untuk Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Perseroan.
- The Company acquired 3,500 telecommunications towers from PT XL Axiata and 142 telecommunications towers from independent tower companies.
- The Company received an Effective Statement from the Financial Service Authority on December 19, 2014, to conduct the Limited Public Offering II.

2016

- Sebagai bagian dari program transformasi Perseroan melalui pendekatan pembenahan menyeluruh, STP melakukan penajaman Nilai Inti Perusahaan dengan menambah 1 (satu) nilai inti menjadi: Innovative, Dynamic, Positive, Trustworthy, Fun, Reliable.
- As part of the Company's transformation program, through a total improvement approach, STP redesigned the Company's Core Values by adding 1 (one) new core value and now becomes: Innovative, Dynamic, Positive, Trustworthy, Fun, Reliable.

2022

Februari

Pada tanggal 11 Februari 2022, Perseroan telah melakukan pengambilalihan 100% saham atau sejumlah 10.000 saham dari modal disetor PT Global Indonesia Komunikatama.

February

On February 11, 2022, the Company acquired PT Global Indonesia Komunikatama for a total of 10,000 shares, representing 100% of its paid-in capital.

- Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas II sejumlah 343.165.024 saham baru dengan harga Rp7.000 per saham. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi biaya emisi) sebesar Rp2.402.155.168.000.
- Menerbitkan obligasi AS\$300 juta 6,25% Senior Notes Due 2020 sebesar AS\$300 juta yang dicatitkan di Bursa Efek Singapura (SGX).
- Conducted Limited Public Offering II of 343,165,024 new shares at Rp7,000 per share. Total proceeds (prior to deduction of emission charge) amounted to Rp2,402,155,168,000.
- Issued US\$300,000,000 bonds of 6.25% Senior Notes Due 2020 amounted US\$300 million, which listed on Singapore Stock Exchange (SGX).

2015

Oktober

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") telah melakukan pengambilalihan Perseroan dengan jumlah saham yang dibeli Protelindo adalah sejumlah 1.069.614.676 saham atau sebesar 94,03% dari modal disetor Perseroan.

October

On October 1, 2021, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") acquired the Company for a total of 1,069,614,676 shares, representing 94.03% of the Company's paid-in capital.

2021

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Company In Brief



Aset menara telekomunikasi milik Perseroan tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan mayoritas 85% terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera.

The Company operates telecommunications tower assets in 34 provinces in Indonesia, the majority of which 85% are in Java and Sumatra.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (selanjutnya disebut sebagai "STP" atau "Perseroan") didirikan pada tahun 2006. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat dihadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi; SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. W8-00259 HT.01.01- TH.2006 tanggal 27 September 2006; Tanda Daftar Perusahaan No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Pusat di bawah No.1187/ BH.09.05/v/2007 tanggal 16 Mei 2007; Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No.73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (hereafter referred to as "STP" or "the Company") was founded in 2006. The Company was established based on Deed of Establishment No. 5 dated July 25, 2006, made before Ridjqi Nurdiani, S.H., Notary in Bekasi; Decree of Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006; Company Registration No.090515156159 registered at Central Jakarta Company Registration Office under No.1187/ BH.09.05/V/2007 dated May 16, 2007; State Gazette of the Republic of Indonesia (BNRI) No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN Company In Brief

Perseroan berfokus pada penyewaan menara telekomunikasi untuk penempatan antenna dan perangkat pendukung lain kepada operator telekomunikasi, yang dikenal dengan *base transceiver station* (BTS), dengan skema perjanjian kontrak sewa jangka panjang yang rata-rata berjangka waktu sekitar 10 tahun.

Saat ini Perseroan dikenal sebagai penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia dari segi jumlah menara telekomunikasi. Aset menara telekomunikasi milik Perseroan tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan mayoritas 85% terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia.

Per 31 Desember 2023, Perseroan tercatat memiliki 6.851 menara dengan 12.954 penyewaan dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,89x. Perseroan juga memiliki 26 jaringan Indoor DAS.

Perubahan Nama

STP tidak pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri pada 27 September 2006 hingga saat ini. Namun status Perseroan berubah menjadi perusahaan publik setelah IPO pada Oktober 2011, sehingga status nama perusahaan menjadi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

The Company is primarily focused on leasing out spaces for antennas and supporting equipment for mobile telecommunications operators, also known as base transceiver stations (BTS), at its multi-tenant tower sites under long-term lease agreements with an average contractual period of ten years.

On the number of telecommunication towers, the Company is currently recognised as one of the leading independent tower companies in Indonesia. The Company operates telecommunications tower assets in 34 provinces in Indonesia, the majority of which 85% are in Java and Sumatra, the two Indonesian islands with the highest population density.

As of December 31, 2023, the Company owned and operated 6,851 towers with 12,954 tenants, for a tenancy ratio of 1.89x. In addition, the Company also owns 26 Indoor DAS networks.

Change of the Company Name

Since its first inception in September 27, 2006, STP has not exercised any change of the company name. However the Company's status was changed into a public company following the IPO in October 2011, resulting in the status of company name into PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

VISI, MISI & Nilai-Nilai Perseroan

Vision, Mission & Corporate Value



Visi Vision

Menciptakan nilai dan membuat perbedaan.

To create value and make a difference.



Misi Mission

Mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi, kualitas dan komitmen.

To sustain profitable growth through innovation, quality, and commitment.

Direksi dan Dewan Komisaris telah menelaah Visi dan Misi dan menyetujui bahwa pernyataan Visi dan Misi masih sesuai dengan kondisi saat ini yang dihadapi Perseroan dan tantangan kedepannya.

The Board of Directors and Commissioners of have reviewed the Vision and Mission and agree that the Vision and Mission statement is still suitable for the Company in facing the current situation and future challenges.

VISI, MISI & Nilai-Nilai Perseroan

Vision, Mission & Corporate Value

Nilai-Nilai Inti Core Values



TERPERCAYA | Trustworthy

Kita dapat diandalkan dan dipercaya dalam pikiran, perkataan, dan tindakan.
We have to be reliable and credible in our thoughts, words and actions.



DINAMIS | Dynamic

Kita terbuka kepada perubahan; bertindak dengan antusias dan percaya diri.
We embrace change; act with full enthusiasm and confidence.



MENYENANGKAN | Fun

Kami menciptakan suasana menyenangkan di pekerjaan kami.
We bring fun into work.



INOVATIF | Innovative

Kita berinisiatif untuk selalu kreatif dalam mencari solusi paling efektif dalam segala yang kita lakukan.
We take initiative to always be creative in finding effective solutions in everything we do.

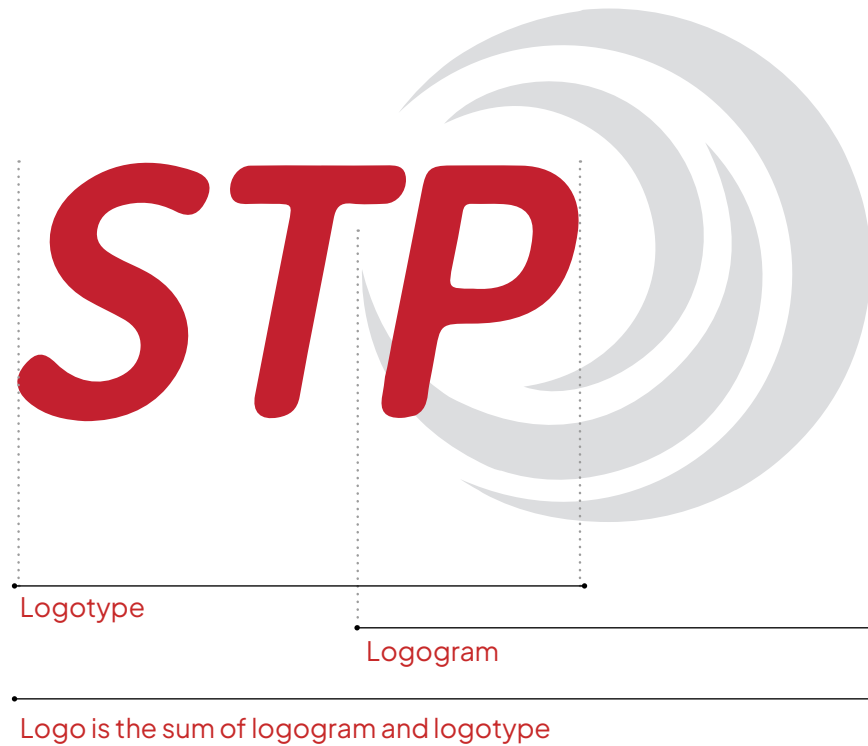


KERJASAMA TIM | Teamwork

Kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memiliki satu visi dan mencapai tujuan yang sama.
We collaborate and synergize to achieve common goals and a shared vision.

LOGO PERUSAHAAN

Company Logo



Logo Utama

Logotype STP memiliki arti bahwa perusahaan tidak hanya merangkul perubahan, tetapi bergerak maju, telah melakukan perubahan terdepan dengan inovasi canggih dan layanan terbaik. Logogram melambangkan peluang tak terbatas yang ingin diraih STP. Ini juga merupakan simbol sinyal sesuai dengan aktivitas bisnis STP sebagai perusahaan penyedia telekomunikasi. Secara keseluruhan logo STP bernuansa modern, praktis dan bersih. Pengaplikasian di semua material, dianjurkan untuk dapat menggunakan logo utama.

Logo STP terdiri dari dua elemen, *logotype* dan *logogram*. Setiap elemen dan keduanya, mendukung dan memperkuat logo secara keseluruhan. Warna yang digunakan untuk logo utama STP adalah STP Red dan STP Grey.

Logo Utama

Logotype STP memiliki arti bahwa perusahaan tidak hanya merangkul perubahan, tetapi bergerak maju, telah melakukan perubahan terdepan dengan inovasi canggih dan layanan terbaik. Logogram melambangkan peluang tak terbatas yang ingin diraih STP. Ini juga merupakan simbol sinyal sesuai dengan aktivitas bisnis STP sebagai perusahaan penyedia telekomunikasi. Secara keseluruhan logo STP bernuansa modern, praktis dan bersih. Pengaplikasian di semua material, dianjurkan untuk dapat menggunakan logo utama.

Logo STP terdiri dari dua elemen, *logotype* dan *logogram*. Setiap elemen dan keduanya, mendukung dan memperkuat logo secara keseluruhan. Warna yang digunakan untuk logo utama STP adalah STP Red dan STP Grey.

KEGIATAN USAHA

Line of Business

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup aktivitasnya adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi, *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan aktivitas perusahaan holding. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008.

Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu pengelolaan dan penyewaan bangunan Menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, Perseroan melaksanakan pengelolaan dan penyewaan menara dan sarana penunjang atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak.

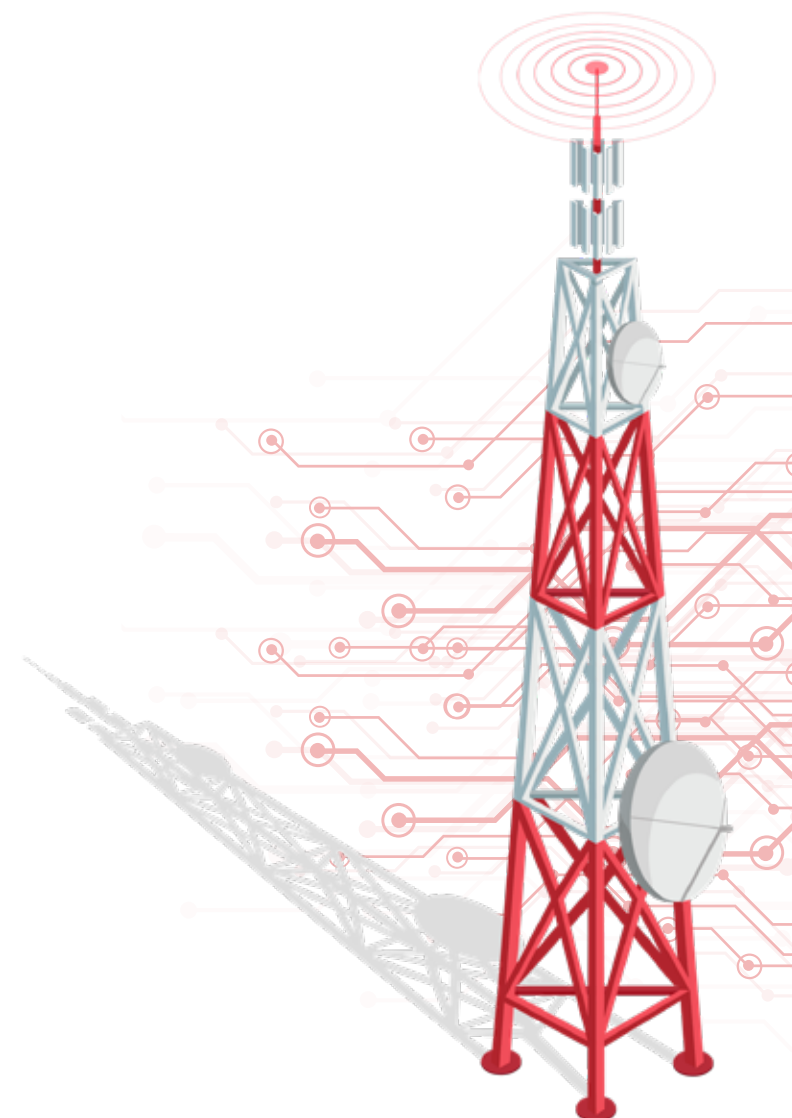
In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its business activities involves in central telecommunication construction, self-owned or leased real estate and holding company activities. The Company started its commercial operations in March 2008.

The principal business activities of the Company, are the management and leasing of Base Transceiver Station (BTS) towers or telecommunications towers and other telecommunications facilities. As such, the Company carries out the management and leasing of towers and supporting infrastructure, as well as telecommunications towers and other telecommunications facilities, either directly or through subsidiaries.

LAYANAN KAMI

Our Service

- Pengelolaan, dan
- Penyewaan bangunan Menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya.
- Management, and
- Leasing of Base Transceiver Station (BTS) towers or telecommunications towers and other telecommunications facilities.

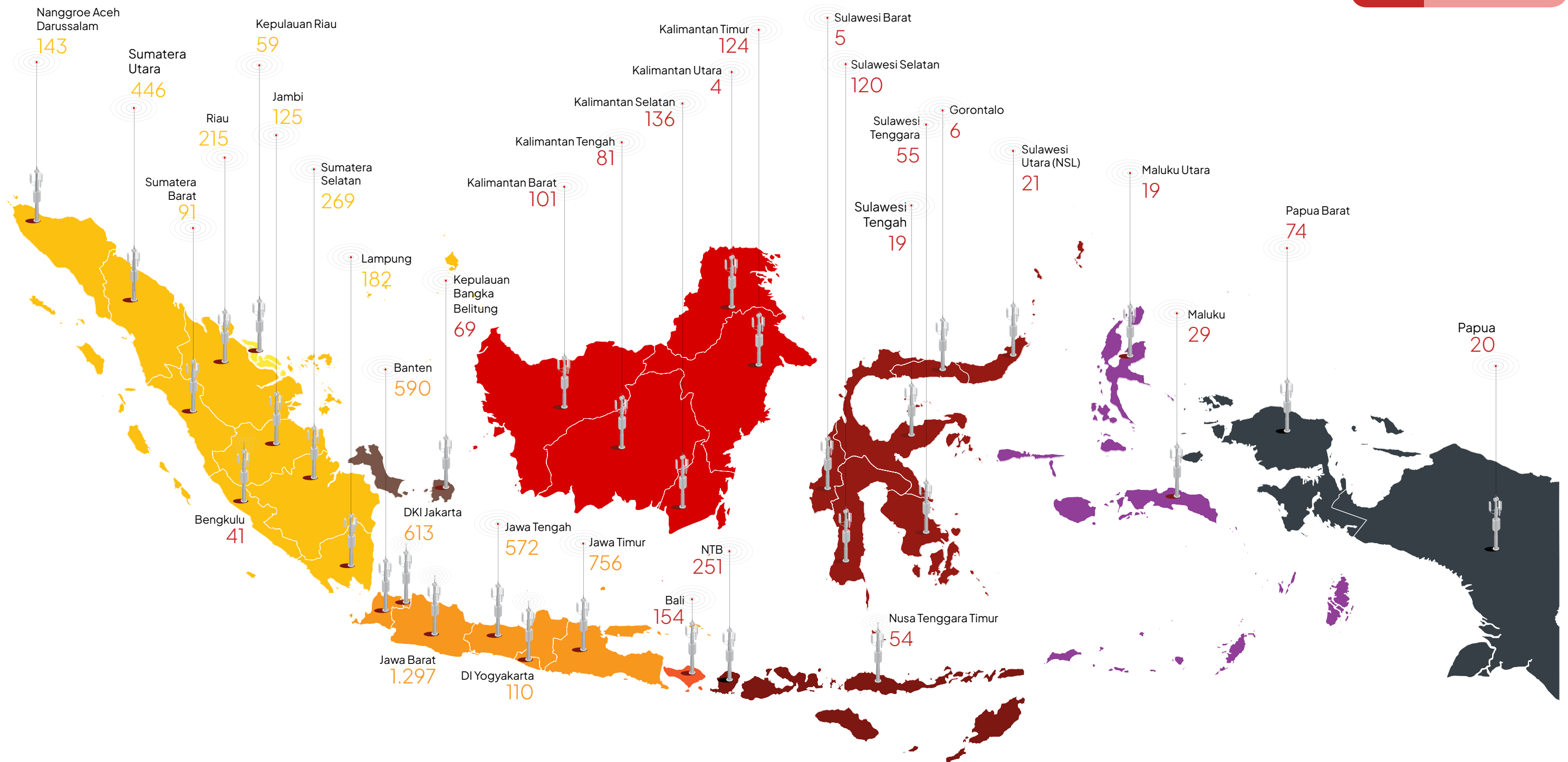
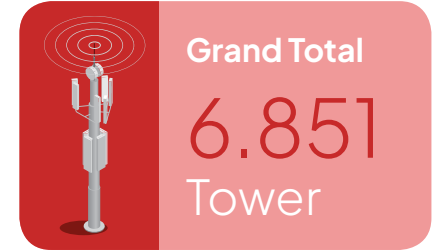


WILAYAH OPERASIONAL

Operational Areas

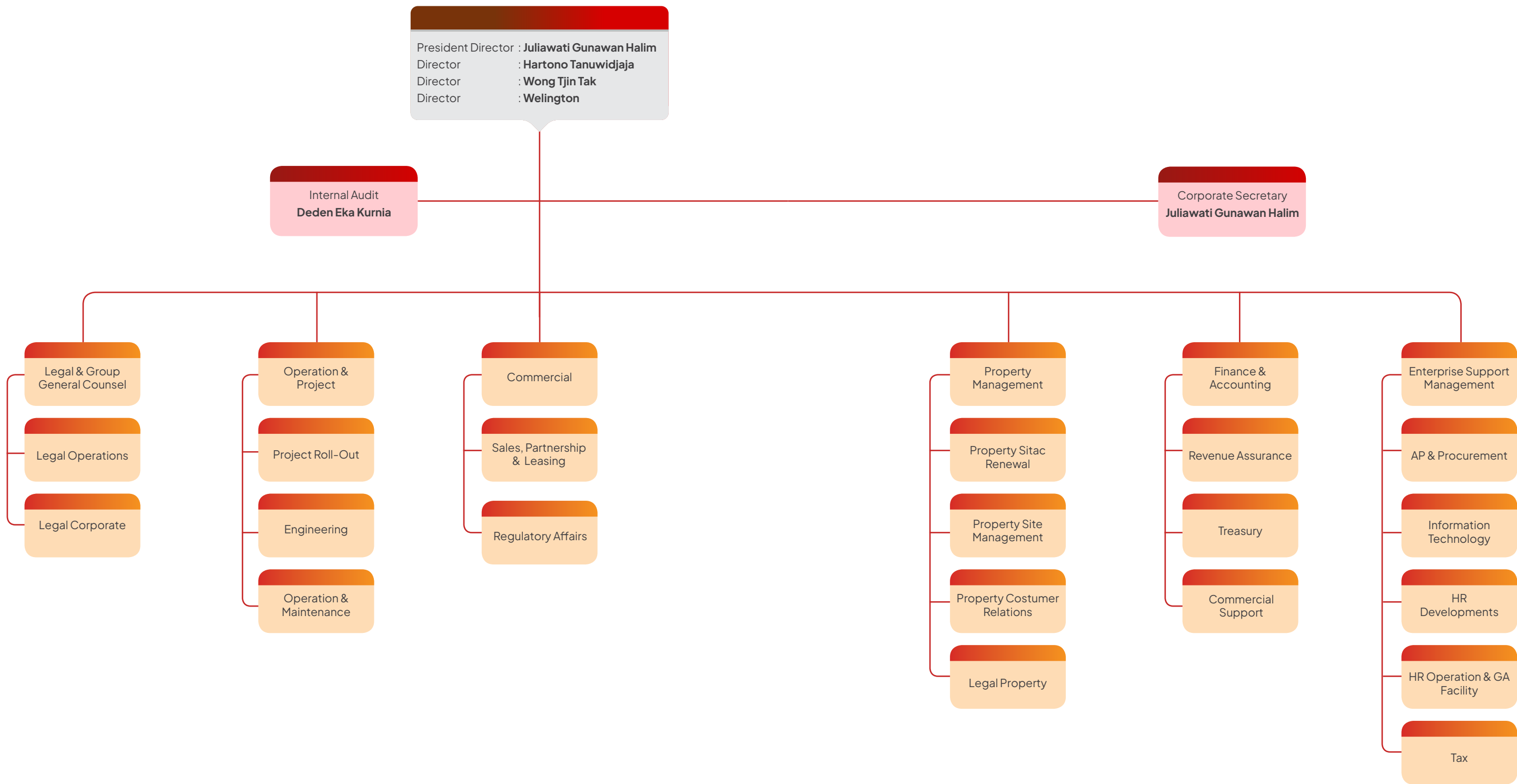
Secara geografis, wilayah operasional Perseroan ditandai dengan portofolio menara yang dimiliki oleh STP Group. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 6.851 menara yang tersebar di berbagai lokasi strategis dan padat penduduk wilayah Indonesia..

Geographically, the Company's operation is signified by the tower portfolio of the STP Group. By the end of December 2023, the Company owns 6,851 towers in strategic locations and densely populated areas in Indonesia.



STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE



KEANGGOTAAN ASOSIASI

Association Membership

No.	Organisasi Organisation	
1	Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi	Asosiasi yang mewadahi perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembang infrastruktur dan menara telekomunikasi.
	Telecommunication Tower Infrastructure Developers Association	An association for companies engaged in the development of telecommunications infrastructure and towers.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners
Composition

Komposisi Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023.

Composition of the Board of Commissioners

As of December 31, 2023, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners, as approved by the Company's Annual General Meeting of Shareholders on May 5, 2023.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Kusmayanto Kadiman

Komisaris Utama
(Komisaris Independen)
President Commissioner
(Independent Commissioner)

Umur Age	69 Tahun Years Old	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Domisili Domicile	Indonesia	
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung (1977) - gelar Doktor Filsafat (PhD) dari Australian National University (1998)	- Earned a Physics Engineering Degree from Bandung Institute of Technology (1977) - Doctor of Philosophy (PhD) from Australian National University (1988)
Dasar Hukum Penunjukkan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan sejak tahun 2021 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023, untuk masa jabatan 3 tahun, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.	Appointed as President Commissioner (Independent Commissioner) of the Company based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on May 5, 2023, for a period of 3 years until the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	- Wakil Komisaris Utama PT Adaro Power (2010–saat ini) - Komisaris Utama PT BFI Finance Tbk (2011–saat ini)	- Vice President Commissioner of PT Adaro Power (2010–present) - President Commissioner of PT BFI Finance Tbk (2011–present)

	- Komisaris Independen PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017–saat ini) - Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–saat ini) - Komisaris Independen PT Global Digital Niaga Tbk (2021–saat ini)	- Independent Commissioner of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017–present) - Independent Commissioner of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–present). - Independent Commissioner of PT Global Digital Niaga Tbk (2021–present)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Dosen Institut Teknologi Bandung (1977–2008) - Direktur PT Alas Buana Raya (1992–1995) - Direktur Pusat Penelitian Teknologi di Institut Teknologi Bandung (1996–1999) - Sekretaris Rektor di Institut Teknologi Bandung (2001–2004) - Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia (2004–2009) - Wakil Komisaris Utama PT Adaro Power (2010–saat ini) - Komisaris Utama PT BFI Finance Tbk (2011–saat ini) - Komisaris Independen PT Martina Berto Tbk (2012 – 2014) - Komisaris PT Tamaris Hydro Lestari (2012 – 2024) - Komisaris PT Iforte Solusi Infotek (2016 – 2017) - Komisaris Utama PT Setiabudi Investment Management (2016–2024) - Komisaris Independen PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017–saat ini) - Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–saat ini) - International Advisory Board Komatsu Ltd (2019–2023) - Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan (2021–saat ini) - Komisaris Utama PT Setiabudi Investment Management (2016–2024)	- Lecturer of Institut Teknologi Bandung (1977–2008) - Director of PT Alas Buana Raya (1992–1995) - Director of Technology Research Center at Bandung Institute of Technology (1996–1999) - Rector Secretary at Bandung Institute of Technology (2001–2004) - The Minister of Research and Technology of the Republic of Indonesia (2004–2009) - Vice President Commissioner of PT Adaro Power (2010–present) - President Commissioner of PT BFI Finance Tbk (2011–present) - Independent Commissioner of PT Martina Berto Tbk (2012 – 2014) - Commissioner of PT Tamaris Hydro Lestari (2012 – 2024) - Commissioner of PT Iforte Solusi Infotek (2016 – 2017) - President Commissioner of PT Setiabudi Investment Management (2016–2024) - Independent Commissioner of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017–present) - Independent Commissioner of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–present) - International Advisory Board of Komatsu Ltd (2019–2023) - President Commissioner (Independent Commissioner) of the Company (2021–present). - President Commissioner of PT Setiabudi Investment Management (2016–2024)
Pernyataan Independensi Declaration of Independence	Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Independent Commissioner of the Company has no financial, management, stock ownership, or second-degree family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders, or a relationship with the Company that could impair their ability to act independently.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, major shareholders and controllers, either directly or indirectly to individual owners.

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Harry Mozarta Zen
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Umur Age	54 Tahun Years Old	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Domisili Domicile	Indonesia	
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Meraih gelar Sarjana Teknik Metalurgi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta (1993) - Meraih gelar MBA di Corporate Finance and Financial Institutions & Market dari the State University of New York, Buffalo (1996)	
Dasar Hukum Penunjukkan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023, untuk masa jabatan 3 tahun, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.	Appointed as Independent Commissioner since 2020 and reappointed as Independent Commissioner of the Company based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on May 5, 2023, for a period of 3 years until the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Rangkap Jabatan Concurrent Positions	-	
Pengalaman Kerja Work Experience	- Assistant Vice President Citibank - Global Corporate Banking (1996–2001) - Co-Head Investment Banking Bahana Securities (2001–2007) - Direktur Barclays Capital (2007–2008) - Direktur Utama Credit Suisse Securities Indonesia (2008–2015) - Direktur Keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2016–2020) - Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) (2016–2020) - Komisaris Utama PT Graha Sarana Duta (2016–2020) - Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu Energi (2020–2024) - Komisaris Independen Perseroan (2020–saat ini)	- Assistant Vice President of Citibank - Global Corporate Banking (1996–2001) - Co-Head Investment Banking of Bahana Securities (2001–2007) - Director of Barclays Capital (2007–2008) - President Director of Credit Suisse Securities Indonesia (2008–2015) - Finance Director of PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2016–2020) - Commissioner of PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) (2016–2020) - President Commissioner of PT Graha Sarana Duta (2016–2020) - Finance Director of PT Pertamina Hulu Energi (2020–2024) - Independent Commissioner of the Company (2020–present).
Pernyataan Independensi Declaration of Independence	Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Independent Commissioner of the Company has no financial, management, stock ownership, or second-degree family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders, or a relationship with the Company that could impair their ability to act independently.
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, major shareholders and controllers, either directly or indirectly to individual owners.

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Eko Santoso Hadiprodjo

Komisaris
Commissioner

Umur Age	52 Tahun Years Old	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Domisili Domicile	Indonesia	
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Meraih gelar Bachelor of Arts, Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta. (1989–1994) - Meraih Magister Management, Jurusan Keuangan, Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta (1995–1996) - Obtained a Bachelor of Arts degree, majoring in Accounting, YKPN College of Economics (STIE), Yogyakarta (1989–1994) - Earned Master of Management, Department of Finance, Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta (1995–1996)	
Dasar Hukum Penunjukkan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023, untuk masa jabatan 3 tahun, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026. Appointed as Commissioner of the Company since 2022 and reappointed as Commissioner of the Company based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on May 5, 2023, for a period of 3 years until the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026.	

Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Director and Chief of Business Support di PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2015–saat ini)	Director and Chief of Business Support at PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2015–present)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Senior Associate Pricewaterhouse Coopers, Jakarta (1996–2002) - Finance and Accounting General Manager PT Grand Indonesia (Developer of Grand Indonesia Complex / ex Hotel Indonesia) (2002–2014) - Head of Tax di PT Lippo Karawaci Tbk (2014–2015) - Director and Chief of Business Support di PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2015–saat ini) - Komisaris PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2022–saat ini)	- Senior Associate of Pricewaterhouse Coopers, Jakarta (1996–2002) - Finance and Accounting General Manager of PT Grand Indonesia (Developer of Grand Indonesia Complex / ex Hotel Indonesia) (2002–2014) - Head of Tax at PT Lippo Karawaci Tbk (2014–2015) - Director and Chief of Business Support at PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2015–present) - Commissioner of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2022–present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan.	Has affiliations with the Ultimate Shareholder of the Company and the Controlling Shareholder.
	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan.	Has no affiliations with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company.



KOMPOSISI DIREKSI

Board of Directors Composition

Komposisi Direksi

Per 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023.

Composition of the Board of Directors

As of December 31, 2023 until the date of this annual report, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors, as approved at the Company's Annual General Meeting of Shareholders on May 5, 2023.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

JULIAWATI GUNAWAN HALIM

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Umur Age	53 Tahun Years Old	
Domisili Domicile	Indonesia	
Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara (1993).	Obtained a Bachelor of Economics majoring in Accounting from Tarumanegara University (1993).
Dasar Hukum Penunjukkan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026.	Appointed as President Director of the Company based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated May 5, 2023 for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Chief Financial Officer PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2023 - saat ini)	Chief Financial Officer PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2023 - present)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Auditor dan Konsultan di Prasetyo, Utomo & Co (Andersen Worldwide Indonesia) (1987–2002) - Ernst & Young Indonesia (2002–2003) - Financial Controller di PT Solusi Tunas Pratama (2009–Juni 2011) - Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk (Juni 2011–2021) - Direktur Utama PT Solusi Tunas Pratama Tbk (November 2021–saat ini)	- Auditor and Consultant at Prasetyo, Utomo & Co (Andersen Worldwide Indonesia) (1987–2002) - Ernst & Young Indonesia (2002–2003) - Financial Controller at PT Solusi Tunas Pratama (2009–June 2011) - Director of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (June 2011–2021) - President Director of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (November 2021–present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders and controllers, either directly or indirectly to individual owners.

PROFIL DIREKSI
 BOARD OF DIRECTORS PROFILE

PROFIL DIREKSI
 BOARD OF DIRECTORS PROFILE

HARTONO TANUWIDJAJA
 Direktur
 Director

Kewarganegaraan Citizenship	55 Tahun Years Old	
Umur Age	Indonesia	
Domisili Domicile	Indonesia	
Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dari Universitas Tarumanegara.	Earned a Bachelor degree in Faculty of Economic from University of Tarumanegara.
Dasar Hukum Penunjukkan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026.	Appointed as Director of the Company based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated May 5, 2023 for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Rangkap Jabatan Concurrent Positions	- Direktur di PT iForte Solusi Infotek (2019–sekarang) - Chief of Business Development di PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2023–sekarang)	- Director at PT iForte Solusi Infotek (2019–present) - Chief of Business Development at PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2023–present)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Chief Accountant Rodamas Timber Kalimantan (1990–1992) - Budget Analyst Great River Industries (1992–1993) - Finance Manager Pizza Hut Indonesia (1993–1996) - VP Finance Ponderosa Group (1996–2000) - Finance Director Mantari Life Insurance (1995–2000) - Finance Manager di Terex Indonesia (2000–2010) - Direktur PT iForte Solusi Infotek (2019–saat ini) - Chief of Finance di PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021–2023) - Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–saat ini)	- Chief Accountant of Rodamas Timber Kalimantan (1990–1992) - Budget Analyst of Great River Industries (1992–1993) - Finance Manager of Pizza Hut Indonesia (1993–1996) - VP Finance of Ponderosa Group (1996–2000) - Finance Director of Mantari Life Insurance (1995–2000) - Finance Manager at Terex Indonesia (2000–2010) - Director of PT iForte Solusi Infotek (2019–present) - Chief of Finance at PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021–2023) - Director of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan dan Pengendali Perseroan. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi Perseroan lainnya dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Has affiliations with the Ultimate Shareholder and the Controlling Shareholder. Has no affiliations with other members of the Board of Directors of the Company and all members of the Board of Commissioners of the Company.

PROFIL DIREKSI
 BOARD OF DIRECTORS PROFILE

PROFIL DIREKSI
 BOARD OF DIRECTORS PROFILE



Kewarganegaraan Citizenship	53 Tahun Years Old	
Umur Age	Indonesia	
Domisili Domicile	Indonesia	
Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana jurusan Teknik Kimia dari Universitas Indonesia (1995).	Obtained a Bachelor Degree in Chemical Engineering, University of Indonesia (1995).
Dasar Hukum Penunjukkan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 5 Mei 2023 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026.	Appointed as Director of the Company based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated May 5, 2023 for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2026
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Chief of IT di Protelindo Group (2018–saat ini)	Chief of IT at Protelindo Group (2018–present)

Pengalaman Kerja Work Experience	- Consultant di Accenture (1995–2009) - Managing Director di Accenture (2009–2016) - Co-owner and Director di Kineto Strategic Visual Communication (2016–2018) - Chief of IT di Protelindo Group (2018–saat ini) - Direktur di PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–saat ini)	- Consultant at Accenture (1995–2009) - Managing Director at Accenture (2009–2016) - Co-owner and Director at Kineto Strategic Visual Communication (2016–2018) - Chief of IT at Protelindo Group (2018–present) - Director at PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan dan Pengendali Perseroan. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi Perseroan lainnya dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Has affiliations with the Ultimate Shareholder and the Controlling Shareholder. Has no affiliations with other members of the Board of Directors of the Company and all members of the Board of Commissioners of the Company.

PROFIL DIREKSI
 BOARD OF DIRECTORS PROFILE

PROFIL DIREKSI
 BOARD OF DIRECTORS PROFILE



Kewarganegaraan Citizenship	45 Tahun Years Old	
Umur Age	Indonesia	
Domisili Domicile	Indonesia	
Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Sipil – Institut Sains dan Teknologi Nasional (2004).	Obtained a Bachelor of Engineering, Majoring in Civil Engineering – National Science and Technology Institute (2004).
Dasar Hukum Penunjukkan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 5 Mei 2023 untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026.	Appointed as Director of the Company based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders dated May 5, 2023 for term of office until the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	-	

Pengalaman Kerja Work Experience	- Engineer di PT Total Bangun Persada Jakarta Proyek Pembangunan Gedung Fedex Lebak Bulus Jakarta (2000–2001), - Customer Care Supervisor PT Pasifik Satelit Nusantara (2002–2004) - Professional Services Assistant Manager PT Indosat Mega Media (2004–2010) - Manager Sales Enterprise, Presales dan Bisnis Development di PT Moratelindo (2010–2012) - Chief Commercial Perseroan (2013–2022), - Direktur di PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2022–saat ini)	- Engineer at PT Total Bangun Persada Jakarta Proyek Pembangunan Gedung Fedex Lebak Bulus Jakarta (2000–2001) - Customer Care Supervisor of PT Pasifik Satelit Nusantara (2002–2004), - Professional Services Assistant Manager of PT Indosat Mega Media (2004–2010) - Manager Sales Enterprise, Presales dan Bisnis Development at PT Moratelindo (2010–2012) - Chief Commercial of the Company (2013–2022) - Director of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2022–present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.	Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders and controllers, either directly or indirectly to individual owners.

DEMOGRAFI KARYAWAN

EMPLOYEES DEMOGRAPHY

DEMOGRAFI KARYAWAN

EMPLOYEES DEMOGRAPHY

Per 31 Desember 2023, Perseroan dan entitas anaknya memiliki 168 karyawan tetap dan 22 karyawan kontrak, dengan rincian demografi karyawan sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the Company and its subsidiaries managed 168 permanent employees and 22 contract employees, with details of employee demographics:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Employees Composition by Position Level

Keterangan Description	2023	2022	2021
Chief & VP	3	1	4
General Manager	3	4	17
Senior Manager & Manager	29	33	61
Non Manager	155	208	270
Total	190	246	352

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Employees Composition by Educational Level

Keterangan Description	2023	2022	2021
Perguruan Tinggi/Universitas College/University	162	218	309
SLTA Sederajat High School Equivalent	23	23	38
SMP Sederajat Junior High School Equivalent	5	5	5
Total	190	246	352

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employees Composition by Age

Keterangan Description	2023	2022	2021
<20 tahun years old	0	0	0
20–30 tahun years old	25	40	59
31–40 tahun years old	84	130	177
41–50 tahun years old	69	67	94
>50 tahun years old	12	9	22
Total	190	246	352

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employees Composition by Gender

Keterangan Description	2023	2022	2021
Perempuan Female	64	89	100
Pria Male	126	157	252
Total	190	246	352

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employees Composition by Employment Status

Keterangan Description	2023	2022	2021
Permanen Permanent	168	202	272
Kontrak Contract	22	44	80
Total	190	246	352

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham per 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023
Shareholder Holding 5% or More of the Outstanding Shares as of January 1, 2023, and December 31, 2023

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari Januari 2023		31 Desember December 2023	
	Jumlah Saham Total Shares	(%)	Jumlah Saham Total Shares	(%)
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.137.099.654	99,96%	1.137.099.654	99,96%
Masyarakat (<5%) Public (<5%)	480.044	0,04%	480.044	0,04%
Jumlah Total	1.137.579.698	100,00%	1.137.579.698	100,00%

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 1 Januari dan 31 Desember 2023
Shares Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors as of January 1 and December 31, 2023

Selain dari informasi yang disebutkan pada tabel di bawah ini, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Perseroan.

Apart from the information mentioned in the table below, the entire Board of Commissioners and Directors of the Company do not have indirect ownership of the Company's shares.

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari Januari 2023		31 Desember December 2023	
		Jumlah Saham Total Shares	(%)	Jumlah Saham Total Shares	(%)
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	0	0%	0	0%
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0%	0	0%
Eko Santoso Hadiprodjo	Komisaris Commissioner	0	0%	0	0%
Juliawati Gunawan Halim	Direktur Utama President Director	0	0%	0	0%
Hartono Tanuwidjaja	Direktur Director	0	0%	0	0%
Wong Tjin Tak	Direktur Director	0	0%	0	0%
Wellington	Direktur Director	0	0%	0	0%

Jumlah Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan <5% per 1 Januari dan 31 Desember 2023
Shareholders Composition from the Public with Ownership <5% as of January 1 and December 31, 2023

Kelompok Pemegang Saham Groups of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders
Per 1 Januari 2023 As of January 1, 2023			
PEMODAL DOMESTIK DOMESTIC SHAREHOLDERS			
Perorangan Domestik Domestic Retail	290.121	0,026%	628

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

Kelompok Pemegang Saham Groups of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders
PEMODAL ASING FOREIGN SHAREHOLDERS			
Perorangan Asing Foreign Retail	2	0,0000%	144
Per 31 Desember 2023 As of December 31, 2023			
PEMODAL DOMESTIK DOMESTIC SHAREHOLDERS			
Perorangan Domestik Domestic Retail	289.921	0,025%	622
PEMODAL ASING FOREIGN SHAREHOLDERS			
Perorangan Asing Foreign Retail	144	0,0000%	2

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi per 1 Januari dan 31 Desember 2023

Total Shareholders and Percentage Ownership Based on Classification as of Januari 1, and December 31, 2023,

Kelompok Pemegang Saham Groups of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders
Per 1 Januari 2023 As of January 1, 2023			
PEMODAL DOMESTIK DOMESTIC SHAREHOLDERS			
Perorangan Domestik Domestic Retail	290.121	0,026%	628
Badan Usaha Domestik Domestic Institutions	1.137.099.733	99,958%	4
Lain-Lain Others	0	0%	0
PEMODAL ASING FOREIGN SHAREHOLDERS			
Perorangan Asing Foreign Retail	144	0,0000%	2
Badan Usaha Asing Foreign Institutions	189.900	0,0017%	1
Per 31 Desember 2023 As of December 31, 2023			
PEMODAL DOMESTIK DOMESTIC SHAREHOLDERS			
Perorangan Domestik Domestic Retail	289.921	0,025%	622
Badan Usaha Domestik Domestic Institutions	1.137.099.733	99,958%	4
Lain-Lain Others	0	0%	0
PEMODAL ASING FOREIGN SHAREHOLDERS			
Perorangan Asing Foreign Retail	144	0,0000%	2
Badan Usaha Asing Foreign Institutions	189.900	0,0017%	3

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2023

Shareholders Structure As of December 31, 2023

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2023

Shareholders Structure As of December 31, 2023

ABBREVIATIONS:

SWH : Stefanus Wijaya Hartono

RSH : Roberto Setiabudi Hartono

TND : Tessa Natalia Damayanti Hartono

VAR : Vanesa Ratnasari Hartono

VRH : Victor Rahmat Hartono

MBH : Martin Basuki Hartono

AWH : Armand Wahyudi Hartono

AKH : Alicia Katrina Hartono

JCH : Jacqueline Chiara Hartono

MKH : Marco Krisna Hartono

CGS : PT Caturguwiratna Sumapala

TMG : PT Tricipta Mandhala Gumilang

SMN : PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

FAS : Ferdinandus Aming Santoso

Protelindo : PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

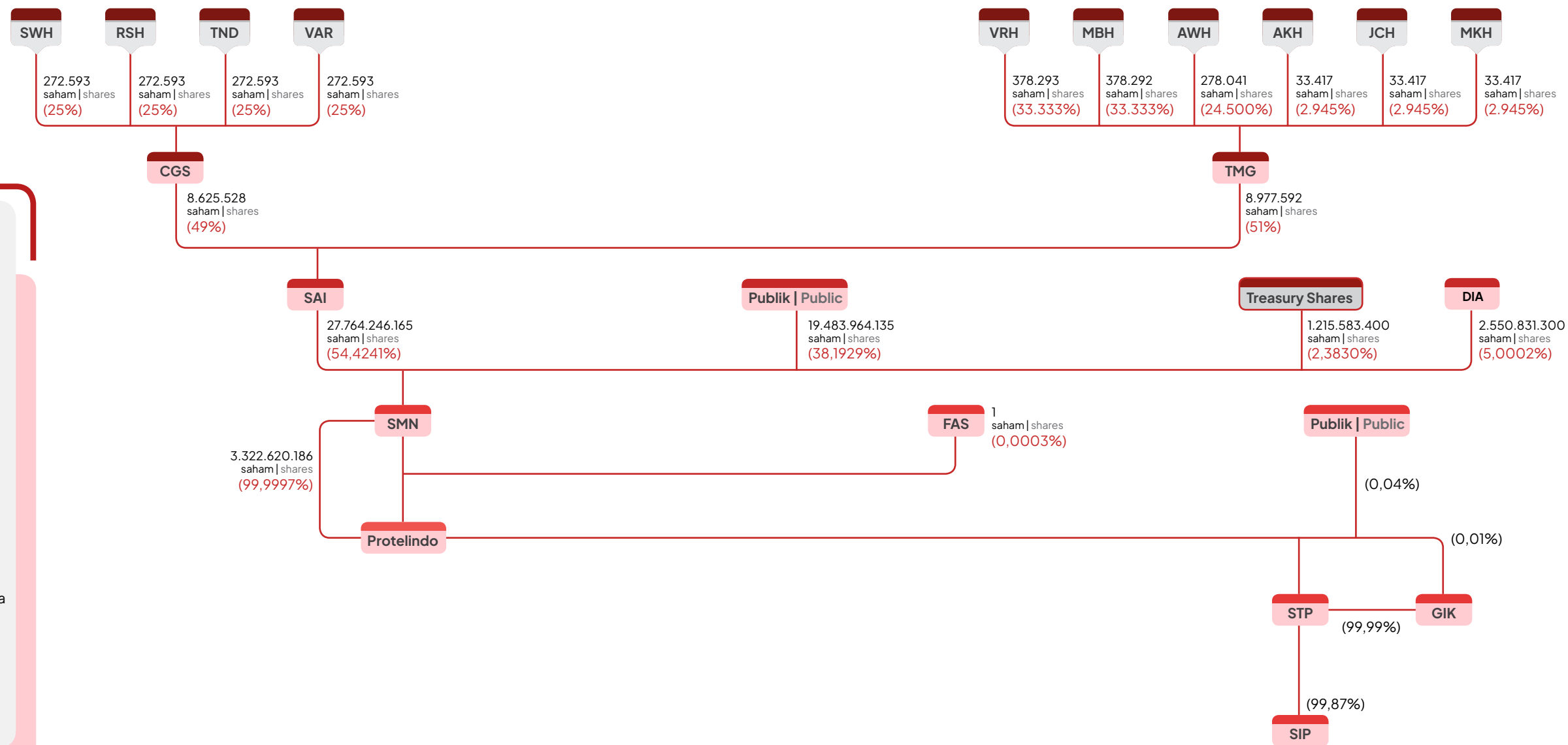
SAI : PT Sapta Adhikari Investama

DIA : PT Dwimuria Investasi Andalan

SIP : PT Sarana Inti Persada

GIK : PT Global Indonesia Komunikatama

STP : PT Solusi Tunas Pratama Tbk



INFORMASI ENTITAS ANAK

Information on Subsidiaries

INFORMASI ENTITAS ANAK

Information on Subsidiaries

PEMILIKAN LANGSUNG | DIRECT OWNERSHIP

PT SARANA INTI PERSADA (“SIP”)	
Jenis Usaha Nature of Business	- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Wholesale of Telecommunication Equipment - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Telecommunication with Cable Activities - Aktivitas Perusahaan Holding Holding Company Activities - Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa Owned or Rental Real Estate - Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities - Instalasi Telekomunikasi Telecommunication Installation - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Trading of a Great Variety of Goods
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	STP – 99,87% BIT – 0,13%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 6 Januari 2005 Start of commercial operations on January 6, 2005
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	116.182
Profil Perusahaan Profile of the Company	Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di SIP. SIP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 12 Oktober 2004 dibuat di hadapan Leontine Anggasurya S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00383.HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Januari 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2005 Tambahan No. 9851. Anggaran Dasar SIP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35, tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai perubahan domisili SIP. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0021679.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022.

	After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in SIP. SIP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 16 dated October 12, 2004 drawn up in the presence of Leontine Anggasurya S.H., Notary in Bandung. SIP’s Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C 00383.HT.01.01.TH.2005 dated January 6, 2005 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74 dated September 16, 2005, Supplement No. 9851. SIP’s Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders’ Resolution No. 35 dated March 25, 2022, drawn up in the presence of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the change domicile of SIP. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0021679. AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 25, 2022.
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347
Pengurus Perusahaan Management of the Company	Dewan Komisaris Board of Commissioners: Juliawati Gunawan Halim Direksi Board of Directors: Wong Tjin Tak

PT GLOBAL INDONESIA KOMUNIKATAMA (“GIK”)	
Jenis Usaha Nature of Business	- Konstruksi Sentral Telekomunikasi Central Telecommunication Construction - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi Wholesale of Telecommunication Equipment - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya Other Management Consultation Activities
Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership	STP – 99,99% Protelindo – 0,01%
Status Operasi Operational Status	Dimulainya kegiatan komersial pada 25 Februari 2010 Start of commercial operations on February 25, 2010
Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam Jutaan Rupiah) Total Assets Before Eliminations (in million IDR)	89.100

INFORMASI ENTITAS ANAK
Information on Subsidiaries

Profil Perusahaan Profile of the Company	Pada Setelah melakukan akuisisi atas STP, Protelindo memiliki saham dan hak suara secara tidak langsung sebesar 100% di GIK. GIK adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 21 Januari 2010 dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-10428.AH.01.01 Tahun 2010 pada tanggal 25 Februari 2010. Anggaran Dasar GIK sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 02, tanggal 6 Desember 2023, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor GIK. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0076900.AH.01.02 TAHUN 2023 tanggal 8 Desember 2023. After acquiring STP, Protelindo has indirect total capital and voting interest of 100% in GIK. GIK is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 39 dated Januari 21, 2010 drawn up in the presence of Netty Maria Machdar, S.H., Notary in Jakarta. GIK's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter No. AHU-10428.AH.01.01 Tahun 2010 dated February 25, 2010. The Articles of Association of GIK, as contained in the aforementioned deed of establishment, have undergone several changes, the last of which was with the Deed of Declaration of Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders No. 02, dated December 6, 2023, made before Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., a notary in Tangerang Regency, concerning the approval of the increase in GIK's authorized capital and issued and paid-up capital. This amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Approval Letter No. AHU-0076900.AH.01.02 YEAR 2023, dated December 8, 2023.
Alamat Perusahaan Address of the Company	Kantor Pusat Head Office: Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah, 59347
Pengurus Perusahaan Management of the Company	Dewan Komisaris Board of Commissioners: Popo Djatmiko, Komisaris Commissioner Direksi Board of Directors: Sandra Tantani, Presiden Direktur President Director Catherine Sembiring Pelawi, Direktur Director

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Stock Listing Chronology

Tanggal Date	Keterangan Description	Jumlah Saham Number of Shares
11 Oktober 2011 October 11, 2011	Penawaran umum perdana saham dan pencatatan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia Initial public offering and listing of the Company's shares in Indonesia Stock Exchange	600.000.000
28 Agustus 2012 August 28, 2012	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	135.000.000
6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015 March 6, 2013 until August 28, 2015	Eksekusi Waran Seri I Execution of Series I Warrants	59.414.674
7 Januari 2015 January 7, 2015	Penawaran Umum Terbatas II Limited Public Offering II	343.165.024
Jumlah Total		1.137.579.698

Penawaran Umum Perdana

Pada 29 September 2011, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 100.000.000 lembar Saham Biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp3.400 per saham. Seluruh saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana digunakan untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau site telekomunikasi dan modal kerja.

Initial Public Offering

On September 29, 2011, the Company received an Effective Statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam) No. S-10636/ BL/2011 to conduct Initial Public offering of 100,000,000 shares to the public with par value of Rp100 per shares and offering price of Rp3,400 per share. All the Company's shares are listed in Indonesia Stock Exchange. The proceeds from public offering were used for acquisition, construction of towers and/or telecommunication sites for working capital.

Penawaran Umum Terbatas I

Pada 8 Agustus 2012, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK No. S-9825/BL/2012 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 135.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp4.800 per saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 waran. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp4.800 dengan masa berlaku pelaksanaan 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015. Sampai dengan masa pelaksanaan berakhir, Perseroan menerbitkan 59.415.534 waran. Saham-saham dan waran ini tercatat pada BEI. Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau site telekomunikasi, dan modal kerja.

Limited Public Offering I

On August 8, 2012, the Company received an Effective Statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam) No. S-9825/BL/2012 related to Limited Public Offering I for the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) with total 135,000,000 shares and par value of Rp100 per share with offering price of Rp4,800 per shares, and maximum 59,400,000 warrants. The exercise period for this warrant was from March 6, 2013, up to August 28, 2015. Up to the closing period of exercise, the Company issued 59,414,674 warrants. The shares and warrants have been listed in Indonesia Stock Exchange. The proceeds from public offerings were used for acquisition, constructions of tower and/or telecommunications sites and working capital.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Stock Listing Chronology

Penawaran Umum Terbatas II

Pada 19 Desember 2014, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-550/D.04/2014 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 343.165.024 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp7.000 per saham. Seluruh saham dari penawaran umum ini telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia, pada bulan Januari 2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (setelah perjumpaan antara pinjaman pemegang saham Perseroan kepada PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) dengan kewajiban KIE untuk penyetoran modal) digunakan untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan modal kerja.

Limited Public Offering II

On December 19, 2014, the Company received an Effective Statement from Chief Executive of Capital Market Supervisory of Financial Service Authority No. S-550/D.04/2014 related to Limited Public Offering II to issue the Pre-emptive Rights of 343,165,024 ordinary shares with par value of Rp100 per shares with offering price of Rp7,000 per shares. All shares from the public offering have been listed in Indonesia Stock Exchange in January 2015. The proceeds from public offering (after setting off between the Company's shareholder loan to PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) with KIE's liability to pay the shares subscribed) were used for the payment of a portion of loan facility and for working capital.

INFORMASI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Other Stock Listing Information

Pada tahun 2023, STP tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya di bursa efek manapun.

In 2023, STP did not executed any listing for bonds, sukuk or conversion bonds or other stock listing at any other stock exchanges.

AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTANT FIRMS

Kantor Akuntan Publik of Public Accountant Firm	Tjahjadi & Tamara
Nama Akuntan Publik Nama of Public Accountant	Riani
Alamat Address	Centennial Tower 15F, Suite 15B Jl. Gatot Subroto Kav. 25 Jakarta 12930, Indonesia Tel : (62-21) 22958350 Fax : (62-21) 22958351
Jasa yang Diberikan Services Rendered:	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 Audit on Consolidated Financial Statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk dated December 31, 2023
Jasa Non-Audit Lain Other Non-Audit Service	Tidak ada jasa lain selain jasa audit There are no other services apart from audit services
Periode Penugasan Assignment Period:	2023
Biaya Jasa Fees	Rp340.000.000

LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institutions & Professions



Biro Administrasi Efek | Share Registrar

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48

Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2525666

Fax : (62-21) 2525028



Notaris | Notary

Christina Dwi Utami, SH., M. Hum, Mkn

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2, Komp.

Ketapang Indah Blok B-2 No. 3

Jakarta 11140, Indonesia

Tel : (62-21) 6345668

Fax : (62-21) 6345666



Konsultan Hukum | Legal Consultant

Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia, 7th Floor

Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126

Jakarta 10220

Tel : (62-21) 5747181

Fax : (62-21) 5747180

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

Awards & Certifications

Penghargaan 2023 2023 Awards



Indonesia Best Public Company 2023 with
Prestigious Trading Prices

Sector : Infrastructures
Sub Sector : Telecommunication

Pemberi Penghargaan | Awarded by
Warta Ekonomi



SWA 100 Indonesia's Best Public Companies -
Best Wealth Creator 2023
Assistant Vice President Citibank The 1st
Ranking of Middle Capitalization Category

INDONESIA THE BEST PUBLIC COMPANIES
BASED ON WAIT (OVERALL) 2023

Pemberi Penghargaan | Awarded by
SWA Media Group

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Corporate Website Information

Berdasarkan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 mengenai situs web emiten atau perusahaan publik, Perseroan dalam upaya kepatuhan terhadap peraturan tersebut telah melengkapi website perusahaan yang beralamat www.stptower.com dengan beberapa informasi penting sebagai berikut:

Based on the OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 regarding the website of the issuer or public company, in compliance with the regulation the Company has complemented the company's website, addressed at www.stptower.com, with the following key information:



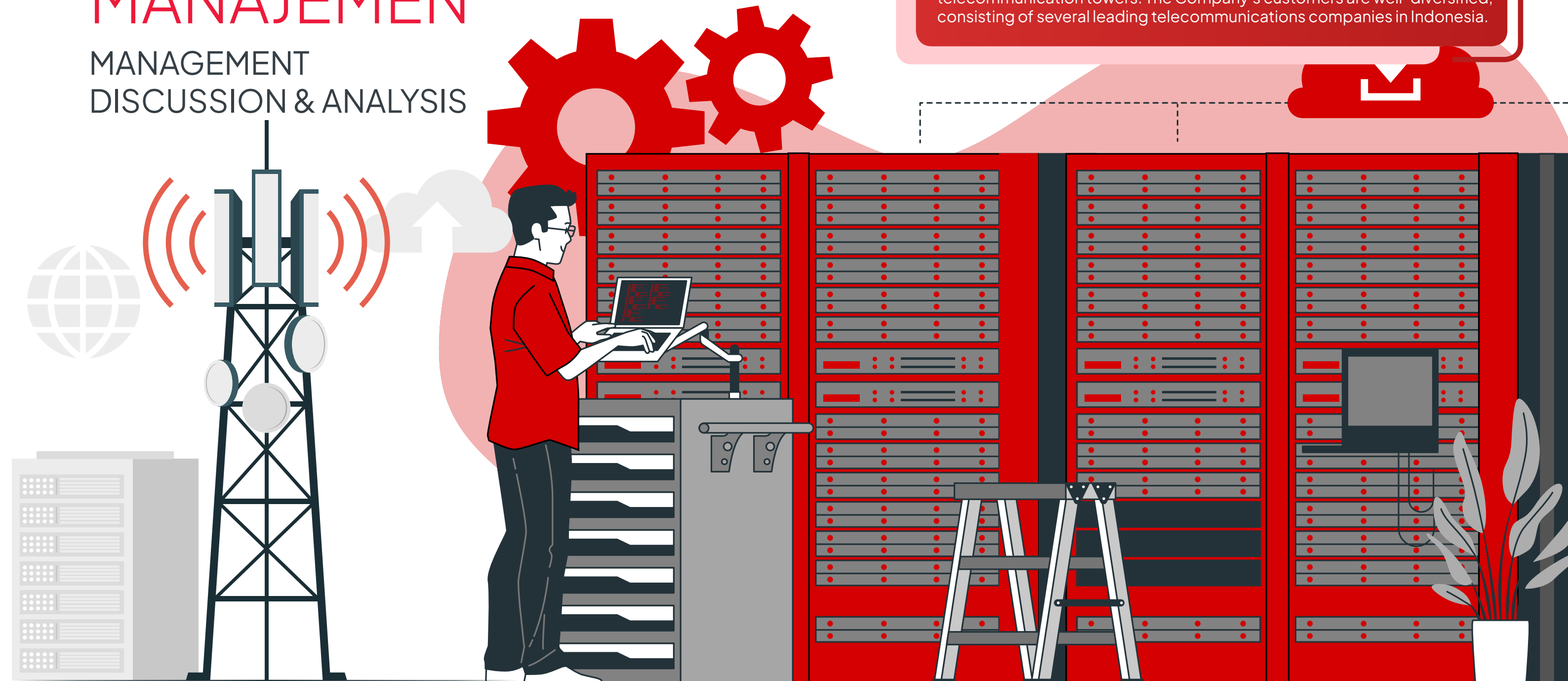
04.

ANALISIS & DISKUSI MANAJEMEN

MANAGEMENT
DISCUSSION & ANALYSIS

Ekspansi bisnis Perseroan yang dikelola dengan baik mampu menghasilkan kinerja profitabilitas yang lebih baik di tahun 2023. Perseroan membukukan **pendapatan** sebesar **Rp1,89 triliun** di tahun 2023 atau **tumbuh 0,20% yoy** dibandingkan senilai Rp1,89 triliun di tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut seluruhnya berasal dari pendapatan sewa menara telekomunikasi. Pelanggan Perseroan terdiversifikasi dengan baik yang terdiri dari beberapa perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia.

The Company's well-managed business expansion was able to yield better profitability performance in 2023. The Company recorded revenue of Rp1.89 trillion in 2023, grew 0.20% yoy compared to Rp1.89 trillion in the previous year. The revenue entirely derived from the lease income of telecommunication towers. The Company's customers are well-diversified, consisting of several leading telecommunications companies in Indonesia.





TINJAUAN PEREKONOMIAN Economic Overview



Meskipun menghadapi tekanan fluktuasi Rupiah dan kenaikan inflasi, ekonomi Indonesia masih membukukan pertumbuhan sebesar **5,05% yoy** di tahun 2023 dibandingkan sebesar 5,31% yoy di tahun sebelumnya.

In light of the pressures from Rupiah fluctuations and inflation increases, the Indonesian economy still recorded growth of 5.05% yoy in 2023 compared to 5.31% yoy in the previous year.

TINJAUAN PEREKONOMIAN Economic Overview

Tinjauan Perekonomian Dunia

Ekonomi dunia menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan sejalan dengan perlambatan ekonomi Tiongkok terutama akibat konsumsi yang melemah dan sektor konstruksi yang mengalami penurunan kinerja setelah dalam beberapa tahun terakhir menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi AS mampu tumbuh lebih kuat terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik di tahun 2023.

Ekonomi global tahun 2023 juga dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik yang meningkat dan berdampak pada kenaikan harga energi dan pangan sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Merespons kenaikan inflasi ini, Bank Sentral AS telah menaikkan Federal Funds Rate (FFR) dari posisi akhir tahun 2022 sebesar 4,50% menjadi 5,50% per Oktober 2023 yang dipertahankan hingga akhir tahun. Kenaikan suku bunga ini diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Sebagai konsekuensinya, Dolar AS menguat secara signifikan seiring dengan pembalikan arus modal dari negara *Emerging Market Economies* (EMEs) ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid.

Faktor ketidakpastian ekonomi dan keuangan global tersebut serta eskalasi ketegangan geopolitik berdampak kepada perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat di tahun 2023. International Monetary Fund (IMF) melaporkan pertumbuhan PDB dunia tahun 2023 sebesar 3,1% di tahun 2023, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 3,50%.

Tinjauan Perekonomian Indonesia

Sejalan dengan perkembangan di ekonomi dunia, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) sebesar 25bps menjadi 5,75% di bulan Januari 2023 dan selanjutnya diikuti kenaikan 25bps lainnya menjadi 6,00% di tahun 2023. Kenaikan BI7DRR ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (*imported inflation*), sehingga inflasi tetap terkendali yang mencapai 2,61% *year-on-year* (yoy) di tahun 2023 atau masih dalam sasaran 3,0±1% pada 2023.

Global Economic Review

The global economy is encountering challenges of deceleration, aligned with the economic downturn in China, primarily attributed to weakened consumption and a downturn in the construction sector's performance, which had been a significant driver of economic growth in recent years. In contrast, the U.S. economy managed to achieve stronger growth, chiefly supported by household consumption and domestically oriented service sectors in 2023.

The global economy in 2023 is also affected by escalating geopolitical tensions, leading to increases in energy and food prices, thus resulting in persistently high global inflation. In response to this surge in inflation, the U.S. Federal Reserve elevated the Federal Funds Rate (FFR) from the end of 2022 position of 4.50% to 5.50% by October 2023, which is sustained until the end of the year. The hike in interest rates is anticipated to remain elevated for an extended period (*higher for longer*). As a result, the U.S. dollar significantly appreciated, accompanying the shift of capital flows from Emerging Market Economies (EMEs) to developed nations and more liquid assets.

These elements of global economic and financial uncertainty, together with the heightening of geopolitical tensions, influence the forecast of global economic growth tapering off in 2023. The International Monetary Fund (IMF) reported the world's GDP growth in 2023 at 3.1%, lower than the preceding year's 3.50%.

Indonesian Economic Review

In line with developments in the global economy, Bank Indonesia (BI) raised its benchmark interest rate (BI7DRR) by 25bps to 5.75% in January 2023 and was followed by another 25bps increase to 6.00% in 2023. The increase in BI7DRR aims to strengthen the stabilization policy of the Rupiah's exchange value from the impact of increasing global uncertainty and as a pre-emptive and forward-looking step to mitigate its impact on imported inflation, thus keeping inflation under control at 2.61% *year-on-year* (yoy) in 2023 or still within the target of 3.0±1% for 2023.



TINJAUAN PEREKONOMIAN Economic Overview

Meskipun menghadapi tekanan fluktuasi Rupiah dan kenaikan inflasi, ekonomi Indonesia masih membukukan pertumbuhan sebesar 5,05% yoy di tahun 2023 dibandingkan sebesar 5,31% yoy di tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia sebesar 52,73% dengan pertumbuhan sebesar 4,82% yoy pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif terjaga dengan baik didukung oleh pengelolaan inflasi dengan baik oleh Pemerintah.

Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia didukung oleh beberapa sektor usaha yang masih mampu tumbuh *double digit* meski mengalami perlambatan pertumbuhan seperti transportasi dan pergudangan (13,96% yoy) serta penyediaan akomodasi dan makan minum (10,01% yoy). Sektor lainnya yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan (4,64% yoy); serta informasi dan komunikasi (7,59% yoy). Di sisi lain, sektor pengadaan listrik dan gas mengalami perlambatan sebesar 4,91% yoy di tahun 2023 dari 6,61% yoy di tahun sebelumnya.

In light of the pressures from Rupiah fluctuations and inflation increases, the Indonesian economy still recorded growth of 5.05% yoy in 2023 compared to 5.31% yoy in the previous year. Household consumption expenditure still contributed the largest to Indonesia's GDP at 52.73% with growth of 4.82% yoy during this period. This indicates that consumer purchasing power is still relatively well-maintained, supported by good inflation management by the Government.

Meanwhile, from the business sector perspective, the growth of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) was supported by several business sectors that were still able to grow in double digits despite a slowdown in growth, such as transportation and warehousing (13.96% yoy) and accommodation and food service activities (10.01% yoy). Other sectors supporting Indonesia's economic growth include the manufacturing industry (4.64% yoy); and information and communication (7.59% yoy). On the other hand, the electricity and gas supply sector decreased by 4.91% yoy in 2023 from 6.61% yoy in the previous year.

TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI Telecommunications Industry Review



Pada tahun 2023, industri informasi dan komunikasi berhasil **tumbuh 7,59% yoy, lebih tinggi** dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,05% yoy.

In 2023, the information and communication industry successfully grew by 7.59% yoy, higher than Indonesia's GDP growth of 5.05% yoy.



TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI Telecommunications Industry Review

Industri informasi dan komunikasi adalah industri yang berhasil membukukan pertumbuhan secara konsisten di zona positif. Bahkan, kecuali untuk periode kuartal II 2021 yang tumbuh 6,90% yoy atau sedikit di bawah pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 7,08%, pertumbuhan industri ini selalu melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan peningkatan permintaan di industri telekomunikasi Indonesia seiring dengan pergeseran budaya komunikasi telepon di Indonesia dalam satu dekade terakhir, dari penggunaan teknologi telekomunikasi telepon kabel menjadi teknologi komunikasi tanpa kabel.

Pada tahun 2023, industri informasi dan komunikasi berhasil tumbuh 7,59% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,05% yoy. Pertumbuhan tertinggi industri ini dalam lima tahun terakhir terjadi saat pandemi sebesar 10,61% yoy di tahun 2020 ketika pembatasan aktivitas sosial diterapkan sehingga mendorong peningkatan aktivitas berbasis digital. Adapun kontribusi industri ini terhadap PDB Indonesia mencapai 4,23% di tahun 2023.

The information and communication industry has successfully recorded consistent growth in the positive zone. Indeed, except for the second quarter of 2021, which grew by 6.90% year-on-year (yoy) slightly below Indonesia's GDP growth of 7.08%, the growth of this industry has always exceeded the economic growth of Indonesia. This indicates an increase in demand in the Indonesian telecommunications industry alongside a shift in the communication culture in Indonesia over the last decade, from the use of wired telecommunications technology to wireless communication technology.

In 2023, the information and communication industry successfully grew by 7.59% yoy, higher than Indonesia's GDP growth of 5.05% yoy. The highest growth of this industry in the last five years occurred during the pandemic at 10.61% yoy in 2020 when social activity restrictions were imposed, hence driving an increase in digital-based activities. The contribution of this industry to Indonesia's GDP reached 4.23% in 2023.

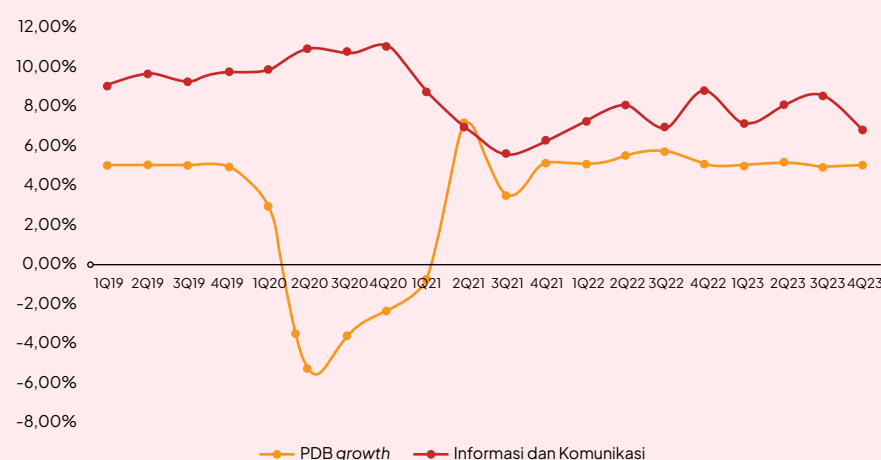
Peningkatan kepemilikan telepon seluler di Indonesia menunjukkan tren kenaikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 67,88% penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler di tahun 2022. Dibandingkan kepemilikan telepon seluler sebesar 39,11% di tahun 2011, selama dua belas tahun penduduk yang memiliki telepon seluler bertambah 28,77%. Selain itu, menurut BPS, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat. Penggunaan internet dalam rumah tangga mencapai 86,54% di tahun 2022 atau lebih tinggi dibandingkan sebesar 73,75% di tahun 2019.

The increase in mobile phone ownership in Indonesia shows an upward trend. The Central Statistics Agency (BPS) stated that 67.88% of the Indonesian population owned a mobile phone in 2022. Compared to mobile phone ownership of 39.11% in 2011, the number of people owning mobile phones increased by 28.77% over twelve years. Additionally, according to BPS, the use of Information and Communication Technology in Indonesia has shown rapid development. Household internet use reached 86.54% in 2022, higher than 73.75% in 2019.

Peningkatan penggunaan internet seiring dengan perkembangan digitalisasi yang pesat sejak pandemi. Dengan demikian, keberadaan industri pendukung penyedia infrastruktur telekomunikasi yakni pengelola menara telekomunikasi sangat dibutuhkan. Pasar menara telekomunikasi Indonesia telah mengalami konsolidasi dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggan dari perusahaan pengelola menara telekomunikasi meliputi operator telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkomsel, H3I, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren selain juga kepada pemerintah.

The increase in internet usage with rapid digitalization since the pandemic implies that the presence of the supporting industry for telecommunications infrastructure providers, namely telecommunications tower operators, is greatly needed. The Indonesian telecommunications tower market has experienced consolidation in recent years. Customers of telecommunications tower management companies include telecommunications operators in Indonesia such as Telkomsel, H3I, Indosat, XL Axiata, and Smartfren, as well as the government.

Pertumbuhan Industri Informasi dan Komunikasi
Information and Communications Industry Growth



Sumber: BPS, diolah | Source: BPS, processed

TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI Telecommunications Industry Review



STRATEGI USAHA Business Strategy

Perseroan menjalankan beberapa strategi yang mempertimbangkan target keuangan, skala operasional serta model bisnis Untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut.

Memaksimalkan Pertambahan Penyewaan Kolokasi pada Portofolio Menara Telekomunikasi yang Telah Ada

Perseroan berkeyakinan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan marjin melalui peningkatan rasio kolokasi pada portofolio *site* telekomunikasi Perseroan yang telah ada. Perseroan berharap pendapatan dan laba operasional dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi akan terus tumbuh dengan dukungan dari menara-menara telekomunikasi milik Perseroan yang berada di lokasi-lokasi strategis serta kapasitas yang tersedia untuk tambahan kolokasi dapat dilakukan dengan peningkatan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar biaya operasional menara telekomunikasi bersifat tetap sejak tahap konstruksi.

Peningkatan rasio kolokasi akan meningkatkan marjin operasional Perseroan secara signifikan karena rendahnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk menambahkan pelanggan baru pada menara telekomunikasi yang telah ada. Oleh karena itu, Perseroan akan tetap fokus pada aktivitas pemasaran dan manajemen proyek untuk meningkatkan rasio kolokasi dan pendapatan, serta peningkatan margin pada portofolio *site* yang telah ada.

Terus Mempererat Hubungan dengan Operator Telekomunikasi

Perseroan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan perluasan jaringan operator telekomunikasi di Indonesia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan komponen penting dalam usaha Perseroan dalam meningkatkan jumlah penyewaan pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan. Perseroan akan terus fokus menjalin hubungan dengan pelanggan menara Perseroan khususnya untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat meningkatkan jumlah penyewaan menara Perseroan dan pertambahan kolokasi serta mengidentifikasi proyek baru yang diminati, termasuk kesempatan untuk konstruksi *build-to-suit* ataupun akuisisi.

The Company implements several strategies that consider financial targets, operational scale, and business models to achieve the set targets as follows.

Maximizing Colocation Leasing Expansion on Existing Telecommunications Tower Portfolio

The Company is confident to be able to increase revenue and improve margins by improving the colocation ratio on its existing telecommunications site portfolio. The Company expects revenue and operating profit from the telecommunications tower leasing business to continue to grow, supported by the Company's telecommunications towers located in strategic locations and the capacity available for additional colocation can be implemented with relatively low-cost increases. Most of the operational costs of telecommunications towers are fixed from the construction stage.

Increased colocation ratio will significantly improve the Company's operational margins due to the low cost incurred by the Company to add new customers to the existing telecommunications towers. As such, the Company will remain focused on marketing activities and project management to increase the colocation ratio and revenue, as well as margin improvement on the existing site portfolio.

Continue to Strengthen Relationships with Telecom Operators

The Company understands the needs for network expansion of telecommunications operators in Indonesia and has the capability to meet those needs. This understanding is a critical component in the Company's efforts to increase the number of leases in its telecommunications site portfolio. The Company will continue to focus on building relationships with its tower customers, particularly to identify opportunities that can increase the number of the Company's tower leases and additional colocations, as well as identifying new projects of interest, including opportunities for build-to-suit constructions or acquisitions.

Tetap Fokus pada Kecepatan dalam Melakukan Eksekusi dan Terus Meningkatkan Kinerja Operasional

Kecepatan eksekusi (*speed-to-market*) dan kinerja jaringan yang handal merupakan indikator utama yang sangat penting bagi pelanggan. Kecepatan eksekusi diartikan sebagai periode waktu sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan dimulainya pemasangan peralatan telekomunikasi pelanggan pada *sites* menara. Kinerja operasional Perseroan merujuk pada kualitas dari layanan pemeliharaan berkala menara dan kecepatan dalam menanggapi keluhan pelanggan.

Focus on Speed of Execution and Continuous Improvement of Operational Performance

Speed-to-market and reliable network performance are critical key indicators for customers. Speed-to-market is defined as the period from the receipt of the work order to the commencement of the customer's telecommunications equipment installation at the tower sites. The Company's operational performance refers to the quality of regular tower maintenance services and the speed in responding to customer complaints.



ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspect

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang diterapkan Perseroan di tengah kompetisi yang semakin meningkat di industri penyewaan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- **Pengembangan Fokus Bisnis untuk memperkuat kompetensi inti dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi berkelanjutan**

Perseroan memformulasikan dan mengimplementasikan strategi pengembangan produk dan layanan yang berfokus pada perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi. Dalam menetapkan harga layanan, Perseroan senantiasa memperhatikan etika bisnis, kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, serta ketentuan yang dikeluarkan pihak regulator. Dengan demikian, Perseroan dapat meningkatkan kepercayaan baik dari pelanggan maupun calon pelanggan secara berkesinambungan, dan juga berkompetisi secara sehat.

- **Service Excellence dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan**

Perseroan meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkaya pengetahuan karyawan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan (*product knowledge*) didukung oleh simplikasi standar operasional perusahaan (SOP), serta dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui penajaman nilai inti Perseroan yang dibarengi dengan penerapan budaya Perseroan yang ditanamkan oleh Manajemen dalam upaya merealisasikan visi dan misi jangka panjang Perseroan.

Pangsa Pasar

Perseroan adalah salah satu penyedia infrastruktur yang dapat diandalkan di Indonesia saat ini dan senantiasa berusaha untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Persaingan di pasar yang semakin ketat, tentunya juga memerlukan kecepatan proses bisnis dan kebijakan yang lebih berfokus pada pasar (*market-driven policy*). Tidak hanya diversifikasi agar produk/layanan semakin lengkap, Perseroan juga perlu melakukan peningkatan secara terus menerus terhadap layanan Perseroan.

Marketing Strategy

Amidst increasing competition in the telecommunications tower leasing industry, the Company deployed the following marketing strategy:

- **Business Focus Development to strengthen core competencies and maintain profitable growth through continuous innovation**

The Company formulates and implements product and service development strategies focused on expanding the telecommunications infrastructure network. In setting service prices, the Company always considers business ethics, market conditions, customer needs, and regulations issued by regulatory agencies. Hence, the Company can continuously improve trust from both customers and potential customers, and maintain a healthy competitive position.

- **Service Excellence in order to enhance customer satisfaction**

The Company improves service quality and enriches employee knowledge of the products and services offered (*product knowledge*) supported by the simplification of the Company's operating standards (SOP), as well as by continuously improving human resource quality through the sharpening of the Company's core values accompanied by the implementation of the Company's culture instilled by Management in an effort to realize the Company's long-term vision and mission.

Market Share

The Company is one of the reliable infrastructure providers in Indonesia today and strives to continue providing the best service to customers. The increasingly tight market competition, of course, also requires faster business processes and more market-driven policies. Not only diversification to make products/services more comprehensive, but the Company also needs to continuously improve the Company's services.

PROSPEK USAHA

Business Prospect

Menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT di tahun 2024 diperkirakan oleh Pemerintah tumbuh menguat. Aktivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, terutama melalui konsumsi terkait penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, Pemerintah menyatakan stabilitas politik nasional diperkirakan dapat terus terjaga dan mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha untuk terus melanjutkan kegiatan ekonomi dan tren positif pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi faktor pendorong industri informasi dan komunikasi di tahun 2024. Secara kumulatif, Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh sebesar 5,2% di tahun mendatang.

Selanjutnya, peluang kenaikan permintaan infrastruktur telekomunikasi secara tidak langsung juga didorong oleh kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia yang diharapkan akan mendorong peningkatan transaksi perbelanjaan dalam rangka memenuhi konsumsi rumah tangga termasuk di dalamnya kebutuhan informasi dan komunikasi. Dengan demikian, keberadaan kelas menengah yang diperkirakan meningkat akan menopang pencapaian target pertumbuhan bisnis di tahun depan.

In light of simultaneous national elections (Pemilu) and regional head elections (Pilkada), the government anticipates that household consumption and Non-Profit Institutions Serving Households (LNPRT) performance will strengthen in 2024. The activities surrounding the elections are expected to have a significant impact on the national economy, particularly through election-related consumption. Furthermore, the government states that national political stability is expected to be maintained, fostering public and business optimism to continue economic activities and the positive trend of creating new jobs. Additionally, improvements in the public's welfare levels will also drive the information and communication industry in 2024. Cumulatively, the government targets an economic growth of 5.2% for the upcoming year.

Moreover, the potential increase in demand for telecommunications infrastructure is indirectly driven by the rising middle class in Indonesia, which is expected to boost transactional spending to meet household consumption, including information and communication needs. Hence, the anticipated growth of the middle class is expected to support the achievement of business growth targets in the coming year.



TINJAUAN OPERASIONAL SEGMENT USAHA

Operational Segment Review

Manajemen Perseroan sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antara segmen operasi dan dicatat sebesar nilai pasar.

Perseroan memiliki dua segmen yakni penyewaan menara dan jasa lainnya.

Kinerja masing-masing segmen usaha dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah sebagai berikut.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

	31–Des–2023			31–Des–2022			31–Des–2021		
	Sewa Menara Tower Lease	Jasa Lainnya Other Service	Total	Sewa Menara Tower Lease	Jasa Lainnya Other Service	Total	Sewa Menara Tower Lease	Jasa Lainnya Other Service	Total
Jumlah Pendapatan Total Revenues	1.892.085	-	1.892.085	1.888.257	-	1.888.257	1.918.397	157.568	2.075.965
Laba Usaha Operating Income	1.324.561	-	1.324.561	1.309.416	-	1.309.416	1.353.792	(78.572)	1.275.220
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Income Before Corporate Income Tax Expense	1.147.404	-	1.147.404	1.065.439	-	1.065.439	(219.367)	(168.483)	(387.850)
Laba Periode Berjalan Income For The Period	1.128.341	-	1.128.341	936.343	-	936.343	99.471	(168.546)	(69.075)
Jumlah Aset Segmen Total Segment Assets	9.885.582	-	9.885.582	9.601.515	-	9.601.515	10.704.807	930.293	11.635.100
Jumlah Liabilitas Segmen Total Segment Liabilities	4.173.933	-	4.173.933	5.020.440	-	5.020.440	7.798.070	626.486	8.424.556

Segmen usaha sewa menara masih merupakan sumber penghasilan utama Perseroan yang memberikan kontribusi sebesar 100%.

The Company's management, as operational decision-makers, monitors the results of business units separately for the purpose of making decisions on resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured in accordance with profit or loss in the consolidated financial statements. Revenue and expenses for each segment include transactions between operating segments and are recorded at market value.

The Company operates in two segments: tower leasing and other services.

The performance of each business segment over the last two years is as follows.

The tower leasing business segment remains the primary source of income for the Company, contributing 100% to the revenue.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review



Segmen usaha sewa menara masih merupakan sumber penghasilan utama Perseroan yang memberikan kontribusi sebesar 100%.

The tower leasing business segment remains the primary source of income for the Company, contributing 100% to the revenue.

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

Analisa dan Pembahasan Manajemen mengenai tinjauan keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan keuangan PT Solusi Tunas Pratama Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Firma anggota jaringan global Morison Global) sesuai dengan laporan Auditor Independen (KAP) No. 00126/2.0853/AU.1/06/0264-2/1/II/2024 tanggal 28 Maret 2024. KAP menyatakan laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Selanjutnya, tinjauan keuangan ini disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai berikut.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANSIAL POSITION

Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 2,96% *year-on-year* (yoy) menjadi Rp9,89 triliun di tahun 2023. Pertumbuhan aset ini terutama didukung oleh kenaikan jumlah aset lancar sebesar 29,98% yoy dari Rp727,96 miliar di tahun 2022 menjadi Rp946,20 miliar di tahun 2023. Sementara itu, dari sisi liabilitas, Perseroan membukukan penurunan liabilitas 16,86% yoy dari Rp5,02 triliun di tahun 2022 menjadi Rp4,17 triliun di tahun 2023. Berkurangnya liabilitas ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang sebesar 71,82% yoy menjadi Rp810,21 miliar di tahun 2023.

Ekspansi bisnis Perseroan yang berhasil meningkatkan kinerja profitabilitas di tahun 2023 mampu meningkatkan ekuitas Perseroan menjadi Rp5,71 triliun dengan pertumbuhan sebesar 24,68% yoy.

The Management Discussion and Analysis of this financial review refers to PT Solusi Tunas Pratama Tbk Financial Statements for the year ended on 31 December 2023 and 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara (a member firm of the global network Morison Global) in accordance with the Independent Auditor report No. 00126/2.0853/AU.1/06/0264-2/1/II/2024 dated March 28, 2024. The KAP states that the consolidated financial statements fairly present, in all material respects, the consolidated financial position of the Company as of December 31, 2023, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Furthermore, this financial review is prepared based on the audited financial statements as follows.

The Company successfully recorded an asset growth of 2.96% *year-on-year* (yoy) to Rp9.89 trillion in 2023. The asset growth was mainly supported by an increase in current assets by 29.98% yoy from Rp727.96 billion in 2022 to Rp946.20 billion in 2023. Meanwhile, on liabilities, the Company recorded a decrease in liabilities of 16.86% yoy from Rp5.02 trillion in 2022 to Rp4.17 trillion in 2023. The decrease in liabilities was mainly due to a reduction in non-current liabilities by 71.82% yoy to Rp810.21 billion in 2023.

The Company's successful business expansion, which improved profitability performance in 2023, was able to increase the Company's equity to Rp5.71 trillion, with a growth of 24.68% yoy.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023-2022)		Description
				Nominal	%	
Jumlah aset lancar	946.200	727.964	1.932.729	218.236	29,98%	Total current assets
Jumlah aset tidak lancar	8.939.382	8.873.551	9.702.371	65.831	0,74%	Total non-current assets
Jumlah aset	9.885.582	9.601.515	11.635.100	284.067	2,96%	Total assets
Jumlah liabilitas jangka pendek	3.363.726	2.145.801	2.700.564	1.217.925	56,76%	Total current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	810.207	2.874.639	5.723.992	(2.064.432)	(71,82%)	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	4.173.933	5.020.440	8.424.556	(846.507)	(16,86%)	Total liabilities
Jumlah ekuitas	5.711.649	4.581.075	3.210.544	1.130.574	24,68%	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	9.885.582	9.601.515	11.635.100	284.067	2,96%	Total liabilities and equity

Aset Lancar

Secara kumulatif, jumlah aset lancar Perseroan mencapai Rp946,20 miliar di tahun di tahun 2023. Pertumbuhan sebesar 29,98% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp727,96 miliar triliun ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan signifikan atas piutang usaha di tahun 2023. Ekspansi usaha Perseroan di tengah peningkatan kinerja industri informasi dan telekomunikasi di Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan piutang usaha sebesar 81,25% yoy menjadi Rp754,55 miliar di tahun 2023 dari Rp512,43 miliar di tahun sebelumnya. Porsi piutang usaha - neto terhadap jumlah aset lancar mencapai 79,75% di tahun 2023 dan 70,39% di tahun 2022.

Current Assets

Cumulatively, the Company's current assets reached Rp946.20 billion in 2023. This represents a growth of 29.98% yoy compared to the previous year's Rp727.96 billion. This growth was primarily influenced by a significant increase in trade receivables in 2023. The Company's business expansion amid the improving performance of the information and telecommunications industry in Indonesia was able to boost the growth of trade receivables by 81.25% yoy to Rp754.55 billion in 2023 from Rp512.43 billion in the previous year. The ratio of net trade receivables to total current assets reached 79.75% in 2023 and 70.39% in 2022.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023-2022)		Description
				Nominal	%	
Kas dan bank	5.253	2.361	593.415	2.892	122,49%	Cash on hand and in banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	8	-	-	-	-	Restricted cash in bank
Piutang usaha - neto	754.552	512.434	511.522	242.118	47,25%	Trade receivables - net
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	34.218	18.879	87.654	15.339	81,25%	Accrued income - net
Piutang lain-lain	2.614	754	420.452	1.860	246,68%	Other receivables
Persediaan - neto	5.732	8.371	48.402	(2.639)	(31,53%)	Inventories - net
Beban dibayar dimuka - jangka pendek	3.032	11.924	12.745	(8.892)	(74,57%)	Prepaid expenses - current
Pajak dibayar dimuka	131.822	152.940	228.385	(21.118)	(13,81%)	Prepaid taxes
Uang muka	8.969	20.301	30.154	(11.332)	(55,82%)	Advances
Jumlah aset lancar	946.200	727.964	1.932.729	218.236	29,98%	Total current assets

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

Aset Tidak Lancar

Perseroan membukukan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp8,94 triliun di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,74% yoy. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar 0,91% yoy dari Rp7,74 triliun di tahun 2022 menjadi Rp7,81 triliun di tahun 2023. Terdapat penambahan aset tetap yang mencapai Rp246,13 miliar di tahun 2023 dari Rp315,11 miliar di tahun sebelumnya. Dari jumlah penambahan aset tetap di tahun 2023 tersebut, penambahan terbesar adalah untuk aset dalam penyelesaian senilai Rp227,20 miliar.

Secara kumulatif, porsi aset tetap terhadap jumlah aset tidak lancar mencapai 84,57% di tahun 2023 dan 87,26% di tahun 2022.

Selain itu, aset hak guna – neto juga menunjukkan kenaikan sebesar 1,85% yoy dari Rp1,08 triliun di tahun 2022 menjadi Rp1,10 triliun di tahun 2023. Hal ini sejalan dengan penambahan aset hak guna sebesar Rp406,60 miliar di tahun 2023 dibandingkan sebesar Rp223,88 miliar di tahun sebelumnya.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023–2022)		Description
				Nominal	%	
Beban dibayar dimuka – jangka panjang	–	23.905	26.829	(23.905)	(100,00%)	Prepaid expenses – non current
Aset tetap – neto	7.814.095	7.743.300	8.204.844	70.795	0,91%	Fixed assets – net
Aset hak-guna – neto	1.098.887	1.078.908	1.378.624	19.979	1,85%	Right-of-use assets – net
Goodwill	17.257	17.257	89.029	–	0,00%	Goodwill
Aset tak berwujud – neto	8.382	9.430	1.190	(1.048)	(11,11%)	Intangible assets – net
Aset pajak tangguhan – neto	–	–	443	–	–	Deferred tax assets – net
Aset tidak lancar lainnya	761	751	1.412	10	1,33%	Other assets
Jumlah aset tidak lancar	8.939.382	8.873.551	9.702.371	65.831	0,74%	Total non–current assets

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 56,76% yoy menjadi Rp3,36 triliun dari senilai Rp2,15 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan utang bank menjadi Rp2,20 triliun dengan pertumbuhan sebesar 170,07% yoy. Kenaikan lainnya juga ditunjukkan oleh akun pendapatan ditangguhkan

Non–Current Assets

The Company recorded non-current assets of Rp8.94 trillion in 2023, with a growth of 0.74% yoy. This increase was mainly due to an increase in fixed assets by 0.91% yoy from Rp7.74 trillion in 2022 to Rp7.81 trillion in 2023. Increase of fixed assets was posted to reach Rp246.13 billion in 2023 from Rp315.11 billion in the previous year. Of the total increase in fixed assets in 2023, the largest increase was for construction in progress valued at Rp227.20 billion.

Cumulatively, the proportion of fixed assets to total non-current assets reached 84.57% in 2023 and 87.26% in 2022.

In addition, net right-of-use assets also increased by 1.85% yoy from Rp1.08 trillion in 2022 to Rp1.10 trillion in 2023. This is in line with the addition of right-of-use assets amounting to Rp406.60 billion in 2023 compared to Rp223.88 billion in the previous year.

Current Liabilities

The Company’s current liabilities increased by 56.76% yoy to Rp3.36 trillion from Rp2.15 trillion in the previous year. This increase was primarily driven by the growth in bank loans to Rp2.20 trillion, with a growth of 170.07% yoy. Another increase was indicated by the deferred income account, which recorded growth of 31.89% yoy to Rp766.87 billion from Rp581.43 billion.

yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 31,89% yoy menjadi Rp766,87 miliar dari sebesar Rp581,43 miliar. Selain itu, sejalan dengan ekspansi usaha di tahun 2023, Perseroan mencatatkan kenaikan utang usaha sebesar 103,09% yoy menjadi Rp70,36 miliar dari Rp34,65 miliar di tahun sebelumnya.

Sementara itu, utang panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan mencapai Rp142,84 miliar di tahun 2023, lebih rendah dibandingkan senilai Rp514,89 miliar di tahun sebelumnya.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023–2022)		Description
				Nominal	%	
Utang bank	2.202.580	815.558	1.350.000	1.387.022	170,07%	Bank loans
Utang usaha	70.364	34.646	34.136	35.718	103,09%	Trade payables
Utang lain-lain	35.545	18.947	20.657	16.598	87,60%	Other payables
Utang pajak	70.626	43.625	42.863	27.001	61,89%	Taxes payable
Beban akrual	48.622	117.549	142.247	(68.927)	(58,64%)	Accrued expenses
Pendapatan ditangguhkan	766.874	581.430	566.239	185.444	31,89%	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek, neto	18.678	19.154	7.296	(476)	(2,49%)	Short-term employee benefits liability, net
Utang derivatif	7.595	–	–	7.595	–	Derivative payable
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	142.842	514.892	537.126	(372.050)	(72,26%)	Current maturities of long-term debts
Jumlah liabilitas jangka pendek	3.363.726	2.145.801	2.700.564	1.217.925	56,76%	Total current liabilities

Liabilitas Jangka Panjang

Perseroan melaporkan liabilitas jangka panjang sebesar Rp810,21 miliar di tahun 2023. Penurunan sebesar 71,82% yoy dibandingkan tahun 2022 tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 88,83% yoy dari Rp2,23 triliun di tahun 2022 menjadi Rp249,05 triliun di tahun berikutnya.

Utang bank sebagai komponen utama utang jangka panjang Perseroan mengalami penurunan signifikan sebesar 87,96% yoy dari Rp2,06 triliun di tahun 2022 menjadi hanya Rp248,10 miliar di tahun 2023. Per 31 Desember 2023, Perseroan membukukan utang bank jangka panjang dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp405,80 miliar.

Additionally, in line with the business expansion in 2023, the Company recorded an increase in trade payables by 103.09% yoy to Rp70.36 billion from Rp34.65 billion in the previous year.

Meanwhile, the Company’s long-term debt maturing within one year reached Rp142.84 billion in 2023, lower than the Rp514.89 billion in the previous year.

Non–Current Liabilities

The Company reported non-current liabilities of Rp810.21 billion in 2023. This represents a decrease of 71.82% yoy compared to 2022, mainly due to a reduction in long-term debt – after deducting the portion due within one year by 88.83% yoy from Rp2.23 trillion in 2022 to Rp249.05 billion in the following year.

Bank loans, as a major component of the Company’s long-term debt, posted a significant decrease of 87.96% yoy from Rp2.06 trillion in 2022 to Rp248.10 billion in 2023. As of December 31, 2023, the Company recorded long-term bank debt from Bank CIMB Niaga amounting to Rp405.80 billion.



TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023-2022)		Description
				Nominal	%	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	249.045	2.228.691	5.102.111	(1.979.646)	(88,83%)	Long-term debts - net of current maturities
Provisi jangka panjang	24.407	22.796	20.907	1.611	7,07%	Long-term provision
Liabilitas pajak tangguhan - neto	515.403	597.782	562.501	(82.379)	(13,78%)	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang, neto	21.352	25.370	38.473	(4.018)	(15,84%)	Long-term employee benefits liability, net
Jumlah liabilitas jangka panjang	810.207	2.874.639	5.723.99	(2.064.432)	(71,82%)	Total non-current liabilities

Ekuitas

Perseroan berhasil membukukan peningkatan ekuitas sebesar 24,68% yoy dari Rp4,58 triliun di tahun 2022 menjadi Rp5,71 triliun di tahun 2023. Penguatan ekuitas ini didukung oleh saldo laba yang lebih tinggi senilai Rp680,05 miliar di tahun 2023 dibandingkan defisit laba yang dibukukan oleh Perseroan di tahun sebelumnya sebesar Rp448,29 miliar. Kenaikan saldo laba ini didorong oleh peningkatan profitabilitas Perseroan di tahun 2023 sejalan dengan ekspansi bisnis yang dilakukan di sepanjang tahun tersebut.

Equity

The Company successfully recorded an increase in equity of 24.68% yoy from Rp4.58 trillion in 2022 to Rp5.71 trillion in 2023. The strengthening of equity was supported by a higher retained earnings balance of Rp680.05 billion in 2023 compared to a deficit in earnings booked by the Company in the previous year of Rp448.29 billion. The increase in retained earnings was driven by an improvement in the Company's profitability in 2023 in line with the business expansion carried out throughout that year.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023-2022)		Description
				Nominal	%	
Modal saham - modal dasar	113.758	113.758	113.758	-	0,00%	Share capital - authorised capital
Tambahan modal disetor	4.900.723	4.900.723	4.050.261	-	0,00%	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	17.117	14.884	16.283	2.233	15,00%	Other comprehensive income
Saldo laba (rugi)	680.048	(448.288)	(1.386.566)	1.128.336	(251,70%)	Retained earnings (deficit)
Kepentingan non-pengendali	3	(2)	416.808	5	(250,00%)	Non-controlling interest
Jumlah ekuitas	5.711.649	4.581.075	3.210.544	1.130.574	24,68%	Total equity

Penjelasan lebih lengkap terkait kinerja profitabilitas Perseroan dijelaskan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian berikut ini.

Please refer to the following Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for a more detailed explanation of the Company's profitability performance.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Ekspansi bisnis Perseroan yang dikelola dengan baik mampu menghasilkan kinerja profitabilitas yang lebih baik di tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Pendapatan

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,89 triliun di tahun 2023 atau tumbuh 0,20% yoy dibandingkan senilai Rp1,89 triliun di tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut seluruhnya berasal dari pendapatan sewa menara telekomunikasi. Pelanggan Perseroan terdiversifikasi dengan baik yang terdiri dari beberapa perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Kontribusi pendapatan yang berasal dari pelanggan seperti XL Axiata, Indosat, Telkomsel, dan Smart Telecom masing-masing mencapai 36%; 35%; 18%; dan 10% per 31 Desember 2023.

The Company's well-managed business expansion was able to yield better profitability performance in 2023. This can be seen from several indicators as follows:

Revenues

The Company recorded revenue of Rp1.89 trillion in 2023, grew 0.20% yoy compared to Rp1.89 trillion in the previous year. The revenue entirely derived from the lease income of telecommunication towers. The Company's customers are well-diversified, consisting of several leading telecommunications companies in Indonesia. The contribution to revenue from customers such as XL Axiata, Indosat, Telkomsel, and Smart Telecom each reached 36%; 35%; 18%; and 10% as of December 31, 2023.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023-2022)		Description
				Nominal	%	
Pendapatan	1.892.085	1.888.257	2.075.965	3.828	0,20%	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(465.236)	(443.201)	(598.897)	(22.035)	4,97%	Cost of Revenues
Laba Bruto	1.426.849	1.445.056	1.477.068	(18.207)	(1,26%)	Gross Income
Beban penjualan dan pemasaran	(3.934)	(6.621)	(9.024)	2.687	(40,58%)	Sales and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(98.354)	(129.019)	(192.824)	30.665	(23,77%)	General and administrative expenses
Laba Usaha	1.324.561	1.309.416	1.275.220	15.145	1,16%	Operating income
Pendapatan Keuangan	269	1.662	3.878	(1.393)	(83,81%)	Financial Income
Biaya Keuangan, Neto	(208.095)	(238.132)	(734.608)	30.037	(12,61%)	Finance Costs
Kerugian netto dari lindung nilai arus kas	-	-	(478.505)	-	-	Net loss on cash flows hedge
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	30.669	(7.507)	(453.835)	38.176	(508,54%)	Other income (expenses) - net
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	1.147.404	1.065.439	(387.850)	81.965	7,69%	Profit Before Final Tax and Income Tax
Beban Pajak Final dan pajak Penghasilan	(19.063)	(129.096)	318.775	110.033	(85,23%)	Final Tax and Income Tax
Laba Tahun Berjalan	1.128.341	936.343	(69.075)	191.998	20,51%	Income for the Year
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	2.233	536	589.646	1.697	316,60%	Total Other Comprehensive Income (Loss)

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023–2022)		Description
				Nominal	%	
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.130.574	936.879	520.571	193.695	20,67%	Total Comprehensive Income for The Year
Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.130.569	936.343	(69.075)	194.226	20,74%	Income for The Year Attributable to Owners of the Parent Entity
Laba Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali	5	-	-	-	-	Income for The Year Attributable to Non-Controlling interests
Total Penghasilan Komprehensif Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.130.574	936.879	520.571	193.695	20,67%	Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity
Total Penghasilan Komprehensif Yang Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	Total Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling interests
Laba Per Saham Dasar dan Dilusian	992	823	(61)	169	20,53%	Basic and Diluted Earnings Per Share

Beban Pokok Pendapatan
Beban pokok pendapatan yang berasal dari penyusutan aset hak guna dan penyusutan aset tetap masing-masing mencapai Rp228,51 miliar dan Rp178,64 miliar di tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 6,16% yoy dan 11,11% yoy. Porsi beban penyusutan aset hak guna dan penyusutan aset terhadap beban pokok pendapatan adalah sebesar 49,12% dan 38,40% di tahun 2023.

Selain itu, beban pokok pendapatan lainnya berupa pemeliharaan dan perbaikan serta jasa keamanan dan lain juga meningkat menjadi Rp56,90 miliar di tahun 2023 dari senilai Rp55,80 miliar di tahun sebelumnya.

Laba Bruto
Kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan berdampak pada penurunan laba bruto sebesar 1,26% yoy menjadi Rp1,43 triliun di tahun 2023 dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,45 triliun.

Beban Operasional
Perseroan mampu membukukan efisiensi operasional di sepanjang tahun 2023 dengan beban penjualan

Cost of Revenues
The cost of revenue resulting from depreciation of right-of-use assets and depreciation of fixed assets was Rp228.51 billion and Rp178.64 billion in 2023, respectively, with an increase of 6.16% yoy and 11.11% yoy, respectively. The portion of depreciation of right-of-use assets and depreciation of fixed assets to cost of revenue was 49.12% and 38.40% in 2023.

Moreover, other cost of revenue also increased from Rp55.80 billion in the previous year to Rp56.90 billion in 2023 in the form of repair and maintenance as well as security services and others.

Gross Income
The increase in cost of revenue, which was higher than revenue growth, resulted in an 1.26% yoy decrease in gross profit to Rp1.43 billion in 2023 from Rp1.45 trillion in the previous year.

Operational Expenses
The Company was able to achieve operational efficiency throughout 2023. Sales and marketing

dan pemasaran mampu diturunkan menjadi Rp3,93 miliar atau turun 40,58% yoy dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,62 miliar. Selain itu, beban umum dan administrasi dilaporkan juga mengalami penurunan sebesar 23,77% yoy menjadi Rp98.35 miliar di tahun 2023 dari senilai Rp129,02 miliar di tahun sebelumnya.

Laba Usaha
Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp1,32 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,31 triliun, pencapaian ini tumbuh 1,16% yoy didukung oleh efisiensi operasional Perseroan.

Laba Sebelum Pajak Final dan Penghasilan
Setelah biaya keuangan neto dikurangi pendapatan keuangan, dan pendapatan lain-lain neto di tahun 2023 senilai Rp177,16 miliar, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan Perseroan mencapai Rp1,15 triliun. Capaian ini lebih tinggi 7,69% yoy dibandingkan sebesar Rp1,07 triliun di tahun 2022.

Laba Tahun Berjalan
Setelah dikurangi beban pajak final dan pajak penghasilan senilai Rp19,06 miliar, laba tahun berjalan Perseroan mencapai Rp1,13 triliun. Capaian ini tumbuh 20,51% yoy dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp936,34 miliar.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Perolehan rugi komprehensif lain yang secara kumulatif mencapai Rp2,23 miliar di tahun 2023 berdampak pada kenaikan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan menjadi Rp1,13 triliun dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp936,88 miliar.

Laba Per Saham Dasar dan Dilusian
Sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yang dibukukan di tahun 2023, laba per saham dasar dan dilusian meningkat menjadi Rp992 per saham.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Perseroan membukukan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi senilai Rp1,64 triliun di tahun 2023 dari senilai Rp1,61 triliun di tahun sebelumnya. Pencapaian

expenses were reduced to Rp3.93 billion or down 40.58% yoy from Rp6.62 billion in the previous year. Apart from this, the general and administrative expenses were also reported to have been decreased by 23.77% yoy to Rp98.35 billion in 2023 from Rp129.02 billion in the previous year.

Operating income
The Company posted an operating income of Rp1.32 trillion. Compared to the previous year's Rp1.31 trillion, this figure grew 1.16% yoy supported by the Company's operational efficiency.

Profit Before Final Tax and Income Tax
After deducting net financial costs from financial income and net other income of Rp177.16 billion in 2023, the income before final tax and income tax reached Rp1.15 trillion. This figure was 7.69% higher yoy compared to Rp1.07 trillion in 2022.

Income for the Year
After deducting final tax and income tax expense of Rp19.06 billion, the Company's income for the year reached Rp1.13 trillion. This figure grew 20.51% yoy compared to the previous year's figure of Rp936.34 miliar.

Total Comprehensive Income for The Year
The acquisition of other comprehensive loss, which cumulatively reached Rp2.23 billion in 2023, resulted in the total comprehensive income for the current year increased to Rp1.13 trillion compared to the previous year's figure of Rp936.88 billion.

Basic and Diluted Earnings Per Share
In line with the Company's increased revenue in 2023, basic and diluted earnings per share were maintained at the level of Rp992 per share.

Cash Flows from Operating Activities
The Company recorded net cash from operating activities of Rp1.64 trillion in 2023, up from Rp1.61 trillion in the previous year. This figure was mainly driven

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

ini terutama didorong oleh penerimaan kas dari pelanggan senilai Rp2,03 triliun di tahun 2023. Selain itu, Perseroan mampu membukukan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan lebih rendah masing-masing senilai Rp101,80 miliar dan Rp65,16 miliar di tahun 2023 dibandingkan sebesar Rp276,69 miliar dan Rp71,63 miliar di tahun sebelumnya.

by cash receipts from customers of Rp2.03 trillion in 2023. In addition, the Company was able to record lower cash payments to suppliers and employees of Rp101.80 billion and Rp65.16 billion, respectively, in 2023 compared to Rp276.69 billion and Rp71.63 billion in the previous year.

Penerimaan utang bank dalam jumlah yang lebih besar tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang oleh Perseroan masing-masing senilai Rp4,70 triliun dan Rp3,64 triliun.

The receipt of bank loans in larger amounts was influenced by the Company's payment of short-term and long-term bank loans of Rp4.70 trillion and Rp3.64 trillion, respectively.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2022	Perubahan Growth (2023–2022)		Description
				Nominal	%	
Kas Neto Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.639.238	1.608.359	1.567.305	30.879	1,92%	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
Arus Kas Neto (Digunakan Untuk) Yang Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(245.353)	1.032.637	65.365	(1.277.990)	(123,7%)	Net Cash Flows (Used in) Provided by Investing Activities
Arus Kas Neto Yang (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.390.992)	(3.234.328)	(1.275.647)	1.843.336	(56,99)	Net Cash Flows Used in Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank	2.893	(593.332)	357.023	596.225	(100,4%)	Net Increase (Decrease) in Cash on Hand and in Banks
Pengaruh Perubahan Kurs Terhadap Kas dan Bank	(1)	2.278	(784)	(2.279)	(100,0%)	Effects of Changes in Foreign Exchange Rate on Cash on Bank and in Banks
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.361	593.415	237.176	(591.054)	(99,60%)	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	5.253	2.361	593.415	2.892	122,49%	Cash and Cash Equivalents at The End of Year

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perseroan melaporkan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi senilai Rp245,35 miliar di tahun 2023. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perolehan aset tetap senilai Rp246,13 miliar di tahun tersebut. Sebaliknya, di tahun sebelumnya, Perseroan membukukan kas neto diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp1,03 triliun sehubungan dengan penjualan penyertaan saham pada entitas anak – neto yang mencapai Rp1,43 triliun.

Cash Flows from Investing Activities

The company reported net cash used in investing activities of Rp245.35 billion in 2023. This was mainly influenced by the acquisition of fixed assets worth Rp246.13 billion in that year. In contrast, in the previous year, the Company posted net cash provided by investing activities of Rp1.03 trillion in connection with the proceeds from sale of investments in shares – net, which amounted to Rp1.43 trillion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan menjadi Rp1,39 triliun di tahun 2023 dibandingkan sebesar Rp3,23 triliun di tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama didukung oleh penerimaan utang bank jangka pendek yang mencapai Rp6,10 triliun di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar Rp1,70 triliun. Perseroan juga masih membukukan penerimaan utang jangka panjang senilai Rp1,48 triliun di tahun 2023.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash used in financing activities dropped to Rp1.39 trillion in 2023 compared to Rp3.23 trillion in the previous year. This decline was mainly supported by the receipts of short-term bank loans of Rp6.10 trillion in 2023 compared to only Rp1.70 trillion in the previous year. The Company also still recorded the receipt of long-term loans worth Rp1.48 trillion in 2023.

Kas dan Bank pada Akhir Tahun

Didukung oleh ketersediaan kas dan bank awal tahun senilai Rp2,36 miliar, Perseroan membukukan kas dan bank pada akhir tahun 2023 sebesar Rp5,25 miliar.

Cash on Hand and in Banks at End of Year

Supported by the availability of cash on hand and in banks at the beginning of the year worth Rp2.36 billion, the Company recorded cash on hand and in banks at the end of 2023 in the amount of Rp5.25 billion.

RASIO KEUANGAN UTAMA
KEY FINANCIAL RATIOS

Kinerja keuangan Perseroan di tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

The following financial metrics are used to measure the Company's financial performance in 2023 compared to the prior year:

Uraian	2023	2022	2021	Description
Marjin EBITDA	92,1%	90,7%	85,3%	EBITDA Margin
Marjin Laba Usaha	70,0%	69,3%	61,4%	Operating Income Margin
Marjin Laba Tahun Berjalan	59,6%	49,6%	(3,3%)	Income for the Year Margin
Rasio Laba terhadap Total Ekuitas	19,8%	20,4%	(2,2%)	Return on Equity
Rasio Laba terhadap Total Aset	11,4%	9,8%	(0,6%)	Return on Assets
Rasio Lancar (X)	0,3	0,3	0,7	Current Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap Ekuitas (X)	0,5	0,7	1,6	Net Debt to Equity Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap Aset (X)	0,3	0,4	0,4	Net Debt to Asset Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA* (X)	1,4	2,0	3,0	Net Debt to LQA EBITDA* Ratio (X)

*) EBITDA Kuartal terakhir yang disetahunkan | Annualized latest quarter EBITDA

LIKUIDITAS
LIQUIDITY

Rasio lancar dipergunakan untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek Perseroan. Rasio lancar Perseroan sebesar 0,3x di tahun 2023, sama dengan capaian di tahun sebelumnya. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kegiatan usaha Perseroan sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi berupa menara telekomunikasi yang sangat membutuhkan belanja modal yang *high capital intensive*. Dalam hal ini, dibutuhkan utang untuk pembangunan menara dan usaha lainnya.

The current ratio is used to measure the Company's ability to pay off its short-term obligations. The Company's current ratio was 0,3x in 2023, the same as achieved in the previous year. This achievement is influenced by the Company's business activities as a provider of telecommunications infrastructure in the form of telecommunications towers, which require high capital-intensive expenditures. In this case, debt is needed for the construction of towers and other ventures.



TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga likuiditas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini juga diperkuat dengan kinerja profitabilitas Perseroan yang solid didukung oleh kinerja industri informasi dan komunikasi yang berhasil tumbuh di atas pertumbuhan PDB Indonesia.

As such, the Company is committed to prioritizing the principle of caution in maintaining liquidity, both short-term and long-term. This is also strengthened by the Company's solid profitability performance, supported by the successful growth of the information and communication industry above the growth of Indonesia's GDP.

SOLVABILITAS SOLVENCY

Kemampuan membayar seluruh kewajiban Perseroan diukur dengan rasio keuangan, yaitu rasio utang Neto terhadap Ekuitas, Rasio Utang Neto terhadap Aset, dan Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA. Ketiga rasio tersebut mencapai 0,5x; 0,3x; dan 1,4x di tahun 2023 yang menunjukkan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajibannya. Secara konsolidasi, Perseroan memiliki sumber pendanaan yang berasal dari utang bank.

The Company's ability to pay off all its obligations is measured with financial ratios, namely the Net Debt to Equity Ratio, Net Debt to Assets Ratio, and Net Debt to LQA EBITDA Ratio. All three ratios reached 0.5x; 0.3x; and 1.4x in 2023, indicating an adequate ability to meet its obligations. On a consolidated basis, the Company has funding sources derived from bank loans.

KOLEKTABILITAS PIUTANG RECEIVABLES COLLECTABILITY

Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh Perseroan dalam menagih piutangnya. Rasio yang digunakan untuk mengukur kolektibilitas piutang Perseroan adalah periode penagihan (hari). Perseroan mampu membukukan 152 hari penagihan piutang di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya 103 hari.

The Company's receivables collectability is influenced by the Company's ability to collect receivables. The ratio used to measure the Company's receivables collectability is the collection period (days). The Company was able to collect receivables for 152 days in 2023 compared to 103 days in the prior year.

Uraian	2023	2022	2021	Description
Periode Penagihan (hari)	152	103	90	Collection Period (day)

Umur piutang usaha Perseroan dan upaya dalam pengelolaan piutang usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The following are the terms of the Company's trade receivables and efforts to manage trade receivables.

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023-2022)		Description
				Nominal	%	
Belum lewat jatuh tempo	745.577	508.696	498.852	236.881	46,57%	Not past due
Lewat jatuh tempo:						Past due:
1 - 30 hari	8.979	141	8.513	8.838	6268,09%	1 - 30 days
31 - 60 hari	-	-	1.374	-	-	31 - 60 days

Uraian	2023	2022	2021	Perubahan Growth (2023-2022)		Description
				Nominal	%	
61 - 90 hari	9	-	2.007	-	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	2.174	5.720	6.024	(3.546)	(61,99%)	Over 90 days
Sub Jumlah	756.739	514.557	516.770	242.182	47,07%	Subtotal
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(2.187)	(2.123)	(5.248)	(64)	3,01%	Allowance for expected credit loss
Jumlah piutang usaha - bersih	754.552	512.434	511.522	242.118	47,25%	Total receivables - net

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Kebijakan Manajemen Struktur Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan dan entitas anaknya adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Capital Structure Management Policy

The primary objective of the capital management of the Company and its subsidiaries is to ensure they maintain of a robust capital ratio to support the business and maximize returns for shareholders.

Perseroan dan entitas anaknya mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

The Company and its subsidiaries manage their capital structure and make adjustments based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries can adjust dividend payments to shareholders or issue new shares.

Selain itu, Perseroan diprasyaratkan oleh Undang-Undang Perusahaan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Grup pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Furthermore, the Company is required by the Limited Liability Company Law effective August 16, 2007, to contribute up to 20% of its issued and fully paid-up share capital into a reserve fund that cannot be distributed. This external capital requirement is considered by the Group at the General Meeting of Shareholders.

Kebijakan Perseroan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The Company's policy is to maintain a robust capital structure to secure access to funding at reasonable costs.

Struktur Permodalan

Struktur modal Perseroan terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas. Utang berbasis bunga berasal dari total utang bank dan utang obligasi sebagai berikut:

Capital Structure

The Company's capital structure consists of interest-bearing debt and equity. The interest-bearing debt originates from the total bank loans and bond payables as follows:



TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

(Dalam Rp miliar) | (In Rp billion)

Uraian	2023		2022		2021		Description
	Nominal	Porsi Portion (%)	Nominal	Porsi Portion (%)	Nominal	Porsi Portion (%)	
Total Pinjaman	2.608,4	31,4	5.020,4	52,3	8.424,6	72,4	Total Loans
Jangka Pendek	2.608,4	31,4	2.145,8	22,3	2.700,6	23,2	Current
Jangka Panjang	-	-	2.874,6	29,9	5.724,0	49,2	Non-Current
Ekuitas	5.711,6	68,6	4.580,5	47,7	3.210,5	27,6	Equity
Total Modal yang Diinvestasikan	8.320,0	100,0	9.601,5	100,0	11.635,1	100,0	Total Invested Capita

Secara kumulatif struktur modal Perseroan terdiri dari pinjaman dengan porsi 31,4% dibandingkan ekuitas sebesar 68,6% di tahun 2023. Di tahun sebelumnya, porsi kedua komponen modal itu adalah 52,3% dan 47,7%.

Cumulatively, the Company's capital structure consists of loans with a share of 31.4% compared to equity of 68.6% in 2023. In the previous year, the ratio of the two capital components was 52.3% and 47.7%.

IKATAN MATERIAL UNTUK BELANJA MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURES

Per 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait tujuan dari ikatan tersebut; sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; mata uang yang menjadi denominasi; dan langkah yang direncanakan Perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

As of December 31, 2023, the Company does not have any material commitments for capital expenditure investments. As such, the Company does not present information related to the purpose of these commitments; the expected source of funds to fulfill these commitments; the currency denomination; and the planned steps by the Company to mitigate the risk from the related foreign currency positions.

REALISASI BELANJA MODAL

ACTUAL CAPITAL EXPENDITURES

Perseroan membukukan belanja modal senilai Rp2,86 triliun di sepanjang tahun 2023 yang bertujuan untuk mendukung ekspansi bisnis dalam penyewaan menara telekomunikasi. Informasi lebih lengkap terkait belanja modal yang direalisasikan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Company realized capital expenditure of Rp2.86 trillion in 2023, which is aimed at supporting business expansion in telecommunication tower lease. More detailed information regarding the capital expenditure realized in 2023 is as follows

(Dalam Rp Juta) | (In Rp Million)

Uraian	2023	2022	2021	Description
Menara dan sarana penunjang	11.544	36.939	244.259	Towers and supporting equipment
Bangunan	-	350		Buildings
Menara bergerak	4.279			Transportable tower

Uraian	2023	2022	2021	Description
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	-	-	19.110	Networks, fiber optic and infrastructures
Peralatan dan perabotan kantor	1.659	1.882	5.720	Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	1.500	1.159		Motor vehicle
Antena indoor	180	211	128	Indoor antenna
Aset dalam penyelesaian	267.301	280.972	200.115	Construction in progress
Total	286.463	321.513	469.332	Total

INFORMASI DAN/ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

SUBSEQUENT EVENTS

Fasilitas Kredit dari PT Bank QNB Indonesia Tbk ("QNB")

Pada tanggal 26 Maret 2024, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan PT Iforte Energi Nusantara ("IEN") dengan QNB telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit No. 019/PK-1114/III/2024, dimana QNB menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp 500.000 yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan IEN selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar ongkos pendanaan QNB ditambah margin tertentu. Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan IEN bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini.

Credit Facility from PT Bank QNB Indonesia Tbk ("QNB")

On March 26, 2024, the Company, Protelindo, Iforte, BIT and PT Iforte Energi Nusantara ("IEN") with QNB has signed the Credit Facility Agreement No. 019/PK-1114/III/2024, whereby QNB agreed to provide revolving loan facility amounted to Rp 500,000 which can be used by the Company, Protelindo, Iforte, BIT and IEN for the period of 12 (twelve) months. The loan facility is bears annual interest rate of specific margin over QNB's cost of fund. The Company, Protelindo, Iforte, BIT and IEN are jointly and severally liable for settlement of those loan facilities.

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDENDS AND DIVIDEND POLICY

Kebijakan Dividen

Perseroan dalam membagikan dividen kepada pemegang saham senantiasa mempertimbangkan beragam faktor diantaranya kondisi keuangan, profitabilitas dan biaya operasional serta rencana investasi Perseroan, dengan tunduk pada keputusan RUPS Tahunan Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividend Policy

In distributing dividends to shareholders, the Company considers various factors including financial conditions, profitability, operational costs, and the Company's investment plans, subject to the decisions of the Company's Annual GMS and relevant laws and regulations.

Melalui persetujuan Dewan Komisaris, Direksi dapat memutuskan untuk membagi dividen interim tunai sebagai bagian dari total dividen final yang akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan keadaan keuangan Perseroan.

With the approval of the Board of Commissioners, the Board of Directors may decide to distribute interim cash dividends as part of the total final dividend to be approved at the next Annual General Meeting of Shareholders. This policy is taken considering the financial circumstances of the Company.

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review

Pembayaran Dividen

Perseroan tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2022 dan tahun buku 2021.

Dividend Payment

The Company did not distribute dividends for the fiscal year 2022 and the fiscal year 2021.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
REALIZATION OF THE USE OF THE PROCEEDS OF THE PUBLIC OFFERING

Perseroan tidak melakukan penawaran umum saham dan obligasi serta tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana pada tahun buku 2023. Oleh karena itu, Perseroan tidak mengungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum di tahun tersebut.

The Company is not conducting a public offering of shares and bonds and is not obliged to submit a report on the use of proceeds in fiscal year 2023. Therefore, the Company does not disclose the realization of the use of proceeds from the public offering in that year.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Perseroan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

The Company has not entered into any material transactions involving a conflict of interest for the period ended December 31, 2023.

Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Perseroan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”, yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian.

Transactions with related parties

The Company applies PSAK 7 (Revised 2010), “Related Party Disclosure”, which requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the consolidated financial statements.

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

In the normal course of business, the Company entered into transactions with related parties in view of their common ownership and management. All transactions with related parties are conducted based on policies and terms agreed upon by both parties.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

- a. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia adalah entitas induk Perusahaan.
- b. PT Bank Central Asia Tbk adalah entitas di bawah pengendalian yang sama.
- c. PT Komet Infra Nusantara adalah entitas di bawah pengendalian yang sama.

Nature of relationship with related parties

- a. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia is the Company’s parent entity.
- b. PT Bank Central Asia Tbk is an entity under common control.
- c. PT Komet Infra Nusantara is an entity under common control.

- d. PT Iforte Solusi Infotek adalah entitas di bawah pengendalian yang sama.
- e. Manajemen kunci meliputi Direksi Grup.

- d. PT Iforte Solusi Infotek is an entity under common control.
- e. Key management includes the members of the Company’s Board of Directors

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan No. 34 atas laporan keuangan konsolidasian auditan per 31 Desember 2023.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in note No. 34 of the audited consolidated financial statements as of December 31, 2023.

TRANSAKSI TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI
TRANSACTION RELATED TO INVESTMENTS, EXPANSION, DIVESTMENTS, MERGERS, ACQUISITION, AND RESTRUCTURING

Perseroan melaporkan tidak terdapat informasi terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi di sepanjang tahun 2023.

The Company reported that there was no information regarding investments, expansions, divestments, business mergers, acquisitions and restructurings throughout 2023.

TARGET & REALISASI TAHUN 2023 SERTA PROYEKSI 2024
2023 TARGETS AND ACHIEVEMENTS AND 2024 PROJECTION

Berpedoman kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, Perseroan telah menetapkan target tahun 2023. Adapun realisasi RKAP tahun 2023 beserta proyeksi tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini:

The Company has set targets for 2023 guided by the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP). The implementation of the 2023 RKAP as well as the projections for 2024 are explained in the following table:

Indikator Keuangan Financial Indicators	Target 2023/ 2023 Targets (RpTriliun/ RpTrillion)	Realisasi 2023/ 2023 Actual (RpTriliun/ RpTrillion)	Proyeksi 2024/ 2024 Projection (RpTriliun/ RpTrillion)
Pendapatan Revenue	1,9	1,9	1,8
EBITDA EBITDA	1,7	1,7	1,7

PERUBAHAN PERATURAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN
SIGNIFICANT REGULATORY CHANGES AFFECTING THE COMPANY

Tidak terdapat perubahan peraturan pemerintah dan otoritas pasar modal yang berpengaruh signifikan terhadap bisnis Perseroan pada tahun 2023.

There were no changes in government regulations and capital market authorities that significantly affected the Company’s business in 2023.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI CHANGES TO THE ACCOUNTING STANDARDS

Perubahan kebijakan akuntansi

Perseroan dan entitas anaknya menerapkan seluruh standar yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini tidak memiliki dampak material pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya:

Amandemen PSAK 1, “Penyajian laporan keuangan” tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi ‘signifikan’ entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi ‘material’ entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian item apa pun dalam laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Changes in accounting policies

The Company and its subsidiaries adopted all revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that do not have any material impact to the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries:

Amendment of PSAK 1, “Presentation of financial statement” regarding disclosure of accounting policies.

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgments to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their ‘significant’ accounting policies with a requirement to disclose their ‘material’ accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments had an impact on the Company’s and its subsidiaries’ disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Company’s and its subsidiaries’ financial statements.

Amendment of PSAK No. 16, “Fixed Assets” regarding proceeds before intended use.

The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap” tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan. (lanjutan)

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

Amandemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” tentang definisi estimasi akuntansi.

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak.

Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Changes in accounting policies (continued)

Amendment of PSAK No. 16, “Fixed Assets” regarding proceeds before intended use. (continued)

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

Amendment of PSAK No. 25, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors” regarding the definition of accounting estimates.

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the the Company and its subsidiaries’ consolidated financial statements.

Amendment of PSAK 46 “Income Taxes” –Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Company and its subsidiaries’ consolidated financial statements.

Changes in accounting policies (continued)



TINJAUAN KEUANGAN Financial Review

AmandemenPSAK 46: PajakPenghasilan – Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua.

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

Amandemen tersebut tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya karena tidak memiliki penghasilan dari yurisdiksi luar negeri.

Amendment of PSAK 46: Income Taxes – International Tax Reform – Pillar Two Model Rules.

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and
- Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

The amendments had no impact on the Company and its subsidiaries's consolidated financial statements as the Company and its subsidiaries do not have income from foreign jurisdictions.

SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources



Dalam pengelolaan sumber daya manusia, STP menggunakan kerangka kerja pengelolaan SDM secara *end to end* yang selaras dengan strategi organisasi dan secara bersamaan memberikan *added value* sehingga dapat meningkatkan *employee experience*.

In managing human resources, STP utilizes an end-to-end HR management framework that aligns with the organization's strategy and simultaneously provides added value, thereby enhancing the employee experience.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

KERANGKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mewujudkan visi STP menjadi perusahaan yang memberikan nilai dan membuat perbedaan, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan produktif. Dalam pengelolaan SDM, STP menggunakan kerangka kerja pengelolaan SDM secara *end to end* yang selaras dengan strategi organisasi. Kerangka kerja pengelolaan SDM ini digunakan untuk memberikan gambaran pengelolaan SDM dan secara bersamaan memberikan *added value* pada setiap proses pengelolaan SDM yang dilalui oleh pegawai sehingga dapat meningkatkan pengalaman pegawai (*employee experience*).

STP memahami bahwa pegawai adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Oleh karena itu, pengelolaan pegawai perlu dikelola dengan sistem yang terstruktur dan selaras dengan strategi organisasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan eksternal, berorientasi jangka panjang dan memperhatikan *best practice* di industri sejenis.

PELAKSANAAN STRATEGI PENGELOLAAN SDM

REKRUTMEN

Salah satu prioritas dalam pengelolaan SDM di STP adalah untuk memastikan ketersediaan pegawai pada fungsi-fungsi yang mendukung tercapainya strategi Perseroan. Untuk mewujudkan hal tersebut, STP melakukan rekrutmen melalui beberapa program, di antaranya *Campus Hiring*, Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan talenta sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan saat ini serta memastikan ketersediaan talenta untuk menjadi *leaders* di masa yang akan datang.

Pemenuhan pegawai STP dilakukan dengan melalui beberapa *sourcing* di antaranya adalah:

1. LinkedIn
2. Jobstreet
3. Career Page

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FRAMEWORK

To realize STP's vision of becoming a company that provides value and makes a difference, competent and productive human resources (HR) are needed. In HR management, STP applies an end-to-end HR management framework that is aligned with the organization's strategy. This HR management framework is used to provide an overview of HR management and simultaneously adds value to every HR management process experienced by employees, thereby enhancing the employee experience.

STP understands that employees are an integral part of the organization in realizing its vision and mission. As such, employee management needs to be managed with a structured system that is aligned with the organization's strategy, while still paying attention to external regulations, being long-term oriented, and considering best practices in similar industries.

IMPLEMENTATION OF HR MANAGEMENT STRATEGY

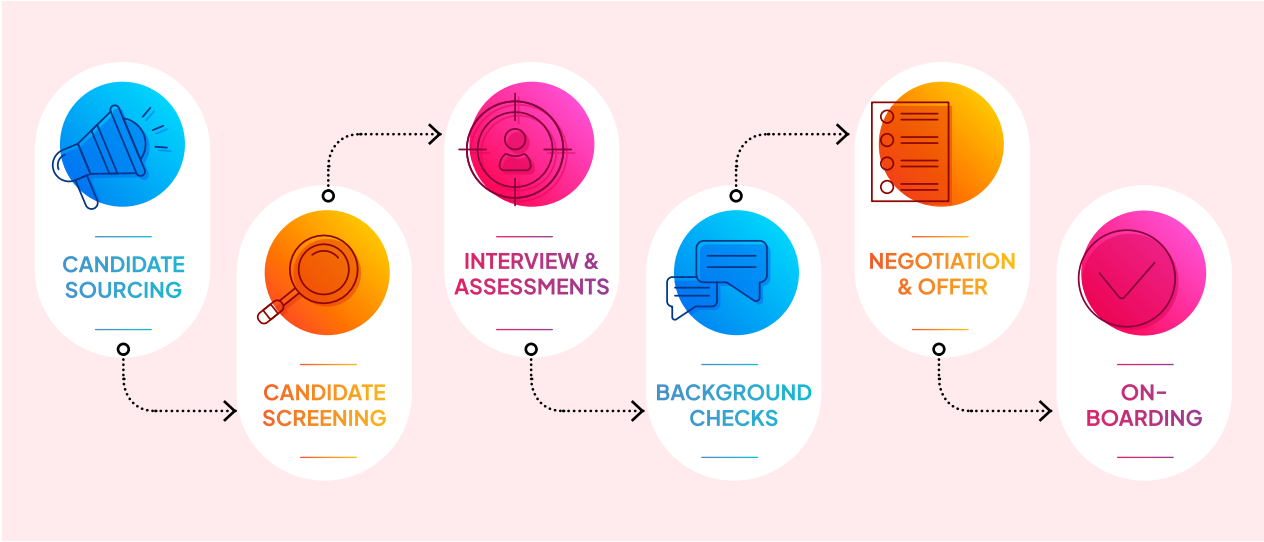
RECRUITMENT

One of the priorities in human resource management at STP is to ensure the availability of employees in functions that support the achievement of the Company's strategy. To realize this, STP conducts recruitment through several programs, among them *Campus Hiring*. The implementation of these programs aims to ensure the availability of talent according to the current business needs of the Company and to ensure the availability of talent to become future leaders.

STP's employee fulfillment is carried out through several sourcing channels, including:

1. LinkedIn
2. Jobstreet
3. Career Page

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources



Berikut informasi perekrutan di tahun 2023.

The following is recruitment information in 2023.

Tabel Rekrutmen Pegawai

Kepegawaian Employment	2023				2022				2021			
	Karyawan Masuk Recruited Employees				Karyawan Masuk Recruited Employees				Karyawan Masuk Recruited Employees			
	Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Karyawan Berdasarkan Usia Employees by Age												
<20 tahun <20 years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20–30 tahun 20–30 years	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	6	5
31–40 tahun 31–40 years	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	7	5
41–50 tahun 41–50 years	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1
>50 tahun >50 years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	0	0	1	0	0	0	10	8	1	0	17	11
Tingkat Perekrutan Karyawan (%) Employee Recruitment Rate (%)	0%	0%	100%	0%	0%	0%	55,6%	44,4%	3,5%	0%	58,6%	37,9%
Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional Employees by Operational Area												
Kantor Pusat – Kudus Head Office – Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	11



SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Kepegawaian Employment	2023				2022				2021			
	Karyawan Masuk Recruited Employees				Karyawan Masuk Recruited Employees				Karyawan Masuk Recruited Employees			
	Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Kantor Cabang – Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Offices – Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Office	0	0	1	0	0	0	10	8	0	0	1	0
Jumlah Total	0	0	1	0	0	0	10	8	1	0	17	11
Tingkat Perekrutan Karyawan (%) Employee Recruitment Rate (%)	0%	0%	100%	0%	0%	0%	55,6%	44,4%	3,5%	0%	58,6%	37,9%

Sementara untuk karyawan keluar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The following describes information on resigned employees:

Kepegawaian Employment	2023				2022				2021			
	Karyawan Keluar Resigned Employees				Karyawan Keluar Resigned Employees				Karyawan Keluar Resigned Employees			
	Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Karyawan Berdasarkan Usia Employees by Age												
<20 tahun <20 years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20–30 tahun 20–30 years	1	0	1	2	1	0	2	1	3	7	29	5
31–40 tahun 31–40 years	2	2	1	1	15	4	5	1	20	7	24	7
41–50 tahun 41–50 years	2	1	0	0	6	0	3	0	21	4	5	1
>50 tahun >50 years	3	0	2	0	3	2	2	0	3	0	1	0
Jumlah Total	8	3	4	3	25	6	12	2	47	18	59	13
Tingkat Karyawan Keluar (%) Employee Resignation Rate (%)	44.4%	16.7%	22.2%	16.7%	55.6%	13.3%	26.7%	4.4%	34.3%	13.1%	43.1%	9.5%
Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional Employees by Operational Area												
Kantor Pusat – Kudus Head Office – Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	45	17	56	12

Kepegawaian Employment	2023				2022				2021			
	Karyawan Keluar Resigned Employees				Karyawan Keluar Resigned Employees				Karyawan Keluar Resigned Employees			
	Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Kantor Cabang – Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Office – Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Office	8	3	4	3	25	6	12	2	2	1	3	1
Jumlah Total	8	3	4	3	25	6	12	2	47	18	59	13
Tingkat Karyawan Keluar (%) Employee Resignation Rate (%)	44,4%	16,7%	22,2%	16,7%	55,6%	13,3%	26,7%	4,4%	34,3%	13,1%	43,1%	9,5%

Turn Over Karyawan
Employee Turnover

Uraian Description	2023			2022			2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total
Jumlah Karyawan Masuk Total New Recruited Employees	1	0	1	10	8	18	18	11	29
Karyawan Keluar Resigned Employees									
Atas Permintaan Sendiri Own Request	4	1	5	19	6	25	12	7	19
Diberhentikan Karena Melakukan Pelanggaran Dismissed for Misconduct	2	2	4	6	0	6	69	17	86
Pensiun Pension	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Habis Kontrak Contract Expiration	5	3	8	12	2	14	25	7	32
Lain-lain Others	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	12	6	18	37	8	45	106	31	137
Tingkat Turn Over Karyawan (%) Employee Turnover Rate (%)	2,4	0,6	3,0	7,7	2,4	10,2	3,4	2,0	5,4

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Dari tabel di atas, jumlah karyawan yang baru direkrut pada tahun 2023 adalah sebanyak 1 (satu) orang yang semuanya merupakan laki-laki. Sedangkan jumlah karyawan keluar adalah 18 orang yang didominasi oleh alasan atas permintaan sendiri. Dengan demikian, tingkat *turnover* karyawan di tahun 2023 rata-rata sebesar 3%, lebih rendah 7.2% dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata sebesar 10.2%.

Keanekaragaman Karyawan

Dalam menjalankan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), STP berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman. Berikut adalah tabel keberagaman yang dapat disajikan:

Proporsi Proportional	2023	2022	2021
A. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Board of Commissioners and Board of Directors			
Berdasarkan Usia By Age			
<20 tahun <20 years	0	0	0
20–30 tahun 20–30 years	0	0	0
31–40 tahun 31–40 years	0	0	0
41–50 tahun 41–50 years	1	1	3
>50 tahun >50 years	6	6	5
Berdasarkan Gender By Gender			
Laki-laki Male	6	6	6
Perempuan Female	1	1	2
B. Karyawan Employees			
Berdasarkan Usia By Age			
<20 tahun <20 years	0	0	0
20–30 tahun 20–30 years	25	40	59
31–40 tahun 31–40 years	84	130	177
41–50 tahun 41–50 years	69	67	94
>50 tahun >50 years	12	9	22
Berdasarkan Gender By Gender			
Laki-laki Male	126	157	252
Perempuan Female	64	89	100

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk mendukung visi perusahaan, STP telah menyediakan berbagai macam program pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan perusahaan.

From the table above, the number of employees newly recruited in 2023 was 1 (one), all of whom are male. Meanwhile, the number of employees who left is 18, predominantly due to voluntary resignation. Thus, the employee turnover rate in 2023 averaged 3%, which is 7.2% lower than the previous year's average of 10.2%.

Employee Diversity

In managing Human Resources (HR), STP strives to create an inclusive work environment that supports diversity. Below is a diversity table that can be presented:

COMPETENCY DEVELOPMENT

To support the Company's vision, STP has provided various training and development programs tailored to the needs of employees and the company. The competency development of STP employees is

Pengembangan kompetensi pegawai STP dilakukan melalui *HR Learning & Development* memaksimalkan penggunaan LMS (*MyLearning*) untuk dapat mendukung pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dan dapat mencakup lebih banyak orang. Melalui LMS (*MyLearning*), banyak automasi yang juga dapat dilakukan untuk mendukung operasional *learning and development* yang lebih efektif dan efisien. Topik-topik pelatihan yang menjadi fokus LMS meliputi *Basic Managerial Skill*, serta pelatihan lainnya yang relevan, yang dapat mendukung kegiatan operasional Perseroan serta meningkatkan kompetensi SDM-nya.

Pada tahun 2023, pelatihan yang telah dilakukan STP antara lain:

1. *Leader as Coach*
2. *Problem Solving Through Design Thinking*
3. *Impactful Report Writing*

Secara total, jumlah pelatihan yang diselenggarakan baik secara *online* maupun *offline* oleh *inhouse* maupun eksternal ada sebanyak 46 pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 146 peserta. Pelatihan ini disesuaikan dengan level jabatan karyawan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, antara lain:

carried out through HR Learning & Development, maximizing the use of the LMS (*MyLearning*) to support learning that can be done anywhere and anytime, and can include more people. Through LMS (*MyLearning*), many automations can also be performed to support more effective and efficient learning and development operations. Training topics focused on by the LMS include Basic Managerial Skill, as well as other relevant trainings that can support the Company's operational activities and enhance its HR competencies.

In 2023, the trainings conducted by STP include:

1. *Leader as Coach*
2. *Problem Solving Through Design Thinking*
3. *Impactful Report Writing*

In total, there were 46 trainings organized both online and offline by in-house and external providers, with a total of 146 participants. These trainings are tailored to the employee's job level, as seen in the table below, among others:

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 untuk level Non Manager
2023 Competency Development for Non-Manager level

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
<i>Collaborative Excellence Elevating Self to Thrive in Teamwork Batch 1</i>	3	<i>Team Work</i>	Untuk meningkatkan kemampuan kolaboratif dan mengevaluasi diri untuk bekerjasama dalam tim To improve collaborative skills and self-evaluation to work in teams
<i>Communication Inside Out</i>	1	<i>Interpersonal/ Communication Skill</i>	Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal To improve interpersonal communication skills
<i>Critical Thinking: A Vital Auditing Competency</i>	2	<i>Functional</i>	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang berpikir kritis dalam kompetensi <i>auditing</i> To improve technical skills about critical thinking in auditing competence
<i>Managing Tasks, Priorities, & Deadlines</i>	6	<i>Planning</i>	Untuk meningkatkan kemampuan mengelola tugas, prioritas dan <i>deadlines</i> To improve the ability to manage tasks, priorities and deadlines



SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources

SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Problem Solving Through Design Thinking	13	Problem Solving & Decision Making	Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui <i>design thinking batch 1</i> To improve problem-solving skills through design thinking batch 1
Speak Confidently	1	Interpersonal/ Communication Skill	Untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan percaya diri To improve the ability to speak confidently
Simple Path to Productivity	6	Professionalism	Untuk meningkatkan kemampuan jalur sederhana menuju produktivitas To improve the capabilities of a simple path to productivity
AWS Cloud Practitioner Essentials Day	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang AWS cloud To increase technical knowledge of the AWS cloud
Fast Track Workshop Fortigate	5	Functional/Technical	Untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang Fortigate To improve technical knowledge about Fortigate
Fast Track Workshop Fortiproxy	3	Functional/Technical	Untuk meningkatkan pengetahuan teknis tentang Fortiproxy To improve technical knowledge of Fortiproxy
Impactful Report Writing	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang penulisan laporan To improve technical skills about report writing

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 untuk level Manager
2023 Competency Development for Manager level

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Basic Managerial Skill	3	Leadership	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang kemampuan manajerial To improve technical skills about managerial skills
Harrison Assessments (HATS)	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang Harrison assesment To improve technical capabilities about Harrison assessment
Agile Auditing	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang audit yang efektif To improve technical capabilities on effective auditing
Building Sustainable Quality	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang membangun kualitas secara berkelanjutan To improve technical capabilities about building quality on an ongoing basis

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Professional Development Program (PDP): Pragmatic Approaches in Assessing Risks for Real Sector Companies	1	Functional/Technical	Untuk meningkatkan kemampuan teknis tentang pendekatan pragmatis dalam penilaian risiko pada perusahaan besar To improve technical capabilities on pragmatic approaches in risk assessment in large companies
PDCA Mastery: The Continous Improvement Workshop	3	Planning	Untuk meningkatkan kemampuan penguasaan PDCA dan peningkatan berkelanjutan To improve PDCA mastery ability and continuous improvement
Strategic Decision Making	6	Decision Making	Untuk meningkatkan kemampuan strategi pengambilan keputusan To improve the ability of decision-making strategies
Winning Spirit	1	Stress Management & Pressure Tolerance	Untuk meningkatkan pengetahuan tentang semangat kemenangan To increase knowledge of the spirit of victory

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 untuk level General Manager
2023 Competency Development for General Manager level

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Leader as Coach Batch 1	1	Leadership & People Development	Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan sebagai coach To improve leadership skills as a coach

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 untuk level Chief/VP
2023 Competency Development for Chief/VP level

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Leader as Coach Batch 2	1	Leadership & People Development	Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan sebagai coach To improve leadership skills as a coach

Pelatihan untuk Purnabakti

STP juga menyediakan program pelatihan untuk karyawan yang akan memasuki masa purnabakti. Program ini bertujuan untuk membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalani masa purnabakti dengan lebih sejahtera dan produktif, termasuk membantu karyawan dalam mengelola perubahan psikologis yang sering terjadi menjelang pensiun, menjalani hidup sehat di berbagai aspek, serta pelatihan dan strategi berwirausaha.

Training for Retirement

STP also provides training programs for employees who are about to enter retirement. This program aims to equip employees with the skills and knowledge needed to live a more prosperous and productive retirement life, including helping employees manage the psychological changes that often occur as retirement approaches, leading a healthy life in various aspects, as well as entrepreneurship training and strategies.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Di tahun 2023, program pelatihan purna bakti yang telah diselenggarakan STP adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Memasuki Masa Pensiun
2. *Mindest Mental Switching*
3. Mengelola Keharmonisan Rumah Tangga
4. Strategi Menjaga Kesehatan Jasmani dan Rohani
5. Strategi meulai Wirausaha dan melakukan Marketing dan Branding
6. Startegi Pengelolaan Keuangan
7. Strategi Pembuatan *Business Plan*
8. Kunjungan Tempat Usaha
9. Workshop *Personal Business Coaching & Mentoring*

Biaya Pengembangan Kompetensi
Setiap tahun Perseroan menyediakan anggaran yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan. Tahun 2023, Perseroan mengeluarkan biaya program pelatihan dan pengembangan sebesar Rp180,98 juta. Biaya realisasi pengembangan ini meningkat 1.188% dari tahun 2022 yang sebesar Rp14,05 juta. Peningkatan realisasi biaya pelatihan tersebut karena meningkatnya jumlah pelatihan yang dilakukan Perseroan dan juga merupakan salah satu bentuk komitmen STP dalam meningkatkan pengembangan kompetensi karyawan.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Costs

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Biaya Pelatihan Training Costs	Rp-Juta Rp-Million	180,98	14,05	N/A*

*data belum dapat dicatat Perseroan | The data cannot yet be recorded by the Company.

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

STP secara berkala mengevaluasi kinerja karyawan setiap tahunnya untuk mengukur kinerja selama tahun berjalan. Penilaian kinerja karyawan Perseroan dilakukan oleh masing-masing atasan dan difasilitasi oleh unit kerja SDM. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan mengacu kepada 3 (tiga) prinsip utama yaitu:

The following are retirement training programs organized by STP in 2023:

1. Introduction to Entering Retirement
2. Mindset Mental Switching
3. Managing Household Harmony
4. Strategies for Maintaining Physical and Spiritual Health
5. Strategies for Starting Entrepreneurship and Conducting Marketing and Branding
6. Financial Management Strategies
7. Business Plan Creation Strategies
8. Business Site Visits
9. Workshop on Personal Business Coaching & Mentoring

Competency Development Costs
Every year, the Company allocates a budget determined based on needs while still considering the Company's financial capability. In 2023, the Company spent Rp180.98 million on training and development programs. This realization cost increased by 1,188% from 2022, which was Rp14.05 million. The increase in training cost realization was due to the increased number of trainings conducted by the Company and is also a form of STP's commitment to enhancing employee competency development.

EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION

STP regularly evaluates employee performance each year to measure performance during the current year. The Company's employee performance evaluation is conducted by each supervisor and facilitated by the HR department. The implementation of employee performance evaluation refers to three main principles:

1. Setiap Karyawan Memiliki Target
Setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan Perseroan.
2. Target Karyawan Harus Terukur
Karyawan dituntut untuk mencapai target sesuai dengan jangka waktu tertentu, berdasarkan hasil diskusi dengan atasan dan telah disahkan oleh Kepala Unit Kerja, yang kemudian dirumuskan dalam suatu format terukur.
3. Evaluasi Kinerja Karyawan Berkala
Peningjauan dan penilaian atas pencapaian target senantiasa dilakukan secara formal setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Namun demikian, peninjauan pencapaian target juga dilakukan secara informal oleh masing-masing atasan melalui dialog/diskusi yang berkesinambungan agar karyawan dapat selalu menjadi yang terdepan sesuai dengan dinamika lingkungan bisnis.

Pengembangan Karir yang diterapkan SMN Group bertujuan untuk mempersiapkan, mengembangkan dan mempertahankan pegawai agar dapat menampilkan kinerja terbaiknya, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Saat ini Perusahaan memiliki program pengembangan karir berjenjang atau program promosi bagi pegawai dari pejabat tingkat pertama sampai dengan pejabat eksekutif yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan jabatan yang kosong. Dasar dalam Pengembangan Karir terdiri dari dua aspek yaitu kompetensi yang diukur melalui proses asesmen dan kinerja pegawai. Pengukuran kompetensi dilakukan secara berkala guna memperbaharui kemampuan terbaru dari masing-masing pegawai pada seluruh jenjang jabatan.

Pengembangan karir berlaku untuk semua karyawan, baik secara vertikal maupun horisontal, tanpa terkecuali. Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk meniti karir berdasarkan kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk setiap level jabatan. Penilaian sistematis untuk

1. Every Employee Has a Target
Every employee has tasks and responsibilities according to the targets that have been set based on the Company's goals.
2. Employee Targets Must Be Measurable
Employees are required to achieve targets within a certain timeframe, based on discussions with supervisors and approved by the Head of the Unit, which are then formulated in a measurable format.
3. Regular Employee Performance Evaluation
Review and evaluation of target achievement are formally conducted at least once a year. However, informal reviews of target achievement are also conducted by each supervisor through continuous dialogue/discussion to ensure employees can always be at the forefront according to business environment dynamics.

The Career Development applied by SMN Group aims to prepare, develop, and retain employees, ensuring that they can perform at their best, both now and in the future. Currently, the Company has a career development program or a promotion program for employees from entry-level officials to executive officials to fulfill the needs of vacant positions. The basis of Career Development consists of two aspects: competence measured through assessment processes and employee performance. Competence measurement is carried out regularly to update the latest capabilities of each employee at all levels of positions.

Career development applies to all employees, both vertically and horizontally, without exception. Every employee has the same opportunity to pursue a career based on competency according to the requirements specified for each job level. Systematic assessments to identify quality talent within the

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

mengidentifikasi talenta berkualitas dalam jajaran karyawan Perseroan tetap dilakukan dalam 3 (tiga) hal utama yang meliputi:

1. Penilaian administratif dari sisi penilaian kinerja, pendidikan, dan usia;
2. Penilaian potensi kinerja melalui serangkaian evaluasi kompetensi berdasarkan kepada standar yang berlaku dalam industri Perseroan; dan
3. Penilaian manajemen untuk mendapatkan assessment dari pihak pengambil keputusan strategis di lingkungan Perseroan.

Setiap karyawan yang memenuhi kriteria penilaian di atas akan ditempatkan dalam berbagai kategori berdasarkan nilai potensi dan kompetensi mereka masing-masing. Unit kerja SDM akan melakukan proses kategorisasi dan mempertimbangkan kesesuaian profil jabatan dengan kebutuhan unit kerja terhadap posisi tertentu.

Program karir dibuka sesuai proyeksi kebutuhan atas suatu kekosongan jabatan dengan penetapan formasi yang telah diterbitkan oleh unit yang bertanggung jawab terkait Struktur Organisasi dan Jaringan. Pada tahun 2023, terdapat 12 orang Pegawai yang telah menjalankan program pengembangan karir.

Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar pengembangan karyawan, termasuk pelatihan karyawan, promosi jabatan dan bahkan pembinaan karyawan. Perusahaan telah menerapkan sistem penilaian kinerja dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai penilaian yang objektif.

Pada tahun 2023, Manajemen STP telah melakukan penilaian terhadap 191 karyawan, dibandingkan penilaian tahun 2022 sebanyak 148 karyawan. Sebagai tindak lanjut penilaian tersebut, sampai dengan 31 Desember tahun 2023 terjadi promosi jabatan sebanyak 12 orang. Berikut tabel penilaian karyawan Perusahaan.

Company's employee ranks continue to focus on three main aspects:

1. Administrative assessment from the perspective of performance evaluation, education, and age;
2. Potential performance assessment through a series of competency evaluations based on standards applicable in the Company's industry; and
3. Management assessment to obtain an assessment from strategic decision-makers within the Company.

Every employee who meets the above evaluation criteria will be placed in various categories based on their potential and competencies. The HR department will conduct the categorization process and consider the suitability of the job profile with the needs of the unit for a specific position.

Career programs are opened according to the projected needs for a vacancy with the formation set by the unit responsible for Organizational Structure and Network. In 2023, there were 12 employees who have undertaken the career development program.

The results of performance evaluations are used as a basis for employee development, including employee training, job promotions, and even employee coaching. The Company has implemented a performance evaluation system using *Key Performance Indicators* (KPIs) as an objective assessment.

In 2023, STP Management has conducted evaluations for 191 employees, compared to 148 employees in 2022. As a follow-up to these evaluations, as of December 31, 2023, there were 12 job promotions. Below is the Company's employee evaluation table.

Tabel Penilaian Karyawan

Level Pegawai Employee Level	2023						2022						2021					
	Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development			Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development			Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development		
	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/ Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/ Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/ Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion
Manager	24	11	35	2	N/A	N/A	12	8	20	1	N/A	N/A	12	8	20	0	N/A	N/A
Asisten Manager	10	3	13	2	N/A	N/A	7	2	9	0	N/A	N/A	12	3	15	0	N/A	N/A
Supervisor	32	9	41	5	N/A	N/A	38	10	48	2	N/A	N/A	38	12	50	3	N/A	N/A
Staff	40	39	79	3	N/A	N/A	25	29	54	0	N/A	N/A	33	32	65	1	N/A	N/A
Non-Staff	23	0	23	0	N/A	N/A	17	0	17	0	N/A	N/A	1	0	1	0	N/A	N/A

REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI

Kebijakan sistem remunerasi STP didasarkan pada kinerja agar pengelolaan karyawan tetap profesional. Sistem remunerasi berbasis kinerja memberikan kompensasi dan *benefit* yang didasarkan pada pencapaian kinerja individu dan kinerja Perseroan. Dengan demikian, Perseroan dapat membuka peluang menarik talenta- talenta terbaik dan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja.

Kesesuaian remunerasi senantiasa dipantau dan dipertahankan dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan karyawan untuk mempertahankan tingkat retensi karyawan secara optimal dan juga kondisi Perseroan untuk memastikan keberlanjutan usaha.

Selain itu, STP juga menyediakan paket tunjangan dan kesejahteraan yang kompetitif kepada seluruh karyawannya. Paket tunjangan termasuk asuransi kesehatan, asuransi melahirkan, asuransi gigi, asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan perorangan.

Sistem remunerasi karyawan diterapkan secara kompetitif sesuai dengan tingkat upah minimum yang berlaku di area operasional, sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Guna memastikan lebih lanjut tidak adanya diskriminasi di dalam Grup, terutama diskriminasi terhadap *gender*, Grup memberlakukan *gender pay gap* nol persen antara remunerasi bagi pekerja laki-laki

REMUNERATION AND EMPLOYEE
WELFARE

STP's remuneration system policy is based on performance to ensure professional employee management. A performance-based remuneration system provides compensation and benefits based on the achievement of individual performance and the Company's performance. Hence, the Company can attract the best talents and enhance its competitiveness in the labour market.

The suitability of remuneration is constantly monitored and maintained, taking into account the evolving needs of employees to optimally retain employees and also the condition of the Company to ensure business sustainability.

Moreover, STP also offers a competitive package of benefits and welfare to all its employees. The benefits package includes health insurance, maternity insurance, dental insurance, life insurance, and personal accident insurance.

The employee remuneration system is competitively applied according to the minimum wage levels prevailing in the operational areas, as regulated by applicable legal provisions. To further ensure the absence of discrimination within the Group, especially *gender* discrimination, the Group enforces a zero percent *gender pay gap* between remuneration for male and female workers. This

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

dan perempuan. Artinya, Grup menerapkan kondisi dimana karyawan laki-laki dan perempuan menerima pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama atau memiliki nilai yang sama (*equal pay for equal work*) agar tercapainya kesetaraan upah berdasarkan *gender*. Grup juga senantiasa melakukan audit gaji secara berkala dan *benchmarking* untuk memastikan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan masih dapat bersaing dengan pelaku usaha sejenis di Indonesia, termasuk juga memastikan nilai kesetaraan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan.

Sedangkan tunjangan dan kesejahteraan karyawan yang disediakan Perseroan adalah tunjangan kesehatan jasmani dan rohani karyawan melalui berbagai fasilitas, salah satunya adalah melalui BPJS Kesehatan, sesuai dengan regulasi pemerintah. Selain itu Perseroan juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa penggantian biaya kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS sesuai tingkat jabatan karyawan, dengan sistem plafon manfaat, seperti rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi, pembuatan kacamata, dan perawatan kelahiran.

PROGRAM PENSIUN

Kebijakan pensiun STP didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan salah satu implementasinya adalah kepatuhan terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Perseroan juga mengikutkan seluruh karyawan ke dalam program pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) karyawan yang telah menjalankan program pensiun. Program pensiun yang diberikan oleh STP antara lain: Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek. Karena bersifat *mandatory* maka seluruh karyawan wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban karyawan dari Gaji Pokok.

means the Group implements conditions where male and female employees receive equal pay for equal work or work of equal value to achieve gender wage equality. The Group also conducts regular salary audits and benchmarking to ensure that wages offered to employees remain competitive with similar businesses in Indonesia, including ensuring wage equality between male and female employees.

Meanwhile, the benefits and welfare provided by the Company for employees include physical and mental health benefits through various facilities, one of which is through BPJS Healthcare, in accordance with government regulations. Additionally, the Company provides health facilities in the form of reimbursement for healthcare costs not covered by BPJS according to the employee's job level, with a ceiling benefit system, such as hospitalization, outpatient care, dental care, glasses purchase, and maternity care.

RETIREMENT PROGRAM

STP's retirement policy is based on the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Employment and one of its implementations is compliance with the National Social Security System (SJSN) through BPJS Employment. In addition, the Company also enrolls all its employees in the retirement program from BPJS Employment.

In 2023, there was 1 (one) employee who undertook the retirement program. The retirement programs provided by STP include: Pension Guarantee from the Social Security Administration Agency (BP) Jamsostek. As it is mandatory, all employees must be registered in all BP Jamsostek programs starting from Old Age Guarantee (JHT), Death Benefit (JKM), Work Accident Guarantee (JKK), and Pension Guarantee (JP). The contribution rate for the Pension Guarantee (JP) program is calculated at 3%, consisting of 2% company burden and 1% employee burden from the Basic Salary.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

STP menyelenggarakan pengukuran survei keterikatan dengan tujuan untuk menyempurnakan implementasi strategi maupun kebijakan serta sebagai sarana pegawai menyampaikan aspirasinya. Pengukuran survei keterikatan karyawan dilakukan melalui *employee engagement* yang memiliki manfaat untuk kedua belah pihak, dari karyawan maupun Perseroan.

Bagi Pegawai

1. Sebagai wadah aspirasi karyawan terhadap Perseroan. Karyawan dapat memberikan kritik kepada Perseroan melalui pengisian *Employee Engagement*. Informasi tersebut selanjutnya akan menjadi *input* bagi Perseroan dalam membuat kebijakan.
2. Menciptakan semangat baru bagi karyawan untuk berangkat ke kantor. Karyawan akan selalu berpikir positif dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan ide-ide untuk perkembangan tim serta Perseroan.
3. Menciptakan hubungan kuat dengan setiap karyawan. Hubungan ini juga akan membuat karyawan untuk fokus kepada pencapaian yang ingin dituju, membangun kerja sama tim yang solid, serta tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian antar divisi.
4. Menghilangkan pemikiran jenuh dan negatif dari setiap masalah yang dihadapi oleh karyawan dalam kehidupannya. Pendekatan ini dapat membuat karyawan menjadi semangat kembali ketika melakukan pekerjaan di Perseroan.

Bagi Perseroan

1. Perseroan lebih memahami kebutuhan dalam peningkatan kompetensi karyawan sehingga tingkat keterikatan antara karyawan dan Perseroan semakin meningkat.
2. Perseroan akan memiliki karyawan dengan sikap dan perilaku yang positif. Dengan perilaku positif, tentu akan mengarah kepada pertumbuhan Perseroan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Karyawan akan menjadi loyal kepada Perseroan karena adanya *Employee Engagement* di tempat mereka bekerja. Mereka juga dengan bangga akan menceritakan dan bahkan menyarankan orang yang ditemuinya untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh Perseroan.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

STP conducts engagement surveys with the goal of refining the implementation of strategies and policies, as well as a means for employees to express their aspirations. The measurement of employee engagement surveys is carried out through employee engagement, which benefits both parties, from employees and the Company.

For Employees

1. Acts as a forum for employees to express their aspirations towards the Company. Employees can provide criticism to the Company through the Employee Engagement survey. This information will then become input for the Company in making policies.
2. Creates a new enthusiasm for employees to go to the office. Employees will always think positively in performing their jobs and provide ideas for the development of the team and Company.
3. Creates a strong relationship with each of its employees. This relationship will also make employees focus on the achievements they aim for, build solid team cooperation, and not forget to say thank you and appreciation for achievements across divisions.
4. Eliminates the feeling of saturation and negative thoughts from every problem faced by employees in their lives. This approach can make employees become enthusiastic again when doing their job in the Company.

For the Company

1. The Company understands more about the needs in improving employee competence, hence increasing the level of engagement between employees and the Company.
2. The Company will have employees with positive attitudes and behaviours. With positive behaviour, it will certainly lead to better Company growth than in previous years.
3. Employees will become loyal to the Company because of the Employee Engagement at their workplace. They will proudly talk about and even recommend to people they meet to use the products or services owned by the Company.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

4. *Employee Engagement* menciptakan komitmen lebih dari karyawan kepada Perseroan. Jumlah absen karena karyawan yang sakit menjadi berkurang, meredam angka untuk tingkat kecelakaan dalam proses pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas sepanjang tahun.

BUDAYA KERJA

Budaya kerja STP diharapkan mampu menginspirasi karyawan untuk senantiasa memberikan yang terbaik saat bekerja. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menginternalisasi budaya kerja secara berkala sehingga setiap karyawan dapat menaati dan mengikuti budaya kerja Perseroan yang berbasis kinerja, kreativitas, dan inovasi secara berkesinambungan.

Di tahun 2023, sosialisasi budaya kerja Perseroan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu diseminasi informasi melalui email ke seluruh karyawan, serta program orientasi atau pelatihan bagi karyawan baru.

SARANA DAN UNIT PENUNJANG LAYANAN SDM

Perseroan telah mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan operasional bisnis, salah satunya dengan meluncurkan produk digital untuk pengelolaan SDM yang berupa Portal MyHR. Portal MyHR merupakan media informasi digital berbasis *website* yang berguna untuk memastikan komunikasi dan memberikan layanan kepada pegawai antara lain menampung informasi, berita, agenda diklat, informasi kegiatan, *polling* dan informasi lainnya terkait kegiatan perusahaan.

Perseroan juga memberikan kemudahan pengurusan administrasi bagi karyawan melalui aplikasi seperti aplikasi informasi kebijakan SDM, informasi karyawan, aplikasi cuti, dan lain sebagainya. Perseroan juga memiliki unit kerja umum yang mengelola mobilitas karyawan, gedung beserta fasilitasnya.

Selain itu, Perseroan juga mendukung karyawan untuk dapat bekerja dengan maksimal melalui berbagai

4. *Employee Engagement* creates more commitment from employees to the Company. The number of absences due to illness decreases, reduces the number of accidents in the work process, and increases productivity throughout the year.

WORK CULTURE

The work culture at STP is designed to inspire employees to always provide their best while working. As such, the Company continuously internalizes its work culture to ensure that every employee can continuously adhere to and follow the Company's performance-based, creativity, and innovation-driven work culture.

In 2023, the dissemination of the Company's work culture was conducted through a series of activities, including disseminating information via email to all employees, as well as orientation or training programs for new employees.

HR FACILITIES AND SUPPORT UNITS

The Company has optimized the use of digital technology in its business operations, one of which is by launching a digital product for HR management in the form of the MyHR Portal. The MyHR Portal is a website-based digital information medium that ensures communication and provides services to employees, including hosting information, news, training schedules, activity information, polls, and other information related to company activities.

The Company also offers ease of administrative management for employees through applications such as HR policy information, employee information, leave applications, and so forth. The Company also has a general work unit that manages employee mobility, buildings, and their facilities.

Moreover, the Company supports employees to optimally work with various facilities, amenities, and

fasilitas, sarana, dan prasarana kerja sesuai dengan jabatan dan tugas yang diembannya. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup fasilitas internet, intranet, dan aplikasi lainnya yang memudahkan kegiatan karyawan.

Bagi para karyawan yang mendapatkan jadwal *Work From Home*, Perseroan memberikan akses layanan *Virtual Private Network* (VPN) dan penerapan sistem approval dokumen secara *online* melalui aplikasi agar karyawan dapat bekerja secara maksimal di rumah.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan industrial Perseroan dijalankan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku di STP. Meskipun hingga saat ini Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja, namun Perseroan berupaya untuk mengelola hubungan industrial yang baik dengan para karyawan melalui saluran komunikasi melalui kreasi beberapa grup dalam portal MyHR.

Perseroan membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit ini sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja, sebagai wadah komunikasi dengan karyawan, termasuk terkait dengan pemenuhan hak-hak karyawan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja serta sebagai upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

STRUKTUR PENGELOLA SDM

Mempertimbangkan perkembangan dan pertumbuhan bisnis perseroan dan juga tantangan ke depan, maka STP memerlukan SDM yang memiliki kapabilitas terunggul untuk dapat bersaing di industri layanan dan jasa telekomunikasi baik pada skala nasional maupun global. Berdasarkan hal tersebut diperlukan

infrastructure according to their positions and duties. These facilities include internet, intranet, and other applications that facilitate employee activities.

For employees scheduled to Work From Home, the Company provides Virtual Private Network (VPN) access and the implementation of an online document approval system through applications ensuring that employees can work optimally at home.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Company's industrial relations are conducted based on policies and regulations applicable at STP. Although the Company does not have a Workers' Union to date, it strives to manage good industrial relations with employees through communication channels by creating several groups within the MyHR portal.

The Company establishes a Bipartite Cooperation Institution as a forum for communication and consultation on matters related to industrial relations. The Bipartite Cooperation Institution consists of employers and workers' unions/labour unions that are registered with the relevant labour authority or represent workers/laborers. The establishment of the Bipartite Cooperation Institution is a commitment by the Company to provide labour protection, as a communication platform with employees, including fulfilling employee rights based on the Company Regulations and Employment Agreements, and as an effort to create harmonious and mutually beneficial industrial relations for all parties.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRUCTURE

Considering the development and growth of the Company's business as well as future challenges, STP requires human resources (HR) with outstanding capabilities to compete in the telecommunications services and industry on both national and global scales. Based on this, solid HR management is



SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources

pengelolaan SDM yang solid dan senantiasa melakukan perbaikan serta penyempurnaan dalam praktik pengelolaan SDM di STP.

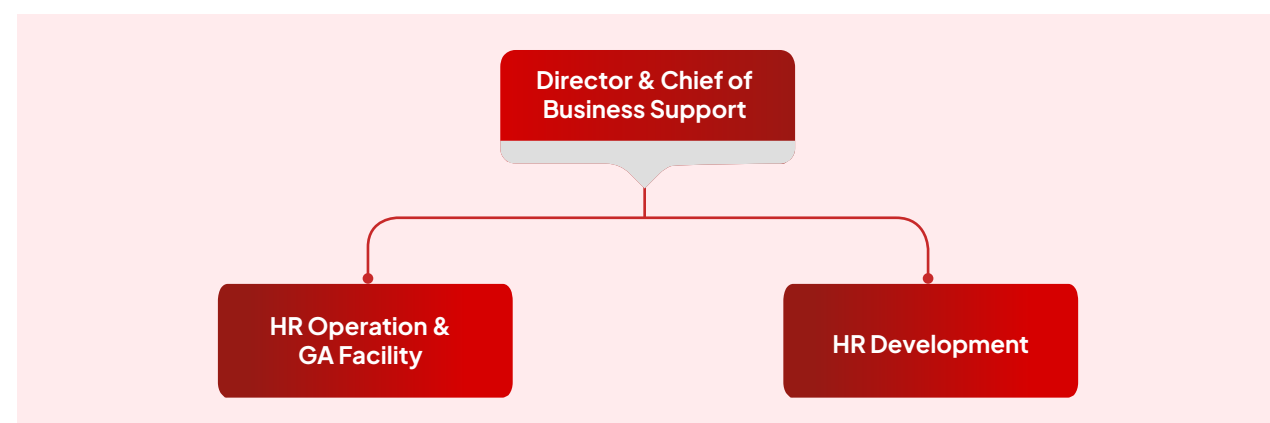
Perseroan telah memiliki organisasi pengelolaan SDM yang langsung disupervisi oleh Direktur SDM. Organisasi pengelolaan SDM di STP dikelola oleh Divisi HR yang berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait SDM dan juga berperan dalam melakukan operasionalisasi kebijakan terkait SDM, termasuk melakukan pengembangan kapabilitas pegawai.

Divisi HR dipimpin oleh Head of Director & Chief of Business Support. Divisi ini terdiri dari Sub HR Operation & GA Facility dan HR Development. Sub Divisi ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.

necessary, constantly making improvements and refinements in HR management practices at STP.

The Company has an HR management organization that is directly supervised by the HR Director. The HR management organization at STP is managed by the HR Division, which is authorized to establish HR-related policies and also plays a role in the operationalization of HR-related policies, including the development of employee capabilities.

The HR Division is led by the Head of Director & Chief of Business Support. This division consists of the Sub HR Operation & GA Facility and HR Development. These sub-divisions are expected to deliver employees with high competencies and uphold the corporate cultural values.



TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology



Teknologi Informasi di STP berperan aktif dalam pemenuhan dukungan dan solusi TI terhadap kebutuhan bisnis, khususnya dalam konteks mendukung pencapaian bisnis Perseroan. Di tahun 2023 Perusahaan melakukan integrasi sistem dan memastikan akurasi data untuk pengelolaan transaksi bisnis serta mempercepat penanganan laporan yang masuk.

STP's Information Technology actively contributes to achieving the Company's business objectives by providing IT solutions and support for business needs. In 2023, the Company implemented system integration and ensured data accuracy for the management of business transactions, thereby accelerating the processing of incoming reports.



TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

Kebijakan

Kebijakan teknologi informasi yang dimiliki STP diantaranya adalah Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi ("Kebijakan TI"). Teknologi Informasi (TI) di STP berperan aktif dalam pemenuhan dukungan solusi TI terhadap kebutuhan bisnis, khususnya dalam konteks mendukung pencapaian bisnis Perseroan.

Kebijakan TISTP secara umum memuat hal-hal berikut:

1. Penerapan keamanan TI secara umum untuk melindungi data rahasia Perusahaan, aplikasi bisnis, dan infrastruktur TI lainnya dari ancaman keamanan siber.
2. Penyediaan komunikasi rutin untuk menciptakan kesadaran bagi pengguna TI mengenai pentingnya keamanan TI bagi operasi bisnis Perusahaan, serta berupaya meningkatkan peran dan kontribusi pengguna dalam melindungi Perusahaan dari ancaman keamanan siber.
3. Tanggung jawab pengguna untuk melindungi data rahasia Perusahaan dengan melakukan aktivitas kerja secara bertanggung jawab, antara lain dengan mengikuti pedoman keamanan TI, menjaga dan menjaga keamanan data rahasia perusahaan, melindungi perangkat yang mereka gunakan dalam pekerjaan sehari-hari, dll.
4. Prosedur dan pengelolaan penyimpanan data.
5. Klasifikasi data dan penjelasannya, antara lain mengenai data pribadi, data yang sangat rahasia dan data non-rahasia. Ketentuan mengenai penyimpanan data pribadi dan data yang sangat rahasia yang harus disimpan dengan kerahasiaan yang paling ketat, dimana akses terhadap data tersebut akan diberikan berdasarkan kebutuhan dan dipelihara dalam sistem pengontrol *domain* Perusahaan. Persyaratan akses baru atau modifikasi dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada administrator TI melalui persetujuan kepala divisi masing-masing.

Policy

STP's information technology policies include the Information Technology Security Policy ("IT Policy"). The Information Technology (IT) at STP actively takes a role in fulfilling IT solution support for business needs, particularly in the context of supporting the achievement of the Company's business objectives.

The STP IT Policy generally includes the following aspects:

1. The implementation of general IT security to protect the Company's confidential data, business applications, and other IT infrastructure from cybersecurity threats.
2. Provision of regular communication to create awareness among IT users about the importance of IT security for the Company's business operations, as well as striving to enhance the role and contribution of users in protecting the Company from cybersecurity threats.
3. The users' responsibility to protect the Company's confidential data by conducting work activities responsibly, including following IT security guidelines, maintaining and protecting the security of the Company's confidential data, protecting devices used in their daily work, etc.
4. Procedures and management of data storage.
5. Data classification and explanation, including personal data, highly confidential data, and non-confidential data. Provisions regarding the storage of personal data and highly confidential data must be kept with the utmost confidentiality, where access to this data will be granted based on necessity and maintained within the Company's domain control system. New access requirements or modifications can be made by submitting a request to the IT administrator through the approval of each division head.

6. Penjelasan mengenai kemampuan untuk lebih mengamankan infrastruktur Perusahaan, aplikasi bisnis dan data serta perangkat pengguna akhir dari potensi ancaman keamanan siber, termasuk *malware*, *virus*, dan pelaku ancaman lainnya. Hal yang diterapkan mencakup penerapan dan investasi pada *firewall*, VPN, anti-virus, teknologi *web-filter*, *email security* serta *Security Operations Center* ("SOC") untuk pemantauan ancaman siber.
7. Ketentuan mengenai aplikasi bisnis dan Infrastruktur TI Perusahaan yang dilengkapi dengan akses yang dilindungi kata sandi, dan jejak audit dari akses tersebut.

Strategi

Secara umum strategi TI di Perseroan berfokus pada hal-hal berikut:

1. Sentralisasi IT *capabilities*, dan mengembangkan kapabilitas yang dapat dipergunakan bersama (*shared*)
2. Proses automation untuk akurasi dan mempercepat proses bisnis
3. *Continuous improvement* pada IT security
4. Penerapan teknologi baru yang relevan agar dukungan aplikasi tetap mumpuni dengan pertumbuhan bisnis
5. Pengembangan personal IT yang juga mengerti konteks bisnis

Strategi ini dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional bisnis Perseroan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam menjalankan strategi ini, pengelolaan TI di Perseroan dilakukan melalui organisasi divisi TI yang terbentuk dari beberapa departemen, seperti departemen TI Infrastruktur yang mengelola perangkat jaringan, *server* dan *security*; TI *support & automation* yang memberikan support dan resolusi masalah-masalah yang dihadapi users; serta TI *applications* yang mengembangkan dan mengelola aplikasi bisnis yang mendukung operasional *business*.

6. Explanation of the capability to further secure the Company's infrastructure, business applications, data, and end-user devices from potential cybersecurity threats, including *malware*, *viruses*, and other threat actors. Implemented measures include the deployment and investment in firewalls, VPNs, antivirus, *web-filter* technologies, email security, and a *Security Operations Center* ("SOC") for cyber threat monitoring.
7. Provisions regarding the Company's business applications and IT Infrastructure equipped with password-protected access, and the audit trail of such access.

Strategy

Generally, the IT strategy at the Company focuses on the following aspects:

1. Centralization of IT *capabilities* and developing capabilities that can be shared.
2. Process automation for accuracy and to speed up business processes.
3. Continuous improvement in IT security.
4. Implementation of relevant new technologies to ensure application support keeps pace with business growth.
5. Development of IT personnel who also understand the business context.

This strategy is carried out to support the Company's business operational activities, making them more effective and efficient.

In implementing this strategy, IT management at the Company is conducted through an IT division organization established from several departments, such as the IT Infrastructure department that manages network devices, servers, and security; IT support & automation that provides support and resolution for issues encountered by users; and IT applications that develop and manage business applications supporting business operations.



TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology



Inovasi Innovation

Inovasi yang dilakukan STP dalam bidang TI merujuk pada pengembangan dan penerapan ide-ide baru, metode, atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja sistem informasi. Inovasi TI dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengembangan perangkat lunak baru, integrasi teknologi terkini, hingga penerapan konsep baru dalam manajemen data dan keamanan informasi. Berikut inovasi TI STP di tahun 2023:

STP's innovations for IT refer to the development and application of new ideas, methods, or technologies to improve efficiency, productivity, and performance of information systems. IT innovations can be produced in various forms, from the development of new software, integration of the latest technology, to the application of new concepts in data management and information security. The following are STP's IT innovations in 2023:

1. Meluncurkan "IT Hotline", yang merupakan <i>monthly newsletter</i> TI yang bertujuan untuk mengedukasi seluruh karyawan antara lain seputar <i>cyber security</i> , IT Security Awareness dan <i>Technology Update</i> ;	Launching the "IT Hotline", a monthly IT newsletter aimed at educating all employees about topics such as cyber security, IT Security Awareness, and Technology Update;
2. Melakukan inisiatif untuk mengenkripsi data pribadi mitra kerja/suppliers dalam <i>database</i> untuk meningkatkan proteksi data kepada mitra kerja;	Initiating efforts to encrypt personal data of work partners/suppliers in the database to enhance data protection for partners;
3. Melakukan konsolidasi server, storage dan network serta server virtualisasi yang berkontribusi pada efisiensi penggunaan energi. Perseroan juga melakukan peremajaan server dan perangkat secara berkala termasuk penggunaan teknologi baru yang cenderung mengonsumsi energi yang lebih sedikit; dan	Consolidating servers, storage, and networks, as well as server virtualization, contributing to energy usage efficiency. The Company also regularly updates servers and devices, including the use of new technology that tends to consume less energy; and
4. Menggalakkan inisiatif-inisiatif digital sesuai kebutuhan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi.	Promoting digital initiatives as needed by the Company to improve efficiency.

Inisiatif Aplikasi Digital

Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses bisnis Perseroan yang lebih efektif, efisien, dan optimal serta dalam rangka meningkatkan inovasi produk dan jasa kepada pelanggan, STP telah mengembangkan berbagai aplikasi yang dipergunakan untuk mencatat transaksi bisnis, pembuatan laporan, integrasi data yang bersifat internal maupun eksternal, serta aplikasi otomasi yang membantu kelancaran dan kecepatan transaksi bisnis.

Digital Application Initiatives

To support more effective, efficient, and optimal execution of the Company's business processes, and to enhance product and service innovation for customers, STP has developed various applications used for recording business transactions, report generation, both internal and external data integration, as well as automation applications that assist in the seamless and speed of business transactions.

Selama dua belas bulan terakhir, titik berat pengembangan aplikasi di STP dan Group ditujukan pada otomasi proses, menggunakan *robotic process automation* dan juga *artificial intelligence*, sehingga transaksi dapat dijalankan dengan lebih cepat dan akurat. Disamping itu, aspek proses integrasi juga semakin dikembangkan Grup yang bertujuan untuk perbaikan efisiensi proses.

Integrasi sistem dan akurasi data ini juga dipergunakan untuk pembuatan operasional *dashboard* yang menjadi semacam portal untuk pengelolaan transaksi bisnis termasuk percepatan identifikasi permasalahan dan penanganan secara proaktif. Di sisi lain, inisiatif ini juga mampu mempermudah manajemen dalam melihat potret kondisi operasional pada waktu tertentu.

Infrastruktur Teknologi Informasi

Divisi TI STP telah memiliki sistem dan perangkat perlindungan tambahan sebagai langkah proteksi keamanan Informasi di Perusahaan sebagai berikut:

1. Sertifikasi ISO 270001 mengenai Information Security Management System
2. Kebijakan Perlindungan Data (IT Security Policy)

Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan penggunaan TI berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memitigasi risiko sekaligus memberikan nilai tambah bagi STP. Penerapan Tata Kelola TI di STP dilakukan melalui penyelarasan Rencana Strategis TI dengan strategi bisnis Perseroan, optimalisasi sumber daya, pemanfaatan TI, pengukuran kinerja, dan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, tata kelola TI di STP terbagi ke dalam 3 (tiga) proses, yaitu proses pengelolaan perangkat jaringan, server dan security, proses otomasi untuk memberikan support dan resolusi masalah-masalah yang dihadapi users, dan proses pengembangan dan pengelolaan aplikasi bisnis untuk mendukung kegiatan operasional bisnis Perseroan.

Pada proses pengelolaan perangkat jaringan, server dan security, Perseroan telah memiliki kebijakan

Over the last twelve months, the focus of application development at STP and the Group has been on process automation, using robotic process automation and artificial intelligence, ensuring that transactions can be executed more swiftly and accurately. Moreover, the aspect of process integration has also been further developed by the Group with the aim of improving process efficiency.

This system integration and data accuracy are also used to develop operational dashboards, which serve as portal for managing business transactions including the acceleration of problem identification and proactive handling. On the other hand, this initiative also makes it easier for management to view a snapshot of operational conditions at any given time.

Information Technology Infrastructure

The IT Division of STP has the following additional protection systems and devices as measures for Information Security protection in the Company:

1. ISO 270001 certification on Information Security Management System
2. Data Protection Policy (IT Security Policy)

Information Technology Governance

Information Technology Governance is a process conducted to ensure that IT is applied effectively and efficiently, thereby mitigating risks while providing added value to STP. The implementation of IT Governance at STP is carried out through the alignment of the IT Strategic Plan with the Company's business strategy, optimization of resources, utilization of IT, performance measurement, and the implementation of effective risk management while still complying with relevant regulations.

Broadly, IT governance at STP is divided into three (3) processes: the management of network devices, servers, and security; automation processes to provide support and resolution of problems encountered by users; and the development and management of business applications to support the Company's business operational activities.

In the process of managing network devices, servers, and security, the Company has established policies



TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

terkait dengan perlindungan data yang diatur dalam IT Security policy dimana Perseroan memberikan perlindungan atas data perusahaan, pribadi dan *supplier* termasuk jenis data penting, rahasia dan sensitif. Perlindungan data ini dilakukan dengan pemberian akses data yang diatur sesuai kebutuhan bisnis dari masing-masing fungsi yang menjalankan bisnis serta mendapatkan persetujuan dari manajemen.

Selain itu, IT Security Policy juga menjelaskan langkah perlindungan yang sudah dijalankan terkait potensi *cyber security* dengan mengimplementasikan teknologi pendukungnya untuk melindungi dari ancaman *Cyber Crime*.

Keamanan Informasi

Sebagai komitmen dalam melindungi data, baik itu data Perusahaan maupun data pelanggan, STP terus memperkuat keamanan siber dengan melakukan berbagai upaya, antara lain dengan memiliki ISO 27001:2013.

related to data protection as regulated in the IT Security policy. The Company provides protection for company, personal, and supplier data, including important, confidential, and sensitive data types. This data protection is conducted by granting data access that is arranged according to the business needs of each function performing the business and obtaining approval from management.

Moreover, the IT Security Policy also outlines the protection measures that have been carried out regarding potential cybersecurity by implementing supporting technology to protect from Cyber Crime threats.

Information Security

As a commitment to protecting data, both Company and customer data, STP continues to strengthen cybersecurity by undertaking various efforts, among others by having ISO 27001:2013.



TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

Dengan adanya ISO 27001:2013, Perseroan dapat melindungi segala informasi yang dimiliki oleh karyawan dan konsumen atau klien, baik itu digital, *hardcopy* atau *cloud*. Selain itu juga dapat mengantisipasi *cyber attack* dan mengelola risiko keamanan sistem informasi secara tepat dan efektif.

Implementasi Manajemen Keamanan Informasi Tahun 2023

Perseroan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap manajemen keamanan informasi untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber yang andal dengan beberapa upaya, yaitu:

1. Mengimplementasikan *software* antivirus pada semua perangkat laptop dan desktop users.
2. Mengaktifkan *firewall*, *webfilter*, dan anti-spam.
3. Menugaskan team SOC (Security Operation Center) untuk melakukan monitoring serta mengidentifikasi dan mitigasi jika ada resiko atau aktivitas yang mencurigakan pada jaringan perusahaan.

The ISO 27001:2013 enables the Company to protect all information owned by employees, consumers, or clients, whether it's digital, hardcopy, or on the cloud. Additionally, it can anticipate cyber-attacks and accurately and effectively manage the security risks of information systems.

Implementation of Information Security Management in 2023

The Company constantly makes continuous improvements to information security management to enhance resilience and reliable cybersecurity through several efforts, as follows:

1. Implementing antivirus software on all user laptops and desktop devices.
2. Activating firewalls, web filters, and anti-spam.
3. Assigning a SOC (Security Operation Center) team to perform monitoring and identify and mitigate any risks or suspicious activities on the company network.

Prosedur Eskalasi Atas Insiden TI IT Incident Escalation Procedure

Departemen TI telah menetapkan prosedur atau mekanisme tata Kelola keamanan informasi dan proses eskalasi jika terjadi kejahatan siber. Adapun prosedur tersebut adalah:

The IT Department has established procedures or mechanisms for information security governance and the escalation process in the event of cybercrime. The procedures are as follows:

a. Untuk tindakan preventive IT Security memiliki tools yang terdiri dari *endpoint protection*, *email protection*, *web filtering protection*, dan lain-lain. Apabila ada peringatan, maka Departemen TI melalui IT Helpdesk akan melakukan pengecekan terhadap *endpoint* yang menjadi penyebab *alert* tersebut.

For preventive actions, IT Security has tools consisting of endpoint protection, email protection, web filtering protection, and others. If there is an alert, the IT Department through the IT Helpdesk will check the endpoint causing the alert.

b. Insiden keamanan harus segera dilaporkan ke bagian IT baik melalui sistem internal Perseroan maupun melalui email.

Security incidents must be immediately reported to the IT department either through the Company's internal system or via email.

c. IT Helpdesk akan meneruskan masalah ke tim IT Infrastructure untuk segera dilakukan investigasi

The IT Helpdesk will forward the issue to the IT Infrastructure team for immediate investigation.

TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

d.	Jika insiden dianggap sebagai insiden keamanan maka akan dilakukan eskalasi ke <i>Head of IT</i> untuk selanjutnya dieskalasi ke Direktur <i>Business Support</i> .	If an incident is considered a security incident, it will be escalated to the Head of IT and then further escalated to the Director of Business Support.
e.	Departemen TI akan bekerja sama dengan vendor termasuk tim <i>Security Operations Center</i> dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan aplikasi atau peralatan infrastruktur yang terkena dampak, untuk dilakukan mitigasi terhadap insiden tersebut.	The IT Department will collaborate with vendors, including the Security Operations Center team and related parties associated with the affected applications or infrastructure equipment, for mitigation of the incident.
f.	<i>Head of IT</i> bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan prosedur solusi untuk memperbaiki situasi	The Head of IT is responsible for coordinating the solution procedures to rectify the situation.
g.	<i>Head of IT</i> akan memberikan <i>update</i> status kepada Direktur <i>Business Support</i> secara berkala jika diperlukan eskalasi atau tindakan lebih lanjut tergantung dari tingkat dan dampak dari insiden tersebut.	The Head of IT will provide status updates to the Director of Business Support periodically if escalation or further action is needed, depending on the level and impact of the incident.

Penanganan Keluhan Layanan TI

Divisi TI memiliki Departemen IT Support & Automation untuk memberikan dukungan dan resolusi masalah-masalah yang dihadapi users. Departemen IT Support & Automation akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk sesuai dengan SOP yang dimiliki.

Di tahun 2023 terdapat 18,000 tiket yang masuk melalui sistem pengaduan layanan TI, yang meliputi berbagai kategori permintaan, mulai dari permasalahan pada perangkat kerja, akses ke jaringan dan aplikasi, permintaan aksesoris pelengkap untuk perangkat kerja, dll.

Dalam menangani permasalahan layanan TI, Perseroan memiliki SLA (*Service Level Agreement*) yang terdiri dari *respond time* dan *resolution time* yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 jam.

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan TI

Survei kepuasan pelanggan terhadap penggunaan layanan TI Perseroan dilakukan secara berkelanjutan melalui formulir nilai kepuasan untuk setiap pelayanan yang diberikan. Formulir penilaian ini dijalankan secara otomatis melalui sistem pelaporan tiket yang telah diselesaikan. Mekanisme ini juga menjadi cara untuk pelanggan TI untuk meng-konfirmasi bahwa permintaan mereka sudah selesai dijalankan.

IT Service Complaint Handling

The IT Division has an IT Support & Automation Department to provide support and resolve issues encountered by users. The IT Support & Automation Department will follow up on each report received according to the SOPs in place.

In 2023, a total of 18,000 tickets received through the IT service complaint system, covering various request categories, from issues with work devices, access to networks and applications, requests for accessory additions for work devices, etc.

In handling IT service issues, the Company has an SLA (*Service Level Agreement*) consisting of response time and resolution time that must be resolved within a timeframe of 4 hours.

Customer Satisfaction Survey on IT Services

The customer satisfaction survey regarding the use of the Company's IT services is continuously conducted through a satisfaction rating form for every service provided. This assessment form runs automatically via the ticket reporting system once a ticket has been resolved. This mechanism also serves as a way for IT customers to confirm that their requests have been completed.



Di tahun 2023, hasil survei **kepuasan pelanggan terhadap layanan TI** mencapai rating **4.9** dari **650** pelanggan yang memberikan penilaian, dimana **rating 1** adalah **sangat tidak puas** dan **rating 5** adalah **sangat puas**.

In 2023, the customer satisfaction survey results for IT services reached a rating of 4.9 from 650 customers who provided feedback, where a rating of 1 indicates very dissatisfied and a rating of 5 indicates very satisfied.

Pengembangan SDM TI

Peningkatan kompetensi SDM TI sangat diperlukan untuk men-deliver rencana strategis TI. Perusahaan telah mendesain dan menjalankan rencana pengembangan kompetensi pegawai TI secara sistematis dan terstruktur melalui program berikut:

1. Pengembangan kompetensi teknis yang relevan dengan teknologi yang di-implementasikan pada Perusahaan
2. Pengembangan kompetensi manajerial melalui program pengembangan yang dikoordinasikan oleh Divisi HRD
3. Pengembangan diri melalui "Learning by Doing", untuk mengembangkan pengetahuan karyawan akan dinamika dan proses bisnis Perusahaan

Di tahun 2023, pegawai TI telah mengikuti serangkaian Pendidikan dan pelatihan berikut:

IT Human Resources Development

The enhancement of IT human resources competencies is crucial for delivering the IT strategic plan. The Company has designed and implemented a systematic and structured plan for the development of IT employee competencies through the following programs:

1. Development of technical competencies relevant to the technologies implemented at the Company.
2. Development of managerial competencies through development programs coordinated by the HRD Division.
3. Self-development through "Learning by Doing," to enhance employees' knowledge of the Company's business dynamics and processes.

In 2023, IT employees have participated in the following series of education and training programs.

Tanggal Date	Nama Pelatihan Trainings	Jumlah Peserta Total Participants	Penyelenggara Organizers
19 Februari 2023 February 19, 2023	<i>Know Your Customer</i>	1 orang person	Internal
7 Mei 2023 May 7, 2023	<i>Effective Project Management</i>	2 orang persons	External
22 Mei 2023 May 22, 2023	<i>Asset Management: Requirements of ISO 55001:2014</i>	1 orang person	External
23-24 Mei 2023 May 23-24, 2023	<i>Fundamentals of Asset Management</i>	1 orang person	External
13 Juni 2023 June 13, 2023	<i>Strategic Decision-Making Training</i>	1 orang person	External
Juni 2023 June 2023	<i>Google Cloud Cost Optimization Technique</i>	1 orang person	External



TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology

Tanggal Date	Nama Pelatihan Trainings	Jumlah Peserta Total Participants	Penyelenggara Organizers
3 Juli 2023 July 3, 2023	Ms. Excel	3 orang persons	External
2-4 Agustus 2023 August 2-4, 2023	ISO Training	3 orang persons	External
9-10 Agustus 2023 August 9-10, 2023	Strategic Communication	2 orang persons	External
16 Agustus 2023 August 16, 2023	Leader as a coach	2 orang persons	External
7 September 2023 September 7, 2023	Basic Training Microsoft 365 & Power Automate	1 orang person	External
12 September 2023 September 12, 2023	Collaboration of Excellence	2 orang persons	Internal
10 Oktober 2023 October 10, 2023	Decision Drivers: Fueling Success Through Problem Solving	1 orang person	External
17 Oktober 2023 October 17, 2023	PDCA Mastery: The Continuous Improvement Workshop	1 orang person	External
1-2 November 2023 November 1-2, 2023	Data Privacy and Protection: Implementation and Its Challenges.	2 orang persons	External
27 November 2023 November 27, 2023	Fast Track Workshop Fortiproxy	3 orang persons	External
4 Desember 2023 December 4, 2023	Fast Track Workshop Fortigate	3 orang persons	External.
5 Desember 2023 December 5, 2023	Managing Tasks, Priorities, and Deadlines	1 orang person	Internal
9 Desember 2023 December 9, 2023	Present with Impact Escalating Your Presentation Skill	1 orang person	External

Rencana TI Tahun 2024

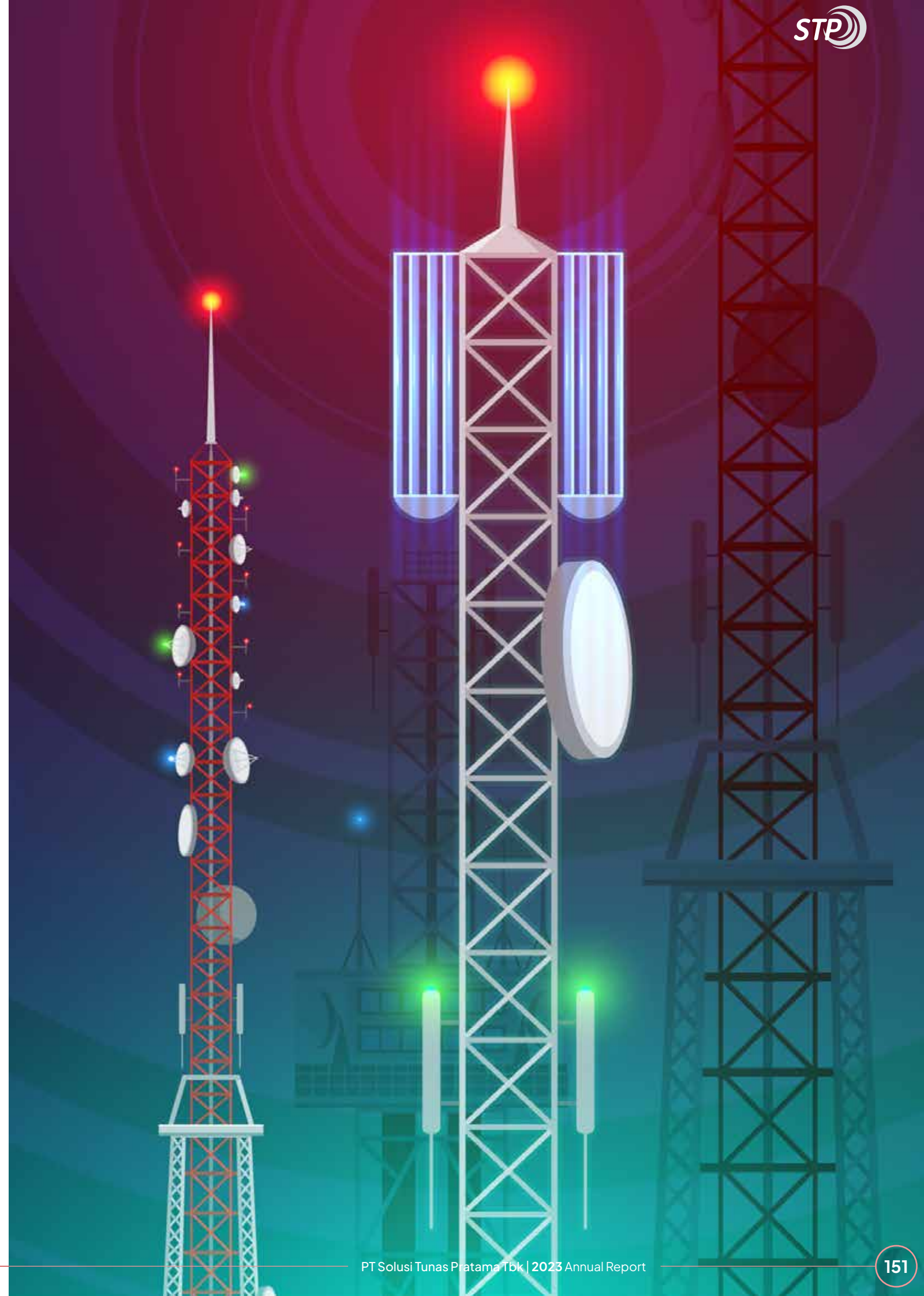
Untuk mencapai hasil yang diinginkan, konsistensi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan sehingga tercipta sinergi yang efektif dan tepat sasaran. Langkah-langkah ini akan mendukung pencapaian strategi TI yang telah ditetapkan, Berikut rencana kerja TI di tahun 2024:

1. Perbaiki sistem yang ada sehingga proses bisnis dan integrasi data semakin baik.
2. Modernisasi aplikasi untuk mendukung pengembangan volume dan kompleksitas bisnis Perusahaan, termasuk juga di mana relevan penggunaan teknologi terbaru seperti AI dan Automation untuk meningkatkan efisiensi proses di Perusahaan.
3. Mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis baru Perusahaan.

IT Plans in 2024

To achieve the objectives, consistency in execution is very much needed to create an effective and targeted synergy. These steps will support the achievement of the established IT strategy. The following are the IT work plans for 2024:

1. Improve the existing systems to ensure better business processes and data integration.
2. Modernize applications to support the development of the Company's business volume and complexity, including where relevant the application of the latest technologies such as AI and Automation to enhance process efficiency in the Company.
3. Support the expansion and development of the Company's new business.



05.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE
GOVERNANCE



Pengembangan dan penerapan GCG merupakan wujud komitmen STP guna mendukung keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya untuk meningkatkan kinerja, nilai dan penciptaan perusahaan yang baik.

GCG development and implementation is a manifestation of STP's commitment to support business success and accountability to improve performance, value and the creation of a good company.





TATAKELOLA PERUSAHAAN corporate governance



STP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG selain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, juga untuk menciptakan mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

STP is committed to enhancing the quality of good corporate governance principles' implementation. The implementation of GCG principles not only ensures that the interests of shareholders and other stakeholders are balanced but also facilitates the achievement of sustainable and optimal performance.

TATAKELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada pemegang saham.

STP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan dan penerapan GCG merupakan wujud komitmen STP guna mendukung keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya untuk meningkatkan kinerja, nilai dan penciptaan perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance (GCG) encompasses a set of regulatory and control mechanisms implemented by business entities with the aim of generating value for all stakeholders, including shareholders.

STP is committed to improving the quality of implementation of GCG principles. The Company implements the principles of corporate governance to maintain a balance between the interests of shareholders and other stakeholders.

GCG development and implementation is a manifestation of STP's commitment to support business success and accountability to improve performance, value and the creation of a good company.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berikut dasar hukum penerapan GCG di Perseroan:

LEGAL BASIS FOR CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

The following are the legal references for implementing GCG in the Company:

No.	Peraturan	Regulations
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 concerning Capital Market.
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain: - POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. - POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. - POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. - POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	Regulation of the Financial Services Authority (POJK) and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK), as follows: - POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. - POJK No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies. - POJK No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. - POJK No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Company.

TATAKELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

TATAKELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. - POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. - POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. - POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. - SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	- POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Working Implementation Guidelines for Audit Committee. - POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Drafting an Internal Audit Unit Charter. - POJK No. 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies. - POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Holding of the General Meeting of Shareholders of a Public Companies. - SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for the Governance of Public Companies.
4. Anggaran Dasar Perseroan.	The Company's Articles of Association.
5. Peraturan Internal Perseroan (mencakup didalamnya kebijakan- kebijakan Perseroan mengenai GCG).	The Company Internal Regulations (including the Company's policies regarding GCG).

PENERAPAN PRINSIP GCG

Penerapan GCG di Perseroan dibangun berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan pada setiap lini organisasi dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas usaha sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan penerapan Tata Kelola yang baik, Perseroan berpegang pada prinsip-prinsip dasar GCG sesuai PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUG-KI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

The implementation of GCG in the Company is built based on strong integrity, hence the principles of good governance can be implemented in every line of the organization and carried out in every business activity to achieve consistent and sustainable operational activities. To manifest the implementation of good governance, the Company adheres to the basic principles of GCG in accordance with the INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE GENERAL GUIDELINES (PUG-KI) 2021 that have been updated by the Governance Policy National Committee (KNKG), namely Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability.

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation
Perilaku Beretika Ethical Conduct	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the company always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and beliefs consistently. The company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and is managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.

Akuntabilitas Accountability	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The company can account for its performance transparently and reasonably. As such, the company must be managed correctly, measurably and in accordance with company interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.
Transparansi Transparency	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting business, the company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also those that are important for decision-making by shareholders, creditors and other stakeholders.
Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibility towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve community lives in a way that is in line with business interests and the sustainable development agenda.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

STP meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan dapat mendukung pencapaian kinerja yang optimal. Penerapan prinsip GCG di lingkup STP mengacu kepada peraturan yang berlaku, ketentuan dan norma serta Anggaran Dasar Perseroan. Peningkatan dan perbaikan penerapan tata kelola perusahaan terus dilakukan di semua aspek, dimulai dari kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Di tahun 2023, STP telah melakukan beberapa peningkatan dalam lingkup tata kelola perusahaan, di antaranya melaksanakan *benchmarking*, analisis kesenjangan, penguatan komunikasi internal untuk memastikan koordinasi berjalan baik, dan menjalankan fungsi komunikasi eksternal secara teratur untuk memastikan pemangku kepentingan mengetahui komitmen dan pelaksanaan GCG Perseroan.

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

STP believes that continuous good corporate governance adoption might support the accomplishment of optimal performance. The application of GCG principles within the scope of STP refers to applicable regulations, provisions, and norms, as well as the Company's Articles of Association. Improvement and enhancement of the corporate governance application continue in all aspects, from policy to execution to supervision.

In 2023, STP made several improvements in the scope of corporate governance, including conducting benchmarking, gap analysis, strengthening internal communication to ensure good coordination, and regularly executing external communication functions to ensure stakeholders are aware of the Company's GCG commitment and implementation.

TATAKELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

TATAKELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN GCG DI STP

Kesadaran (*awareness*) Perseroan akan pentingnya praktik *Good Corporate Governance* menjadi titik awal dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkup STP. Melalui asesmen yang dilakukan baik secara *self-asesment* maupun melalui asesor independen, STP berupaya untuk memenuhi saran dan rekomendasi yang didapat dari asesmen tersebut guna melakukan evaluasi dan memaksimalkan praktik terbaik GCG di lingkup STP (*improvement*).

Hasil rekomendasi tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perseroan. Adapun kebijakan-kebijakan GCG yang dimiliki Perseroan hingga saat ini adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy/CGP*), Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct/CoC*), Piagam Dewan Komisaris (*BOC Charter*), Piagam Direksi (*BOD Charter*), Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris, Piagam Internal Audit, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, serta kebijakan lainnya yang mendukung penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan di atas selalu dimutakhirkan secara berkala untuk diadaptasikan sesuai dengan praktik terbaik, kondisi dan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan serta perubahan peraturan dan perundangan yang berlaku.

INTERNALISASI GCG

Untuk dapat memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan akan penerapan GCG di Perseroan, STP telah melaksanakan sosialisasi implementasi GCG pada karyawan, termasuk penerapan GCG terkait dengan *issue-issue* keberlanjutan, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing serta mensyaratkan adanya *acknowledgement* oleh karyawan atas Peraturan Perusahaan dan kebijakan terkait GCG lainnya.

Selain itu, penanaman nilai-nilai GCG juga dilakukan melalui portal internal Perseroan, sosialisasi dan publikasi melalui *website* Perseroan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh pegawai Perseroan maupun stakeholders lainnya.

GCG IMPLEMENTATION AND POLICY IN STP

The Company's awareness of the importance of Good Corporate Governance practices serves as a starting point in improving the quality of GCG implementation within STP. STP strives to fulfil the suggestions and recommendations obtained from the assessment in order to evaluate and maximize GCG best practices within the scope of STP (*improvement*) through assessments conducted both by self-assessment and by independent assessors.

The recommendations' outcomes are then outlined in the Company's policies. To date, the policies are the Corporate Governance Policy (CGP), the Code of Conduct (CoC), the Board of Commissioners Charter (BOC Charter), the Board of Directors Charter (BOD Charter), the Board of Commissioners Supporting Committee Charter, the Internal Audit Charter, the Risk Management Policy Guidelines, and other policies that support the consistent and sustainable implementation of GCG.

The policies stated above are updated regularly to reflect best practices, conditions, and developments in the Company's business environment, as well as changes in prevailing laws and regulations.

GCG INTERNALIZATION

To provide a good understanding to all stakeholders about GCG implementation in the Company, STP has carried out socialization of GCG implementation to employees, including the application of GCG related to sustainability issues, in accordance with their respective job scopes, and requires an acknowledgement by employees of the Company Regulations and other GCG-related policies.

Moreover, GCG values are entrenched through the Company's internal portal, socialization and dissemination through the Company's website, all of which can be easily accessed and downloaded by Company employees and other stakeholders.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Agar kualitas penerapan GCG di lingkungan STP dapat terus ditingkatkan, STP melakukan pengukuran kualitas penerapan GCG secara berkala. Hal ini mencerminkan komitmen STP untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practice*), sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi.

Di tahun 2023, STP melakukan penilaian penerapan GCG melalui 2 (dua) model penilaian, yaitu:

1. Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Secara umum, Perseroan sebagai perusahaan terbuka telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Khususnya terkait pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut yang memuat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG.

Pemenuhan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Fulfillment of Public Company Governance Guidelines Recommendations

Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
A. HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANY WITH THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE SHAREHOLDERS' RIGHTS	
1. Prinsip 1 / Principle 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Improving the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Convention	

GCG ASSESSMENTS

To ensure ongoing enhancements in the quality of GCG implementation within the STP environment, STP undertakes periodic assessments of the implementation's quality. This reflects STP's commitment to implementing GCG principles in adherence to prevailing laws, regulations, and best practices, thereby enabling the identification of areas in need of enhancement.

In 2023, STP has carried out GCG assessment through 2 (two) assessment models, as follows:

1. GCG Assessment Based on Financial Services Authority (OJK) Regulations
2. GCG Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters

GCG Assessment Based on Financial Services Authority (OJK) Regulations

In general, the Company as a public company has implemented all regulations issued by OJK, and strives to make improvements to create added value for shareholders and stakeholders. Particularly related to the Public Company Governance Regulation regulated under OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines, which is described in OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Public Company Governance Guidelines. The guidelines contain 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 recommendations for the implementation of GCG aspects and principles.

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public company has technical procedures for opened or closed voting that promote independency and shareholders' interests.	Terpenuhi Comply
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All Members of the Directors and Board of Commissioners are present at Annual GMS.	Terpenuhi Comply
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS Minutes is available on public company's Website by no less than 1 (one) year.	Terpenuhi Comply
2.	Prinsip 2 / Principle 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau Investor. Public company has a communication policy with shareholders or investors.	Terpenuhi Comply
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public company discloses its communication policy with shareholders or investors in Website.	Terpenuhi Comply
B.	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANY WITH THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE SHAREHOLDERS' RIGHTS	
3.	Prinsip 3 / Principle 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of number of Board of Commissioners' members shall consider the conditions of Public Company.	Terpenuhi Comply
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Composition of Board of Commissioners' members considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	Terpenuhi Comply
4.	Prinsip 4 / Principle 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Commissioners	
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Board of Commissioners has self assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners.	Terpenuhi Comply
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkap melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self Assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners is disclosed in Annual Report of Public Company.	Terpenuhi Comply
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Commissioners has a policy with respect to the resignation of the member of the Board of Commissioners if such member is involved in financial crime.	Terpenuhi Comply

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Board of Commissioners or Committee that conduct the Nomination and Remuneration functions arrange succession policy in nomination process of members of Board of Directors.	Terpenuhi Comply
C.	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' FUNCTIONS AND ROLES	
5.	Prinsip 5 / Principle 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of number of Board of Directors' members considers the condition of public company and the effectiveness of decision-making.	Terpenuhi Comply
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Board of Directors' members considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	Terpenuhi Comply
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of Board of Directors who is liable for accounting or finance has accounting expertise and/ or knowledge.	Terpenuhi Comply
6.	Prinsip 6 / Principle 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Directors	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has self assessment policy to assess performance of Directors.	Terpenuhi Comply
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkap melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors is disclosed in Annual Report of public company.	Terpenuhi Comply
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Directors has a policy related to resignation of Board of Directors' members involved in financial crimes.	Terpenuhi Comply
D.	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS	
7.	Prinsip 7 / Principle 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Improving corporate governance aspect through participation of stakeholders	
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Public Company has a policy to prevent insider trading.	Terpenuhi Comply
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> . Public company has anti corruption and anti fraud policy.	Terpenuhi Comply
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public company has a policy concerning selection and capability improvement of suppliers and vendors.	Terpenuhi Comply
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. Public company has a policy concerning the fulfillment of creditors' rights.	Terpenuhi Comply

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i> . Public company has a policy of <i>Whistleblowing System</i> .	Terpenuhi Comply
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan. Public company has long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.	Terpenuhi Comply
E.	KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION DISCLOSURE	
8.	Prinsip 8 / Principle 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Improving the Implementation of Information Disclosure	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public Company takes benefits from application of a broader information technology other than website as information disclosure media.	Terpenuhi Comply
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan dan pengendali. Annual Report of public company discloses beneficial owner in share ownership of public company of at least 5% (five percent), other than disclosure of beneficial owner in share ownership of public company through major controlling shareholders.	Terpenuhi Comply

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard

STP meyakini bahwa komitmen yang kuat dalam menjalani prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan hasil optimal dalam peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, STP berupaya untuk terus meningkatkan tata kelolanya melalui penilaian GCG dengan menggunakan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Melalui pengkajian yang dikelompokkan dalam 2 (dua) tingkatan, Perseroan berupaya untuk memenuhi 4 aspek dalam tingkat 1 (satu) yang terdiri dari 4 (empat) prinsip dengan total 149 pertanyaan, yaitu:

1. Prinsip A - Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham terdiri dari 30 pertanyaan dengan bobot penilaian hingga 22%.
2. Prinsip C - Keberlanjutan dan Ketahanan terdiri dari 22 pertanyaan dengan bobot penilaian hingga 14%.
3. Prinsip D - Pengungkapan dan Transparansi terdiri dari 34 pertanyaan dengan bobot penilaian sebesar 25%.
4. Prinsip E - Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari 63 pertanyaan dengan bobot penilaian 39%.

GCG Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters

STP believes that a strong commitment in enforcing good corporate governance principles would yield optimal results in continuous performance improvement. As a result, STP strives to consistently improve its governance through GCG assessment using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters.

Through an assessment grouped into 2 (two) levels, the Company strives to fulfill 4 aspects in level 1 (one) consisting of 4 (four) principles with a total of 149 questions, as follows:

1. Principle A - Rights and Equitable Treatment of Shareholders consists of 30 questions with a valuation weight of up to 22%
2. Principle C - Sustainability and Resilience consists of 22 questions with an assessment weight of up to 14%
3. Principle D - Disclosure and Transparency consists of 34 questions with an assessment weight of 25%
4. Principle E - Responsibilities of the Board consists of 63 questions with an assessment weight of 39%.

Sedangkan pada tingkat 2 yaitu bonus dan penalti, di mana:

- Bonus terdiri dari 18 pertanyaan dengan total skor mencapai 30 poin
- Penalti terdiri dari 26 pertanyaan dengan total skor mencapai minus 69 poin.

Penilaian ACGS Tahun 2023

Di tahun 2023, STP melakukan penilaian ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) untuk tahun buku 2023 dengan metode penilaian dari pihak ketiga independen terhadap penerapan ACGS oleh Perseroan. Berdasarkan hasil penilaian, STP dapat memperbaiki *rating* ACGS ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan *rating* penilaian ini di masa mendatang.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

STP telah memiliki struktur GCG sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur GCG STP terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, setiap organ memiliki peran penting dalam penerapan GCG serta melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Perseroan.

While at level 2 are bonuses and penalties, where:

- The bonus consists of 18 questions with a total score of 30 points
- The penalty consists of 26 questions with a total score of minuses 69 points.

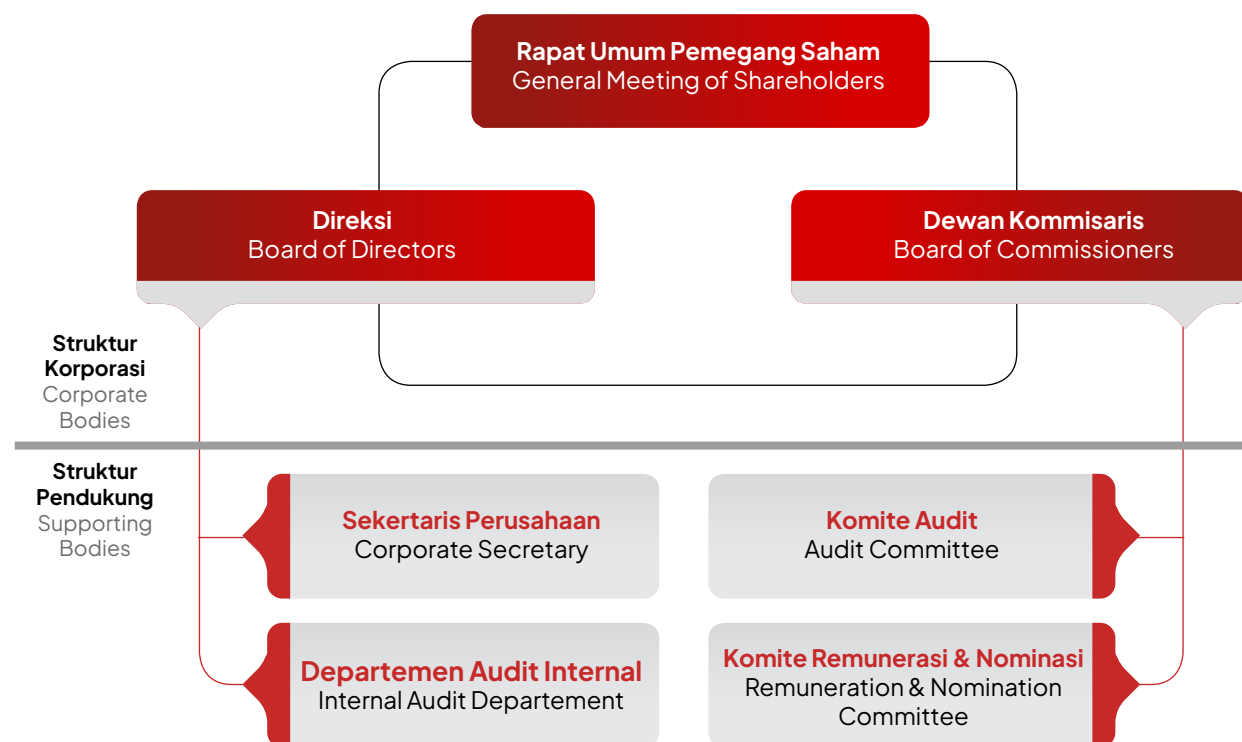
ACGS Assessment 2023

In 2023, STP conducted an ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) assessment for the fiscal year 2023 using an evaluation method from an independent third party on the Company's implementation of the ACGS. Based on the results of the assessment, STP was able to improve its ACGS rating and is committed to continuously enhancing this assessment rating in the future.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

STP already has a GCG structure in place, as required by Law No. 40 of the Republic of Indonesia governing Limited Liability Companies. The General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors comprise STP's GCG structure. Each organ has a significant role in implementing GCG and carrying out their various activities, duties, and obligations for the benefit of the Company, in line with the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

TATAKELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perusahaan yang memiliki otoritas tertinggi dalam struktur tata kelola. RUPS merupakan instrumen bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting dan strategis terkait keberlangsungan Perseroan dalam jangka panjang, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

RUPS juga dapat menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka Panjang.

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan yang diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun, dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Secara umum, RUPS Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Semua keputusan RUPS diusahakan untuk diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Persyaratan kuorum dan pemungutan suara RUPS yang berbeda dan lebih tinggi berlaku dalam hal RUPS mengambil keputusan untuk menyetujui hal-hal tertentu, seperti penggabungan dan/atau peleburan Perseroan. Ketentuan mengenai hal-hal terkait RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Perseroan mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is the Company's organ that has the highest authority in the governance structure. GMS is an instrument for shareholders to make important and strategic decisions related to the sustainability of the Company in the long term, taking into account the provisions of the Articles of Association and laws and regulations.

GMS can also be a forum for shareholders to exercise their rights in expressing opinions and obtaining information related to the Company as long as it relates to the agenda of the meeting. The decisions taken in the GMS must be based on the Company's long-term business interests.

The Company's GMS consists of an Annual GMS held 1 (one) time each year, and an Extraordinary GMS that can be held at any time based on needs. In general, the Company's GMS can be held if attended by shareholders representing more than half of the total shares issued by the Company. All GMS decisions are sought to be taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken based on a vote approving more than 50% of all shares with voting rights present at the GMS.

Different and higher quorum and GMS voting requirements apply in the event that the GMS takes a decision to approve certain matters, such as merger and/or consolidation of the Company. Provisions regarding matters related to the GMS are regulated in the Company's Articles of Association.

LEGAL BASIS

The legal basis for the implementation of the Company's GMS refers to several regulations as follows:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders

3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham Perseroan atau Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasannya dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Wewenang yang dimiliki pemegang saham melalui RUPS diantaranya meliputi:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan;
4. Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Hak pemegang saham dalam RUPS antara lain:

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS serta hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS. Formulir surat kuasa tersedia pada situs web perusahaan;
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS dan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu perdua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

3. POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. Articles of Association of the Company.

RIGHTS AND AUTHORITY OF SHAREHOLDERS IN GMS

Shareholders are individuals or legal entities who legally own shares of the Company. In accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), shareholders individually or jointly representing at least 1/10 of the total shares of the Company or the Board of Commissioners may request the Board of Directors to call and convene an Extraordinary GMS. The request must be submitted in writing to the Board of Directors of the Company stating the matters to be discussed with the reasons and fulfilling other provisions as required in the Company's Articles of Association.

The authority of shareholders through the GMS includes:

1. Approve amendments to the Company's Articles of Association;
2. Appoint and dismiss members of the Board of Directors, and members of the Board of Commissioners;
3. Appointment of a public accounting firm that will provide audit services on annual historical financial information;
4. Other matters duly submitted in the GMS are in accordance with the provisions of the Articles of Association.

The rights of shareholders in the GMS include:

1. The right to attend and vote at the GMS and the right to authorize other parties if shareholders are unable to attend the GMS. The proxy form is available on the Company's website;
2. The right to propose the agenda of the GMS and candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors by 1 (one) or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with voting rights;

3. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi terkait mata acara rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Hak untuk bertanya di setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS;
5. Menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
6. Pemegang Saham juga memiliki hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan, antara lain (i) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, (iii) memberhentikan sementara anggota Direksi, (iv) menyetujui perubahan Anggaran Dasar, (v) menyetujui laporan tahunan, (vi) menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan (vii) menyetujui usulan alokasi penggunaan laba perusahaan, termasuk pembagian dividen.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN 2023

Di tahun 2023, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 5 Mei 2023. Penyelenggaraan RUPST dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana Perseroan membatasi jumlah pemegang saham yang hadir secara fisik dan menyediakan fasilitas secara elektronik bagi pemegang saham yang hadir secara *online* melalui fasilitas eAsy. KSEI. Pemegang saham yang hadir secara daring tetap mempunyai hak yang sama untuk dapat menyampaikan hak suaranya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders

3. At the time of the GMS, shareholders are entitled to obtain information related to the agenda of the meeting in accordance with prevailing laws and regulations;
4. The right to ask questions in every discussion of the agenda and every decision on the GMS agenda;
5. Receive part of the Company's profits intended for shareholders in the form of dividends and other profit distribution in accordance with prevailing laws and regulations.
6. Shareholders also have other rights, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, among others (i) appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, (ii) evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, (iii) suspend members of the Board of Directors, (iv) approve amendments to the Articles of Association, (v) approve the annual report, (vi) approve the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors, and (vii) approve the proposed allocation of the use of company profits, including dividend distribution.

IMPLEMENTATION OF ANNUAL GMS 2023

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which took place on May 5, 2023, was a general meeting of shareholders organised by the Company in 2023. The AGMS was conducted in adherence to health protocols; the Company restricted the physical attendance of shareholders and provided electronic resources via the eAsy.KSEI platform for those who attended virtually. Online-present shareholders retain the same rights pertaining to the exercise of their voting rights.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2022 yang Diselenggarakan di Tahun 2023 Stages of GMS for Fiscal Year 2022 Held in 2023

Pengumuman RUPS GMS Announcement	Pemanggilan RUPS GMS Invitations	Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	Penyampaian Ringkasan RUPS GMS Summary Submission	Penyampaian Risalah/ Berita Acara RUPS Submission of Minutes/ Minutes of GMS
Perseroan telah memberitahukan kepada pemegang saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS PT Kusatodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Electronical General Meeting System ("eASY. KSEI"), situs web bursa efek, dan situs web Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023.	Melakukan panggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat yang diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS PT Kusatodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Electronical General Meeting System ("eASY. KSEI"), situs web bursa efek, dan situs web Perseroan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023.	Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, 5 Mei 2023 di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, Pukul 09.00 WIB – Selesai.	Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat telah dipublikasikan Perseroan melalui situs web penyedia e-RUPS PT Kusatodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Electronical General Meeting System ("eASY. KSEI"), situs web bursa efek, dan situs web Perseroan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023.	Perseroan telah menyampaikan Risalah/Berita Acara RUPST kepada OJK dan IDX melalui sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Publik dan surat kepada OJK No. 041/DIR-STP/V/2023.
The Company has notified shareholders of the plan to hold the Meeting through the website of e-GMS provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), stock exchange website, and the Company's website on Wednesday, March 29, 2023.	Invitation to shareholders to attend the Meeting announced through the e-GMS website provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Electronic General Meeting System ("eASY. KSEI"), the stock exchange website, and the Company's website on Thursday, April 13, 2023.	The meeting held on Friday, May 5, 2023 at Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, 09.00 WIB – Conclusion.	The Company has published a summary of the meeting minutes through the e-GMS website provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Electronic General Meeting System ("eASY. KSEI"), the stock exchange website, and the Company's website on Monday, May 8, 2023.	The Company has submitted the Minutes of AGMS to OJK and IDX through the means of Integrated Electronic Reporting of Public Issuers and a letter to OJK No. 041/DIR-STP/V/2023.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.137.100.974 saham atau 99,958% dari 1.137.579.698 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
The Company's Annual General Meeting of Shareholders has been attended by shareholders and/or shareholders' proxies representing 1,137,100,974 shares or 99.958% of 1,137,579,698 shares which are all shares issued by the Company.

KETENTUAN KUORUM

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung 1 (satu) kali, yaitusesaatsebelumdimulainyaRapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

QUORUM PROVISIONS

Meeting attendance quorum is only counted 1 (one) time, which is shortly before the start of the Meeting. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, as well as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, a Meeting is valid if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) part of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

Kuorum kehadiran untuk RUPST tahun buku 2022 telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat bagi para Pemegang Saham Perseroan untuk setiap mata Acara Rapat.

The attendance quorum for the AGMS for the fiscal year 2022 has been fulfilled and the Meeting is valid and can take valid and binding resolutions for the Company's Shareholders for each agenda of the Meeting.

PROSES PERHITUNGAN SUARA

Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu LIVE Broadcasting. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Durasi pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan durasi pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan untuk melakukan dan memvalidasi perhitungan suara dalam rapat.

VOTE COUNTING PROCESS

The electronic voting process takes place in the eASY. KSEI application on the E-Meeting Hall menu, LIVE Broadcasting sub menu. When the electronic voting period per agenda of the Meeting begins, the system automatically runs the voting time with a maximum countdown of 5 (five) minutes. The duration of voting during the electronic voting process is the standard time set on the eASY.KSEI application. The Company has the right to determine the duration of direct voting electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and will be stated in the Rules of Conduct for the implementation of the Meeting through the eASY. KSEI application.

The Company has appointed an independent party, namely the Notary, Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., and PT Raya Saham Registra, a Share Registrar to conduct and validate the counting of votes in the meeting.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2022 dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan, yaitu:

Direksi

Direktur Utama : Ibu Juliawati Gunawan Halim
Direktur : Bapak Wong Tjin Tak
Direktur : Bapak Hartono Tanuwidjaja
Direktur : Bapak Wellington

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Komisaris Independen): Bapak Kusmayanto Kadiman
Komisaris: Bapak Eko Santoso Hadiprodjo
Komisaris Independen: Bapak Harry Mozarta Zen

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ATTENDANCE

The GMS for Fiscal Year 2022 was physically attended by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors. The following are members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the AGMS:

Board of Directors

President Director : Mrs. Juliawati Gunawan Halim
Director : Mr. Wong Tjin Tak
Director : Mr. Hartono Tanuwidjaja
Director : Mr. Wellington

Board of Commissioners

President Commissioner (Independent Commissioner): Mr. Kusmayanto Kadiman
Commissioner: Mr. Eko Santoso Hadiprodjo
Independent Commissioner: Bapak Harry Mozarta Zen

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

Rapat dipimpin oleh Bapak Kusmayanto Kadiman, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2023
UNTUK TAHUN BUKU 2022

Hingga Laporan tahunan ini di terbitkan, seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2022 telah seluruhnya dilaksanakan. Penjelasan atas setiap mata acara RUPS Tahun Buku 2022 tercantum dalam tabel di bawah ini.

HASIL RUPS TAHUNAN 2023 UNTUK TAHUN BUKU 2022
RESULTS OF THE 2023 ANNUAL GMS FOR THE FISCAL YEAR 2022

MATA ACARA RAPAT PERTAMA	
Mata Acara Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/	Agenda Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended 31-12-2022, including the Company's activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31-12-2022, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31-12-2022, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended 31-12-2022,
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022.	along with the granting of full release and discharge of responsibilities (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended 31-12-2022.
Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dari pemegang saham beserta tanggapan/jawaban yang diberikan oleh Perusahaan dalam mata acara pertama tersebut dicatat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 30 tanggal 5 Mei 2023 oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Akta tersebut kemudian disampaikan oleh Perusahaan kepada OJK, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK	Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions 1 (one) shareholder had raised questions There was 1 (one) shareholder asking questions. Questions from the shareholders and the responses/answers given by the Company in the first meeting agenda were recorded in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders Number 30 dated 5 May 2023 by Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. The Deed was subsequently submitted by the Company to OJK, as required under OJK Regulations
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 1.137.100.974 atau 100% atau lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat Tidak Setuju : - Abstain : -	Voting Outcomes/Decisions Affirmative: 1,137,100,974 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting Negative : - Abstentions : -

The meeting was chaired by Mr. Kusmayanto Kadiman, as the President Commissioner (Independent Commissioner) of the Company who has been appointed by the Board of Commissioners of the Company.

RESULTS OF THE 2023 ANNUAL GMS
RESOLUTION FOR THE FISCAL YEAR 2022

As of the publication of this Annual Report, all resolutions of the GMS for Fiscal Year 2022 have been fully implemented. Explanations of each agenda of the GMS for Fiscal Year 2022 are listed below.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama
Menyetujui dan mengesahkan (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, termasuk di dalamnya laporan kegiatan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Realisasi di tahun 2023:
Telah terealisasikan di tahun 2023.

Resolutions of First Agenda
Approved and ratified (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended 31-12-2022, including the Company's activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31-12-2022, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31-12-2022, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended 31-12-2022, along with the granting of full release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended 31-12-2022, to the extent their actions, including those relating to business activities which are derivatives of the Company's main business activities, are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2022 financial year.

Realization in 2023:
Has been completed in 2023.

MATA ACARA RAPAT KEDUA	
Mata Acara Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022.	Agenda Appropriation of the Company's profits for the financial year ended 31-12-2022.
Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Tidak ada	Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions None
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 1.137.100.974 atau 100% atau lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat Abstain : -	Voting Outcomes/Decisions Affirmative: 1,137,100,974 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting Abstentions: -
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan membukukan seluruh laba bersih tahun buku 2022 sebagai saldo laba, untuk membiayai kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan.	Resolutions of Second Agenda Approved on no distribution of dividend for the financial year ended 31-12-2022, and booked the net profit for the financial year ended 31-12-2022 as retained earnings, to finance the business activities and operational cost of the Company.
Realisasi di tahun 2023: Telah terealisasikan di tahun 2023	Realization in 2023: Has been completed in 2023.
MATA ACARA RAPAT KETIGA	
Mata Acara Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.	Agenda Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023 and tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Tidak ada Hasil Pemungutan Suara Setuju: 1.137.100.974 atau 100% atau lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat Tidak Setuju :- Abstain :- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Realisasi di tahun 2023: Telah terealisasikan. Sehubungan dengan keputusan RUPS untuk agenda ini, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh RUPS serta mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.	Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions None Voting Outcomes/Decisions Affirmative: 1,137,100,974 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting Negative :- Abstentions :- Resolutions of Third Agenda Approved the granting of authority to the controlling shareholder of the Company, namely PT Profesional Telekomunikasi Indonesia to determine salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honorariums and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023 and tantiem for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year of 2022, taking into account the proposals of the Board of Commissioners and the Remuneration and Nomination Committee of the Company. Realization in 2023: Has been completed. In regards to the GMS’ decision for this agenda, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, in accordance with the power and authority granted by the GMS and considering the proposal from the Board of Commissioners and the Company’s Remuneration and Nomination Committee, has determined the salary and allowances for members of the Board of Directors and the salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners for the fiscal year 2023, as well as tantiem for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year 2022.
--	---

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT	
Mata Acara Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31–12–2023. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Tidak ada Hasil Pemungutan Suara Setuju: 1.137.100.974 atau 100% atau lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat Tidak Setuju: - Abstain: -	Agenda Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31–12–2023. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions None Voting Outcomes/Decisions Affirmative: 1,137,100,974 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting Negative: - Abstentions: -

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat 1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan (termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31–12–2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut); b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. 2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat. Realisasi di tahun 2023: Telah terealisasikan. Sehubungan dengan keputusan RUPS untuk agenda ini, Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh RUPS dan berdasarkan kriteria dan batasan yang ditetapkan oleh RUPS, telah menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Resolutions of Fourth Agenda 1. Approved the granting of power and authority to appoint (including to determine the amount of honorarium and other requirements) the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountants who are part of such Registered Public Accounting Firm) to audit Company’s Consolidated Financial Statement for the financial year ended 31–12–2023 (thirty one December of two thousand and twenty three) to the Company’s Board of Commissioners with the following criteria and limitation: a. having international reputation (including the Registered Public Accountants who are part of such Registered Public Accounting Firm); b. registered in the Financial Services Authority; and c. other terms and conditions which are deemed appropriate by the Company’s Board of Commissioners with due observance of the recommendation from the Audit Committee. 2. Granted such authority and power as of the date of the approval of these resolutions by the Company’s AGMS. Realization in 2023: Has been completed. In regards to the GMS’ decision for this agenda, the Company’s Board of Commissioners, in accordance with the power and authority granted by the GMS and based on the criteria and limitations set by the GMS, has appointed (including determining the amount of the honorarium and other terms) a Registered Public Accountant (including Registered Public Accountants who are part of a Registered Public Accounting Firm) to conduct the audit of the Company’s Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.
---	--

MATA ACARA RAPAT KELIMA	
Mata Acara Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Tidak ada Hasil Pemungutan Suara Setuju: 1.137.100.974 atau 100% atau lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat Tidak Setuju: - Abstain: -	Agenda Approval on the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions None Voting Outcomes/Decisions Affirmative: 1,137,100,974 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting Negative: - Abstentions: -

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

- Mengangkat kembali:
 - Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen);
 - Bapak Harry Mozarta Zen sebagai Komisaris Independen;
 - Bapak Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Komisaris;
 - Nyonya Juliawati Gunawan Halim sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Wong Tjin Tak sebagai Direktur;
 - Bapak Hartono Tanuwidjaja sebagai Direktur; dan
 - Bapak Wellington sebagai Direktur

- Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

3.

Direksi

Direktur Utama: Juliawati Gunawan Halim
Direktur: Wong Tjin Tak
Direktur: Hartono Tanuwidjaja
Direktur: Wellington

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Komisaris Independen): Kusmayanto Kadiman
Komisaris: Eko Santoso Hadiprodjo
Komisaris Independen: Harry Mozarta Zen

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Realisasi di tahun 2023:

Telah terealisasi.
Sehubungan dengan keputusan RUPS untuk agenda ini, Direksi Perusahaan telah menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Akta No. 31 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, dan memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Resolutions of Fifth Agenda

- Re-appointed:
 - Mr. Kusmayanto Kadiman as President Commissioner (Independent Commissioner) of the Company;
 - Mr. Eko Santoso Hadiprodjo as Commissioner of the Company;
 - Mr. Harry Mozarta Zen as Independent Commissioner of the Company;
 - Mrs. Juliawati Gunawan Halim as President Director of the Company;
 - Mr. Wong Tjin Tak as Director of the Company;
 - Mr. Hartono Tanuwidjaja as Director of the Company; and
 - Mr. Wellington as Director of the Company

- Determined the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this AGMS until the closing of the 2026 Company's AGMS, as follows:

Board of Directors

President Director: Juliawati Gunawan Halim
Director: Wong Tjin Tak
Director: Hartono Tanuwidjaja
Director: Wellington

Board of Commissioner

President Commissioner (Independent Commissioner): Kusmayanto Kadiman
Commissioner: Eko Santoso Hadiprodjo
Independent Commissioner: Harry Mozarta Zen

- Granted the power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of the Board of Director and Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, and subsequently notify the competent authorities, and take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations

Realization in 2023:

Has been completed.
In regards to the GMS' decision for this agenda, the Company's Board of Directors has documented/declared the decision regarding the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in Deed No. 31 dated May 5, 2023, which was drawn up before the Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, a notary in West Jakarta, and has notified the relevant authorities, as well as carried out all and any actions necessary in relation to that decision in accordance with the prevailing laws and regulations.

HASIL RUPS TAHUNAN 2022 UNTUK TAHUN BUKU 2021

RESULTS OF THE 2022 ANNUAL GMS FOR THE FISCAL YEAR 2021

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Mata Acara

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen - Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda

Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2021 as well as approval and ratification of the Company's Financial Statement including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the fiscal year which ended on 31 December 2021 which has been audited by an Independent Public Accountant Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara and approval of the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 2021, as well as providing full settlement and release of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the fiscal year ended on 31 December 2021.

Resolutions of First Agenda

Approved and ratified the Annual Report of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, including the activity report of the Company, and the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2021, and Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, and to give full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company on their actions of supervision

and management performed for the financial year ended on December 31, 2021 (*acquit et de charge*), to the extent that their actions, including actions related to business activities derived from the main business of the Company are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year of 2021.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders

Realisasi di tahun 2022:

Telah terealisasi.

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquitted et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Realization in 2022:

Has been realized.

Approval and ratification of the Annual Report of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, including the activity report of the Company, and the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2021, and Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, and to give full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company on their actions of supervision and management performed for the financial year ended on December 31, 2021 (acquitted et de charge), to the extent that their actions, including actions related to business activities derived from the main business of the Company are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year of 2021.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Mata Acara

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda

Approval of the determination of the use of the Company's net profit/loss from the year ended on 31 December 2021.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Resolutions of Second Agenda

Approved not to distribute dividends for the financial year ended on December 31, 2021

Realisasi di tahun 2022:

Telah direalisasikan.

Persetujuan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Realization in 2022:

Has been realized.

Approval to not distribute dividend for the financial year ended on 31 December 2021.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Mata Acara

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda

Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will conduct audit of the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on 31 December 2021 and authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other terms of appointment.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pendelegasian wewenang ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Resolutions of Third Agenda

Agreed to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm registered in Financial Services Authority who will audit the Company's Financial Statement for the fiscal year ended on December 31, 2022 and assign authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the criteria for a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statement for the fiscal year ended on December 31, 2022 in accordance with applicable regulations, and authorize the Board of Directors of Company to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant Firm. This delegation of authority is due to the fact that the Company is still conducting the selection process for the appointment of the Public Accountant.

Realisasi di tahun 2022:

Telah direalisasikan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 September 2022, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Realization in 2022:

Has been realized.

Based on Resolutions of the Board of Commissioners of the Company dated September 15, 2022, the Company has appointed the Public Accountant Firm Tjahjadi & Tamara to audit the books and record of the Company for the financial year ended on December 31, 2022.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Mata Acara

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda

Approval of the determination of salary or honorarium as well as other allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Resolutions of Fourth Agenda

Approved to give authority and power to the controlling shareholder of the Company, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo), to determine the salaries and benefits for members of the Board of Directors and salaries or honorarium and benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year of 2022, taking into account the recommendations from the Board Commissioner of the Company, in which the Board of Commissioners of the Company will take the recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee into consideration

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders

Realisasi di tahun 2022:

Telah direalisasikan.

Perseroan melalui pengendalinya, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia telah menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Adapun penetapan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Realization in 2022:

Has been realized.

The Company, through its controller, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia has determined the remuneration or honorariums and allowance for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. Whereas such determination was based on recommendation from the Company's Board of Commissioners, which recommendation was also made in consideration with recommendation from the Company's Remuneration and Nomination Committee.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Mata Acara

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Agenda

Amendment to the composition of the Company's Board of Directors.

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

1. Menerima pengunduran diri Ibu Tjhin Khe Mei selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
2. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama: Ibu Juliawati Gunawan Halim
Direktur: Bapak Wong Tjin Tak
Direktur: Bapak Hartono Tanuwidjaja
Direktur: Bapak Wellington

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, OJK, serta otoritas lainnya sebagaimana perlu, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Resolutions of Fifth Agenda

1. Approved the resignation of Mrs. Tjhin Khe Mei from her position as a Director of the Company with gratitude for her services and performances for the Company;
2. Restated the composition of the Company's Board of Directors as of the closing of this Meeting until the closing of the 2023 Company's Annual General Meeting of Shareholders, shall be as follows:

Direksi

Direktur Utama: Ibu Juliawati Gunawan Halim
Direktur: Bapak Wong Tjin Tak
Direktur: Bapak Hartono Tanuwidjaja
Direktur: Bapak Wellington

3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of the Board of Directors of the Company in a deed made before a Notary, and subsequently notify the competent authorities, including but not limited to the Ministry of Legal and Human Rights, OJK, and other authorities if needed, and take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulations, one and the other without exception.

Realisasi di tahun 2022:

Telah direalisasikan.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah direalisasikan dan dituangkan oleh Perseroan dalam Akta No. 167 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

Realization in 2022:

Has been realized.

The change of composition in the Company's Board of Directors and Board of Commissioners was completed and stated in the Deed No. 167 dated May 27, 2022, made before Notary Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notary in West Jakarta.

HASIL RUPS LUAR BIASA TAHUN 2022

RESULTS OF THE 2022 EXTRAORDINARY GMS

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Mata Acara

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda

Approval of the amendment to the composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

1. Menerima pengunduran diri Bapak David Dharmatrismurti Thomas sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan.
2. Mengangkat:
Bapak Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Komisaris; Bapak Wellington sebagai Direktur; terhitung sejak penutupan Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Komisaris Independen):
Bapak Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen: Bapak Harry Mozarta Zen
Komisaris: Bapak Eko Santoso Hadiprodjo

Resolutions of First Agenda

1. Approved the resignation of Mr. David Dharmatrismurti Thomas from his position as an Independent Commissioner of the Company with gratitude for his services and performances for the Company.
2. Appointed:
Mr. Eko Santoso Hadiprodjo as Komisaris; Mr. Wellington as Director; Since the closing of this Meeting.
3. Restated the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the 2022 Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 2023, shall be as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner: Mr. Kusmayanto Kadiman (Independent Commissioner)
Independent Commissioner: Mr. Harry Mozarta Zen
Commissioner: Mr. Eko Santoso Hadiprodjo

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Direksi

Direktur Utama: Ibu Juliawati Gunawan Halim

Direktur : Ibu Tjhin Khe Mei

Direktur : Bapak Wong Tjin Tak

Direktur : Bapak Hartono Tanuwidjaja

Direktur : Bapak Wellington

Board of Directors

President Director: Mrs. Juliawati Gunawan Halim

Director: Ms. Tjhin Khe Mei

Director: Mr. Wong Tjin Tak

Director: Mr. Hartono Tanuwidjaja

Director: Mr. Wellington

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan, serta otoritas lainnya sebagaimana perlu, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

- Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in a deed made before a Notary, and subsequently notify the competent authorities, including but not limited to the Ministry of Legal and Human Rights, OJK, and other authorities if needed, and take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulations, one and the other without exception.

Realisasi di tahun 2022:

Telah direalisasikan.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah direalisasikan dan dituangkan oleh Perseroan dalam Akta No. 10 tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta Barat.

Realization in 2022:

Has been realized.

The change of composition in the Company's Board of Directors and Board of Commissioners was completed and stated in the Deed No. 10 dated March 1, 2022, made before Notary Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notary in West Jakarta.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Mata Acara

Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

Agenda

Approval of the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association with the 2020 Standard Classification of Indonesian Business Field (KBLI).

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sebagaimana yang telah dijelaskan atau diuraikan dalam Rapat.

Resolutions of Second Agenda

- Approved to adjust Article 3 of the Company Article of Association based on Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020 as explained or described in the GMS.

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menugaskan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan guna terlaksananya secara penuh hal yang diputuskan dalam Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Realisasi di tahun 2022:

Telah direalisasikan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah direalisasikan dan dituangkan oleh Perseroan dalam Akta No. 10 tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

- Approved to give full authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution to take any and each necessary action in relation with the resolutions, including but not limited to state/declare the resolutions in the form of deed made before a Notary, to amend and/or rearrange Article 3 of the Company's Articles of Associations in accordance with the resolutions as required by and in accordance with provisions of the applicable laws and regulations, and subsequently to apply for approval and/or submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Associations in the resolutions of this Meeting to the competent authorities including but not limited to the Ministry of Finance, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, and take any and each necessary action for the full implementation of the matters approved at this GMS in accordance with the prevailing laws and regulations, without any exceptions.

Realization in 2022:

Has been realized.

The change of the Company's Articles of Association was completed and stated in the Deed No. 10 dated March 1, 2022, made before Notary Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notary in West Jakarta.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang berfungsi melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta memastikan kegiatan usaha Perusahaan yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

DASAR HUKUM

Dasar pengangkatan Dewan Komisaris:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2023 STP memiliki Dewan Komisaris yang terdiri dari tiga anggota yang meliputi satu Komisaris Utama yang sekaligus merupakan Komisaris Independen, satu Komisaris dan satu Komisaris Independen. Dengan komposisi tersebut, susunan Dewan Komisaris STP telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik di mana komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 30% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perseroan yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

Berikut komposisi Dewan Komisaris STP per tanggal 31 Desember 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPS Luar Biasa 16 November 2021 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 5 Mei 2023 First Appointment: Extraordinary GMS November 16, 2021 Last Appointment: Annual GMS May 5, 2023	2023–2026

The Board of Commissioners has duties and responsibilities to supervise and provide advice to the Board of Directors and ensure that the Company's business activities are carried out in accordance with applicable regulations and the principles of good corporate governance.

LEGAL BASIS

Basis of appointment of the Board of Commissioners:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Articles of Association of the Company.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

BOARD OF COMMISSIONERS STRUCTURE AND COMPOSITION

In 2023, STP Board of Commissioners consists of three members, including one President Commissioner who is also an Independent Commissioner, one Commissioner and one Independent Commissioner. With this composition, the structure of the STP Board of Commissioners has complied with the provisions of POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies where the composition of the Board of Commissioners is at least 30% members of the Board of Commissioners from outside the Company as stipulated in the decision of appointment.

The following is the composition of the Board of Commissioners of STP as of December 31, 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Eko Santoso Hadiprojo	Komisaris Commissioners	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPS Luar Biasa 1 Maret 2022 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 5 Mei 2023 First Appointment: Extraordinary GMS May 5, 2023 Last Appointment: Annual GMS May 5, 2023	2023–2026
Harry Morzata Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPS Tahunan 22 Juli 2020 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 5 Mei 2023 First Appointment: Annual GMS July 22, 2020 Last Appointment: Annual GMS May 5, 2023	2023–2026

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dewan Komisaris dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila:

1. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
3. Melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan atau terlibat dalam tindakan lain yang merugikan Perseroan.
4. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam Perseroan.
5. Menduduki jabatan rangkap yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
6. Meninggal dunia.
7. Mengundurkan diri.

Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris tersebut untuk membela diri sesuai ketentuan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

Pursuant to the Company's Articles of Association, the term of office for members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years or until the closure of the GMS at the end of the said term of office, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners at any time before the end of their term.

The Board of Commissioners may be dismissed before the end of its term of office if:

1. Performance of duties was subpar.
2. Failure to comply with the provisions of the legal regulations and/or the Policy.
3. Commit acts that are detrimental to the Company or participate in other actions that are detrimental to the Company.
4. Imprisoned for committing criminal acts and/or making mistakes while performing supervisions within the Company.
5. Occupy a prohibited concurrent position as stipulated by the rules of law and/or Policy.
6. Passed-away.
7. Resigned.

Dismissal of a member of the Board of Commissioners at any time before the conclusion of the term of office shall be carried out by the GMS by declaring the cause and first giving the member of the Board of Commissioners the opportunity to defend himself in accordance with applicable regulations.

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Kriteria pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan POJK No. 33/2014, yaitu:

- Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/ atau Laporan keuangan kepada Otoritas jasa keuangan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan/lembaga/organisasi lain sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab 3 (tiga) mengenai profil masing-masing anggota Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT CRITERIA

The criteria for the Board of Commissioners appointment are as set forth under POJK 33/2014 as follows:

- having good moral and integrity as well as legal capacity to take any legal action;
- within the past five (5) years prior to appointment and during the course of directorship:
 - has never been declared bankrupt;
 - has never been performed as former member of the Board of Commissioners or Board of Directors which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
 - has never been sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector; and
 - has never been performed as former member of Board of Commissioners or Board of Directors whereby during each directorship:
 - has never been convened an Annual General Meeting of Shareholders,
 - his/her accountability, management and supervisory report rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders, and;
 - caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfill its obligations to submit annual reports and/ or financial reports to the Financial Service Authority;
- has a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;
- has a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.

BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITIONS

Information regarding the concurrent positions of members of the Board of Commissioners in other companies/institutions/organizations in 2023 is presented in chapter 3 (three) on the profile of each member of the Board of Commissioners.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara-cara sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris. Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Piagam/Pedoman Kerja (Board Manual) Dewan Komisaris digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris, serta untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya menurut Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Hingga akhir tahun 2023, STP telah memiliki Piagam/Pedoman Kerja (Board Manual) Dewan Komisaris yang telah disahkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Desember 2022 dan masih berlaku hingga akhir tahun pelaporan per 31 Desember 2023.

Piagam Dewan Komisaris memuat antara lain, tugas dan wewenang Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, nilai-nilai, pelaporan dan tanggung jawab serta tindakan-tindakan yang dilarang.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perseroan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan selambat-lambatnya sebelum

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners acts independently, among others, in the ways as stated in the Board of Commissioners Charter. The Board of Commissioners always upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company above its own.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Board of Commissioners' Board Manual is used as a guide in the implementation of duties and responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, as well as to provide direction for the Board of Commissioners in carrying out its supervisory functions in accordance with the Articles of Association and applicable regulations. Until the end of 2023, STP has a Board Manual of the Board of Commissioners which has been ratified and approved by the Board of Commissioners of the Company on December 16, 2022 and remained valid until the end of the reporting year as of December 31, 2023.

The Board Manual of the Board of Commissioners contains, among others, the duties and authorities, Meetings, values, reporting and responsibilities as well as prohibited acts.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners is entrusted with supervising and advising the Board of Directors as the Company's management, the implementation of whose duties, responsibilities, and authorities is reported to the GMS. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but shall act in accordance with the Board's decision. The Board of Commissioners' scope of activity, based on prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, comprises the following duties and responsibilities:

- To supervise and be responsible for the supervision on management policies, general management, both of the Company and its businesses, and provide advices to the Board of Directors.
- To approve the annual business plan of the Company, at the latest prior to the commencement of the following fiscal year.

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

- dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain meliputi:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja di bawah Dewan Komisaris, termasuk fungsi pengendalian internal Perusahaan, kepatuhan hukum, dan benturan kepentingan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan

Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan dan melaporkan kegiatan pengawasan tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan;

- To perform duties specifically granted to it under the Articles of Association, the applicable laws and regulations and/or pursuant to General Meeting of Shareholders resolutions.
- To perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the terms of the Company's Articles of Association and General Meeting of Shareholders resolutions.
- To examine and review of annual reports prepared by the Board of Directors as well as to execute such annual reports.
- To comply with the Articles of Association as well as the laws and regulations, as well as has to implement professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, as well as fairness.
- Ensuring the implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Company at all levels or tiers of the organization, including:
 - The execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
 - The performance of duties by committees and units under the Board of Commissioners, including the Company's internal control functions, legal compliance, and conflict of interest management.

To support the effective performance of such duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish and determine the composition of an audit committee in accordance with prevailing laws and regulations, as well as Capital Market regulations, and is also required to evaluate the performance of such committees at the end of each fiscal year of the Company.

In reverence to the aforementioned duties, the Board of Commissioners shall:

- Supervise the implementation of the Company's annual work plan and reporting its oversight to the General Meeting of Shareholders;
- Follow the progress of the Company's activities;

- Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perseroan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, persyaratan Komisaris Independen adalah diantaranya:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris Independen

Pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen selaras dengan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

- Provide opinions and advices to the General Meeting of Shareholders of any other matters that are deemed material for the management of the Company;
- Performing other supervisory duties as determined by the General Meeting of Shareholders; and
- Provide feedback to the Board of Directors' periodic reports and at any time necessary regarding the Company's developments.

INDEPENDENT COMMISSIONER

An independent commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, shareholding, or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or controlling shareholders, or with the Company that might hinder or jeopardize his ability to act independently in accordance with GCG principles.

Pursuant to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the requirements for an Independent Commissioner include:

- Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner.
- Does not own shares either directly or indirectly in the Company.
- Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.
- Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders of the Company.

Statement of Independence of Members of the Independent Board of Commissioners

The statement of independence of each Independent Commissioner is in line with that outlined in the provisions of Article 25 paragraph (1) POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as follows:

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Pemenuhan Aspek Independensi Fulfillment of Independence Aspects	
	Kusmayanto Kadiman	Harry Mozarta Zen
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months.	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan. Has no affiliation with the Company, other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Controlling Shareholders of the Company.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan. Does not have financial relationships, management relationships, share ownership relationships, family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Company.	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.	✓	✓

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan. Pemberitahuan rapat dikirim melalui surat elektronik terdaftar atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat, tanpa menghitung tanggal pemberitahuan dan tanggal rapat.

Rapat dapat diadakan baik dengan kehadiran fisik atau non-fisik. Rapat dengan kehadiran non-fisik dapat dilakukan melalui *teleconference*, *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya. Jika seorang anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri Rapat, ia dapat menunjuk seorang anggota lain dari Dewan Komisaris untuk mewakilinya dalam menghadiri Rapat berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners must hold a meeting at least once every 2 (two) months. Notice of meeting shall be sent by registered electronic mail or letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners at least 7 (seven) days prior to the meeting, without counting the notification date and meeting date.

Meetings can be held either with physical or non-physical attendance. Meetings with non-physical presence can be conducted via teleconference, video conference or other electronic media facilities. If a member of the Board of Commissioners is unable to attend the Meeting, he may appoint another member of the Board of Commissioners to represent him in attending the Meeting based on a specific proxy granted for that purpose.

Rapat Dewan Komisaris tahun 2023 telah diagendakan sebelum tahun berjalan yang dituangkan dalam program kerja Dewan Komisaris tahun 2022.

Selama tahun 2023, Rapat internal Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.

The 2023 Board of Commissioners meeting has been scheduled before the current year as outlined in the 2022 Board of Commissioners work program.

During 2023, internal meetings of the Board of Commissioners have been held 6 (six) times attended by members of the Board of Commissioners.

Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	6	6	100%
Eko Santoso Hadiprojo	Komisaris Commissioner	6	6	100%
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Agenda

Tanggal	Agenda
27 Januari 2023 January 27, 2023	Pembahasan dan persetujuan atas Kinerja dan Pencapaian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Anggaran dan Rencana Kerja Perseroan Tahun Buku 2023 Discussion and approval on the Company's Performance and Achievements for Fiscal Year 2022 and the Company's Budget and Work Plan for Fiscal Year 2023
20 Maret 2023 March 20, 2023	Pembahasan dan persetujuan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 Discussion and approval on the Company's Financial Result for Fiscal Year 2022
28 April 2023 April 28, 2023	Pembahasan dan persetujuan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 1 Tahun Buku 2023 Discussion and approval on the Company's Financial Result for Q1 Fiscal Year 2023
26 Juni 2023 June 26, 2023	Diskusi Perubahan Anggota Komite Audit dan <i>Update</i> ISO Discussion on Changes of Audit Committee Members and ISO Updates
27 Juli 2023 July 27, 2023	Pembahasan dan persetujuan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 Discussion and approval on the Company's Financial Result for Q2 Fiscal Year 2023
25 Oktober 2023 October 25, 2023	Pembahasan dan persetujuan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku Q3 2023 Discussion and approval on the Company's Financial Result for Q3 Fiscal Year 2023

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS BERSAMA DIREKSI

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Bersama Direksi wajib menyelenggarakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi tahun 2023 telah diagendakan sebelum tahun berjalan yang dituangkan dalam program kerja Dewan Komisaris tahun 2022.

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS WITH THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners with the Board of Directors must hold periodic joint meetings at least once in 4 (four) months. The 2023 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors has been scheduled before the current year as outlined in the 2022 work program of the Board of Commissioners.

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

Selama tahun 2023, Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

During 2023, the Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors has been held 6 (six) times which was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi Joint Meeting of Board of Commisioner and Board of Director

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	6	6	100%
Eko Santoso Hadiprojo	Komisaris Commissioner	6	6	100%
Harry Morzata Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris BOC Average Attendance				100%
Juliawati Gunawan Halim	Direktur Utama President Director	6	6	100%
Wong Tjin Tak	Direktur Director	6	6	100%
Hartono Tanuwidjaja	Direktur Director	6	6	100%
Wellington	Direktur Director	6	6	100%
Rata-rata Kehadiran Direksi BOD Average Attendance				100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi BOC and BOD Average Attendance				100%

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris yang baru menjabat akan mendapatkan program pengenalan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

Untuk meningkatkan pemahaman Dewan Komisaris, Perseroan juga menyampaikan dokumen-dokumen penunjang lainnya antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Anggaran Dasar, Rencana Jangka Panjang Perseroan, dan sebagainya.

Di tahun 2023, STP tidak menyelenggarakan program ini dikarenakan komposisi Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The newly appointed Board of Commissioners will receive an induction program organized by the Corporate Secretary. The purpose of this program is to provide an overview of business activities, future company plans, work guidelines and other matters that are the responsibility of the Board of Commissioners.

To improve the understanding of the Board of Commissioners, the Company also submits other supporting documents including the Annual Report, the Company's Work Plan and Budget, Articles of Association, the Company's Long-Term Plan, and so forth.

In 2023, STP did not hold this program as the composition of the Board of Commissioners has not changed from the previous year.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Dewan Komisaris dan sejalan dengan program pengembangan Dewan Komisaris, Perseroan senantiasa memutakhirkan pengetahuan Dewan Komisaris melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar, *conference*, ataupun dalam bentuk kunjungan kerja serta studi banding (*benchmark*).

Pada tahun 2023, realisasi Program Pelatihan dan Pengembangan yang dilakukan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners Member	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Organization
Kusmayanto Kadiman	Seminar Nasional Era baru Industri Pembiayaan National Seminar on the New Era of the Financing Industry	6 Juni 2023 June 6, 2023	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan atas kegiatan operasional Perseroan, di antaranya:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antaralain melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta tugas komite komite dan satuan kerja di bawah Dewan Komisaris, termasuk fungsi pengendalian internal Perseroan, kepatuhan hukum, dan benturan kepentingan.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

To improve the competence and knowledge of the Board of Commissioners and in line with the development program of the Board of Commissioners, the Company constantly updates the knowledge of the Board of Commissioners through training activities, workshops, seminars, conferences, or in the form of work visits and comparative studies (*benchmarks*).

In 2023, the realization of the Training and Development Program carried out by the Board of Commissioners is as follows:

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2023

During 2023, the Board of Commissioners has carried out supervisory duties over the Company's operational activities, including:

- Supervised and be responsible for supervising management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Board of Directors.
- Provided approval for the Company's annual work plan.
- Researched and review the annual report and financial statements prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
- Ensured the implementation of Good Corporate Governance, among others, assessing the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the duties of committees and units under the Board of Commissioners, including the Company's internal control functions, legal compliance, and conflicts of interest.

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Publik (**"POJK No. 21"**), dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 (**"SE No. 32"**) Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perseroan (**"Kebijakan Penilaian"**). Kebijakan Penilaian telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Kebijakan Penilaian ini adalah pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Berdasarkan Kebijakan Penilaian, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan pada setiap tahun buku oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan metode *self-assessment* atas kinerja individual dan kolegal Dewan Komisaris. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek atau kriteria penilaian, antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - Pelaksanaan fungsi pengawasan atas kegiatan pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi;
 - Pelaksanaan fungsi pemberian persetujuan dan masukkan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan; dan
 - Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT POLICY

In implementing good corporate governance as required by the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance for Public Companies (**"POJK No. 21"**), which is further regulated in the Financial Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 (**"SE No. 32"**) on Guidelines for Corporate Governance for Public Companies, the Company has formulated a Performance Assessment Policy for the Company's Board of Commissioners (**"Assessment Policy"**). The Assessment Policy has been reviewed and approved by the Company's Board of Commissioners. This Assessment Policy is a guideline used as a form of accountability for the performance assessment of the Board of Commissioners.

According to the Assessment Policy, the performance of the Board of Commissioners is assessed annually by each member of the Board of Commissioners using a self-assessment method on their individual and collegial performance. With this self-assessment, it is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to continuously improving the performance of the Board of Commissioners.

The implementation of performance assessment by each member of the Company's Board of Commissioners is carried out with reference to aspects or assessment criteria, including the following:

- Implementation of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners, which include, among others:
 - Execution of supervisory functions over the management activities of the Company carried out by the Board of Directors;
 - Execution of functions for giving approvals and input on the Company's annual work plans and budgets; and
 - Execution of functions, duties, and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.

- Pelaksanaan pengawasan atas penerapan kepatuhan (*compliance*) dan tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- Tingkat kehadiran Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan bersama dengan Direksi
- Pelaksanaan fungsi pengawasan atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja melalui proses *self-assessment* untuk selanjutnya akan menjadi dasar bagi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk memberikan masukan dalam penentuan skema kompensasi/insentif bagi Dewan Komisaris dan pertimbangan dasar bagi Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan penunjukan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris akan disampaikan melalui Laporan Dewan Komisaris (sebagai bagian dari Laporan Tahunan) yang kemudian akan menjadi salah satu mata acara/agenda yang dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Setiap tahun, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris. Penilaian ini dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris menjadi bahan penilaian untuk perpanjangan masa kerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya. Penilaian di antaranya meliputi kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif sesama anggota Komite, integritas, kemampuan memahami visi misi dan rencana strategis Perseroan, serta kualitas atas saran/

- Oversight of the implementation of compliance and good corporate governance.
- Attendance level of Commissioners in the Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors.
- Oversight of the performance of committees under the Board of Commissioners.

The performance assessment results through the self-assessment process will subsequently serve as a basis for the Company's Nomination and Remuneration Committee to provide input in determining compensation/incentive schemes for the Board of Commissioners and as a fundamental consideration for the Company's Shareholders to determine the appointment or nomination of the respective Board of Commissioners members.

The entire execution of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners will be conveyed through the Board of Commissioners Report (as part of the Annual Report) which will then become one of the agenda items discussed and approved in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING COMMITTEE

The Board of Commissioners annually evaluates the performance of members of the Board of Commissioners' Supporting Committee. This assessment is carried out both individually and collectively utilizing assessment procedures in line with the Board of Commissioners' Decision. The results of the performance assessment of members of the Board of Commissioners' Supporting Committee become assessment material for the extension of the service duration of members of the Board of Commissioners' Supporting Committee for the following year. The assessment includes attendance at meetings, the ability to work together and communicate actively among Committee members,

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

rekomendasi yang diberikan terkait program kerja masing-masing Komite Penunjang Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Sistem *Whistle Blower*.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, termasuk terkait rekomendasi pengangkatan, pergantian dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit internal dan eksternal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi kebijakan remunerasi dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan.

Komite sistem *whistle blower* memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menyampaikan pelaporan rahasia mengenai pelanggaran oleh pihak internal perusahaan.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing komite dan menilai bahwa sepanjang tahun 2023, pelaksanaan tugas masing-masing komite telah dilaksanakan dengan baik sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS, besaran remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh pemegang saham pengendali Perseroan dengan mempertimbangkan

integrity, the ability to understand the Company's vision and mission and strategic plan, as well as the quality of the suggestions/recommendations given regarding the work program of each Supporting Committee of the Board of Commissioners.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by 3 (three) Committees, which are the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Whistle Blower System Committee.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in order to support the effectiveness of the implementation of duties and supervisory functions on matters related to financial statements, including recommendations for appointment, replacement and implementation of duties and responsibilities of internal and external audit functions as well as compliance with prevailing laws and regulations.

The Remuneration and Nomination Committee has an important role in evaluating remuneration policies and examining the overall performance of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The whistle blower system committee has an important role in implementing the principles of good corporate governance and submitting confidential reports regarding violations by internal company parties.

In 2023, the Board of Commissioners has assessed the performance of each committee and evaluated that throughout 2023, the implementation of the duties of each committee has been carried out properly according to the criteria set by the Board of Commissioners.

REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Remuneration Determination Procedure for the Board of Commissioners

Based on the resolution of the GMS, the amount of remuneration of the Board of Commissioners is determined by the controlling shareholder of the

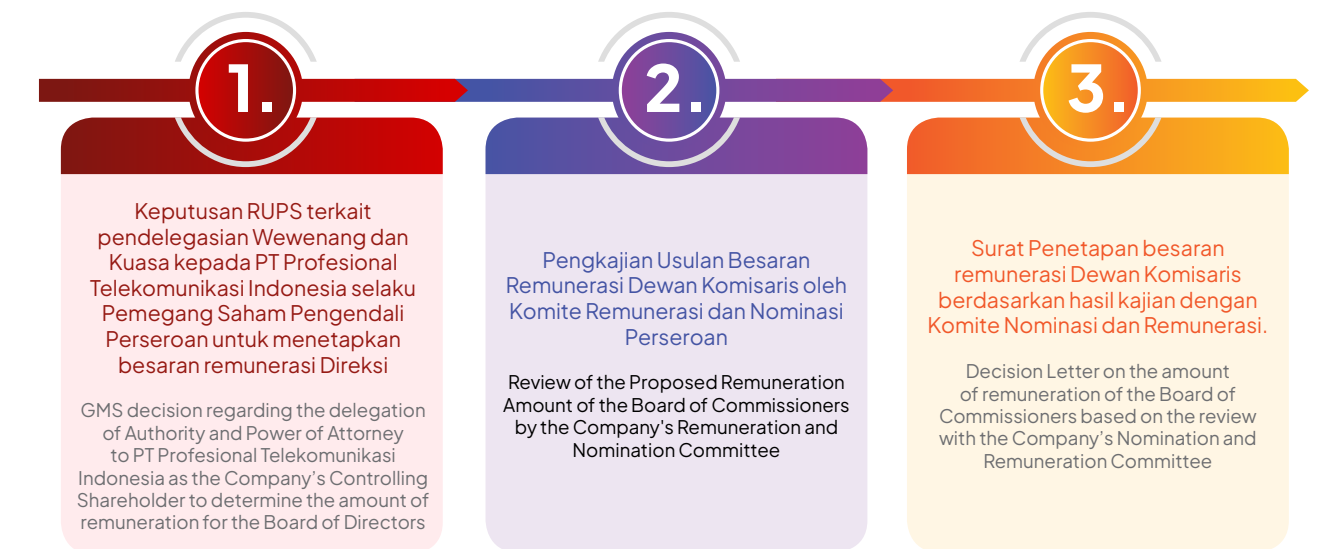
usulan dari Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

Company, by considering the proposal from the Board of Commissioners based on recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee. Some of the factors to consider in determining Remuneration are as follows:

1. Reports from independent manpower consultants;
2. Other companies that have the same or similar business as the Company;
3. Classification and portion of work of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
4. The current cost of living in Jakarta is based on, but not limited to, the national inflation rate.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Determination Process



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023 adalah sebesar Rp 27.015.882.955*.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi untuk Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners' Remuneration Structure

The total remuneration for all members of the Board of Commissioners for the financial year of 2023 is Rp 27,015,882,955*.

The remuneration structure that indicates the Remuneration component for Board of Commissioners during 2023 is as follows:

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Nama Name	Gaji Salary	Tunjangan* Allowance*					Jumlah Remunerasi/Tahun (Gross)* Total Remuneration/Year (Gross)*		
		Transportasi Transportation	Kepemilikan Kendaraan Car Ownership Program	Pajak Tax	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan lain Other Allowances	Di bawah 1 miliar Rupiah Under 1 billion Rupiah	Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah	Di atas 2 miliar Rupiah Above 2 billion Rupiah
Kusmayanto Kadiman	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓
Harry Mozart Zen	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Eko Santoso Hadiprodjo	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓

*) Tunjangan dan Remunerasi yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris, termasuk untuk jabatan yang bersangkutan pada entitas lain di seluruh Grup Perseroan (sepanjang relevan) | Allowance and Remuneration received by the Members of the Board of Commissioners including their other positions in the other entities within the Company Group (as relevant)

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

STP mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris untuk memberitahukan kepada Perseroan apabila terjadi perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan kepemilikan akan saham Perseroan.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33") mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK No. 33, OJK mengeluarkan POJK No. 21, dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32. POJK No. 21 dan SE No. 32 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP POLICY

STP requires all members of the Board of Commissioners to notify the Company if there is a change in ownership of the Company's shares, either directly or indirectly, no later than 3 (three) working days after the change of ownership of the Company's shares.

Throughout 2023, there are no members of the Board of Commissioners who own shares of the Company, either directly or indirectly.

RESIGNATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS WHO ARE INVOLVED IN FINANCIAL

Law No. 40 of 2007 concerning a Limited Liability Company (the "Company Law") and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or Public Company ("POJK No. 33") stipulates that one of the requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners is having never been convicted for commission of a criminal offense that damages the state finance and/or the relevant financial sector. In accordance with the Company Law and POJK No. 33, OJK issued POJK No. 21, which POJK No. 21 further stipulated in SE No. 32. POJK No. 21 and SE No. 32 among other things provides recommendation to the public company to have a policy regarding the resignation procedure for members of the Board of Commissioners who may be involved in a financial crime. Such financial crimes are considered to be manipulation and various forms of corruption in financial service activities as well as money laundering.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No. 21 dan SE No. 32 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memiliki keragaman keahlian, latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman industri yang merupakan faktor penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang diemban oleh Dewan Komisaris.

Informasi mengenai keberagaman Dewan Komisaris dapat dilihat pada Profil masing-masing Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Following the POJK No. 21 and SE No. 32, the Company has prepared the policy of resignation for the members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes. The policy of resignation was reviewed and approved by the Board of Commissioners.

The resignation procedure for the members of the Board of Commissioners are as follows:

1. A member of the Board of Commissioners shall resign from their position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;
2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK no later than 2 (two) working days after receiving the resignation letter;
3. The Company shall convey a General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the resignation of such Commissioner within a maximum period of 90 (ninety) days after receiving his resignation letter; The members of the Board of Commissioners who resigned shall be held liable from the date of their appointment to their position until the date of resignation as approved by the GMS.
4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVERSITY

The composition of the Company's current Board of Commissioners has a diversity of expertise, background, knowledge, and industry experience which are important factors to ensure the effectiveness of the implementation of the supervisory function on the Company's management carried out by the Board of Commissioners.

Information regarding the diversity of the Board of Commissioners is presented in the Profile of each Board of Commissioners in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

DIREKSI

Board of Directors

DIREKSI

Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan Perseroan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi. Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masing-masing anggota Direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara.

DASAR HUKUM

Penunjukkan Direksi berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

RUPS memiliki wewenang menentukan komposisi dan jumlah Direksi dengan tetap memperhatikan visi dan misi Perseroan. Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi dalam Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 5 Mei 2023. Komposisi Direksi hingga 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Juliawati Gunawan Halim	Direktur Utama President Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPS Luar Biasa 16 November 2021 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 5 Mei 2023 Basis of First Appointment: Extraordinary GMS November 16, 2021 Basis of Last Appointment: Annual GMS May 5, 2023	2023– 2026
Wong Tjin Tak	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPS Luar Biasa 16 November 2021 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 5 Mei 2023 Basis of First Appointment: Extraordinary GMS November 16, 2021 Basis of Last Appointment: Annual GMS May 5, 2023	2023– 2026
Hartono Tanuwidjaja	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPS Luar Biasa 16 November 2021 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 5 Mei 2023 Basis of First Appointment: Extraordinary GMS November 16, 2021 Basis of Last Appointment: Annual GMS May 5, 2023	2023– 2026
Wellington	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPS Luar Biasa 1 Maret 2022 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPS Tahunan 5 Mei 2023 Basis of First Appointment: Extraordinary GMS March 1, 2022 Basis of Last Appointment: Annual GMS May 5, 2023	2023– 2026

The Board of Directors is the Company's organ with full authority and responsibility for managing the Company's activities and implementing GCG at all levels or levels of the Organization. In line with the rules of the Company's Articles of Association, the Board of Directors may represent the Company both within and outside of court. Each member of the Board of Directors has the authority to make decisions in accordance with the segregation of duties and authorities, however the execution of duties remains a collective duty. Each member of the Board of Directors, including the President Director, holds an equal standing.

LEGAL BASIS

Appointment of the Board of Directors refers to:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Articles of Association of the Company.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

BOARD OF DIRECTORS STRUCTURE AND COMPOSITION

The GMS has the authority to determine the composition and number of Directors while taking into account the vision and mission of the Company. In 2023, there was no change in the composition of the Board of Directors based on the resolution of the Annual GMS dated May 5, 2023. The composition of the Board of Directors until December 31, 2023 is as follows:

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan Direksi dimulai sejak tanggal RUPS mengangkat Direksi tersebut untuk jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar sampai ditutupnya RUPST yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi di perusahaan/lembaga/organisasi lain sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada bab 3 (tiga) mengenai profil masing-masing anggota Direksi.

Untuk rangkap jabatan Direksi Perseroan, Perseroan tunduk kepada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dituangkan lebih lanjut dalam Piagam Direksi Perseroan, yaitu Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, tidak ada Anggota Direksi Perseroan yang menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan, baik sebagai Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris di perusahaan terbuka lainnya.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan Direksi berdasarkan kriteria POJK No. 33/2014 adalah:

1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

BOARD OF DIRECTORS TENURE

The term of office for the Board of Directors begins from the date the GMS appoints the Board of Directors for a period specified in the Articles of Association until the closure of the 3rd (third) Annual GMS after the date of their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Directors at any time.

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

Information regarding the concurrent positions of members of the Board of Directors in other companies/institutions/organizations in 2023 is presented in chapter 3 (three) on the profile of each member of the Board of Directors.

For the concurrent positions of the Company's Board of Directors, the Company adheres to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which is further detailed in the Company's Board of Directors Charter. As such, the Board of Directors can only hold concurrent positions as:

- a. a member of the Board of Directors in no more than 1 (one) other Issuer or Public Company; and
- b. a member of the Board of Commissioners in no more than 3 (three) other Issuers or Public Companies.

As of the date of this annual report, no member of the Company's Board of Directors holds more than 2 (two) positions, whether as a Member of the Board of Directors or a Member of the Board of Commissioners in other public companies.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT CRITERIA

The Company's Board of Directors has fulfilled the following criteria as stipulated by POJK 33/2014:

1. have good morals and integrity as well as capable of doing legal action;
2. within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
 - a. has never been declared bankrupt;
 - b. has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners that is found guilty of causing a company to be declared bankrupt;

DIREKSI Board of Directors

DIREKSI Board of Directors

- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan keuangan kepada Otoritas jasa keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara-cara sebagaimana tertuang dalam Piagam Direksi. Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri.

PIAGAM DIREKSI

Piagam/Pedoman Kerja (*Board Manual*) Direksi digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar kinerja Direksi dapat terkoordinasi dengan baik dalam mengelola kegiatan usaha Perseroan. *Board Manual* Direksi ini senantiasa dievaluasi secara berkala agar sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Saat ini Piagam Direksi Perseroan telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Perseroan pada tanggal 16 Desember 2022 dan masih berlaku hingga akhir tahun pelaporan per 31 Desember 2023.

- c. has never been punished for committing criminal acts that are detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and
- d. has never been a member of the Board of Directors and/or any member of the Board of Commissioners during his tenure:
 - i. has never convened an annual GMS;
 - ii. his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has not been accepted by the GMS or has not granted responsibility as a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and
 - iii. has never caused a company obtaining permit, approval or registration from the Financial Services Authority fails to fulfill the obligation to submit the Annual Report and/or Financial Statement to the Financial Services Authority.
3. have a commitment to comply with laws and regulations; and
4. have knowledge and/or expertise in the field.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors acts independently, among others, in the ways as stated in the Board of Directors Charter. The Board of Directors always upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company above its own.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

The Board of Directors' Board Manual serves as a guide in carrying out its duties and responsibilities, allowing the Board of Directors' performance to be properly coordinated in managing the Company's business activities. The Board of Directors' Board Manual is always assessed regularly to ensure that it is in compliance with changes in applicable laws and regulations and that it is tailored to the needs of the Company. The Company's Board of Directors Charter was reviewed and approved by the Company's Board of Directors on December 16, 2022, and it remains valid until the end of the fiscal year on December 31, 2023.

Piagam Direksi memuat antara lain, tugas dan wewenang Direksi, Rapat Direksi, nilai-nilai, pelaporan dan tanggung jawab serta tindakan-tindakan yang dilarang.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar dan Piagam Direksi, antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengambil tindakan yang terkait dengan manajemen Perseroan demi mencapai kepentingan terbaik Perseroan dan sasaran Perseroan yang terdiri dari:
 - a. Menjaga dan mengelola aset Perseroan; dan
 - b. Berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan dan operasional Perseroan.
2. Secara sah mewakili dan mengikat Perseroan, termasuk dalam pengadilan yang telah tercantum dalam hukum dan peraturan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan-keputusan yang disepakati oleh pemegang saham.

LINGKUP KERJA DIREKSI

1. Memimpin dan mengambil tindakan yang terkait dengan manajemen Perseroan demi mencapai kepentingan terbaik Perseroan dan sasaran Perseroan yang terdiri dari:
 - A. Menjaga dan mengelola aset Perseroan; dan
 - B. Berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan dan operasional Perseroan.
2. Secara sah mewakili dan mengikat Perseroan, termasuk dalam pengadilan yang telah tercantum dalam hukum dan peraturan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan-keputusan yang disepakati oleh pemegang saham.

Tanggung Jawab Pribadi dan Bersama Direksi

Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad yang baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi baik secara pribadi maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan jika dinyatakan bersalah melakukan

The Board of Directors' Board Manual contains, among others, the duties and authorities of the Board of Directors, Meetings, values, reporting and responsibilities as well as prohibited acts.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors has the collective duty and responsibility in managing the Company. The Articles of Association and the Board of Directors' Board Manual outline its duties and responsibilities, which include the following:

1. To lead and take actions in relation to the management of the Company in the best interests of the Company and to further the Company's objectives, which include:
 - a. Maintaining and managing the Company's assets; and
 - b. Seeking to improve the efficiency and effectiveness of the Company's employees and operations.
2. To officially represent and bind the Company, including in a court of law, as provided for in the laws and regulations, the Articles of Association and/or resolutions adopted by the shareholders.

SCOPE OF WORK OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. To lead and take actions in relation to the management of the Company in the best interests of the Company and to further the Company's objectives, which include:
 - A. Maintaining and managing the Company's assets; and
 - B. Seeking to improve the efficiency and effectiveness of the Company's employees and operations.
2. To officially represent and bind the Company, including in a court of law, as provided for in the laws and regulations, the Articles of Association and/or resolutions adopted by the shareholders.

Board of Directors Joint and Individual Responsibility

The Board of Directors must undertake its duties with good intentions and with full responsibility. Each member of the Board of Directors is individually and collectively liable for any loss to the Company if the individuals concerned are found to be guilty of fraud

DIREKSI
Board of Directors

DIREKSI
Board of Directors

pelanggaran atau lalai atas pekerjaannya selama menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu anggota Direksi ditunjuk oleh Direksi sebagai individu yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pemantauan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam setahun dan dapat dilakukan setiap waktu tergantung dengan tingkat kebutuhan, hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemberitahuan rapat dikirim melalui surat elektronik terdaftar atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat, tanpa menghitung tanggal pemberitahuan dan tanggal rapat. Rapat dapat diadakan baik dengan kehadiran fisik atau non-fisik. Rapat dengan kehadiran non-fisik dapat dilakukan melalui *teleconference*, *videoconference* atau fasilitas media elektronik lainnya. Jika seorang anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat, ia dapat menunjuk seorang anggota lain dari Direksi untuk mewakilinya dalam menghadiri Rapat berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.

Rapat Direksi tahun 2023 telah diagendakan sebelum tahun berjalan yang dituangkan dalam program kerja Direksi tahun 2022.

Selama tahun 2023, Rapat internal Direksi telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh anggota Direksi dengan agenda rapat membahas antara lain hal-hal yang memerlukan persetujuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yakni antara lain mengenai rencana kerja Perseroan, laporan keuangan Perseroan dan pelaksanaan RUPS Perseroan.

Rapat Direksi
Board of Directors Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Juliawati Gunawan Halim	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Wong Tjin Tak	Direktur Director	12	12	100%

or negligent in the performance of their duties in accordance with the provisions of the law.

One of the members of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors as the person responsible for the application and monitoring of GCG for the Company.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Directors must hold periodic meetings at least once every month or 12 (twelve) times a year and can be done at any time depending on the level of need.

Notice of meeting shall be sent by registered electronic mail or letter delivered directly to each member of the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the meeting, without counting the notification date and meeting date. Meetings can be held either with physical or non-physical attendance. Meetings with non-physical presence can be conducted via teleconference, video conference or other electronic media facilities. If a member of the Board of Directors is unable to attend the Meeting, he may appoint another member of the Board of Directors to represent him in attending the Meeting pursuant to a specific proxy granted for that purpose.

The 2023 Board of Directors Meeting has been scheduled prior to the current year as outlined in the 2022 Board of Directors work program.

During 2023, internal meetings of the Board of Directors have been held 12 (twelve) times attended by members of the Board of Directors with the agenda of discussing the matters which are required approvals of Board of Directors and/or Board of Commissioners, i.e. business plan of the Company, financial statements of the Company and GMS of the Company.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Hartono Tanuwidjaja	Direktur Director	12	12	100%
Wellington	Direktur Director	12	12	100%

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN
UNTUK DIREKSI

Direksi yang baru menjabat akan mendapatkan program pengenalan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan. Tujuan dari program ini adalah memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi. Selain pemaparan Perseroan, dalam program pengenalan Perseroan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang lainnya antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, Rencana Jangka Panjang Perseroan, dan sebagainya.

Pada tahun 2023, tidak terdapat pengangkatan Direksi baru sehingga tidak dilakukan program pengenalan perusahaan untuk Direksi.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, Direksi Perseroan tidak mengikuti program pendidikan atau pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014, usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. STP memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang berfungsi untuk menyiapkan pimpinan Perseroan, khususnya anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam menjalankan kegiatan Operasional Perseroan.

Atas dasar tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kebijakan suksesi Direksi yang menetapkan persyaratan pencalonan Direksi yang akan ditetapkan dalam RUPS mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR
DIRECTORS

The newly appointed Board of Directors will receive an induction program organized by the Corporate Secretary. The purpose of this program is to provide an overview of business activities, future company plans, work guidelines and other matters that are the responsibility of the Board of Directors. In addition to the Company's presentation, the Company's induction program also conveyed other supporting documents including the Annual Report, the Company's Work Plan and Budget, Articles of Association, the Company's Long-Term Plan, and so forth.

As no new Directors were appointed in 2023, there was no company induction program for Directors.

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY
DEVELOPMENT PROGRAM

During 2023, the Board of Directors of the Company did not attend any educational program or training related to the business activities of the Company.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

Referring to POJK No. 33/POJK.04/2014, proposals for appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function. STP has a Remuneration and Nomination Committee that functions to prepare the Company's leaders, especially members of the Board of Directors who are professional, have integrity, are dedicated and have competence in carrying out the Company's operational activities.

As such, the Remuneration and Nomination Committee has a succession policy of the Board of Directors which determines the requirements for the nomination of the Board of Directors to be determined in the GMS referring to the Company's Articles of

DIREKSI Board of Directors

DIREKSI Board of Directors

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2023

Selama Tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas yang bersifat strategis, antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan Perseroan dan selalu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan; dan
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan.
4. Menyusun laporan tahunan.
5. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perusahaan.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR UTAMA)

Dalam rangka penerapan tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21 dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan telah menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Direksi Perseroan ("Kebijakan Penilaian"). Kebijakan Penilaian telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Perseroan. Kebijakan Penilaian ini menjadi pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi.

Berdasarkan Kebijakan Penilaian, penilai kinerja setiap anggota Direksi, termasuk Direktur Utama, dilakukan pada setiap tahun buku oleh masing-masing Direksi dengan menggunakan metode *self-assessment* atas kinerja individual dan kolegal Direksi. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.

Association, POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

During 2023, the Board of Directors has carried out strategic duties, including the following:

1. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the objectives set by the articles of association and the provisions of the prevailing laws and regulations, as well as for the benefit of the Company and strives to make efforts to improve the efficiency and effectiveness of the Company.
2. Controlling, maintaining and managing the Company's assets.
3. Develop an annual work plan containing the Company's annual budget.
4. Develop an annual report.
5. Apply GCG principles in every activity of the Company.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR

In implementing good corporate governance as required by POJK No. 21, which is further detailed in SE No. 32 on the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies, the Company has developed a Performance Assessment Policy for the Company's Board of Directors ("Assessment Policy"). The Assessment Policy was reviewed and approved by the Company's Board of Directors. This Assessment Policy serves as a guideline used as a form of accountability for the performance assessment of the Board of Directors.

According to the Assessment Policy, the performance evaluation of each member of the Board of Directors, including the President Director, is conducted annually by each Director using a self-assessment method on their individual and collegial performance. This self-assessment aims to help each Director contribute continuously towards improving the performance of the Board of Directors.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh masing-masing Direksi Perseroan, termasuk Direktur Utama akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek atau kriteria penilaian, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan fungsi memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 3. Pengendalian, pemeliharaan dan pengelolaan aset Perseroan;
 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pemenuhan dan pencapaian *Company Shared Key Performance Indicators* (KPI) atau target, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota Direksi, yang telah disusun dan disepakati sebelumnya.
- c. Penerapan kepatuhan (*compliance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- d. Tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan bersama dengan Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja melalui proses *self-assessment* untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan skema kompensasi/insentif bagi Direksi dan pertimbangan dasar bagi Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan penunjukan atau pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi akan disampaikan melalui Laporan Direksi (sebagai bagian dari Laporan Tahunan) yang

The implementation of performance assessment by each Director of the Company, including the President Director, will be based on various aspects or evaluation criteria, including the following:

- a. Execution of functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors, which includes:
 1. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the Company's objectives;
 2. Enhancing the efficiency and effectiveness of the Company;
 3. Control, maintenance, and management of the Company's assets;
 4. Preparation of the Company's annual work plan and budget to be submitted to the Board of Commissioners; and
 5. Fulfillment of functions, duties, and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.
- b. Fulfillment and achievement of Company Shared Key Performance Indicators (KPIs), or targets, according to the duties and functions of each member of the Board of Directors, which have been previously arranged and agreed upon.
- c. Implementation of compliance and good corporate governance.
- d. Attendance level of the Directors in the Board Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners.

The performance assessment results through the self-assessment process will subsequently be presented to the President Director, who plays an integral part in determining compensation/ incentive schemes for the Board of Directors and serves as a fundamental consideration for the Company's Shareholders to decide on the appointment or nomination of the respective Directors, taking into account inputs from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

The entire execution of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors will be reported through the Directors' Report (as part of

DIREKSI
Board of Directors

DIREKSI
Board of Directors

kemudian akan menjadi salah satu mata acara/ agenda yang dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE–KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi eksekutif Perseroan, Direksi dibantu oleh masing-masing Kepala Departemen yang memberikan laporan secara rutin dalam kegiatan usaha sehari-hari. Laporan kepada Direksi tersebut menjadi bahan diskusi dengan Direksi lainnya dalam Rapat Direksi.

Penilaian terhadap hasil kerja termasuk hasil atas penanggulangan masalah yang dihadapi oleh masing-masing Kepala Departemen pada setiap tahun buku dievaluasi oleh Direksi dan secara akumulatif disampaikan kepada masing-masing Kepala Departemen dalam penilaian kinerja tahunan karyawan Perseroan pada awal tahun buku berikutnya.

REMUNERASI BAGI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS, Perseroan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk menentukan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi (“Remunerasi”) dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
- Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
- Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

the Annual Report), which will then become one of the agenda items discussed and approved at the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its duties, responsibilities and executive function of the Company, the Board of Directors has an assistance from each Department Head in daily activities. Such reports became one of the agenda during the Board of Directors’ meeting.

Assessment on the tasks results including the result of countermeasures against work issues encountered by each of Head Department on one financial year, will be evaluated by the Director and accumulatively conveyed to each Head Department in the employee performance appraisal on the next early financial year.

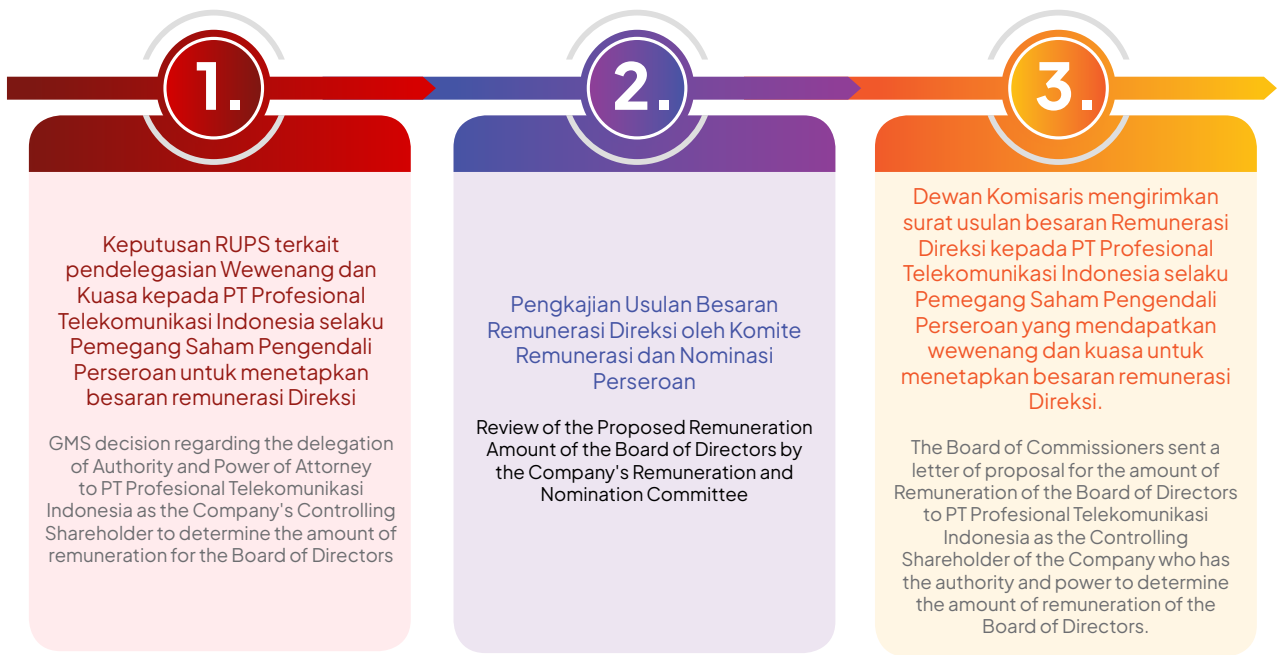
REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Remuneration Determination Procedure for the Board of Directors

Based on the resolution of the GMS, the Company has granted power and authority to the controlling shareholder of the Company to determine the amount of salary or honorarium and allowances of members of theBoardofDirectors(“Remuneration”)byconsidering the proposal from the Board of Commissioners of the Company based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee. Some of the factors to consider in determining Remuneration are as follows:

- Reports from independent manpower consultants;
- Other companies that have the same or similar business as the Company;
- Classification and portion of work of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
- The current cost of living in Jakarta is based on, but not limited to, the national inflation rate.

Proses Penetapan Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Determination Process



Struktur Remunerasi Direksi

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023 adalah sebesar Rp25.070.853.301*.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi untuk Direksi selama tahun buku 2023, adalah sebagai berikut:

Board of Directors Remuneration Structure

The total remuneration for all members of the Board of Directors for the financial year of 2023 is Rp25,070,853,301*.

The remuneration structure that indicates the Remuneration component for each Board of Directors during 2023 is as follows

Nama Name	Gaji Salary	Tunjangan* Allowance*					Jumlah Remunerasi/Tahun (Gross)* Total Remuneration/Year (Gross)*		
		Transportasi Transportation	Kepemilikan Kendaraan Car Ownership Program	Pajak Tax	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan lain Other Allowances	Di bawah 1 miliar Rupiah Under 1 billion Rupiah	Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah	Di atas 2 miliar Rupiah Above 2 billion Rupiah
Juliawati Gunawan Halim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Wong Tjin Tak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Hartono Tanuwidjaja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Wellington	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

*)Tunjangan dan Remunerasi yang diterima oleh Anggota Direksi, termasuk untuk jabatan yang bersangkutan pada entitas lain di seluruh Grup Perseroan (sepanjang relevan) | Allowance and Remuneration received by the Members of the Board of Directors, including their other position in the other entities within the Company Group (as relevant).

DIREKSI Board of Directors

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

STP mewajibkan seluruh anggota Direksi untuk memberitahukan kepada Perusahaan apabila terjadi perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan kepemilikan akan saham Perseroan.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

UUPT dan POJK No. 33 mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Direksi yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT dan POJK No. 33, OJK mengeluarkan POJK No. 21, dimana POJK No. 21 lebih lanjut diatur dalam SE No. 32. POJK No. 21 dan SE No. 32 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No. 21 dan SE No. 32 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kebijakan pengunduran diri tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Perseroan.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP POLICY

STP requires all members of the Board of Directors to notify the Company if there is a change in ownership of the Company's shares, either directly or indirectly, no later than 3 (three) working days after the change of ownership of the Company's shares.

Throughout 2023, there are no members of the Board of Directors who own shares of the Company, either directly or indirectly.

RESIGNATION PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS WHO ARE INVOLVED IN A FINANCIAL CRIME

The Company Law and POJK No. 33 stipulates that one of the requirements to be appointed as a member of the Board of Directors is having never been convicted for the commission of a criminal offense that damages the state finance and/or the relevant financial sector. In accordance with the Company Law and POJK No. 33, OJK issued POJK No. 21, which POJK No. 21 further stipulated in SE No. 32. POJK No. 21 and SE No. 32 among other things provide recommendation to a public company to have a policy regarding the resignation procedure for members of the Board of Directors who are involved in financial crimes. Such financial crimes are considered to be manipulation and various forms of corruption in financial service activities as well as money laundering.

Following the POJK No. 21 and SE No. 32, the Company has prepared policy for the resignation for the members of the Board of Directors who are involved in the financial crimes. The policy of resignation was reviewed and approved by the Board of Directors.

The resignation procedure for the members of the Board of Directors are as follows:

1. The member of the Board of Directors shall resign from his position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;

2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut;
3. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut; Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

KEBERAGAMAN DIREKSI

Komposisi Direksi Perseroan yang menjabat saat ini telah memiliki keragaman keahlian, latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman industri yang merupakan faktor penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

Informasi mengenai keberagaman Direksi dapat dilihat pada Profil masing-masing Direksi pada Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK no later than 2 (two) working days after receiving the resignation letter;
3. The Company shall convey a General Meeting of Shareholders ("GMS") to approve the resignation of such Director within a maximum period of 90 (ninety) days after receiving the resignation letter; Members of the Board of Directors who resign still be held liable since the appointment of position until the date of the resignation and approved by the GMS.
4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit the result to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

The composition of the Company's Board of Directors currently serving has a diversity of expertise, background, knowledge, and industry experience which are important factors to ensure the effectiveness of the implementation of the Board of Directors' duties in managing the Company.

Information about the diversity of the Board of Directors is presented in the Profile of each Board of Directors of the Company Profile Chapter in this Annual Report.

ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Supporting Organs

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang mempunyai tugas berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Sampai dengan akhir tahun 2023, Dewan Komisaris STP memiliki 2 (dua) Komite Penunjang Dewan Komisaris yang bertugas membantu tugas dan fungsi Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite Penunjang Dewan Komisaris diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing pedoman kerja (*charter*). Adapun dasar hukum pembentukan organ penunjang Dewan Komisaris mengacu pada:

1. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perseroan.

Pursuant to laws and regulations, in carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners may form a committee that has duties related to the supervisory function of the Board of Commissioners. Until the end of 2023, STP Board of Commissioners has 2 (two) Supporting Committees of the Board of Commissioners tasked with assisting the duties and functions of Commissioners, namely the Audit Committee and Remuneration and Nomination Committee. Each Supporting Committee of the Board of Commissioners is chaired by a member of the Board of Commissioners and the duties and responsibilities of each Committee are stated in each charter. The legal basis for the establishment of supporting organs of the Board of Commissioners refers to:

1. OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance;
2. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee;
3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
4. Company's Articles of Association,

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, memastikan perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Selain itu memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan, membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

DASAR HUKUM

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan:

1. Surat keputusan Dewan komisaris tanggal 5 Mei 2023
2. Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja komite Audit.
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A
4. Anggaran Dasar Perseroan

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen (Ketua Komite), dan pihak dari luar Perseroan (anggota) yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Saat ini, Ketua Komite Audit Perseroan dijabat oleh Harry Mozarta Zen berdasarkan SK Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2023 yang menjabat selama 3 (tiga) tahun hingga penutupan RUPST Perseroan tahun 2026.

Berikut susunan Komite Audit Perseroan per tanggal 31 Desember 2023:

KOMITE AUDIT

Audit Committee

The Audit Committee was established to assist the duties of the Board of Commissioners in carrying out supervisory functions, ensuring that the company is managed with sound management in accordance with GCG principles, establishing an adequate internal control structure, improving the quality of transparency and financial reporting, and reviewing the scope, accuracy, independence and objectivity of public accountants. In addition, the Committee also provides advice in the implementation of internal control and company audit, making written reports on every assignment given by the Board of Commissioners, and making reports on the implementation of Audit Committee activities and the level of achievement of its performance to be disclosed in the Company's Annual Report.

LEGAL REFERENCES

The Audit Committee is established by referring to:

1. Decree of the Board of Commissioners dated 5 May 2023
2. The Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.
3. Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A.
4. The Company's Articles of Association.

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP

Pursuant to OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee, the Company's Audit Committee consists of 3 (three) members consisting of Independent Commissioners (Chairman of the Committee), and parties from outside the Company (members) who are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Currently, the Chairman of the Company's Audit Committee is held by Harry Mozarta Zen based on the Decree of the Board of Commissioners dated 5 May 2023 who serves for 3 (three) years to closing of 2026 AGMS of the Company.

The following is the composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2023:

KOMITE AUDIT

Audit Committee

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	SK Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023 BOC Decree of the Company dated 5 May 2023	5 Mei 2023 – RUPST 2026 May 5, 2023 – AGMS 2026
Stefanus Ginting	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	SK Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023 BOC Decree of the Company dated 5 May 2023	5 Mei 2023 – RUPST 2026 May 5, 2023 – AGMS 2026
Jennywati Soewito	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	SK Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023 BOC Decree of the Company dated 5 May 2023	5 Mei 2023 – RUPST 2026 May 5, 2023 – AGMS 2026

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEMBER PROFILES

Harry Mozarta Zen Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee Periode Period: 2023–2026 (Periode kedua Second period)	Profil Harry Mozarta Zen sebagai Ketua Komite Audit sekaligus Komisaris Independen dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Harry Mozarta Zen's profile as Chairman of the Audit Committee and Independent Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners in the Company Profile Chapter of this Annual Report.
---	--

Stefanus Ginting Anggota Komite Audit Member of Audit Committee Periode Period: 2023–2026	
Usia Age 71 Tahun 71 Years old	
Kewarganegaraan Citizen Indonesia Indonesian	
Dasar Hukum Penunjukkan Appointment Basis Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023 Decree of the Board of Commissioners of the Company dated May 5, 2023	
Riwayat Pendidikan Educational Background Beliau memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1978 He earned a Bachelor's degree majoring in Economics from Gadjah Mada University in 1978	

Pengalaman Kerja Professional Background	Beliau berpengalaman sebagai Chairman PT Map Tiga Indonesia pada tahun 2016–2021. Beliau juga pernah menjadi Anggota Komite Audit dari PT BFI Finance Tbk pada tahun 2006–2016. Memiliki sejumlah pengalaman sebagai Direktur diantaranya pada PT Baskara Utama Sedaya di tahun 2009–2013, sebagai Direktur Proyek pada PT Lintas Marga Sedaya di tahun 2005–2013, dan Direktur PT Siwani Trimitra Tbk pada tahun 1993–2004. Beliau juga memiliki pengalaman pada dunia perbankan diantaranya menjadi Penasihat Senior di Hastin International Bank pada tahun 1993–1995, Junior Director di Bank Summa pada tahun 1990–1992, Offshore Business Manager di Banque Indosuez pada tahun 1988–1989, Senior Officer pada Credit and Marketing di HSBC pada tahun 1982–1988, dan mengawali karir sebagai Credit and Marketing Officer di Bank Central Asia pada tahun 1979–1982. He has served as Chairman of PT Map Tiga Indonesia in 2016–2021. He was also a Member of the Audit Committee of PT BFI Finance Tbk in 2006–2016. He has a number of experiences as Director at PT Baskara Utama Sedaya in 2009–2013, as Project Director at PT Lintas Marga Sedaya in 2005–2013, and Director of PT Siwani Trimitra Tbk in 1993–2004. He also has experience in the banking industry including being a Senior Advisor at Hastin International Bank in 1993–1995, Junior Director at Bank Summa in 1990–1992, Offshore Business Manager at Banque Indosuez in 1988–1989, Senior Officer at Credit and Marketing at HSBC in 1982–1988, and commencing his career as Credit and Marketing Officer at Bank Central Asia in 1979–1982.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Chief Executive Officer PT SAT Inti Konsultama - Chairman PT Adrea Sarana Elcomindo - Chairman PT Indo Eksplorasi Media - Chairman PT AJN Solusindo - Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia - Wakil Ketua Yayasan Frans Seda - Chief Executive Officer PT SAT Inti Consultants - Chairman of PT Adria Sharana Elcomindo - Chairman of PT Indo Exploration Media - Chairman of PT AJN Solucindo - Vice Chairman of the Association of Indonesian Private Higher Education Organizing Bodies - Vice Head of the Frans Seda Foundation
Sertifikasi Certifications	- Harvard Business School Online: Disruptive Strategy by Prof Clayton Christensen. - Oxford Said Business School: Fintech Program. - MIT Sloan Business School: Dynamic Work Design. - Harvard Business School Online: Disruptive Strategy by Prof Clayton Christensen. - Oxford Said Business School: Fintech Program. - MIT Sloan Business School: Dynamic Work Design.

KOMITE AUDIT Audit Committee

KOMITE AUDIT Audit Committee

Jennywati Soewito Anggota Komite Audit Member of Audit Committee Periode Period: 2023–2026		
Usia Age	57 Tahun	57 Years old
Kewarganegaraan Citizen	Indonesia	Indonesian
Dasar Hukum Penunjukkan Appointment Basis	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023	Decree of the Board of Commissioners of the Company dated May 5, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau memperoleh gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti	She earned a Bachelor's degree majoring in Accounting from Trisakti University
Pengalaman Kerja Professional Background	Berpengalaman di bidang konsultasi lebih dari 20 tahun mencakup jasa audit dan konsultasi keuangan. Beliau merupakan anggota Komite Audit PT Barito Pacific Tbk tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Solusi Tunas Pratama Tbk pada periode 2011–2017. Pada tahun 2019 bergabung dengan KJPP Ruky Safrudin dan rekan. Pada tahun 2009, beliau mendirikan perusahaan penilai Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto dan Rekan (KJPP JKR) sampai dengan tahun 2018. Pada awal tahun 2008, beliau bergabung sebagai Direktur di PT Infinity Capital. Pada Juli 2002 hingga Desember 2007, beliau pernah bergabung dengan Ernst & Young dengan posisi terakhirnya sebagai Non-Equity Partner. Sebelum bergabung dengan Ernst & Young, beliau bekerja dengan Arthur Andersen Indonesia dari tahun 1988 hingga 2002.	More than 20 years of consulting experience including audit and financial consulting services. She is a member of the Audit Committee of PT Barito Pacific Tbk from 2019 until now. She also served as a member of the Audit Committee of PT Solusi Tunas Pratama Tbk in 2011–2017. In 2019 joined KJPP Ruky Safrudin and colleagues. In 2009, she established the appraisal company Jennywati, Kusnanto and Partners Public Appraisal Service Office (KJPP JKR) until 2018. In early 2008, she joined as Director of PT Infinity Capital. From July 2002 to December 2007, she joined Ernst & Young with her last position as Non-Equity Partner. Prior to joining Ernst & Young, she worked with Arthur Andersen Indonesia from 1988 to 2002.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Direktur PT Infinity Capital - Pendiri PT Infinity Consulting - Anggota Komite Audit PT Barito Pacific Tbk - Partner KJPP Ruky Safrudin dan Rekan - Anggota Komite Audit PT Barito Renewable Energy Tbk.	- Director of PT Infinity Capital - Founder of PT Infinity Consulting - Member of Audit Committee of PT Barito Pacific Tbk - KJPP Partner Ruky Safrudin and Partners - Member of Audit Committee of PT Barito Renewable Energy Tbk.

Sertifikasi Certifications	Memiliki sertifikat profesi sebagai Akuntan dari Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan Anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Anggota Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI).	Have a professional certificate as an Accountant from the Accounting Professional Education University of Indonesia. She is also a Member of MAPPI (Indonesian Society of Professional Appraisals), Member of the Indonesian Institute of Accountants (IAI), Member of the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI), and Member of the Indonesian Institute of Management Accountants (IAMI).
---	---	--

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungankeluargadengananggotaDewanKomisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

All members of the Audit Committee are independent parties, not having financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or business relationships with the Company that may affect the ability to act independently.

Pernyataan Independensi	Harry Mozarta Zen	Stefanus Ginting	Jennywati Soewito
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada SMN dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; Not a person in the Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Office or other parties who provide insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to SMN within the last 6 (six) months;	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan SMN dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen); Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise SMN's activities within the last 6 (six) months (except for Independent Commissioners);	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di SMN; Does not have direct or indirect shares in SMN;	✓	✓	✓
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di SMN; The family has neither direct nor indirect shares in SMN;	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama SMN; Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of SMN;	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha SMN; Does not have a business relationship either directly or indirectly related to SMN's business activities;	✓	✓	✓

KOMITE AUDIT Audit Committee

KOMITE AUDIT Audit Committee

Pernyataan Independensi	Harry Mozarta Zen	Stefanus Ginting	Jennywati Soewito
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah; Does not serve as an administrator of a political party and/or candidate/member of the legislature and/or is a candidate or serves as the head/deputy head of local government;	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di SMN. Do not have other positions that can cause conflicts of interest related to positions in SMN.	✓	✓	✓

Keterangan: ✓=Ya |x=Tidak | Description: ✓= Yes |x=No

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris yang bertujuan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit, sehingga dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan. Perseroan senantiasa mengkaji piagam secara berkala agar sesuai dengan praktik terbaik terkini. Kajian terakhir disetujui oleh seluruh anggota Komite Audit pada tanggal 15 April 2016 dan telah diunggah ke dalam situs web Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Berdasarkan piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Tugas

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan, seperti Laporan Keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau pergantian akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan fee.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Audit Committee has an Audit Committee Charter which has been prepared and stipulated under the Decision of the Board of Commissioners that is intended to be the guidance for Audit Committee to perform its duties and responsibilities, and to work independently, objectives, self-reliant and transparent. The Company has always made a regular review on the charter to comply with the latest best practices. The final review was approved by all members of the Audit Committee on April 15, 2016 and has been uploaded to the Company's website.

AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Based on the Audit Committee charter, the duties and responsibilities of the Company's Audit Committee are as follows:

Duties

1. Reviewing the financial information that will be issued by the Company, such as financial statements and other financial information;
2. Reviewing the Company's compliance with Indonesian laws and regulations related to the capital markets and other rules related to the business activities of the Company;
3. Providing independent opinions in the event of dissenting opinions between the management and the accountant for services provided.
4. Providing recommendation to the Board of Commissioners concerning the appointment or removal of the accountant based on independency, scope of work, assignment and fee

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan.
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perseroan.

Tanggung Jawab

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Audit yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - b. Laporan Semester pelaksanaan tugas Komite Audit
 - c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit
3. Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Kewenangan

1. Komite Audit memiliki akses yang tidak terbatas atas informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

5. Reviewing the implementation of audit by internal auditor and supervising the follow up actions performed by the Board of Directors on the findings of the internal auditor
6. Reviewing the independency and objectivity of the public accountant of the Company
7. Reviewing and report to the Board of Commissioners on complaints relating to the Company including but not limited to complaints relating to process of accounting and financial reporting of the Company
8. Maintaining confidentiality of documents, data and information of the Company.
9. Reviewing and provide suggestions to the Board of Commissioners in relation with potential conflict interests of the Company.

Responsibilities

1. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners.
2. The Audit Committee is responsible for submitting to the Board of Commissioners the following reports:
 - a. Annual Report on the implementation of duties and activities of the Audit Committee which will be disclosed in the Annual Report.
 - b. Semester Report on the implementation of the duties of the Audit Committee
 - c. Report for each implementation of specific duties of the Audit Committee
3. The Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

Authority

1. The Audit Committee has unrestricted access to information about the Company's employees, funds, assets, and other resources related to the implementation of its duties.
2. Communicate directly with employees including the Board of Directors and parties who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding their duties and responsibilities.
3. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may request the assistance of experts and/or consultants to assist the Audit Committee.

KOMITE AUDIT

Audit Committee

KOMITE AUDIT

Audit Committee

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Berdasarkan Piagam/Charter Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dan dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota senior Komite Audit apabila Ketua berhalangan hadir.

Rapat dapat diadakan secara fisik dan non fisik melalui *teleconference*, *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan 5 (lima) kali rapat Komite Audit. Adapun kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit selama tahun 2023 sebagai berikut:

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Harry Mozarta	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	5	5	100%
Stefanus Ginting	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	3*	3*	100%
Jennywati Soewito	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	3*	3*	100%

*Bapak Stefanus Ginting dan Ibu Jennywati Soewito diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 5 Mei 2023.
 *Mr. Stefanus Ginting and Mrs. Jennywati Soewito were appointed as the Company's Audit Committee members since May 5, 2023.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Untuk peningkatan kompetensi anggota Komite Audit, di tahun 2023 Perseroan mengikutsertakan anggota Komite Audit ke berbagai program pendidikan dan/atau pelatihan yang terlihat dalam tabel berikut:

4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE MEETING

Based on the Audit Committee Charter, the Audit Committee must hold periodic meetings at least once in 3 (three) months. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the number of members and chaired by the Chairman of the Audit Committee or senior members of the Audit Committee if the Chairman is unable to attend.

Meetings can be held physically and non-physically through teleconference, video conference or other electronic media facilities. If deemed necessary, the Audit Committee may invite management related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting.

Throughout 2023, 5 (five) Audit Committee meetings have been held. The attendance of each member of the Audit Committee in Audit Committee Meetings during 2023 is as follows:

Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Organization
Jennywati Soewito	Economic Outlook 2023	07 Januari 2023 January 07, 2023	IAMI
	Bidang Pasar Modal "Topik: Penerapan Penilaian Hak Kekayaan Intelektual" Capital Market Field "Topic: Application of Intellectual Property Rights Assessment"	08 Februari 2023 February 08, 2023	MAPPI
	Bidang IKNB, Topik: Refreshment POJK No. 38/POJK.05/2015 dan SEOJK No. 29/SEOJK.05/2016 IKNB Field, Topic: Refreshment POJK No. 38/POJK.05/2015 and SEOJK No. 29/SEOJK.05/2016	09 Februari 2023 February 09, 2023	MAPPI
	Penerapan Open AI dalam Analisis Big Data untuk Keputusan Strategis dalam Akuntansi Manajemen Application of Open AI in Big Data Analytics for Strategic Decisions in Management Accounting	17 Juni 2023 June 17, 2023	IAMI
	PPL Pendamping PPL wajib AP batch 8 - sharing temuan-temuan hasil pemeriksaan KAP oleh PPPK dan mitigasi risikonya PPL Coaching PPL of AP mandatory, batch 8 - sharing the findings of the results of the KAP audit by PPPK and its risk mitigation	15 Agustus 2023 August 15, 2023	IAPI
	Strategi Penilai Menyikapi Proses Beracara, Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Assessment Strategy in Responding to the Process of Proceedings, Investigation and Investigation of Criminal Cases	24 Agustus 2023 August 24, 2023	MAPPI
	Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Wajib Penilai Publik Tahun 2023 Batch 3 Compulsory Sustainable Professional Education (PPL) Public Assessor in 2023 Batch 3	16 Oktober 2023 October 16, 2023	MAPPI
	Penyusunan SOP Finance and Accounting Development of Finance and Accounting SOP	11 November 2023 November 11, 2023	IAMI
	PPL Penilai Publik Bisnis dan Properti Bisnis Tahun 2023 Batch 5 PPL Business Public Appraiser and Business Property Year 2023 Batch 5	16 November 2023 November 16, 2023	MAPPI
	Sharing Session of IAPI "Pemutakhiran Sosialisasi Workshop A&B Bagi Pemegang Sertifikat Cpa Kode (P) Dan (K)" Sharing Session of IAPI "Update on A&B Workshop Socialization for CPA Code (P) and (K) Certificate Holders"	01 Desember 2023 December 01, 2023	IAPI

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

To improve the competence of Audit Committee members, in 2023 the Company has included Audit Committee members in various education and/or training programs as seen in the following table:

KOMITE AUDIT

Audit Committee

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman Kerja Komite Audit serta Program Kerja Komite Audit Tahun 2023. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2023, diantaranya:

1. Pembahasan hasil audit laporan keuangan tahun 2022 dengan eksternal auditor
2. Pembahasan rencana kerja audit internal untuk tahun 2023
3. Pembahasan hasil kerja audit internal setiap kuartal
4. Pembahasan manajemen risiko dengan manajemen dan divisi audit internal
5. Pembahasan performa dan laporan keuangan setiap kuartal dengan manajemen
6. Pembahasan perencanaan audit laporan keuangan tahun 2023 dengan auditor eksternal
7. Evaluasi kinerja dan rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE DUTIES

During 2023, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee Charter and Work Programs for 2023. Realization of the implementation of the Audit Committee's duties in 2023 is as follows:

1. Discussion of the results of the 2022 financial report audit with the external auditor
2. Discussion of the internal audit work plan for 2023
3. Discussion of internal audit work results every quarter
4. Discussion of risk management with management and the internal audit division
5. Discussion of performance and financial reports every quarter with management
6. Discussion of planning for the 2023 financial report audit with external auditors
7. Performance evaluation and recommendations from Public Accountants and Public Accounting Firms

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

DASAR HUKUM

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan mengacu pada:

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2023.

KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diketuai oleh Komisaris Independen, dan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, dan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Berikut susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2023:

The Remuneration and Nomination Committee was established to assist the Board of Commissioners in carrying out the functions and duties of the Board of Commissioners related to remuneration and nomination for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

LEGAL REFERENCES

Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported at the GMS. The Committee establishment refers to:

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies; and
2. Decree of the Board of Commissioners dated May 5, 2023.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBERSHIP

In accordance with the OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the Company's Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members chaired by an Independent Commissioner, and other members who can come from members of the Board of Commissioners, and parties who occupy managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.

The following is composition of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2023:

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	SK Dewan Komisaris 5 Mei 2023 BOC Decree May 5, 2023	2023 - 2026
Eko Santoso Hadiprodjo	Komisaris Commissioner	Anggota Member	SK Dewan Komisaris 5 Mei 2023 BOC Decree May 5, 2023	2023 - 2026
Doni Kusuma	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs SMN dan Protelindo Head of Human Resources and General Affairs Division of SMN and Protelindo	Anggota Member	SK Dewan Komisaris 5 Mei 2023 BOC Decree May 5, 2023	2023 - 2026

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

PROFIL ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBER PROFILES

Kusmayanto Kadiman Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of Remuneration and Nomination Committee Periode Period: 2023– 2026		
Profil Kusmayanto Kadiman sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus Komisaris Independen dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Kusmayanto Kadiman's profile as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee as well as Independent Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners in the Company Profile Chapter of this Annual Report.	

Eko Santoso Hadiprodjo Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee Periode Period: 2023– 2026		
Profil Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus Komisaris dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Eko Santoso Hadiprodjo's profile as a Member of the Remuneration and Nomination Committee as well as Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners in the Company Profile Chapter of this Annual Report.	

Doni Kusuma Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee Periode Period: 2023– 2026		
Usia Age	46 Tahun	46 Years old
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesian
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris 5 Mei 2023	Board of Commissioners Decree in May 5, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2008 dari Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.	Earned Bachelor Degree in Human Resources Management in 2008 from Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs SMN dan Protelindo	Head of Human Resources and General Affairs of SMN and Protelindo

Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman dalam kompensasi, remunerasi, manfaat/ tunjangan, dan hubungan industrial. Beliau bergabung dengan Protelindo pada tahun 2008 sebagai Asisten Sumber Daya Manusia (2008–2009). Bapak Kusuma saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber DayaManusiadanGeneralAffairsPerseroan dan Protelindo. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan program kompensasi dan program tunjangan, sistem personalia, Peraturan Perusahaan, komunikasi karyawan, program retensi dan program pengembangan serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum bergabung dengan Protelindo, beliau bekerja dengan General Electric Finance Indonesia selama enam tahun (2000–2006), dan dari tahun 2006 hingga 2008, beliau bekerja pada beberapa perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia.	He has over 22 years' experience in compensation remuneration, benefit/ allowance, and industrial relationships. He joined Protelindo in 2008 as Human Resources Assistant (2008–2009). Mr. Kusuma's current position is the Head of Human Resources and General Affairs of the Company and Protelindo. He is responsible for the implementation of compensation and benefits programs, HR systems, Company Regulations, internal communication and retention program, and also includes corporate social responsibility programs. Prior to joining Protelindo, he worked with General Electric Finance Indonesia for six years (2000–2006). From 2006 to 2008, he worked in several local and multinational companies in Indonesia.
---	---	--

INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Setiap tahun, masing-masing anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris wajib memberikan pernyataan independensi dalam rangka menjaga independensi mereka. Berikut pernyataan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

INDEPENDENCE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Every year, each member of the Supporting Committee of the Board of Commissioners is required to provide a statement of independence in order to maintain their independence. The following is a statement of Remuneration and Nomination Committee Independence based on OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Pernyataan Independensi Independence Statement	Kusmayanto Kadiman	Eko Santoso Hadiprodjo	Doni Kusuma
Bukan merupakan Direksi SMN Not a Board of Directors of SMN	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama dari Perseroan Not a person affiliated with the Company, a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or the ultimate shareholder of the Company	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di SMN Does not have direct or indirect shares in SMN	✓	✓	✓

Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Pernyataan Independensi Independence Statement	Kusmayanto Kadiman	Eko Santoso Hadiprodjo	Doni Kusuma
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di SMN No family has any direct or indirect shares in SMN	✓	✓	✓
Mempunyai pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi Have experience related to Nomination and/or Remuneration	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha SMN Does not have a business relationship either directly or indirectly related to SMN's business activities	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah Does not serve as an administrator of a political party and/or candidate/member of the legislature and/or is a candidate or serves as the head/deputy head of local government	✓	✓	✓
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di SMN Do not have other positions that can cause conflicts of interest related to positions in SMN	✓	✓	✓
Keterangan: ✓= Ya x=Tidak Description: ✓= Yes x=No			

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memiliki Piagam Komite yang berisi panduan kerja komite termasuk didalamnya tugas dan tanggung jawab komite serta pelaksanaan Rapat komite. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi STP juga mengacu pada piagam komite yang disahkan secara Grup SMN.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur atas remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER

The Company's Remuneration and Nomination Committee has a Committee Charter that contains the committee's work guidelines, including the committee's duties and responsibilities, as well as the implementation of committee meetings. The STP Remuneration and Nomination Committee Charter also refers to the committee charter ratified by the SMN Group.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the policy, amount, and structure of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners which will be part of the Board of Commissioners' Report to be submitted and then determined at the General Meeting of Shareholders;
- Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain, selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan kepada Dewan Komisaris dan harus bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan rapat secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan, yang dipimpin oleh Ketua Komite. Rapat hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota komite yang salah satunya merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Rapat dapat diadakan secara fisik dan non fisik melalui *teleconference*, *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya.

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: (i) the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, (ii) policies and criteria needed in the nomination process for members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and (iii) performance assessment policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted and approved at the General Meeting of Shareholders; and
- Carry out other duties, other than those mentioned above given by the Board of Commissioners in accordance with their functions and duties from time to time as needed.

The Remuneration and Nomination Committee reports to the Board of Commissioners and must act independently in carrying out its duties.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETING

The Remuneration and Nomination Committee shall meet periodically at least once in 4 (four) months, chaired by the Chairman of the Committee. A meeting can only be held if it is attended by a majority of the total committee members, one of whom is the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee. Meetings can be held physically and non-physically through teleconference, video conference or other electronic media facilities.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani suatu persetujuan sirkular. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Kusmayanto Kadiman	Ketua Chairman	3	3	100%
Eko Santoso Hadiprodjo	Anggota Member	3	3	100%
Doni Kusuma	Anggota Member	3	3	100%

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi STP telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Berikut uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2023:

- Meninjau skema remunerasi yang ada untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan laporan yang dipersiapkan oleh konsultan tenaga kerja eksternal;

The Remuneration and Nomination Committee may also take valid decisions without holding a meeting, provided that all committee members have been notified in writing and all committee members give approval to the proposal submitted in writing by signing a circular agreement. Decisions taken in this way have the same force as decisions lawfully taken in meetings.

Throughout 2023, the Remuneration and Nomination Committee has held 3 (three) meetings with the following member attendance levels:

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Throughout 2023, the STP Remuneration and Nomination Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the work program set at the beginning of the year. The following is a brief description of the implementation of the activities of the Remuneration and Nomination Committee in 2023:

- Reviewed the existing remuneration scheme of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Provided recommendations to the Board of Commissioners with regards to policies, amount, and structure of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering a report the external manpower consultant;

- Merumuskan prinsip dasar dalam menentukan kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan:
 - Posisi dan persaingan dalam industri Perseroan;
 - Klasifikasi dan kompleksitas tugas yang dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - Biaya hidup saat ini termasuk indikator inflasi nasional.
- Merumuskan prinsip dasar untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan:
 - Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Kualifikasi personal dari para kandidat; dan
 - Persyaratan dari Perseroan.

- Formulated basic principles in setting remuneration policy by considering:
 - Positioning and competitiveness in the Company's industry;
 - Classification and complexity of work performed by the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
 - Current cost of living including the national inflation indicators.
- Formulated the basic principles for nominating members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering:
 - The Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations;
 - Personal qualifications of the candidates; and
 - Requirements of the Company.

SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan mempunyai peranan penting dalam memperlancar hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pihak eksternal atau *stakeholders*. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi dengan mekanisme internal Perseroan dan atas persetujuan Dewan Komisaris.

DASAR HUKUM

Keberadaan Sekretaris Perusahaan juga diharapkan terlaksananya pemenuhan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Juliawati Gunawan Halim
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Profil Juliawati Gunawan Halim sebagai Sekretaris Perusahaan sekaligus Direktur Utama Perseroan dapat dilihat pada Profil Direksi Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

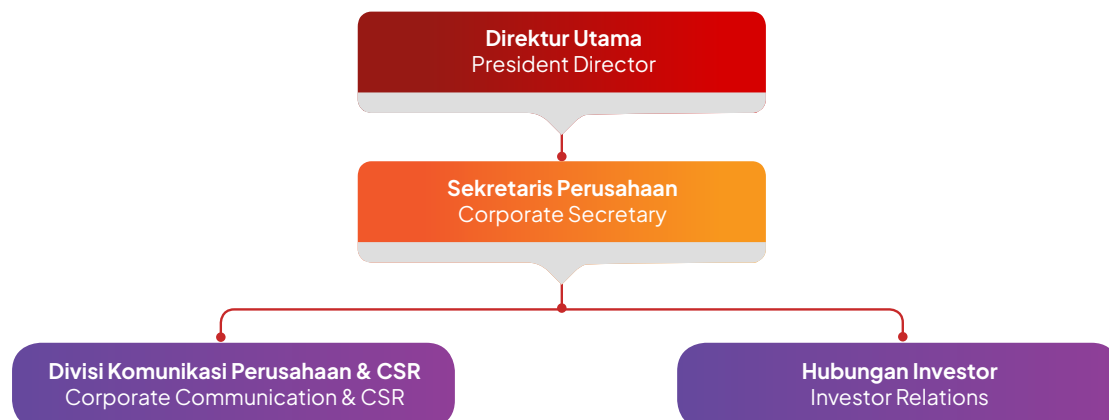
The Corporate Secretary serves a vital part in facilitating the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as serving as a liaison between the Company and external parties or stakeholders. The Corporate Secretary reports directly to the Board of Directors and is appointed and dismissed based on the Board of Directors' decision and with the approval of the Board of Commissioners.

LEGAL REFERENCES

The Corporate Secretary' establishment fulfills the provisions of the OJK regulation No.35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Susunan Organisasi Perseroan, Divisi Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dengan struktur sebagai berikut:



CORPORATE SECRETARY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Based on the Company's Organizational Structure, the Corporate Secretary Division is under the President Director with the following structure:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

CORPORATE SECRETARY DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are:

1. Update the development of the capital market in particular the capital markets laws and regulations;
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the prevailing capital market laws and regulations;
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in implementing the principles of Good Corporate Governance; and
4. As a liaison between the Company and shareholders, OJK and other stakeholders.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

STP mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan. Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan STP mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

STP engages the Corporate Secretary in competency development activities through various trainings and education with funding fully being the responsibility of the Company. Throughout 2023, STP's Corporate Secretary has been participating in the following competency development programs:

Tanggal Date	Workshop atau Seminar Workshop or Seminar
19 Januari 2023 January 19, 2023	Webinar <i>ESG Strategy and Rating</i> - Kerja Sama PT Bursa Efek Indonesia dengan PwC Indonesia ESG Strategy and Rating Webinar - Cooperation between PT Bursa Efek Indonesia and PwC Indonesia
22 Februari 2023 February 22, 2023	Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2022 Socialization of the General Guidelines for Indonesian Corporate Government and the Implementation of the 2022 Annual Report Award
16 Maret 2023 March 16, 2023	<i>IFC and IDX ESG Collaboration Launch Event and ESG Leadership Training</i>
21 Maret 2023 March 21, 2023	<i>Coaching Clinics SDG 16 Business Framework: Way forward for ESG: Streamlining and Impact Reporting</i>
13 Juni 2023 June 13, 2023	Seminar " <i>The Future of Sustainability Reporting: An Exclusive Forum for Regulators and Listed Companies in Indonesia</i> " Seminar on " <i>The Future of Sustainability Reporting: An Exclusive Forum for Regulators and Listed Companies in Indonesia</i> "
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Webinar <i>Compliance Refreshment</i> Emiten dan Perusahaan Publik
18 Oktober 2023 October 18, 2023	ACMF-ISSB Technical Training on <i>IFRS Sustainability Disclosure Standards</i>

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Tanggal Date	Workshop atau Seminar Workshop or Seminar
29–30 November 2023 November 29–30, 2023	Pelatihan “ <i>Calculating Your Carbon Footprint</i> ” “Calculating Your Carbon Footprint” Training
20 Desember 2023 December 20, 2023	Undangan Sosialisasi Kriteria dan Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 Invitation to Socialize ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 Criteria and Assessment
6–7 September 2023 September 6–7, 2023	<i>Greenhouse Gas Calculation, Mitigation, Audit and Reporting Training</i>
26 Januari 2023 January 26, 2023	<i>Indonesia Economic Outlook 2023: Opportunities and Challenges</i>
21–23 Februari 2023 February 21–23, 2023	<i>CG Officer Workshop Series Batch 9</i>
14 Maret 2023 March 14, 2023	Webinar <i>Regulatory</i> Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI Webinar on GMS Implementation Regulatory via eASY.KSEI
28 Maret 2023 March 28, 2023	Webinar dengan tema Mengenal ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS): Peran dan Lingkupnya dalam Tata Kelola Perusahaan Webinar on Getting to know the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS): Its Role and Scope in Corporate Governance
5 April 2023 April 5, 2023	Webinar dengan tema Pendalaman Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E: tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Webinar on the Deepening Indonesia Stock Exchange Regulations No. I-E: concerning Information Submission Obligations
30 Mei 2023 May 30, 2023	Webinar dengan tema <i>Effective Risk Management for Corporate Secretary</i> Webinar on Effective Risk Management for Corporate Secretary
8 Juni 2023, June 8, 2023	Webinar dengan tema Pendalaman POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Webinar on the Deepening POJK No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to POJK No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights
27 Juni 2023 June 27, 2023	<i>Strengthening the Board’s Succession: A Framework for Board Performance & Evaluation</i>
2 Agustus 2023 August 2, 2023	Webinar dengan tema “Strategi Ketahanan Perlindungan Data pada Perusahaan” Webinar on “Data Protection Resilience Strategy in Companies”
24 Agustus 2023 August 24, 2023	Webinar dengan tema “Pendalaman SEOJK No. 33/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Penawaran Umum” Webinar on “SEOJK Deepening No. 33/2022 concerning Guidelines for the Implementation of Securities Offerings That Are Not Public Offerings”
3 Oktober 2023 October 3, 2023	Webinar dengan tema “ <i>Listed Companies Compliance Refreshment</i> ” Webinar on “Listed Companies Compliance Refreshment”
12 Oktober 2023 October 12, 2023	Webinar dengan tema “ <i>The Corporate Governance Officer’s Role in Driving Digital Resilience</i> ” Webinar on “The Corporate Governance Officer’s Role in Driving Digital Resilience”

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya, antara lain sebagai berikut:

1. Mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
2. Melakukan keterbukaan informasi ke publik atau pelaporan kepada OJK terakit kegiatan korporasi Perseroan;
3. Menyusun panduan dan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan Perseroan;
4. Mengelola komunikasi dengan: OJK, *Self-Regulatory Organization* (BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Biro Administrasi Efek (BAE), BKPM, dan institusi lainnya yang terkait;
5. Mengorganisir dan turut serta dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan;
6. Mengorganisir semua rapat yang dilakukan untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta membuat risalah rapat;
7. Membuat dan mempersiapkan prosedur dan kebijakan yang relevan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK; dan
8. Mengelola situs web Perseroan guna mematuhi peraturan OJK yang baru.

CORPORATE SECRETARY DUTIES PERFORMANCE

During 2023, the Corporate Secretary has carried out its duties, including the following:

1. Organized the Annual General Meetings of Shareholders;
2. Undertaken information disclosure pertaining to certain corporate activities of the Company
3. Organized Corporate Social Responsibility guidelines and activities of the Company;
4. Maintained communication with the OJK, *Self-Regulatory Organization* (IDX, the Indonesian Central Securities Deposit (also known as KSEI), Share Registrar (also known as BAE), Indonesia Investment Coordinating Board (also known as BKPM) and other related institutions;
5. Organized and prepared the Annual Report and Sustainability Report of the Company;
6. Organized all Board meetings and drafting the Minutes of Meetings;
7. Drafted and prepared relevant procedures and policies as stipulated in Corporate Governance Guidelines issued by OJK; and
8. Adjusted the Company’s website to comply with the new OJK regulation.

UNIT KEBERLANJUTAN

Sustainability Unit

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan untuk Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 35/2014"), Perseroan telah melakukan penunjukan Sekretaris Perusahaan yang secara umum memiliki peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam POJK 35/2014. Disamping itu, Sekretaris Perusahaan juga memiliki peran untuk membantu Direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di lingkup Perseroan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Sekretaris Perusahaan diwajibkan untuk berkoordinasi dengan seluruh unit kerja yang relevan di STP untuk memastikan implementasi strategi keberlanjutan Perseroan, termasuk melaporkan seluruh aktivitas dan kinerja Keberlanjutan Perseroan, serta melakukan sosialisasi dan internalisasi visi, misi dan strategi Keberlanjutan STP.

Sekretaris Perusahaan juga bekerja bersama-sama dengan unit kerja terkait di Grup, sebagai satu kesatuan fungsi Unit Keberlanjutan Grup.

As regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 regarding Corporate Secretary for Issuers or Public Companies ("POJK 35/2014"), the Company has appointed a Corporate Secretary who generally has the roles and responsibilities outlined in POJK 35/2014. Moreover, the Corporate Secretary assists the Board of Directors in implementing sustainability principles within the Company and is directly responsible to the Board of Directors.

The Corporate Secretary is required to coordinate with all relevant units in STP to ensure the implementation of the Company's sustainability strategy, including reporting all activities and performance of the Company's Sustainability, as well as conducting socialization and internalization of the vision, mission, and Sustainability strategy of STP.

The Corporate Secretary also works together with related units in the Group, as a unified function of the Group's Sustainability Unit.

DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Internal Audit Department

Audit Internal dibentuk dengan tujuan memberikan pendapat profesional, independen dan objektif kepada Direktur Utama terhadap aktivitas dan operasi STP dengan meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi guna memastikan bahwa kegiatan operasional sudah berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perseroan. Internal Audit merupakan unit yang independen terhadap unit-unit yang lain dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Perseroan memiliki Departemen Audit Internal ("DAI") yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Internal Audit was established with the aim of providing professional, independent and objective opinion to the President Director on STP's activities and operations by improving the integrated control function to ensure that operational activities are properly performed so as to increase added value for the Company. Internal Audit is a unit that is independent of other units and is directly responsible to the President Director.

The Company has an Internal Audit Department ("DAI") which functions to examine and evaluate the implementation of internal control and risk management in accordance with the Company's policies.

PROFIL KEPALA DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT HEAD PROFILE

Deden Eka Kurnia Kepala Departemen Audit Internal Head of Internal Audit Department		
Usia	44 Tahun	44 Years Old
Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesian
Dasar Hukum Penunjukkan	SK Direksi tanggal 6 September 2021	Decree of the Board of Directors dated September 6, 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE PERBANAS, Jakarta (2002).	Bachelor of Economics majoring in Accounting from STIE PERBANAS, Jakarta (2002).
Pengalaman Kerja	Beliau adalah <i>Division Head Internal Audit & Risk Management</i> PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–sekarang), <i>Senior Manager Risk Management</i> di PT ABM Investama Tbk (2017–2021), <i>Manager Risk Management</i> di PT Bumi Serpong Damai Tbk - Sinarmas Land (2013–2017), <i>Assistant Manager Risk Management</i> di PT OTP Geothermal (2012–2013), <i>Assistant Manager Internal Audit & Risk Management</i> di PT Pam Lyonnaise Jaya - PALYJA (2008–2012), <i>Assistant Manager Internal Audit</i> di PT Tirta Investama, Tbk - Danone AQUA (2004–2008), <i>Internal Auditor</i> di PT Gubah Bumi Selaras (2003–2004), <i>External Auditor</i> di KAP Husni, Mucharam & Rasidi (2002–2003).	He serves as <i>Division Head Internal Audit & Risk Management</i> of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–present), <i>Senior Manager of Risk Management</i> at PT ABM Investama Tbk (2017–2021), <i>Manager of Risk Management</i> at PT Bumi Serpong Damai, Tbk - Sinarmas Land (2013–2017), <i>Assistant Manager of Risk Management</i> at PT OTP Geothermal (2012–2013), <i>Assistant Manager of Internal Audit & Risk Management</i> at PT Pam Lyonnaise Jaya - PALYJA (2008–2012), <i>Assistant Manager Internal Audit</i> at PT Tirta Investama Tbk - Danone AQUA (2004–2008), <i>Internal Auditor</i> at PT Gubah Bumi Selaras (2003–2004), <i>External Auditor</i> at KAP Husni, Mucharam & Rasidi (2002–2003).

DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL
Internal Audit Department

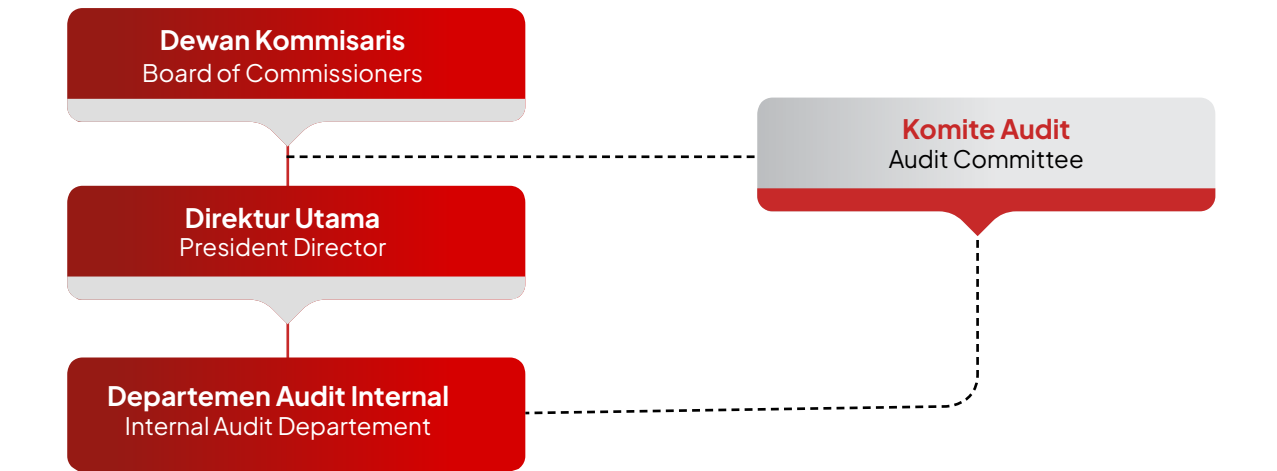
Rangkap Jabatan	Kepala Departemen Manajemen Risiko PT Solusi Tunas Pratama Tbk	Head of Risk Management Department of PT Solusi Tunas Pratama Tbk
Sertifikasi	-	-

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Kedudukan Fungsi Audit Internal STP berada langsung di bawah Direktur Utama Perseroan yang dipimpin oleh Kepala Departemen. Struktur dan kedudukan Departemen Audit Internal STP adalah sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

The structure of STP's Internal Audit Function is directly under the Company's President Director led by the Head of Department. The structure and position of STP's Internal Audit Department are as follows:



Alur Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Departemen Audit Internal
Flow of Appointment/Dismissal of Head of Internal Audit Department



SUMBER DAYA MANUSIA DAN SERTIFIKASI PROFESI DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Hingga akhir Desember 2023, Kepala Departemen Audit Internal memiliki 2 (dua) orang anggota yang membantunya dalam melaksanakan pekerjaan audit internal. Seluruh personel Audit Internal STP belum memiliki sertifikasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Departemen Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal (PAI) mengacu pada peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. PAI ini secara umum mencakup struktur dan kedudukan Unit Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik serta independensi dan objektivitas Auditor Internal.

HUMAN RESOURCES AND PROFESSIONAL CERTIFICATION INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Until the end of December 2023, the Head of Internal Audit Department has 2 (two) members who assist in carrying out internal audit work. All STP Internal Audit personnel have not been certified.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

- Formulate and implement yearly internal audit plan;
- Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with the Company's policies;
- Conduct examination and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
- Providing recommendations and objective information about the activities under review at all levels of management;
- Create and submit audit reports to the President Director and the Board of Commissioners;
- Monitor, analyze and report on the management's follow-up of audit recommendations;
- Working together with the Audit Committee
- Establish a program to evaluate the quality of internal audit activities;
- Conducting special audit(s) as needed.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In fulfilling its duties and responsibilities, the Internal Audit Department is guided by the Internal Audit Charter (IAC) pursuant to OJK regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines of Internal Audit Charter. The Internal Audit Charter broadly outlines the Vision and the Mission, Structure and Position, Duties and Responsibilities, Authority, Code of Ethics of the Department, as well as the requirements for members of the Internal Audit Department.

DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Internal Audit Department

PAI senantiasa dikaji berkala agar sesuai dengan praktik terkini. PAI terakhir berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 26 Juli 2022 dan telah diunggah ke dalam situs web Perseroan.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Kode etik auditor internal Perseroan mengacu pada Kode Etik dari The Institute of Internal Auditors yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal dalam menjalankan praktik audit internal.

Integritas	Objektivitas	Kerahasiaan	Kompetensi
Menunjukkan kejujuran, obyektivitas, dan Kesungguhan dalam melaksanakan tugas, serta taat hukum dan etika Perusahaan.	Tidak melakukan kegiatan yang dapat berpotensi/ menimbulkan konflik dengan kepentingan Perusahaan, tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari auditee dan pihak lain yang terkait dengan pekerjaan audit, mengungkapkan semua fakta penting dan material serta tidak menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.	Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh, selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan.	Melaksanakan setiap penugasan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kompetensi profesional yang dimiliki, senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitasnya secara berkelanjutan.
Integrity	Objectivity	Concealment	Competence
Demonstrate honesty, objectivity, and Sincerity in carrying out duties, as well as obeying the law and ethics of the Company.	Not doing activities that can potentially/cause conflict with the Company's interests, not accepting anything in any form from the auditee and other parties related to audit work, disclosing all important and material facts and not covering up the existence of unlawful practices.	Be careful and prudent in using the information obtained, always maintain the confidentiality of data and information related to the implementation of its duties and do not use information for personal or group benefits that can cause losses to the Company.	Carry out each assignment using their knowledge, expertise, experience, and professional competence, always improving their competence and effectiveness and quality on an ongoing basis.

METODOLOGI AUDIT

Departemen Audit Internal menerapkan metodologi auditberbasisrisiko(*RiskBasedAudit*)yangditerapkan mulai dari tahap perencanaan audit tahunan, pelaksanaan audit sampai dengan pelaporan. Penilaian risiko dilakukan secara menyeluruh, baik pada unit kerja di kantor pusat maupun unit bisnis.

RAPAT DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Selama tahun 2023 Departemen Audit Internal telah melakukan Rapat dengan Direksi sebanyak 3 kali dan Rapat dengan Komite Audit sebanyak 3 kali.

IAC is always reviewed periodically to comply with the latest practices. The final review was based on the Decree of the Board of Commissioners dated July 26, 2022 and has been uploaded to the Company's website.

INTERNAL AUDITOR CODE OF ETHICS

The Company's internal auditor code of ethics refers to the Code of Ethics of The Institute of Internal Auditors which contains standards of conduct as guidelines for all Internal Auditors in carrying out internal audit practices.

AUDIT METHODOLOGY

The Internal Audit Department applies a risk-based audit methodology that is applied starting from the annual audit planning stage, audit implementation to reporting. Risk assessment is carried out thoroughly, both in work units at the head office and business units.

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT MEETING

During 2023, the Internal Audit Department has held meetings with the Board of Directors 3 times and meetings with the Audit Committee 3 times.

DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Internal Audit Department

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Sepanjang tahun 2023, anggota Departemen Audit Internal mengikuti berbagai program pendidikan dan/atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi, sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut.

No	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Facilitator
1.	<i>Webinar Trends & Challenges Internal Audit in 2023-2025</i>	2 Januari 2023 January 2, 2023	YPIA
2.	<i>Microsoft Excel - Intermediate (Batch 1)</i>	07 Maret 2023 March 07, 2023	Protelindo Learning
3.	<i>Microsoft Excel - Advance (Batch 1)</i>	08 Maret 2023 March 08, 2023	Protelindo Learning
4.	<i>Critical Thinking : A Vital Auditing Competency</i>	29 & 30 Maret 2023 March 29 & 30, 2023	IIA Indonesia
5.	<i>Communication Inside Out</i>	16-17 Mei 2023 May 16-17, 2023	Protelindo Learning
6.	<i>Root Cause Analysis</i>	22-23 Mei 2023 May 22-23, 2023	IIA Indonesia
7.	<i>Fraud Detection & Investigation for Internal Audit</i>	29 & 30 Mei 2023 May 29 & 30, 2023	IIA Indonesia
8.	<i>Agile Auditing</i>	21-22 Juni 2023 June 21-22, 2023	IIA Indonesia
9.	<i>Performing an Effective Quality Assessment</i>	12 & 13 Juli 2023 July 12 & 13, 2023	IIA Indonesia
10.	<i>Communication Skills for Auditors: Interviewing and Negotiating</i>	24-25 Juli 2023 July 24-25, 2023	IIA Indonesia
11.	<i>Building and Sustainable Quality Program</i>	11-12 September 2023 September 11-12, 2023	IIA Indonesia

PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Di tahun 2023, Departemen Audit Internal telah melaksanakan kegiatan audit dan konsultasi sebagai berikut:

1. Melakukan 10 Audit dan investigasi audit ad-hoc, termasuk peninjauan proses bisnis;
2. Menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi audit yang disepakati;
3. Mendukung penyelidikan kasus pelanggaran Kode Etik;

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT DEPARTMENT ACTIVITIES

In 2023, the Internal Audit Department has carried out audit and consulting activities as follows:

1. Conducting 10 Audits and ad hoc audit investigations, including business process review;
2. Followed on the implementation of the agreed audit recommendations, and;
3. Supported the investigation of Code Breach cases.

DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

Internal Audit Department

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Jumlah Penugasan

Number of Assignments

No.	No. Surat Penugasan Letter of Assignment	Judul Penugasan Assignment Subject
1.	001/II/2023/PTI/STP/A/STIA	Business Development
2.	004/III/2023/PTI/STP/A/STIA	Material Planning - Combat
3.	024/XII/2023/STP/A/STIA	Cost Control
4.	004/III/2023/PTI/STP/A/STIA	Material Planning - Tower
5.	002/II/2023/PTI/ISI/STP/A/STIA	Corporate Credit Card
6.	016/VIII/2023/PTI/STP/A/STIA	OM - Helpdesk Tower
7.	019/IX/2023/PTI/STP/A/STIA	AR Unbilled Collection - Tower
8.	024/XII/2023/PTI/STP/A/STIA	Revenue Assurance
9.	005/III/2023/PTI/STP/A/STIA	ICR - Tower Permit

Berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 5 Mei 2023, Perseroan telah memutuskan kriteria dan batasan dalam menunjuk jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu:

1. Mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut);
2. Terdaftar sebagai Auditor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Atas dasar tersebut, Perseroan memutuskan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjadi & Tamara dengan Akuntan Publik (*Signing Partner*) yaitu Riani untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Berikut adalah KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Based on the Annual GMS held on May 5, 2023, the Company has decided on the criteria and limitations in appointing the services of a Public Accounting Firm (KAP), as follows:

1. Have an international reputation (including Registered Public Accountants who are members of the Registered Public Accountant Firm);
2. Registered as an IKNB (Non-Bank Financial Industry) Auditor at the Financial Services Authority; and
3. Other terms and conditions deemed good by the Company's Board of Commissioners by taking into account the input and consideration from the Company's Audit Committee.

On this basis, the Company decided to render the services of Public Accounting Firm (KAP) Tjahjadi & Tamara with a Public Accountant (*Signing Partner*), Riani to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries dated December 31, 2023 and for the year ended on that date.

The following are KAP that audited the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries in the last 5 (five) years:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	No. Izin KAP License No.	Akuntan Publik Public Accountant	No. Izin AP License No.	Fee (Rp-Juta)
2023	Tjahjadi & Tamara	STTD.KAP-67/PM.22/2018	Riani	STTD.AP-361/PM.22/2018 AP.0264	Rp340.000.000
2022	Tjahjadi & Tamara	STTD.KAP-67/PM.22/2018	Riani	STTD.AP-361/PM.22/2018 AP.0264	Rp320.000.000
2021	Tjahjadi & Tamara	STTD.KAP-67/PM.22/2018	Junarto Tjahjadi	STTD.AP-360/PM.22/2018 AP.0168	Rp460.000.000
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	STTD.KAP-00012/PM.22/2017	Tjun Tjun	STTD.AP-243/PM.22/2018 AP.1115	Rp330.000.000
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	STTD.KAP-00012/PM.22/2017	Tjun Tjun	STTD.AP-243/PM.22/2018 AP.1115	Rp275.000.000
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	STTD.KAP-00012/PM.22/2017	Tjun Tjun	STTD.AP-243/PM.22/2018 AP.1115	Rp250.000.000

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

STP menerapkan Sistem Pengendalian Internal untuk membantu manajemen meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, dan memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan. Selain itu, pengendalian internal dibangun untuk meningkatkan fungsi pengendalian guna memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

STP memiliki kebijakan pengendalian internal yang dirancang dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada, antara lain risiko keuangan, risiko operasional dan risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pengendalian Internal STP juga berlandaskan pada konsep *three lines* model yang melibatkan semua tingkatan pada struktur organisasi yaitu organ pengurus, manajemen risiko, dan Divisi Internal Audit.

Sistem pengendalian internal STP dievaluasi secara berkala dengan melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit guna memberikan keyakinan bahwa penerapan Pengendalian Internal telah sesuai dengan tujuan dan sasaran Perseroan

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sepanjang tahun 2023, Audit Internal Perseroan telah melaksanakan evaluasi pengendalian internal melalui audit operasional/*Enterprise Risk Management*/audit khusus yang dilakukan sesuai rencana audit tahunan, kebijakan internal dan regulasi terkait. Evaluasi Pengendalian Internal ini juga melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terkait kecukupan atas efektivitas pengendalian internal.

STP implements an Internal Control System to assist management in improving the company's compliance with prevailing laws and regulations, ensuring the availability of true, complete, and timely financial statements and management reports, and meeting the company's business activities' efficiency and effectiveness. Furthermore, internal control is designed to improve the control function in order to ensure that operational activities are carried out correctly and to increase added value for the company through the effectiveness of risk management implementation and Good Corporate Governance principles.

STP has an internal control policy designed by considering existing risks, including financial risks, operational risks and compliance risks with laws and regulations. Moreover, STP Internal Control is also based on the concept of a three-line model that involves all levels of the organizational structure, which are management organs, risk management, and Internal Audit Division.

STP's internal control system is regularly evaluated by involving the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee to provide confidence that the implementation of Internal Control is in accordance with the Company's goals and objectives

REVIEW OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM EFFECTIVENESS

Throughout 2023, the Company's Internal Audit has carried out internal control evaluations through operational audits/*Enterprise Risk Management*/special audits conducted in line with the annual audit plan, internal policies and related regulations. This Internal Control Evaluation also engages the Board of Directors and the Board of Commissioners to obtain adequate assurance regarding the adequacy of the effectiveness of internal control.

Berdasarkan hasil evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris, sistem pengendalian internal di Perseroan dinyatakan telah berjalan dengan efektif dan telah memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen, *shareholders* dan *stakeholders* dengan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta menjalankan kegiatan Perseroan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

PERNYATAAN KECUKUPAN PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan kajian mendalam mengenai kecukupan penerapan Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi bersama manajemen, Internal Auditor, Auditor Independen, dan Komite Audit, dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah cukup memadai.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Based on the Board of Directors' and Board of Commissioners' evaluation results, the Company's internal control system is declared to have performed effectively and have provided adequate confidence to management, shareholders, and stakeholders by delivering reliable financial statements and carrying out the Company's activities in line with prevailing rules and laws.

STATEMENT OF INTERNAL CONTROL ADEQUACY

The Board of Directors and the Board of Commissioners undertook an in-depth assessment of the Internal Control System's implementation adequacy. Based on the findings of review and discussions with management, Internal Auditor, Independent Auditor, and the Audit Committee, the Company's Internal Control System is adequate.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

STP senantiasa berupaya menerapkan Manajemen Risiko untuk memastikan pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Kebijakan ini diterapkan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan pencapaian nilai bagi *stakeholders*.

Penerapan manajemen risiko di STP mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko yang ditandatangani oleh Direksi pada tanggal Juli 2023. Kebijakan manajemen risiko digunakan untuk memastikan bahwa semua level manajemen Perseroan selalu mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko dalam menjalankan setiap proses bisnis dan pengambilan keputusan.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Di tahun 2023, strategi manajemen risiko Perseroan berfokus pada manajemen risiko terintegrasi ke dalam perencanaan strategis, perencanaan aktivitas, manajemen kinerja, dan keputusan alokasi sumber daya dengan memanfaatkan peluang sesuai dengan praktik terbaik.

Dengan integrasi dan implementasi kebijakan pengelolaan risiko ini diharapkan pengelolaan risiko di Perseroan dapat mencapai level optimal. Tentunya, hal itu tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek tetapi memerlukan proses dan implementasi dalam jangka waktu cukup Panjang dan senantiasa dievaluasi atas pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan. Berikut roadmap strategi pengelolaan manajemen risiko Perseroan.

STP strives to implement Risk Management to ensure the achievement of the Company's Vision and Mission. This policy is in place to ensure good corporate governance and value creation for stakeholders.

STP's risk management implementation refers to the Risk Management Policy signed by the Board of Directors on July 2023. A risk management policy is used to ensure that all levels of management at the company consider risk management aspects in all business processes and decision making.

RISK MANAGEMENT STRATEGY

The Company's risk management strategy in 2023 focuses on integrating risk management into strategic planning, activity planning, performance management, and resource allocation decisions by leveraging best practices.

It is expected that risk management in the Company will improve with the integration and implementation of this risk management policy. Naturally, this cannot be accomplished in the short term, but rather requires a long-term approach and implementation that is constantly evaluated for the accomplishments made. The following is the Company's risk management plan road map.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Perseroan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko No. PRO-RM-POL-001 yang efektif pada 10 Juli 2023. Tujuan Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan adalah:

1. Menggabungkan pendekatan yang konsisten untuk manajemen risiko ke dalam budaya dan proses perencanaan strategis organisasi yang mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat operasional dan strategis.
2. Menerapkan pendekatan yang konsisten terhadap manajemen risiko untuk mendukung tanggung jawab tata Kelola organisasi untuk inovasi dan pengambilan risiko yang bertanggung jawab, pengembangan kebijakan, program, dan tujuan. Dalam semua kasus, langkah-langkah yang tepat akan dilakukan untuk mengatasi dampak yang tidak menguntungkan dari risiko dan manfaat yang menguntungkan dari peluang.
3. Mengelola pendekatan yang transparan terhadap risiko melalui komunikasi dan pemantauan yang terbuka dan bermakna terhadap semua risiko utama yang menyeimbangkan biaya pengelolaan risiko dengan manfaat yang diantisipasi.

Adapun lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan mencakup semua rencana, aktivitas, proses bisnis, kebijakan, prosedur, individu dan *property* yang tergabung dalam Grup SMN.

Dalam mengelola risikonya, Perseroan menerapkan ISO 31000:2018 sebagai acuan dalam melakukan proses manajemen risiko dengan mengedepankan tiga elemen yaitu prinsip (*principle*), kerangka kerja (*framework*), dan proses (*process*). Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait.

Dengan ISO 31000, Perseroan menekankan tujuan manajemen risiko untuk menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kinerja, inovasi, dan pencapaian sasaran.

RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The Company has a Risk Management Policy No. PRO-RM-POL-001 effective on July 10, 2023. The objectives of the Company's Risk Management Policy are:

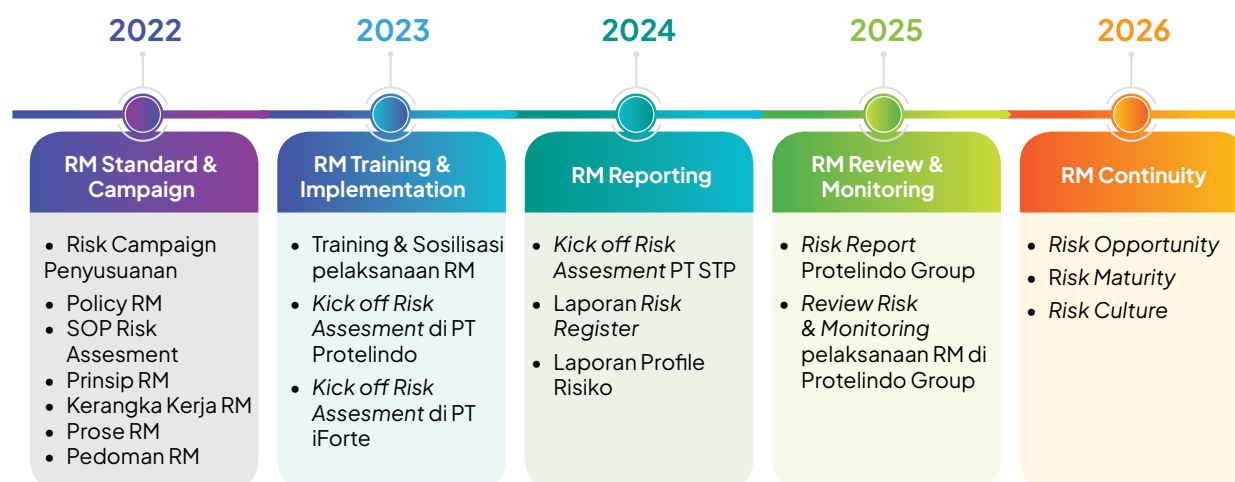
1. Incorporate a consistent approach to risk management into an organization's strategic planning culture and processes that support decision-making and resource allocation at operational and strategic levels.
2. Apply a consistent approach to risk management to support organizational governance responsibilities for innovation and responsible risk-taking, policy development, programs, and objectives. In all cases, appropriate measures will be taken to address the unfavorable impact of the risks and the beneficial benefits of the opportunity.
3. Manage a transparent approach to risk through open and meaningful communication and monitoring of all key risks that balance the costs of managing risk with anticipated benefits.

The scope of the Company's Risk Management Policy covers all plans, activities, business processes, policies, procedures, individuals and properties incorporated in the SMN Group.

In managing its risks, the Company applies ISO 31000:2018 as a reference in carrying out the risk management process by prioritizing three elements, namely principles, frameworks, and processes. Risk management principles are the basis of risk management practice or philosophy. A framework is a structured and systematic arrangement of risk management systems throughout an organization. A process is a sequential and interrelated risk management activity.

With ISO 31000, the Company emphasizes the purpose of risk management to create and protect value. These goals are realized through improved performance, innovation, and achievement of targets.

5 YEARS JOURNEY ROADMAP



MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI DAN MITIGASI

Perseroan melalui Departemen Manajemen Risiko telah mengidentifikasi dan memetakan seluruh risiko Perseroan berdasarkan risiko-risiko yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan. Risiko-risiko ini kemudian dianalisis dan disusun strategi-strategi untuk memitigasinya. Berikut profil risiko utama Perseroan di tahun 2023:

KEY RISKS AND ITS MITIGATION

The Company through the Risk Management Department has identified and mapped all of the Company's risks based on risks that have a significant effect on the Company. These risks are then analyzed and strategies are developed to mitigate them. Here is the Company's main risk profile in 2023:

Risiko Terkait dengan Indonesia Risks Related to Indonesia	Perseroan didirikan di Indonesia. Seluruh aset serta operasionalnya berada di Indonesia. Akibatnya, seluruh kebijakan pemerintah serta kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia dapat menimbulkan dampak material dan negatif terhadap bisnis kami, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Risiko yang paling menonjol khusus untuk Indonesia yang secara langsung dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan, operasional, dan prospek Perseroan, meliputi: - Ketidakstabilan sosial dan politik di Indonesia; - Indonesia terletak di zona gempa bumi, dan terpengaruh risiko geologi dan bencana alam yang signifikan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi; - Gerakan buruh dan tindakan anarkis yang dilakukan buruh dalam bisnis kami atau mitra usaha komersial kami dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan kami; - Perubahan ekonomi global atau regional dapat secara material dan negatif mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia dan pada akhirnya mempengaruhi bisnis kami; dan - Penurunan pemeringkatan kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat secara material dan negatif mempengaruhi bisnis kami dan kemampuan kami untuk memperoleh pembiayaan.	The Company is incorporated in Indonesia. All of our assets and operations are located in Indonesia. As a result, government policies and the political, economic, legal and social conditions in Indonesia could materially affect our business, financial condition, results of operations and prospects. The most notable risks specific to Indonesia that may directly affect the business, financial condition, operations and prospects of the Company include the following: - Political and social instability; - Indonesia is located in an earthquake zone and is subject to geological risks and natural disasters that could lead to economic loss; - Labor activism and labor unrest in our business or the business of our commercial partners may adversely affect our performance and financial condition; - Regional or global economic changes may materially and adversely affect the Indonesian economy and ultimately our business; and - Downgrades of the credit ratings of Indonesia and Indonesian companies could materially and adversely affect our business and our ability to obtain financing.
--	--	---

Mitigasi Mitigation	Tim manajemen Perseroan secara aktif memantau risiko-risiko tersebut dan potensi risiko lainnya yang berhubungan dengan Negara serta mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan Perseroan menghadapi risiko tersebut yang mungkin terjadi.	The management teams actively monitor these risks and other potential country risks and take the necessary steps to prepare the Company for any country-related risks that may occur.
----------------------------------	---	--

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa faktor risiko yang secara signifikan dan langsung dapat mempengaruhi bisnis dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan kami secara negatif. Kegiatan, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan dapat terpengaruh oleh salah satu risiko berikut ini:

RISKS ASSOCIATED WITH THE COMPANY

The following are some of the risk factors that can significantly and directly impact the business and may negatively affect our financial condition. The Company's activities, financial condition, operational results and prospects may be affected by any of the following risks:

Risiko Kredit Pelanggan Customer Credit Risk	Risiko dimana lawan transaksi tidak dapat memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara.	A risk that a counterparty is not able to meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to financial loss. The company is exposed to credit risk from operational activities related to the leasing of towers.
Mitigasi Mitigation	Risiko kredit pelanggan dikelola sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit.	Customer credit risk is managed in accordance with the Company's policies, procedures, and established controls related to credit risk management.
Risiko Peraturan Pemerintah Government Regulation Risk	Adanya perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, kesulitan mendapatkan izin dan persetujuan, pencabutan, atau tidak diperpanjang izin yang diperlukan untuk kebutuhan menara, penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa lokasi menara.	Changes in government regulations and policies, difficulties in obtaining permissions and approvals, revocation, or non-renewal of the necessary licenses for towers, and objections from local communities to some tower locations.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Mitigasi Mitigation	Perseroan memantau perkembangan lokasi menara yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan menjaga, membina dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan lokasi menara, dan akuisisi lahan Perseroan secara aktif bertemu dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi manfaat ekonomis dari menara kepada masyarakat sekitarnya.	The Company monitors the development of tower locations that will be built, acquired, or are already existing. The Company also maintains and fosters relationships with regulators and local communities to ensure the continuity of land leases, the construction of tower locations, and the acquisition of company land. The Company actively engages with the community to conduct socialization about the economic benefits of the tower to the surrounding community.
Risiko Kesehatan & Keselamatan Kerja Work Health & Safety Risk	Adanya risiko pekerja vendor mengalami kecelakaan kerja, baik selama proses pembangunan maupun <i>maintenance</i> tower, seperti: 1. Jatuh dari ketinggian 2. Tersengat listrik 3. Tertimpa material 4. Tertabrak 5. Mengangkat beban berat, terkilir 6. Tersambar petir 7. Dan risiko lainnya	There are risks of vendor employees experiencing work accidents, both during the construction process and maintenance of tower facilities, such as: 1. Falling from heights 2. Getting electrocuted 3. Being struck by materials 4. Being hit by vehicles 5. Lifting heavy loads, spraining 6. Being struck by lightning 7. And other risks
Mitigasi Mitigation	Perseroan memiliki sistem dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dijalankan oleh vendor. Sistem dan aturannya meliputi persyaratan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), sertifikasi bekerja di ketinggian, serta persyaratan dokumen Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) seperti: <i>Job Safety Analysis</i> , <i>QHSE briefing</i> , <i>Permit Letter</i> , dll. Aturan tersebut diatas dan kebijakan K3 yang lain diinfokan/disosialisasikan kepada vendor melalui email QHSE setiap bulan.	The Company has a safety and health management system and rules that must be implemented by vendors. These systems and rules include requirements for the use of Personal Protective Equipment (PPE), certification for working at heights, as well as Occupational Health and Safety (OHS) document requirements such as <i>Job Safety Analysis</i> , <i>QHSE briefings</i> , <i>Permit Letters</i> , etc. These rules and other OHS policies are communicated/disseminated to vendors via QHSE email every month.
	Selain itu, Perseroan juga melakukan <i>monitoring</i> terhadap implementasi yang dijalankan oleh vendor melalui <i>random HSE inspection</i> , ISO internal audit, ISO external audit, <i>emergency site drill</i> , dll.	In addition, the Company also monitors the implementation by vendors through random HSE inspections, ISO internal audits, ISO external audits, emergency site drills, etc.

Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Risiko apabila Perseroan mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.	The risk that the Company encounters difficulties in meeting its financial liabilities when they due.
Mitigasi Mitigation	Perseroan mempertahankan kas dan bank yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Selain itu Perseroan menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas. Perseroan juga menggunakan alat perencanaan likuiditas untuk memonitor risiko likuiditas.	The Company maintains adequate cash and bank balances to support business activities in a timely manner. Additionally, the Company balances the continuity of accounts receivable collections and the flexibility of using bank loans to manage liquidity risk. The Company also uses liquidity planning tools to monitor liquidity risk.
Lingkungan Environment	Risiko: Tantangan terkait isu pemanasan global dan isu lingkungan lainnya. Peluang: Perseroan terus melakukan berbagai inisiatif, baik melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) maupun inisiatif internal yang sejalan dengan upaya untuk mengurangi risiko lingkungan tersebut di atas, antara lain melalui inisiatif pengembangan produk ramah lingkungan dan pengurangan emisi.	Risk: Challenges related to global warming and other environmental issues. Opportunities: The Company continues to carry out various initiatives, both through Corporate Social Responsibility (CSR) programs and internal initiatives that are in line with efforts to reduce aforementioned environmental risks, including through initiatives to develop green products and reduce emissions.
Sosial Social	Risiko: <i>Post pandemic</i> , <i>business recovery</i> yang masih berlangsung dan adanya kesenjangan terkait pemerataan kesempatan kerja, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk pengelolaan keamanan dan kerahasiaan data	Risk: <i>Post pandemic</i> , ongoing business recovery and gaps related to equal employment opportunities, access to health and education facilities, including data security and confidentiality management

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

	Peluang: Perseroan terus memonitor dan menggalakkan aksi-aksi CSR, khususnya terkait dengan masyarakat sekitar yang berdomisili di wilayah kegiatan usaha Perseroan, antara lain melalui program pelayanan dan bantuan kesehatan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga, bantuan kepada anak-anak yang berpotensi <i>stunting</i> di Jawa Timur, serta pemberian beasiswa kepada siswa SMA/SMK dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Secara internal, Perseroan juga terus melakukan inisiatif peningkatan kesejahteraan dan kompetensi karyawan, antara lain melalui program MESOP dan program pelatihan yang relevan. Perseroan juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data termasuk keamanan teknologi informasi.	Opportunities: The Company continues to monitor and promote CSR actions, particularly related to the surrounding communities in the Company's business activity areas, including through the Ksatria Airlangga Floating Hospital health service and assistance program, assistance to children who are potentially stunted in East Java, and providing scholarships to high school/vocational students and university students throughout Indonesia. Internally, the Company also continues to carry out initiatives to improve employee welfare and competence, among others through the MESOP program and relevant training programs. The Company is also committed to continuously improving data security and confidentiality including information technology security.
Ekonomi Economy	Risiko: Adanya konsolidasi bisnis di sektor operator telekomunikasi dan peningkatan suku bunga yang memberikan dampak langsung pada persaingan usaha di industri penyedia infrastruktur telekomunikasi Peluang: Perseroan terus mengambil langkah-langkah untuk memastikan keunggulan produk, diversifikasi pelayanan dan layanan serta strategi menjalankan bisnis secara lebih efisien.	Risk: The existence of business consolidation in the telecommunications operator sector and the increase in interest rates have a direct impact on business competition in the telecommunications infrastructure provider industry Opportunities: The Company continues to take measures to ensure product excellence, diversification of services and solutions as well as strategies to conduct business more efficiently.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

STP senantiasa berupaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) ke seluruh *owner risk* dalam rangka menjalankan proses bisnis Perseroan dengan menitikberatkan konsep risiko sebagai tanggung jawab setiap orang (*risk is your responsibility*). Upaya peningkatan budaya risiko (*risk awareness culture*) ini dilakukan melalui sosialisasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Di tahun 2023, sosialisasi dan pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan budaya sadar risiko adalah sebagai berikut:

RISK CULTURE ENHANCEMENTS

STP strives to ehance the risk awareness culture to all risk owners in order to carry out the company's business processes by emphasizing the concept of "risk is your responsibility". Efforts to increase risk awareness culture are carried out through socialization and continuous learning. In 2023, the socialization and learning carried out to improve the risk-aware culture are as follows:

1. Program *Risk Awareness* bersama IA departemen melalui *HR Online*.
2. Komunikasi dan konsultasi untuk pelaksanaan *Risk Management* di tiap Divisi Perseroan secara berkelanjutan

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Meninjau efektivitas sistem manajemen risiko adalah proses penting yang memastikan strategi manajemen risiko Perseroan secara memadai mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terhadap operasional, reputasi, dan kesejahteraan finansialnya. Kajian Perseroan dalam hal ini meliputi pemeriksaan keselarasan kerangka kerja manajemen risiko dengan tujuan Perseroan, kecukupan proses identifikasi risiko, efektivitas metodologi penilaian risiko, dan efisiensi strategi mitigasi risiko. Perseroan juga menilai komunikasi informasi risiko dalam organisasi dan pemangku kepentingannya, serta integrasi manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan.

Tinjauan menyeluruh membantu mengidentifikasi area untuk perbaikan, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, dan mendukung Perseroan dalam mencapai kinerja yang tangguh dan adaptif dalam mengatasi lanskap risiko yang berubah. Perseroan menggarisbawahi pentingnya pemantauan dan pemutakhiran sistem manajemen risiko secara berkelanjutan untuk memitigasi ancaman dan peluang baru, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kajian mendalam mengenai kecukupan penerapan Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi bersama manajemen, Internal Auditor dan Auditor Independen, Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit menilai bahwa penerapan Manajemen Risiko Perseroan telah cukup memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

1. Risk Awareness program with IA department through *HR Online*.
2. Continuous communication and consultation for the implementation of Risk Management in every division of the Company.

REVIEW OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

Reviewing the effectiveness of a risk management system is a critical process that ensures the Company's risk management strategies are adequately identifying, assessing, and mitigating risks to its operations, reputation, and financial well-being. The Company's review in this instance involves examining the risk management framework's alignment with the Company's objectives, the adequacy of risk identification processes, the effectiveness of risk assessment methodologies, and the efficiency of risk mitigation strategies. The Company also assesses the communication of risk information within the organization and to its stakeholders, as well as the integration of risk management into decision-making processes.

A thorough review helps identify areas for improvement, ensures compliance with regulatory requirements, and supports the Company in achieving a resilient and adaptive posture in the address changing risk landscapes. The Company underscores the importance of continuous monitoring and updating of the risk management system to reflect new threats and opportunities, ultimately contributing to the Company's long-term sustainability and success.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committee performed an in-depth investigation of the adequacy of Risk Management implementation. Based on the findings of reviews and discussions with management, Internal Auditors, and Independent Auditors, the Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Audit Committee, determine that the Company's Risk Management is adequate in identifying and managing risks.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

PROFIL KEPALA DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

PROFILE OF HEAD OF RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

Deden Eka Kurnia Kepala Departemen Manajemen Risiko Head of Risk Management Department		
Usia Age	44	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesian	
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Direksi tanggal 6 September 2021	Decree of the Board of Directors dated September 6, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE PERBANAS, Jakarta (2002).	Bachelor of Economics majoring in Accounting from STIE PERBANAS, Jakarta (2002).
Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau adalah <i>Division Head Internal Audit & Risk Management</i> PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2021–sekarang), <i>Senior Manager Risk Management</i> di PT ABM Investama Tbk (2017–2021), <i>Manager Risk Management</i> di PT Bumi Serpong Damai Tbk - Sinarmas Land (2013–2017), <i>Assistant Manager Risk Management</i> di PT OTP Geothermal (2012–2013), <i>Assistant Manager Internal Audit & Risk Management</i> di PT Pam Lyonnaise Jaya - PALYJA (2008–2012), <i>Assistant Manager Internal Audit</i> di PT Tirta Investama, Tbk - Danone AQUA (2004–2008), <i>Internal Auditor</i> di PT Gubah Bumi Selaras (2003–2004), <i>External Auditor</i> di KAP Husni, Mucharam & Rasidi (2002–2003).	
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Kepala Departemen Audit Internal	Head of Internal Audit Department
Sertifikasi Certification	-	

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

- Bertanggungjawab atas pengembangan, koordinasi, dan sosialisasi Kerangka Kerja Manajemen Risiko termasuk pelatihan dan system yang mampu mengidentifikasi, memantau dan melaporkan resiko baru atau yang muncul yang terdokumentasi

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

- Responsible for developing, coordinating, and disseminating, the Risk Management Framework, including training and systems capable of identifying, monitoring, and reporting documented new or emerging risks.

- Bertanggungjawab untuk meninjau proses Manajemen Risiko, memantau dan melaporkan resiko strategis utama.

- Responsible for reviewing the Risk Management process, monitoring and reporting on key strategic risks.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Dalam meningkatkan kualitas personil Departemen Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas manajemen risiko, di tahun 2023 personil manajemen risiko telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, antara lain:

RISK MANAGEMENT DEPARTMENT COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In improving the quality of Risk Management Department personnel in line with the needs of the implementation of risk management duties, in 2023 risk management personnel have participated in various competency development programs, including:

No	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Tanggal Date	Penyelenggara Facilitator
1	<i>Professional Development Program (PDP): The Usage of Risk Assessment Techniques in the Real Sector</i>	1 March, 2 March, 8 March, 9 March & 15 March 2023 (5 Modules)	IRMAPA
2	<i>Webinar: Global Turmoil: The Unpredictable Landscape</i>	15 Maret 2023 March 15, 2023	IRMAPA
3	<i>Webinar: The Future of Risk Culture: Navigating The Unknown</i>	14 Juni 2023 June 14, 2023	The WAY Academy & IRMAPA
4	<i>Webinar: Menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui Manajemen Risiko Pembangunan Nasional</i>	27 Juli 2023	The WAY Academy & IRMAPA
5	<i>Webinar: Optimizing Business Continuity Strategy to Achieve Sustainable Objectives</i>	27 September 2023 September 27, 2023	IRMAPA
6	<i>Webinar: ESG Synergy for Prosperity: Integrating Social Transformation into Risk Management</i>	7 Desember 2023 December 7, 2023	IRMAPA



PERMASALAHAN HUKUM

Litigation

Pada tahun 2023, tidak terdapat perkara hukum penting yang bersifat material bagi Perseroan yang dihadapi Perseroan, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material bagi Perseroan, yang dikenakan oleh pihak regulator atau otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

There were no significant legal cases of a material kind experienced by the Company, members of the Board of Directors, or members of the Company's Board of Commissioners in 2023.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

During 2023, were no administrative sanctions of a material nature for the Company, imposed by regulators or authorities (Financial Services Authority, Bank Indonesia, Stock Exchange, and other authorities) to the Company, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors.

AKSES INFORMASI & DATA PERSEROAN

Information Access & Corporate Data

STP senantiasa memberikan kemudahan akses informasi dan data Perseroan. Penyebaran Informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari implementasi prinsip GCG.

STP aims to provide information and data about the company easily accessible. The sharing of information to all stakeholders is a critical component of implementing GCG principles.

STP selalu memberikan informasi yang lengkap, bermanfaat, dan termutakhir terkait pemberian informasi kepada Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

STP constantly delivers comprehensive, useful, and up-to-date information to Shareholders and Stakeholders. Officers or work units disclose such information in accordance with their duties, authorities, and responsibilities.

Informasi-informasi yang relevan terkait Perseroan telah disampaikan melalui:

Relevant information related to the Company has been submitted through:

1. **RUPS:** Media pengambilan keputusan tertinggi Perseroan

**GMS:** The Company's highest decision-making media

2. **Laporan Tahunan:** Perseroan menyajikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang diterbitkan dalam dua Bahasa, baik dalam bentuk fisik maupun soft file.

**Annual Report:** The Company presents Annual Reports and Financial Statements published in two languages, both in physical and soft files.

Layanan Pelanggan: Perseroan menyediakan Layanan Pelanggan untuk menyampaikan keluhan melalui fasilitas "Kontak Kami" di situs web maupun melalui saluran telepon di nomor +6221- 5794 0688, dan faksimili di nomor +6221-5795 0077.

**Customer Service:** The Company provides Customer Service to submit complaints through the "Contact Us" facility on the website or through telephone lines at +6221- 5794 0688, and facsimile at +6221-5795 0077.

3. **Website:** Melalui situs | Through <https://stptower.com/> yang mengacu pada website which refers to POJK No. 8/POJK.04/2015

4. **Media Massa |** Mass Media
Perseroan menyediakan alamat surat menyurat melalui | The Company provides correspondence addresses through:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
Telepon: +6221 23585555
Fax: +6221 23586446
Email: corporate.secretary@stptower.com
Website: www.stptower.com

Investor Relation | Investor Relations
Investor, analis dan pemegang saham dapat menghubungi Hubungan Investor secara langsung dengan mengirimkan surat elektronik ke | Investors, analysts and shareholders may contact Investor Relations directly by emailing to: corporate.secretary@stptower.com atau telepon | or telephone (62-21) 2358 5500

6.

AKSES INFORMASI & DATA PERSEROAN

Information Access & Corporate Data

AKSES INFORMASI & DATA PERSEROAN

Information Access & Corporate Data

KEBIJAKAN PRIVASI DATA DAN INFORMASI

Kebijakan privasi data dan informasi Perseroan diatur berdasarkan kebijakan Teknologi Informasi No. PRO/NON/POL/ITD/21/001 yang efektif pada 3 Mei 2021. Kebijakan TI secara umum bertujuan untuk memastikan proses bisnis berjalan efisien sehingga Perseroan dapat melayani pelanggannya dengan baik, termasuk untuk menyajikan kondisi bisnis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.

Secara lebih rinci Kebijakan TI memuat antara lain hal-hal berikut:

1. Penerapan keamanan TI secara umum untuk melindungi data rahasia Perseroan, aplikasi bisnis, dan infrastruktur TI lainnya dari ancaman keamanan siber.
2. Penyediaan komunikasi rutin untuk menciptakan kesadaran bagi pengguna TI mengenai pentingnya keamanan TI bagi operasi bisnis Perseroan, serta berupaya meningkatkan peran dan kontribusi pengguna dalam melindungi Perseroan dari ancaman keamanan siber.
3. Tanggung jawab pengguna untuk melindungi data rahasia Perseroan dengan melakukan aktivitas kerja secara bertanggung jawab, antara lain dengan mengikuti pedoman keamanan TI, menjaga dan menjaga keamanan data rahasia Perseroan, melindungi perangkat yang mereka gunakan dalam pekerjaan sehari-hari, dll.
4. Prosedur dan pengelolaan penyimpanan data.
5. Klasifikasi data dan penjelasannya, antara lain mengenai data pribadi, data yang sangat rahasia dan data non-rahasia. Ketentuan mengenai penyimpanan data pribadi dan data yang sangat rahasia yang harus disimpan dengan kerahasiaan yang paling ketat, dimana akses terhadap data tersebut akan diberikan berdasarkan kebutuhan dan dipelihara dalam sistem pengontrol *domain* Perseroan. Persyaratan akses baru atau modifikasi dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada administrator TI melalui persetujuan kepala divisi masing-masing.
6. Penjelasan mengenai kemampuan untuk lebih mengamankan infrastruktur Perseroan, aplikasi bisnis dan data serta perangkat pengguna akhir dari potensi ancaman keamanan siber, termasuk *malware*, *virus*, dan pelaku ancaman lainnya.

DATA AND INFORMATION PRIVACY POLICY

The Company's data and information privacy policy is stipulated based on the Information Technology Policy No. PRO/NON/POL/ITD/21/001, effective on May 3, 2021. The general aim of the IT policy is to ensure that business processes performed efficiently for the Company to properly serve its customers, including providing accurate business conditions as a basis for management decision-making.

The IT Policy details include, among others:

1. General IT Security Application: To protect the Company's confidential data, business applications, and other IT infrastructure from cyber security threats.
2. Regular Communication: To create awareness among IT users about the importance of IT security for the Company's business operations and to enhance the role and contribution of users in protecting the Company from cyber security threats.
3. User Responsibility: To protect the Company's confidential data by working responsibly, including following IT security guidelines, maintaining and securing the confidentiality of company data, protecting the devices used in daily work, etc.
4. Data Storage Procedures and Management.
5. Data Classification and Explanation: Including personal data, highly confidential data, and non-confidential data. Provisions regarding the storage of personal and highly confidential data must be maintained with the utmost confidentiality, where access to such data will be granted based on necessity and maintained within the Company's domain control system. New or modified access requirements can be made by submitting a request to the IT administrator through the approval of each division head.
6. Explanation on Securing the Company's Infrastructure: Business applications, data, and end-user devices from potential cyber security threats, including malware, viruses, and other threat actors. Implemented measures include the deployment and investment in firewalls, VPNs, antivirus, web-filter technology, email security,

Hal yang diterapkan mencakup penerapan dan investasi pada firewall, VPN, anti virus, teknologi web-filter, *email security* serta *Security Operations Center* ("SOC") untuk pemantauan ancaman siber.

7. Ketentuan mengenai aplikasi bisnis dan Infrastruktur TI Perseroan yang dilengkapi dengan akses yang dilindungi kata sandi, dan jejak audit dari akses tersebut

and a Security Operations Center ("SOC") for cyber threat monitoring.

7. Business Applications and IT Infrastructure: Equipped with password-protected access, and an audit trail of such access.

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Procurement of Goods and Services

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Procurement of Goods and Services

STP mengelola rantai pasokannya melalui Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang mempertimbangkan kualitas, *delivery time*, dari sumber yang tepat dan dilakukan melalui strategi, perencanaan, proses dan pengendalian pengadaan yang efektif dan efisien serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Pengadaan didasari oleh pemenuhan barang/jasa yang dibutuhkan melalui mekanisme yang benar dan independen (tidak mengandung unsur benturan kepentingan), dengan menjunjung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*. Kebijakan pengadaan merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan Perseroan yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Perseroan meyakini bahwa pemilihan pemasok yang dilakukan secara terstruktur dapat membantu STP dalam mewujudkan pengadaan berkelanjutan serta memastikan transparansi secara adil, profesional dan dapat diandalkan serta menjamin ketelitian dalam setiap kegiatan pengadaan. Untuk memastikan hal-hal tersebut, Perseroan memiliki Panduan Proses Operasional Pengadaan dan Manajemen Vendor. Panduan ini mengatur secara rinci mengenai proses pengadaan dan proses manajemen pemasok/mitra kerja yang antara lain terdiri dari metode pengadaan dan petunjuk pelaksanaannya, penghematan pengadaan/ *procurement saving*, serta manajemen kinerja pemasok dan parameter kinerjanya.

Untuk menyeleksi pemasok, pada tahap awal Perseroan memiliki persyaratan tertentu yang harus diinformasikan oleh calon pemasok, diantaranya informasi mengenai:

1. Perusahaan calon pemasok, termasuk lingkup kerjanya;
2. Kinerja keuangan pemasok;
3. Peralatan kerja yang dimiliki pemasok;
4. Untuk pemasok yang mengerjakan *project* tertentu, pengalaman kerja pada *project* sejenis sebelumnya;
5. Kemampuan dan kapasitas kerja pemasok;
6. Kompetensi pemasok; dan
7. Pekerja dan tim yang dimiliki, termasuk tenaga ahli.

STP manages its supply chain through a Goods and Services Procurement Policy that takes into account quality, delivery time, and sourcing from the right source, and is carried out through effective and efficient procurement strategies, planning, processes, and controls, as well as compliance with Indonesian laws and regulations.

Procurement Policy is based on the fulfillment of goods/services needed through a correct and independent mechanism (does not contain elements of conflict of interest), by upholding the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Procurement policy is the basis for the preparation of all policies and decisions of the Company related to the procurement process of goods and services.

The Company asserts that structured supplier selection can help STP achieve sustainable procurement and ensure fairness, professionalism, and reliability in transparency, as well as accuracy in every procurement activity. To ensure these, the Company has a Procurement Operational Process Guide and Vendor Management. This guide details the procurement process and supplier/partner management process, including procurement methods and implementation instructions, procurement savings, and supplier performance management and its performance parameters.

To select suppliers, at the initial stage, the Company has specific requirements that must be informed by potential suppliers, including information on:

1. Company of prospective supplier, including scope of work;
2. Financial performance;
3. Work equipment;
4. On specific projects, supplier shall provide similar work experience on previous projects;
5. Working ability and capacity;
6. Competence; and
7. Manpower and teams, including expert personnel.

Setelah dilakukan penunjukan, Perseroan juga mewajibkan pemasok untuk menandatangani surat pernyataan kepatuhan dan integritas. Melalui pernyataan ini, Perseroan mewajibkan pemasok untuk berkomitmen agar melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan konteks keberlanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Praktik tanggung jawab sosial yang mencakup aspek bisnis yang beretika, termasuk kepatuhan pemasok dalam ketentuan anti korupsi, pencucian uang maupun penyusutan dan gratifikasi,
2. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja,
3. Pengembangan sumber daya manusia,
4. Menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan menghindari diskriminasi terhadap pekerja dan eksploitasi tenaga kerja serta mematuhi larangan penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan
5. Melakukan pekerjaan dengan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan hidup maupun perubahan iklim.

Dalam menjalankan pengadaan, STP mengutamakan penggunaan pemasok lokal untuk memberikan manfaat lebih terhadap perekonomian secara tidak langsung. Hal tersebut tercermin dalam penggunaan pemasok di tahun 2023, dimana penggunaan pemasok lokal untuk kegiatan operasional Perseroan adalah sebesar 100% dari total seluruh pemasok sebesar 137 pemasok.

Penilaian Pemasok

Untuk menjamin produk dan/atau jasa yang berkualitas, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi kinerja mitra kerja yang aktif pada periode evaluasi tersebut. Evaluasi ini dilakukan kepada pemasok bisnis tower dengan tujuan diantaranya untuk memastikan bahwa pemasok bekerja sesuai dengan *Key Performance Indicators* dan *Service Level Agreement* yang telah disepakati. Pengukuran kinerja pemasok dilakukan berdasarkan parameter penilaian yang terdiri dari ketepatan waktu, kualitas, kepatuhan administratif, penganggaran dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan.

Untuk meningkatkan keterlibatan pemasok/ *vendor engagement*, Perseroan juga memberikan penghargaan, *performance improvement program*, maupun *punishment* kepada pemasok sesuai dengan hasil evaluasi kinerjanya.

Upon appointment, the suppliers shall sign a compliance and integrity statement, by which the Company requires the commitment of suppliers to conduct operational activities in accordance with the context of sustainability, including but not limited to:

1. Social responsibility practices that include ethical business aspects, including supplier compliance with anti-corruption, money laundering and bribery and gratuity provisions,
2. Management of occupational health and safety,
3. Human resource development,
4. Uphold workers' rights and avoid discrimination against workers and labour exploitation and comply with prohibitions on the use of underage labour, and
5. Considering environmental factors and climate change during working.

In conducting procurement, STP prioritizes the use of local suppliers to provide indirect benefits to the economy. This is reflected in the use of suppliers in 2023, where the use of local suppliers for the Company's operational activities was 100% of the total of 137 suppliers.

Supplier Assessment

To ensure quality products and/or services, the Company regularly evaluates the performance of active business partners during the evaluation period. This evaluation is conducted for tower business suppliers with goals including ensuring that suppliers work in accordance with the Key Performance Indicators and Service Level Agreements that have been agreed upon. Supplier performance measurement is based on assessment parameters consisting of timeliness, quality, administrative compliance, budgeting, and support provided to the Company.

To enhance supplier/vendor engagement, the Company also awards, implements performance improvement programs, or imposes punishments on suppliers according to the results of their performance evaluations.

PEDOMAN PERILAKU

Code of Conduct

PEDOMAN PERILAKU

Code of Conduct

STP telah menyusun Pedoman Perilaku atau yang disebut juga *Code of Conduct* (CoC) sebagai bentuk komitmen dari etika bisnis serta sebagai landasan perilaku usaha. Seluruh Personil STP harus menjadikan Kode Etik menjadi dasar sikap, perilaku dan tindakan dalam melakukan interaksi hubungan bisnis maupun hubungan kerja, dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang ada pada visi, misi, dan nilai-nilai utama Perseroan serta memperhatikan kepatuhan pada peraturan internal dan eksternal yang berlaku.

Pedoman Perilaku STP berlaku bagi seluruh personil STP, mulai dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, tanpa kecuali. Penerapan Pedoman Perilaku menjadi tanggung jawab seluruh insan Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan kode etik di lingkungan Perseroan dengan dibantu oleh organ-organ di bawahnya.

ISI PEDOMAN PERILAKU

Pedoman Perilaku merupakan komitmen yang terdiri dari etika usaha perseroan dan etika perilaku setiap personil STP yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja dalam mencapai visi dan misinya.

Secara garis besar isi pedoman perilaku STP antara lain mengatur:

1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perseroan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, saling menghargai dan menghormati sesama, saling terbuka & percaya, menjaga privasi & rahasia individu, loyal & bertanggung jawab, menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan lain sebagainya);
4. Hubungan dengan Pemegang Saham, Pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya (yang meliputi Hubungan dengan Pelanggan, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan

STP has developed a Code of Conduct (CoC) as a form of commitment to business ethics and as a foundation for business conduct. All STP Personnel must use the Code of Ethics as the basis for their attitudes, behaviours, and actions when conducting business and work relationship interactions, by applying the basic principles outlined in the Company's vision, mission, and core values, and by adhering to all applicable internal and external regulations.

STP Code of Conduct applies without exception to all STP personnel, including members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, supporting organs of the Board of Commissioners, and employees of the Company. The application of the Code of Conduct is the responsibility of all Company personnel. The Board of Commissioners and Board of Directors are in charge of implementing the code of ethics within the Company, with assistance from its subordinate organs.

CONTENT OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is a commitment consisting of corporate business ethics and behavioural ethics of each STP personnel which is prepared to influence, form, regulate and conform behaviour based on the principles of good corporate governance so as to achieve consistent output in accordance with the work culture in achieving its vision and mission.

Broadly speaking, the contents of the STP code of conduct include:

1. Vision, Mission, Corporate Values, Objectives of the Code of Conduct and Scope of the Code of Conduct;
2. Compliance and Risk Management;
3. Creating a Favourable Work Environment (which includes Fair Treatment to All Employees, mutual respect and respect for others, mutual transparency & trust, maintaining individual privacy & confidentiality, loyal & responsible, avoiding conflicts of interest, and so forth);
4. Relationships with Shareholders, Customers and other Stakeholders (which includes Relationships with Customers, Relationships with Associates, Relationships with Regulators, Bribery and

- Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, dan Anti Pencucian Uang);
5. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan terus mengoptimalkan penerapannya guna mencapai skema praktik terbaik. Perseroan terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan memperkuat etika dan budaya kerja yang mengutamakan integritas tinggi, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh level manajemen dan karyawan.

Upaya Penegakan Kode Etik

Kode Etik berlaku bagi seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan terus berupaya dalam proses penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku karyawan yang sesuai standar etika. Langkah-langkah upaya antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui email pengumuman kepada seluruh karyawan dan karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. Penyampaian Kode Etik juga dilakukan pada saat *Induction Program* bagi karyawan eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik, sementara sosialisasi pengkinian akan terus dilakukan secara berkala. Perseroan memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

Selama tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran atas Pedoman Perilaku Perseroan dan sanksi diberikan kepada pegawai yang melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Corruption, Gift Giving and Acceptance, and Anti-Money Laundering);
5. Enforcement of the Code of Conduct (which includes Roles and Responsibilities, Violations of the Code of Conduct).

The Company upholds the principles of GCG and continues to optimize its implementation to achieve best practice scheme. The Company continues to improve the quality of GCG implementation by strengthening work ethics and culture that prioritize high integrity, professionalism, and regulatory compliance at all levels of management and employees.

Code of Ethics Enforcement

Code of Conduct shall be obeyed by all employees including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company is committed to continuously make efforts to enforce the Code of Ethic as one of the implementations of good corporate governance, while also developing employees' behaviour that are in accordance with the ethical standards. The efforts taken among others are socialization of the Code of Ethics through email blast to all Employees, then the Employees respond with acceptance and implementation of the Code of Ethics in the best way possible. Information related to the Code of Ethics is also communicated to executive employees and new hires during the Induction Program, while socialization of the latest updates is given periodically. The Company gives strict sanctions to any irregularities, misuse, and violations of the Code of Ethics

During 2023, there were no violations of the Company's Code of Conduct and sanctions are given to employees who violate in accordance with applicable regulations.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Policy

STP telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 27 Agustus 2012. Kebijakan Anti Korupsi ini berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan tanpa terkecuali.

Dalam pelaksanaannya, STP telah menunjuk Compliance Manager untuk memastikan Kebijakan Anti Korupsi ini dijalankan dengan baik. Adapun isi dari Kebijakan Anti Korupsi tersebut, antara lain:

1. Larangan tegas terhadap korupsi dalam bentuk apapun.
2. Hubungan dengan mitra kerja.
3. Mengatur kebijakan tentang hadiah, hiburan, dan perjalanan.
4. Sumbangan politik, donasi, CSR dan sponsorship.
5. Rekrutmen mantan pejabat pemerintah dan pejabat pemerintah aktif.
6. Ketepatan pencatatan dan pengendalian internal.
7. Sanksi.
8. Prosedur kepatuhan.

STP has an anti-corruption policy that was established by the Company's Board of Directors on August 27, 2012. This Anti-Corruption Policy applies without exception to the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and employees.

In its implementation, STP has appointed a Compliance Manager to ensure that this Anti-Corruption Policy is properly implemented. The contents of the Anti-Corruption Policy include:

1. Strict prohibition against corruption in any form.
2. Relationships with partners.
3. Set policies on gifts, entertainment, and travel.
4. Political donations, donations, CSR and sponsorship.
5. Recruitment of former government officials and active government officials.
6. Accuracy of recording and internal control.
7. Sanctions.
8. Compliance procedures.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN UNTUK MEMENUHI HAK KREDITUR

Company Policy on Creditor's Rights

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK No. 21, Perseroan telah menyusun Kebijakan Perusahaan untuk Memenuhi Hak Kreditur ("Kebijakan"). Perseroan berharap bahwa Kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi Perseroan dan entitas anak dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga dan pemenuhan atas hak-hak kreditur.

Perseroan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini sebelum mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga, antara lain:

1. Mematuhi kewajiban Perseroan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku termasuk mempertahankan izin-izin yang diperlukan Perseroan dan entitas anak dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, seperti persetujuan dari para pemegang saham;
3. Memperhatikan hak-hak kreditur dalam perjanjian pinjaman yang telah ada; dan
4. Memastikan kondisi keuangan Perseroan dalam kondisi yang sehat dengan memelihara Rasio atas Utang Bersih terhadap EBITDA yang Berjalan dan Debt Services Coverage Ratio.

Kami berharap Kebijakan ini dapat menjaga kepercayaan para kreditur, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

Following the requirement of Good Corporate Governance ("GCG") as stipulated in POJK No.21, the "Company") has prepared the Policy of the Company On Fulfillment the Creditor's Rights (the "Policy"). The Company is expecting that the Policy will act as guidance for the Company and its subsidiaries on obtaining a loan from a third party and to protect the creditor's rights.

The Company shall consider the following factors before obtaining a loan facility from a third party, among others:

1. Complying with applicable laws and regulations as well as maintaining necessary licenses which are required by the Company and its subsidiaries to conduct their business activities;
2. Complying with the provisions on the Articles of Association, such as to obtain approval from the shareholders when required;
3. Respecting the rights of the creditors on loans; and
4. Ensuring the financial conditions is in a healthy condition by maintaining the Ratio on Net Debt to Running EBITDA and the Debt Services Coverage Ratio.

This Policy is intended to maintain trust from our creditors, investors and stakeholders and to address their rights.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI

Policy on the Utilization of Information Technology for Information Transparency

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK No.21, Perseroan dengan ini menyusun Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Keterbukaan Informasi ("Kebijakan"). Perseroan berharap dengan Kebijakan tersebut dapat memperluas pemberian informasi kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan juga investor yang potensial sehubungan dengan kinerja dan kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai sebuah perusahaan publik yang tercatat, Perseroan wajib menyampaikan informasi material Perseroan sesuai dengan hukum pasar modal yang berlaku di Indonesia, antara lain, menyediakan informasi tersebut pada situs web Perseroan. Selain dengan situs web Perseroan, Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan dan juga investor yang potensial setiap kali Perseroan merilis laporan keuangan kuartalan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat elektronik sehubungan dengan kondisi dan rencana kegiatan Perseroan; dan
2. Mengadakan pertemuan investor baik dalam bentuk tatap muka maupun konferensi telepon.

Perseroan berharap Kebijakan ini dapat menjaga kepercayaan para pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

In line with requirements of Good Corporate Governance as stipulated in POJK No.21, the Company has prepared the Policy on Utilization of Information Technology for Disclosure Information (the "Policy"). By this Policy, the Company makes it a priority to share information broadly to shareholders and stakeholders as well as potential investors regarding the performance and business plan of the Company.

As a publicly listed company, the Company must disclose its material information in accordance with the prevailing capital market laws in Indonesia, among others, by publishing its information to public on the Company's website. Other than the Company's website, the Company is optimizing the use of information technology to spread information to shareholders and stakeholders as well as potential investors each time the Company release its quarterly financial report, by using the following methods:

1. Sending electronic mail regarding the Company's condition and business plan; and
2. Holding investor gatherings in the form of real meetings or conference calls.

The Company believes that this Policy will maintain the trust from our shareholders, investors and stakeholders towards the Company and to fulfill their rights.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Employee and/or Management Shares Option Programs

Selama tahun buku 2023, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi dalam hal pemberian program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

During fiscal year 2023, the Company did not conduct any corporate action related to the employee and/or management shares option programs.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

STP menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap Insan Perseroan dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG serta nilai-nilai etika yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Perseroan untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, sistem pelaporan pelanggaran Perseroan dilaksanakan berdasarkan *WBS Policy* yang telah ditetapkan melalui surat POL- FIA-003-1.0.00 tanggal 27 Juli 2021.

PIHAK YANG MENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Unit Audit Internal merupakan Unit Kerja terkait yang mengelola pengaduan di mana laporan diterima oleh Direktur Utama kemudian ditindaklanjuti oleh unit audit internal. Bilamana diperlukan maka unit audit internal akan melakukan investigasi lebih lanjut.

TATA CARA PENGADUAN

WBS merupakan saluran yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menyampaikan laporan rahasia mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal Perusahaan, seperti:

- Penipuan;
- Pelanggaran hukum dan peraturan;
- Pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, perjanjian ketenagakerjaan, Kode Etik, dan kebijakan tertulis lainnya dari Perusahaan.

Setiap informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Sebelum laporan disampaikan kepada Direktur Utama, Departemen Audit Internal (DAI) akan mengevaluasi seluruh laporan yang masuk mencakup aspek administratif, operasional, dan yudisial.

Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, DAI akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyimpulkan valid atau tidaknya laporan tersebut. Apabila laporan yang diberikan di luar ruang lingkup dari *Whistleblowing System*, maka DAI akan meneruskan kepada pihak atau unit terkait agar ditindaklanjuti.

STP develops and puts in place a Whistleblowing System (WBS) that will enable all Company employees and other external parties to submit reports on alleged violations of GCG principles and related ethical norms. This is done to demonstrate the Company's commitment to providing a framework for respecting the principles of good corporate governance in order to foster a clean and responsible work environment.

In its implementation, the Company's whistleblowing system is implemented based on the WBS Policy which has been stipulated through letter POL- FIA-003-1.0.00 dated July 27, 2021.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT HANDLERS

Internal Audit Unit is a related Unit that manages complaints where reports are received by the President Director and then followed up by the internal audit unit. If necessary, the internal audit unit will conduct further investigations.

COMPLAINT PROCEDURES

The WBS is channels that can be used by stakeholders to submit confidential reports regarding violations committed by Company's internal parties, such as:

- Fraud;
- Violations of laws and regulations;
- Violations of the Company Regulations, employment agreements, the Code of Conduct, and other written policies of the Company.

Any information submitted by the whistleblowers will be treated as confidential information. Before the report is submitted to the President Director, the Internal Audit Department (DAI) will evaluate all incoming reports including administrative, operational, and judicial aspects.

If the initial information is deemed sufficient, DAI will conduct further checks to conclude whether or not the report is valid. If the report provided is outside the scope of the Whistleblowing System, DAI will forward it to the relevant party or unit for follow-up.

Pihak pelapor akan mendapatkan informasi terkait status laporannya. Untuk Pelaporan Pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban Perseroan untuk memberikan tanggapan.

MEDIA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Penyampaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG serta nilai-nilai etika yang berlaku (*fraud & irregularities*) disampaikan melalui saluran pelaporan berikut:



whistleblower@stptower.com



087844530366

PERLINDUNGAN WHISTLE BLOWER

Setiap pelapor akan diberikan jaminan perlindungan dari Perseroan di mana identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, email dan unit kerja/perusahaan) akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, pelapor diperbolehkan untuk tidak mencantumkan identitas (anonim).

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

STP senantiasa melakukan sosialisasi mengenai kebijakan WBS kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui email blast dan pewartaan di situs web Perseroan.

HASIL PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

Selama tahun 2023 ada sebanyak 5 (lima) pelaporan yang masuk melalui WBS. Seluruh pelaporan tersebut telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

The reporting party will get information regarding the status of the report. For anonymous Breach Reporting, there is no obligation of the Company to respond.

COMPLAINT CHANNEL MEDIA

The presentation of reporting of alleged violations of the principles of GCG as well as the prevailing ethical values (fraud & irregularities) is communicated through the following reporting channels:

WHISTLE BLOWERS' PROTECTION

Whistleblowers will be given a guarantee of protection from the Company where the reporter's identity (name, address, telephone number, email and work unit/company) will be kept confidential. In addition, the whistleblower is allowed to be anonymous.

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

STP continually conducts socialization regarding WBS policy to all employees and stakeholders through email blasts and announcements on the Company's website.

RESULT OF THE REPORT HANDLING AND FOLLOW UP

During 2023 there were 5 (five) reports received through WBS. All such reports have been processed and followed up in accordance with applicable regulations.

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
A.	Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	
A.1	Hak Pemegang Saham Dasar Basic Shareholder Rights	
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final / tahunan) secara adil dan tepat waktu; Artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen dalam waktu 60 hari. Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	117,255, 171
A.2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.	
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, dibuktikan dengan item agenda, untuk menyetujui Remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dalam bentuk barang dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi untuk direktur / komisaris non-eksekutif? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	-
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan Calon Direksi/Komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	166
A.2.3	Apakah perusahaan mengizinkan pemegang saham untuk memilih direktur / komisaris Secara individual? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	166
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum dimulainya rapat? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	168
A.2.5	Apakah risalah RUPST terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	168
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk menyetujui, tidak setuju, dan abstain suara untuk semua resolusi / setiap item agenda untuk RUPS terbaru? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	170
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	168
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua anggota dewan dan CEO (jika dia bukan anggota dewan) menghadiri RUPS terbaru? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	169

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
A.2.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemungutan suara secara in absentia? Does the company allow voting in absentia?	167
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terbaru? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	167
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pihak independen (scrutineers / inspektur) untuk menghitung dan / atau memvalidasi suara pada RUPS? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/ inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	167
A.2.12	Apakah perusahaan menyediakan untuk umum pada hari kerja berikutnya hasil suara yang diambil selama RUPST / RUPSLB terakhir untuk semua keputusan? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	169
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari untuk semua RUPS dan RUPSLB? Does the company provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	169
A.2.14	Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPST/sirkuler dan/ atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	169
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menempatkan item-item pada agenda rapat umum dan/atau untuk meminta rapat umum tunduk pada persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	171
A.3	Pasar untuk kontrol perusahaan harus dibiarkan berfungsi secara efisien dan transparan. Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.	
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris perseroan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	-
A.4	Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi. The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham untuk terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	-
A.5	Saham dan hak suara Shares and voting rights	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
A.5.1	Di mana perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya melalui situs web perusahaan/ laporan/ bursa efek/ situs web regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	N/A
A.6	Panggilan RUPST Notice of AGM	
A.6.1	Apakah masing-masing resolusi diajukan pada rapat umum tahunan terbaru Hanya berurusan dengan satu item, yaitu, tidak ada bundling beberapa item ke dalam resolusi yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	167
A.6.2	Apakah pemberitahuan perusahaan tentang RUPS/surat edaran terbaru sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version? Apakah pemberitahuan RUPS/surat edaran memiliki rincian sebagai berikut: Does the notice of AGM/circulars have the following details	Website
A.6.3	Adalah profil direksi / komisaris (minimal usia, kualifikasi akademik, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di daftar lainnya perusahaan) dalam mencari pemilihan / pemilihan ulang termasuk? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	RUPST 2023 AGMS 2023
A.6.4	Apakah auditor yang mencari penunjukan/penunjukan kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	168
A.6.5	Apakah dokumen proxy tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?	Website
A.7	Perdagangan orang dalam dan transaksi diri yang kasar harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
A.7.1	Apakah direksi / komisaris wajib melaporkan transaksi mereka di perusahaan saham dalam 3 hari kerja? Are the directors / commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	194-195
A.8	Transaksi pihak terkait oleh direktur dan eksekutif kunci. Related party transactions by directors and key executives.	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite direksi/komisaris independen untuk meninjau RPT material untuk menentukan apakah mereka demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/ commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	216
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direksi/ komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan pada agenda tertentu jika ada konflik? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	185

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
A.8.3	Apakah perusahaan juga memiliki kebijakan pinjaman kepada direksi dan komisaris? Melarang praktik ini atau memastikan bahwa mereka dilakukan dengan basis <i>arms' length</i> dan dengan harga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's lengthbasis and at market rates?	118
A.9	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan Protecting minority shareholders from abusive actions	
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa mereka adil dan berada pada <i>arms' length</i> ? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	118
A.9.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, adalah Keputusan yang dibuat oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Laporan Keuangan Financial Statement
C	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	
C.1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, dan mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang dianggap penting oleh investor yang masuk akal dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision	
	Informasi penting terkait Keberlanjutan harus ditentukan Material Sustainability-related information should be specified	
C.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang material bagi Strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai masalah? Does the company identify climate change as an issue?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka pelaporan yang diakui secara internasional atau standar untuk keberlanjutan (yaitu GRI, <i>Integrated Reporting</i> , SASB, IFRS <i>Sustainability Disclosure Standards</i>)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)? <i>Jikasebuahperusahaansecara terbuka menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka kerja pengungkapan harus menetapkan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara teratur dalam bentuk yang mudah diakses</i> If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	-

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	-
C.1.6	Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa Laporan / Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.2	Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memungkinkan dialog antara perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang hal-hal keberlanjutan Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters	
C.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan berkumpul Umpan balik tentang hal-hal keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang hal-hal keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.3	Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan material saat memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait iklim The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks <i>Dewan harus menilai apakah struktur modal perusahaan kompatibel dengan tujuan strategisnya dan selera risiko yang terkait untuk memastikannya tahan terhadap skenario yang berbeda</i> Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios	
C.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau setiap tahun bahwa Struktur modal dan utang perusahaan kompatibel dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	-
C.4	Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial. The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
	<i>Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:</i> Does the company disclose a policy and practices that address:	
C.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan untuk menangani kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programmes and procedures?	258
C.4.6	Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	259
C.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya pada Lingkungan / Ekonomi dan masalah-masalah sosial? Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.5	Di mana kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.	
C.5.1	Apakah perusahaan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.6	Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang. Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.	
C.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik tentang kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik tentang pelatihan dan program pengembangan untuk karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
C.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan hadiah / kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	Merujuk ke Laporan Keberlanjutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
C.7	Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada Dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan untuk melakukan hal ini. Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.	
C.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistle blowing yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan pelanggaran hukum dan perilaku tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report	262
C.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan / orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal / tidak etis dari pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	263
D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	
D.1	Struktur kepemilikan yang transparan Transparent ownership structure	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, memegang 5% kepemilikan saham atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	78–79
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	78–79
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) direksi (komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	76–77
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	-
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk/induk, entitas anak, asosiasi, usaha patungan dan perusahaan tujuan khusus/kendaraan (SPE)/(SPV)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	78–79, 80
D.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
	Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: Does the company's annual report disclose the following items:	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
D.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	48
D.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	8
D.2.3	Indikator kinerja non-keuangan Non-financial performance indicators	149
D.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	117–118
D.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi, tanggal penunjukan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur lainnya dari perusahaan terbuka) dari direktur/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners	58
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement	
D.2.6	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode tata kelola perusahaan dan jika ada ketidakpatuhan, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	58, 66
D.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci Remuneration of Members of the Board and Key Executives	
D.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk Direksi/Komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	192, 193
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara terbuka [yaitu laporan tahunan atau lainnya yang diungkapkan kepada publik; dokumen] rincian remunerasi masing-masing direktur/komisaris non-eksekutif? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	195–196
D.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan / praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dalam bentuk barang dan gaji lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO-nya? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	195–196
D.3.4	Apakah perusahaan secara terbuka mengungkapkan [yaitu laporan tahunan atau dokumen publik lainnya] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	195–196
D.4	Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT) Disclosure of related party transactions (RPT)	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Laporan Keuangan Financial Statement

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
D.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai untuk masing-masing RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	Laporan Keuangan Financial Statement
D.5	Direksi dan komisaris berurusan dengan saham perusahaan Directors and commissioners dealings in shares of the company	
D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	76–77
D.6	Auditor eksternal dan Laporan Auditor External auditor and Auditor Report	
	<i>Jika firma audit yang sama terlibat untuk layanan audit dan non-audit</i> <i>Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services</i>	
D.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	85
D.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	85
D.7	Media komunikasi Medium of communications	
	<i>Apakah perusahaan menggunakan mode komunikasi berikut?</i> <i>Does the company use the following modes of communication?</i>	
D.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	Website
D.7.2	Situs web perusahaan Company website	88
D.7.3	Pengarahan analis Analyst's briefing	88
D.7.4	Pengarahan media/konferensi pers Media briefings /press conferences	88
D.8	Pengarsipan / rilis laporan tahunan / keuangan tepat waktu Timely filing/release of annual/financial reports	
D.8.1	Apakah laporan keuangan tahunan / laporan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 120 hari dari akhir tahun keuangan? Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	Website
D.8.2	Apakah laporan tahunan dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Website
D.8.3	Apakah representasi yang benar dan adil / adil dari keuangan tahunan Pernyataan/laporan yang ditegaskan oleh Direksi/Komisaris dan/atau pejabat Perseroan yang relevan? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Website
D.9	Situs web perusahaan Company website	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal-hal berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
D.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulan terakhir) Financial statements/reports (latest quarterly)	Website
D.9.2	Materi yang diberikan dalam briefing kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	Website
D.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	Website
D.9.4	Panggilan RUPST dan/atau RUPSLB Notice of AGM and/or EGM	Website
D.9.5	Risalah RUPST dan/atau RUPSLB Minutes of AGM and/or EGM	Website
D.9.6	Konstitusi perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, memorandum dan anggaran dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	Website
D.10	Hubungan investor Investor relations	
D.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari pejabat / kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	41
E	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Board Duties and Responsibilities	
	<i>Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang didefinisikan dengan jelas</i> <i>Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy</i>	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	158
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?	185
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	185, 201
	Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	62–63
E.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	201, 30–31
E.1.6	Apakah direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	201, 30–31
E.2	Struktur Dewan Board structure	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
Kode Etik atau Perilaku Code of Ethics or Conduct		
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	256–257
E.2.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi kode etik? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	256–257
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	256–257
Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition		
E.2.4	Apakah direktur/komisaris independen membentuk setidaknya 50% dari direksi/komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	-
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun1 untuk direktur/komisaris independennya? 1Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years1 each for its independent directors/ commissioners? 1 The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	-
E.2.6	Apakah perusahaan menetapkan batas lima kursi dewan yang dapat dipegang oleh seorang direktur / komisaris independen / non-eksekutif secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	184, 58
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat di lebih dari dua dewan perusahaan terbuka di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	184, 58
Komite Nominasi Nomination Committee		
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	221–227
E.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	-
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	222
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan / struktur tata kelola / piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charterof the Nominating Committee?	224
E.2.12	Apakah dalam rapat kehadiran Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali sepanjang tahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	225–226

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration Committee / Compensation Committee		
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/ commissioners with a majority of independent directors/commissioners ?	-
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	222
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan / struktur tata kelola /piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Remuneration Committee?	224
E.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi bertemu setidaknya dua kali sepanjang tahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	225–226
Komite Audit Audit Committee		
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	211–220
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	-
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direktur/Komisaris Independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	212–215
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	216
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu direktur / komisaris independen komite Memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	214
E.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit bertemu setidaknya empat kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	218
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi atas penunjukan, dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	216–217
E.3 Proses Dewan Board Processes		
Rapat Dewan dan Kehadiran Board meetings and attendance		
E.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	202

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
E.3.2	Apakah direksi/komisaris mengadakan rapat minimal enam kali sepanjang tahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	202, 189,190
E.3.3	Apakah masing-masing direksi/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	202, 189,190
E.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for boarddecisions?	202
E.3.5	Apakah direktur / komisaris non-eksekutif perusahaan bertemu secara terpisah setidaknya sekali sepanjang tahun tanpa kehadiran eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	188
	Akses ke Informasi Access to information	
E.3.6	Apakah surat-surat dewan untuk rapat dewan direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	202
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	229
E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau praktik kesekretariatan perusahaan dan terus mengikuti perkembangan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	229–230
	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Board Appointments and Re-Election	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direksi/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	199–200, 184
E.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/ komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	199–200, 184
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan terbuka di negara-negara yang undang-undangnya menetapkan jangka waktu masing-masing 5 tahun2? 2 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years2 each? 2 The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	183, 199
	Masalah Remunerasi Remuneration Matters	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
E.3.12	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	-
E.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan kinerja berbasis Remunerasi direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti penyediaan claw back dan bonus yang ditangguhkan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	-
	Audit Internal Internal Audit	
E.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah? Does the company have a separate internal audit function?	233–238
E.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	233–238
E.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	234–235
	Pengawasan Risiko Risk Oversight	
E.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka kerja manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka kerja itu? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	236
E.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan CG mengungkapkan bahwa direksi/komisaris telah melakukan penelaahan terhadap kontrol material perusahaan (termasuk kontrol operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	240
E.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materiallyexposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	242–249
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan CG memuat pernyataan dari direksi/komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem pengelolaan risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	249
E.4	Anggota Dewan People on the Board	
	Ketua Dewan Board Chairman	
E.4.1	Apakah orang yang berbeda mengambil peran sebagai ketua dan CEO? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	66–73, 58–63

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
E.4.2	Apakah ketua Dewan merupakan direktur/komisaris independen? Is the chairman an independent director/commissioner?	-
E.4.3	Apakah ada di antara direktur yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	Perseroan saat ini memenuhi ketentuan ACGS ini. Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak ada anggota Direktur yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur The Company currently complies with these ACGS regulations. In the last two years, no member of the Board of Directors has ever served as President Director.
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	185–186
	Direktur Independen Utama Lead Independent Director	
E.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk seorang Pemimpin/Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditentukan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	-
	Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies	
E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama tempat perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	-
E.5	Kinerja Dewan Board Performance	
	Pengembangan Direksi Directors Development	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	190, 203
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong direktur/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesi yang sedang berlangsung atau berkelanjutan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	190, 203
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses tentang bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Pelaksana/Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard
Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
E.5.4	Apakah direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	-
	Penilaian Dewan Board Appraisal	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	-
	Penilaian Direktur Director Appraisal	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	-
	Penilaian Komite Committee Appraisal	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	193
	Bonus Bonus	
(B)A.	Hak Pemegang Saham Rights of shareholders	
(B) A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mengizinkan penggunaan pemungutan suara elektronik yang Aman dan <i>real time</i> secara in absentia pada rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	169–181
(B)B.	Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham Equitable treatment of shareholders	
(B) B.1	Panggilan RUPST Notice of AGM	
(B)B.1.1	Apakah perusahaan merilis pemberitahuan RUPST (dengan agenda rinci dan surat edaran penjelasan), seperti yang diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Website
(B)C.	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(B)C.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana mengelola risiko dan peluang terkait iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/ <i>Sustainability Reporting</i> -nya terjamin secara eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report / Sustainability Reporting is externally assured?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran ESG pemangku kepentingan? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal keberlanjutan? Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasandireksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara direktur eksekutif dan remunerasi manajemen senior dan kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B).C.1.7	Apakah Whistle Blowing System perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen? Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties / institutions?	-
(B)D.	Pengungkapan dan transparansi Disclosure and transparency	
(B)D.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
(B)D.1.1	Apakah laporan/laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun buku? Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	-
(B)E.	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
(B) E.1	Kompetensi dan Keragaman Dewan Board Competencies and Diversity	
(B)E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	-
(B)E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keragaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	-
(B) E.2	Struktur Dewan Board Structure	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(B)E.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/ commissioners?	-
(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direksi yang selaras dengan arah strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	-
(B) E.3	Pengangkatan Dewan dan Seleksi Ulang Board Appointments and Re-Election	
(B)E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibentuk oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi / komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	184,199
(B) E.4	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition	
(B)E.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen mencakup lebih dari 50% dewan direksi/komisaris untuk perusahaan dengan ketua independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	-
(B) E.5	Pengawasan Risiko Risk Oversight	
(B)E.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewannya mengidentifikasi risiko utama sehubungan dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	Merujuk ke Laporan Keberlanutan 2023 Refer to Sustainability Report 2023
(B) E.6	Kinerja Dewan Board Performance	
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	-
	Penalti Penalty	
(P)A.	Hak Pemegang Saham Rights of shareholders	
(P)A.1	Hak Pemegang Saham Dasar Basic shareholder rights	
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai menawarkan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	-
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip, tunduk pada pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	



Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(P)A.2.1	Apakah ada bukti hambatan yang mencegah pemegang saham berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lain? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	Perseroan membuka secara aktif jalur komunikasi dengan para pemegang sahamnya. Tidak ada hambatan yang mencegah pemegang saham berkomunikasi dan/atau berkonsultasi dengan pemegang saham lain The Company actively opens communication channels with its shareholders. There are no barriers preventing shareholders from communicating and/ or consulting with other shareholders
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan item agenda tambahan dan tidak diumumkan ke dalam pemberitahuan RUPST/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	Pada RUPST tahun 2022 dan 2023, tidak terdapat mata acara tambahan dan tidak terdapat mata acara yang tidak diumumkan. At the Annual GMS for the years 2022 and 2023, there were no additional agenda items and no unannounced agenda items.
(P)A.3.2	Apakah Ketua Dewan, Ketua Komite Audit dan CEO menghadiri RUPST terakhir? Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPST Perseroan tahun 2022 dan 2023 yang tertulis dalam Bab V bagian Rapat Umum Pemegang Saham All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners were present at the Company's AGMS for the years 2022 and 2023, as documented in Chapter V, section on the General Meeting of Shareholders.

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(P)A.4	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
	Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan: Did the company fail to disclose the existence of:	
(P)A.4.1	Perjanjian Pemegang Saham? Shareholders agreement?	-
(P)A.4.2	Pembatasan pemungutan Suara? Voting cap?	-
(P)A.4.3	Hak Pilih berganda? Multiple voting rights?	-
(P)A.5	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?	-
(P)B	Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Equitable treatment of shareholders	
(P)B.1	Perdagangan orang dalam dan transaksi diri yang kasar harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited	
(P)B.1.1	Apakah ada keyakinan perdagangan orang dalam yang melibatkan direktur/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	-
(P)B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan Protecting minority shareholders from abusive action	
(P)B.2.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait material dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	-
(P)B.2.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan dengan <i>arm's length</i>) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arms length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	-
(P)C	Peran Pemangku Kepentingan Role of stakeholders	
(P)C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.	
(P)C.1.1	Apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepaillitan/komersial/persaingan atau lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/ consumer/ insolvency/ commercial/competition or environmental issues?	-

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(P)C.2	Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	
(P)C.2.1	Apakah perusahaan menghadapi sanksi oleh regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang diperlukan untuk peristiwa material? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	-
(P)C.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan <i>greenwashing</i> ? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	-
(P)D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and transparency	
(P)D.1	Sanksi dari regulator atas laporan keuangan Sanctions from regulator on financial reports	
(P)D.1.1	Apakah perusahaan menerima "opini wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	-
(P)D.1.2	Apakah perusahaan menerima "pendapat merugikan" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	-
(P)D.1.3	Apakah perusahaan menerima "disclaimer opinion" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	-
(P)D.1.4	Apakah perusahaan pada tahun lalu merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	-
(P)E	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
(P)E.1	Kepatuhan terhadap aturan daftar, regulasi, dan hukum yang berlaku Compliance with listing rules, regulations and applicable laws	
(P)E.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan belum mematuhi aturan pencatatan dan peraturan selain dari aturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	-
(P)E.1.2	Apakah ada contoh di mana direktur/komisaris non-eksekutif telah mengundurkan diri dan mengangkat masalah terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	-
(P)E.2	Struktur Dewan Board structure	
(P)E.2.1	Apakah Perseroan memiliki direktur/komisaris independen yang masing-masing menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? 1 Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (which ever is higher) in the same capacity? 1 The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	-

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN
Corporate Governance Scorecard

Conformity of Corporate Governance Implementation to the ASEAN Corporate
Governance Scorecard

Level	Prinsip dan Rekomendasi Principles and Recommendations	Penyajian Presentation
(P)E.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar deskripsi semua direktur mereka sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	-
(P)E.2.3	Apakah perusahaan memiliki direktur independen/non-eksekutif/komisaris yang menjabat secara keseluruhan di lebih dari lima dewan perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non- executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	-
(P)E.3	Audit Eksternal External Audit	
(P)E.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	-
(P)E.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board structure and composition	
(P)E.4.1	Apakah ketua telah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?	-
(P)E.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen menerima opsi, pembagian kinerja atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	-

Catatann | Note:
SR: Sustainability Report / Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2023

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Umum General		
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris. The annual report should be presented in good and correct Indonesian, and it was recommended to present it also in English.		
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report should be printed in good quality and uses an easy-to-read type and size.		
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report clearly stated the company's identity.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: The company name and year of the annual report should be displayed on:	
	1. Sampul muka; 1. Face cover;	
	2. Samping; 2. Side;	
	3. Sampul belakang; dan 3. Back cover; and	
	4. Setiap halaman. 4. Every page.	
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. The annual report should be available on the company website.		
Kilas Kinerja Performance Highlights		6
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun. The summary of important financial data contained financial information presented in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting its business if the Issuer or Public Company had been running its business activities for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: Information in the annual reports includes the following:	8–10
	1. Pendapatan/penjualan; 1. Revenue/sales;	
	2. Laba bruto; 2. Gross profit;	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	3. Laba (rugi); 3. Profit (loss);	
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 4. Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	
	5. Total laba (rugi) komprehensif; 5. Total comprehensive profit (loss);	
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali; 6. Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	
	7. Laba (rugi) per saham; 7. Earnings (loss) per share;	
	8. Jumlah aset; 8. Total assets;	
	9. Jumlah liabilitas; 9. Total liabilities;	
	10. Jumlah ekuitas; 10. Total equity;	
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 11. Ratio of profit (loss) to total assets;	
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 12. Ratio of profit (loss) to equity;	
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 13. Ratio of profit (loss) to income/sales;	
	14. Rasio lancar; 14. Current ratio;	
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; 15. Ratio of liabilities to equity;	
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; 16. Ratio of liabilities to total assets;	
	17. Rasio KPMM; 17. CAR ratio;	
	18. Rasio Return on Asset (ROA); 18. Ratio of Return on Assets (ROA);	
	19. Rasio Return on Equity (ROE); 19. Ratio of Return on Equity (ROE);	
	20. Aset produktif 20. Productive Assets;	
	21. Rasio Non-performing Loans (NPL); 21. Ratio of Non-performing Loans (NPL);	
	22. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); 22. Ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO);	
	23. Cost to Income Ratio (CIR); 23. Cost to Income Ratio (CIR);	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	24. <i>Rasio Net Interest Margin</i> (NIM); 24. Net Interest Margin Ratio (NIM);	
	25. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 25. Percentage of violations and exceeding the Maximum Lending Limit (BMPK);	
	26. <i>Rasio Giro Wajib Minimum</i> (GWM); 26. Statutory Reserves Ratio (GWM);	
	27. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan 27. Ratio of Net Open Position (GDP); and	
	28. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya. 28. Information and other financial ratios relevant to the issuer or public company and the type of industry.	
Informasi Saham Stock Price Information	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company should at least contain:	11–13
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: 1. Shares issued for each quarterly period were presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing:	
	a. Jumlah saham yang beredar; a. Number of outstanding shares;	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; b. Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares were listed;	
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan c. The highest, lowest and closing share prices were based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	
	d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. d. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: 2. In the event of a corporate action causing changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) should be added with at least an explanation regarding:	
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; a. The date of implementation of the corporate action;	
	b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham b. The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends,	
	bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
	c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; c. Number of outstanding shares before and after the corporate action;	
	d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan d. Number of conversion effects executed (if any); and	
	e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; e. Share prices before and after corporate actions;	
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan 3. In the event of a temporary suspension of share trading (<i>suspension</i>) and/or delisting of shares in the financial year, the should be explained; and	
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut. 4. In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process was still ongoing until the end of the Annual Report period, it explained the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (<i>delisting</i>).	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Information on bonds, sukuk or convertible bonds that were still outstanding in the last 2 (two) financial years. Reports of the Board of Directors and the Board of Commissioners	Informasi memuat: Information contained:	13
	1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 1. Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;	
	2. Tingkat bunga/imbalan; 2. Interest rate/yield;	
	3. Tanggal jatuh tempo; dan 3. Due date; and	
	4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021. 4. Bond/sukuk ratings for 2020 and 2021.	
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan. Note: if the company did not have bonds/sukuk/convertible bonds, it had to be disclosed.	
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Reports of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The report of the Board of Commissioners should at least contain a brief description about:	21–25
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; 1. Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan 2. Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.	
Laporan Direksi Board of Directors' Report	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report should at least contain a brief description of:	27–35

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 1. Performance of Issuers or Public Companies, at least containing:	
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; a. Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies;	
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; c. The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan d. Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company; and	
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; e. Constraints faced by Issuers or Public Companies;	
	f. Struktur organisasi; f. Organizational structure;	
	g. Aktivitas utama; g. Main activity;	
	h. Teknologi informasi; h. Information Technology;	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; i. Types of products and services offered, including lending to micro, small and medium business debtors;	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana; j. Interest rates for raising and providing funds	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar; k. Economic development and target market;	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri; l. Network and business partners at home and/or abroad;	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor; m. Number, type and location of offices;	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank; n. Ownership of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders in the Bank's business group;	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan; o. Important changes that occurred in the Bank and the Bank's business group in the relevant year;	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan p. Important things that are expected to happen in the future; and	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. q. Human resources include the number, level of education, training, and human resource development.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan 2. Description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	
	4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. 4. Changes in the composition of the members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.	
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	Memuat hal-hal sebagai berikut: It described:	36–37
	1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 1. The signature is poured on a separate sheet;	
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 2. A statement that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the correctness of the contents of the annual report;	
	3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 3. Signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors stating their names and positions; and	
	4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. 4. A written explanation in a separate letter from the person concerned in the event that there is a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors who does not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from another member in the event that there is no written explanation from the person concerned.	
Profil Perusahaan Company Profile		
Nama dan alamat lengkap perusahaan Company name and full address	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that allowed the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	40–41
	1. Alamat; 1. Address;	
	2. Nomor telepon; 2. Telephone number;	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	3. Alamat surat elektronik; dan 3. Electronic mail address; and	
	4. Alamat situs web; 4. Website address;	
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; Brief history of the Issuer or Public Company	Mencakup antara lain: tanggal/ tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. It included: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.	46–47
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Note: if the company had never changed its name, it should be disclosed.	
Bidang usaha Business fields	Uraian mengenai antara lain: It described:	51
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 1. The company's business activities according to the latest articles of association;	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 2. Business activities carried out; and	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. 3. Products and/or services produced.	
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture	Mencakup: It included:	48
	1. Visi perusahaan; 1. Company vision;	48
	2. Misi perusahaan; 2. Company mission;	
	3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 3. Information that the vision and mission had been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners for the financial year; and	
	4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan. 4. A statement regarding the corporate culture of the Company.	
Wilayah Operasional Operational Area	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. Operational area of Issuer or Public Company; operational area was the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	52–53
Struktur Organisasi Organizational structure	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.	54–55



Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Keanggotaan Asosiasi Association Member	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.	56
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Commissioners, at least contained:	56–63
	1. Nama dan jabatan; 1. Name and position;	
	2. Foto terbaru; 2. Recent photos;	
	3. Usia; 3. Age;	
	4. Kewarganegaraan; 4. Citizenship;	
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; 5. Educational history and/or certification;	
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 6. Position history, including information on:	
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; a. Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; b. The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who was an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; c. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners did not have concurrent positions, then this should be disclosed;	
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; 7. Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including names of affiliated parties;	
	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; In the event that a member of the Board of Commissioners had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter;	
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan 8. Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner had served more than 2 (two) terms; and	
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat 9. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter should be disclosed;	
Profil Direksi Board of Directors Profile	Profil Direksi, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Directors, at least contained:	66–73
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; 1. Name and position in accordance with the duties and responsibilities;	
	2. Foto terbaru; 2. Recent photos;	
	3. Usia; 3. Age;	
	4. Kewarganegaraan; 4. Citizenship;	
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; 5. Educational history and/or certification;	
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 6. Position history, including information on:	
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; a. The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan b. Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this was disclosed; and	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan 7. Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; and	
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; 8. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter should be disclosed;	
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan. Number of employees and data on employee competency development.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year;	74–75
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information could be presented in tabular form.	
Komposisi pemegang saham Composition of shareholders	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year consisted of information regarding:	76–77
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; 1. Shareholders owning 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners owning shares of Issuers or Public Companies.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not own shares, then this matter should be disclosed;	
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter should be disclosed.	
	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Community shareholder group, namely the group of shareholders who each owned less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	
	4. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: 4. Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification:	
	a. Kepemilikan institusi lokal; a. Ownership of local institutions;	
	b. Kepemilikan institusi asing; b. Ownership of foreign institutions;	
	c. Kepemilikan individu lokal; dan c. Local individual ownership; and	
	d. Kepemilikan individu asing; d. Foreign individual ownership;	
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information could be presented in tabular form.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021
SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021
SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Pemegang saham utama dan pengendali Major and controlling shareholders	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the main and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners presented in the form of a scheme or chart;	
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of subsidiaries and/or associated entities	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. The name of the subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company had joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary was added.	80–82
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Perseroan Information related to the Company Business Group		
Struktur grup perusahaan Company group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV). Company group structure in the form of a chart depicting parent entities, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).	78–79
Kronologi pencatatan saham Share listing chronology	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company were listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	83–84
Kronologis penerbitan efek (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronology of securities issuance (including private placement) and/or share listing from the initial issuance to the end of the financial year.	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Other securities listing information that had not matured in the financial year at least included the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);	85

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) Information on the use of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/ allies included: 1. Nama dan alamat; 1. Name and address; 2. Periode penugasan; 2. Assignment period; 3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; 3. Information on audit and/or non-audit services provided; 4. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan 4. Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and 5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. 5. In the event that AP and KAP and their networks/ associations/ allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed.	85
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies could be presented in tabular form.	
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Name and address of supporting institutions and/or professions	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	86
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Awards received in the last financial year and/or certifications that are still valid in the last financial year both on a national and international scale	Informasi memuat antara lain: It contained nformation in the following: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 1. Name of award and/or certification; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Year of award and/or certification; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 3. The awarding and/or certification body; and 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). 4. Validity period (for certification).	87

Daftar Indeks SEOJK16/2021
SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021
SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Name and address of the subsidiary and/or branch office or representative office (if any)	Memuat informasi antara lain: It contained information including: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 1. Name and address of the subsidiary; and 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. 2. Name and address of branch/representative office. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. Note: if the company did not have a subsidiary, branch office, and representative office, it should be disclosed.	88
Informasi pada Website Perusahaan Information on Company Website	Meliputi paling kurang: It included at least: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 1. Shareholder information up to the individual ultimate owner; 2. Isi Kode Etik; 2. Fill in the Code of Ethics; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPSdiumumkan; 3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the invitation to the GMS, the date of the GMS, the date of the summary of the minutes of the GMS being announced; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 4. Separate annual financial statements (last 5 years); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 5. Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors; and 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komitekomite, dan Unit Audit Internal. 6. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	88
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Discussion and Analysis on Company Performance		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review by business segment	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 1. Explanation of each business segment. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: 2. 2. Performance per business segment, including: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; a. Production, which includes the process, capacity, and development; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; b. Increase/decrease in production capacity; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan c. Sales/operating income; and d. Profitabilitas d. Profitability	102
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description of the company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: Financial performance analysis which included a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year and the causes of an increase/decrease in an account (in the form of narratives and tables), including regarding: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities; 3. Ekuitas; 3. Equity; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; 4. Sales/operating income, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period; 5. Arus kas; 5. Cash flow; 6. Suku bunga dasar kredit; 6. Basic loan interest rate; 7. Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan. 7. Analysis of the quality of earning assets and relevant financial ratios.	105 106 108 109–111

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Discussion and analysis of abilities To pay debts and the collectibility level of the company's receivables, by presenting the relevant ratio calculations according to the type of company industry	Penjelasan tentang: Explanation of:	113–114
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan 1. Ability to pay debts, both short term and long term and	113
	2. Tingkat kolektibilitas piutang. 2. The level of collectibility of receivables.	114
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Discussion on capital structure and management of capital structure policy	Penjelasan atas: The explanation consisted of:	115
	1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 1. Details of the capital structure consisting of interest- based debt/ sukuk and equity; and	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 2. Management policies on capital structure (capital structure policies); and	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen 3. Basis for selecting management policy	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last financial year	Penjelasan tentang: It explained:	116
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 1. The name of the party making the bond;	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. The purpose of the bond;	
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut; 3. The expected source of funds to fulfill these commitments;	
	4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Currency to be denominated; and	
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. 5. Measures planned by the company to protect the risk from the related foreign currency position.	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Note: if the company did not have a commitment related to investment in capital goods in the last financial year, it should be disclosed.	
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year	Penjelasan tentang: It explained:	116
	1. Jenis investasi barang modal; 1. Types of investment in capital goods;	
	2. Tujuan investasi barang modal; dan 2. The purpose of investment in capital goods; and	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. 3. The investment value of capital goods issued in the last financial year.	
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Note: if there was no realization of capital goods investment, it should be disclosed.	
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang. Comparison information between the target at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between targets/projections at the beginning of the year book with the results achieved (realization), regarding:	119
	1. Pendapatan/penjualan; 1. Revenue/sales;	
	2. Laba (rugi); 2. Profit (loss);	
	3. Struktur modal (capital structure); 3. Capital structure;	
	4. Pemasaran; 4. Marketing;	
	5. Pengembangan SDM; 5. HR Development;	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 6. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, about:	
	1. Pendapatan/penjualan; 1. Revenue/sales;	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	2. Laba (rugi); 2. Profit (loss);	
	3. Struktur modal (capital structure); 3. Capital structure (capital structure);	
	4. Kebijakan dividen; 4. Dividend Policy;	
	5. Pemasaran; 5. Marketing;	
	6. Pengembangan SDM; 6. HR Development;	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 7. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Material information and facts occurring after the date of the accountant's report	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Description of significant events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks.	117
	Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan. Note: if there was no significant event after the date of the accountant's report, it should be disclosed.	
Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description of the company's business prospects	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.	101
Uraian tentang aspek pemasaran Description of the marketing aspect	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar. The marketing aspect of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	100
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividends for the last 2 (two) financial years	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: Description of dividends for 2 (two) financial years last, at least:	117
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; 1. Dividend policy contained information of the percentage of total dividends distributed to net income;	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; 2. Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); 3. Total dividends per share (cash and/or non-cash);	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar. 4. The amount of dividends per year paid.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Note: if there was no dividend distribution, the reasons should be disclosed.	
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Realization of the use of proceeds from the public offering (in the event that the company was still required to submit a report on the realization of the use of funds)	Memuat uraian mengenai: It contained a description of:	118
	1. Total perolehan dana; 1. Total proceeds;	
	2. Rencana penggunaan dana; 2. Plan for the use of funds;	
	3. Rincian penggunaan dana; 3. Details of the use of funds;	
	4. Saldo dana; dan 4. Fund balance; and	
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). 5. The date of approval of the GMS/RUPO for changes in the use of funds (if any).	
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Note: if the company did not have information on the realization of the use of proceeds from the public offering, it should be disclosed.	
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Information on material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties	Memuat uraian mengenai: It contained a description of:	118
	1. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; 1. Transaction date, value, and object;	
	2. Nama pihak yang melakukan transaksi; 2. Name of the party conducting the transaction;	
	3. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); 3. The nature of the affiliation relationship (if any);	
	4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 4. Explanation of the fairness of the transaction;	
	5. Pemenuhan ketentuan terkait; 5. Fulfillment of related provisions;	



Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	6. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: 6. In the event that there was an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in number 1) to number 5), the Issuer or Public Company also disclosed information:	
	a. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan a. Statement of the Board of Directors that affiliated transactions had gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and	
	b. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); b. The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, is carried out by complying with the arms-length principle;	
	7. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. 7. For affiliated transactions or material transactions which became business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation was added that the affiliated transactions or material transactions were business activities carried out in order to generate operating income and run regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements was added.	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	8. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; 8. For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	
	9. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. 9. In the event that there was no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, this matter should be disclosed.	
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir A description of changes in the laws and regulations of the company in the last financial year	Uraian memuat antara lain: The description included:	119
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 1. The name of the legislation undergoing changes; and	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. 2. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or a statement that the impact is not significant.	
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Note: if there were no changes to the laws and regulations in the last financial year, the matters should be disclosed.	
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir A description of the changes in accounting policies adopted by the company in the last financial year	Uraian memuat antara lain: The description included:	120
	1. Perubahan kebijakan akuntansi; 1. Changes in accounting policies;	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 2. Reasons for changes in accounting policies; and	
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. 3. Quantitative impact on financial statements.	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Note: If there was no change in accounting policy in the last financial year, it should be disclosed.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi kelangsungan usaha Business continuity information	Pengungkapan informasi mengenai: Disclosure of information regarding: - Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 1. Potential Matters having a significant effect on the company's business continuity in the last financial year; - Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 2. Management's assessment of the items in number 1; and - Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. 3. Assumptions used by management in conducting the assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Note: if there were no matters that had the potential to significantly affect the continuity of the company's business in the last financial year, the company should disclose the assumptions that underlied management believe that there are no matters that had the potential to significantly affect the company's business continuity in the last financial year.	
Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance		
RUPS GMS	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year included: - keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan a. resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and - keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b. resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them; dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed.	165–181
Direksi Directors	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 1. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors	198–208

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing- masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	
	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; 2. A statement that the Board of Directors had guidelines or charter for the Board of Directors;	
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; 3. Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	
	Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form.	
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi; 4. Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors:	
	- Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan a. Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and - Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); b. Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);	
	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 5. The Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:	
	- prosedur penilaian kinerja; dan a. performance appraisal procedures; and - kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan b. the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company did not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this should be disclosed.	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 1. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	182–197
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; 2. A statement that the Board of Commissioners had guidelines or charter for the Board of Commissioners;	
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. 3. Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS.	
	Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	
	4. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris; 4. training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	
	a. kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan a. policies on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	
	b. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); b. training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);	
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 5. Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	
	a. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; a. performance appraisal implementation procedures;	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan b. the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	
	c. pihak yang melakukan penilaian; dan c. the party conducting the assessment; and	
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: 6. The assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:	
	a. prosedur penilaian kinerja; dan a. performance appraisal procedures; and	
	b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; b. the criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Independent Commissioner (minimum 30% of the total Board of Commissioners)	Meliputi antara lain: It included:	
	1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 1. Criteria for determining the Independent Commissioner; and	182
	2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. 2. Statement on the independence of each Independent Commissioner.	187–188
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	Paling sedikit memuat: At least it contained:	194–206
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan 1. The nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: 2. Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:	
	a. prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; a. procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	b. struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan b. the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/ bonus and others; and	
	c. besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; c. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks		210–219
Komite audit Audit committee	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 1. Name and position in committee membership;	
	2. Usia; 2. Age;	
	3. Kewarganegaraan; 3. Nationality;	
	4. Riwayat pendidikan; 4. Educational history;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 5. Position history, including information on:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; a. Legal basis for appointment as committee member;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan b. Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; c. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; 6. Period and term of office of audit committee members;	
	7. Pernyataan independensi komite audit; 7. Statement of independence of the audit committee;	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); 8. Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	9. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan 9. Policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at the meeting; and	
	10. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; 10. Implementation of the audit committee's activities for the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Committee or function of nomination and remuneration Issuers or Public Companies	Paling sedikit memuat: At least it contained:	220–222
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 1. Name and position in committee membership;	
	2. Usia; 2. Age;	
	3. Kewarganegaraan; 3. Nationality;	
	4. Riwayat pendidikan; 4. Educational history;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 5. Position history, including information on:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; a. Legal basis for appointment as committee member;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan b. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c. Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite; 6. The period and term of office of the committee members;	
	7. Pernyataan independensi komite; 7. Committee independence statement;	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); 8. Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab; 9. Description of duties and responsibilities;	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); 10. A statement of having a guideline or charter (charter);	

Daftar Indeks SEOJK16/2021
SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021
SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; 11. Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan 12. Brief description of the implementation of activities in the financial year; and	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
	1. Alasan tidak dibentuknya komite; dan 1. Reasons for not forming the committee; and	
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; 2. The party carrying out the nomination and remuneration function;	
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that supported the functions and duties of the Board of Commissioners	Paling sedikit memuat: At least it contained:	n.a
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 1. Name and position in committee membership;	
	2. Usia; 2. Age;	
	3. Kewarganegaraan; 3. Nationality;	
	4. Riwayat pendidikan; 4. Educational history;	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 5. Position history, including information on:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; a. Legal basis for appointment as committee member;	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan b. Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite; 6. The period and term of office of the committee members;	
	7. Pernyataan independensi komite; 7. Committee independence statement;	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan 8. Training and/or competency improvement followed in the financial year (if any); and	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab; 9. Description of duties and responsibilities;	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; 10. A statement that the committee has had guidelines or charters;	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan 11. Policy and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; 12. Brief description of the committee's activities for the financial year;	
Sekretaris perusahaan Company secretary	1. Nama; 1. Name;	227
	2. Domisili; 2. Domicile;	
	3. Riwayat jabatan, meliputi: 3. Position history, including:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan a. Legal basis for appointment as company secretary; and	
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; b. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	
	c. Riwayat pendidikan; c. Educational history;	
	d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan d. Training and/or competency improvement that was followed in the financial year; and	
	e. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; e. A brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the financial year;	



Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	1. Nama kepala unit audit internal; 1. Name of the head of the internal audit unit;	232–237
	2. Riwayat jabatan, meliputi: 2. Position history, including:	
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan a. Legal basis for appointment as head of internal audit unit; and	
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; b. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); 3. Qualification or certification as an internal audit profession (if any);	
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; 4. Training and/or competency improvement that was followed in the financial year;	
	5. Struktur dan kedudukan unit audit internal; 5. The structure and position of the internal audit unit;	
	6. Uraian tugas dan tanggung jawab; 6. Description of duties and responsibilities;	
Akuntan Publik Public Accountant	7. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan 7. A statement that the internal audit unit had a guideline or charter; and	238
	8. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit; 8. A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/ or audit committee;	
	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 1. Name and year of the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years;	
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Name and year of the Public Accounting Firm that audited the annual financial statements for the last 5 years;	
	3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 3. The amount of the fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year; and	
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. 4. Other services provided by Public Accounting Firms and public accountants other than auditing services for annual financial statements in the last financial year.	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. Note: if there was no other service, it should be disclosed.	
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik, A description of the internal control system implemented by the issuer or public company,	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; 1. Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	238–240
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; an 2. Review of the effectiveness of the internal control system; and	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; 3. Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik The risk management system implemented by the Issuer or Public Company	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; 1. General description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	241
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; 2. Types of risks and how to manage them;	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan 3. Overview of the effectiveness of the risk management system Issuer or Public Company; and	248
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; 4. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	248
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada), Legal cases that have a material impact faced by the issuer or public company, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any),	1. Pokok perkara/gugatan; 1. Principal case/lawsuit;	249
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan 2. Status of settlement of cases/claims; and	
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik; 3. The effect on the condition of the issuer or public company;	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada) Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)		249
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Access to company information and data: A description of the availability of access to company information and data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, bulletins, meetings with analysts, and so on.		250–252
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik Information regarding the code of conduct of the Issuer or Public Company	1. Pokok-pokok kode etik; 1. The points of the code of ethics; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 2. Disclosure that the code of ethics applied to all levels of the organization; 3. Penyebarluasan kode etik; 3. Dissemination of the code of ethics; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 4. Sanctions for each type of violation stipulated in the code of ethics (normative); and 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. 5. The number of violations of the code of ethics along with the sanctions given in the last financial year. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Note: if there is no violation of the code of ethics in the last financial year, it must be disclosed	255–256

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/msop) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee Stock ownership program/esop); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (management stock Ownership program/MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock Ownership program/ ESOP) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or stock ownership program by employees (employee Stock ownership program/ESOP); In the case of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP),	Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat: Information disclosed should at least contain:	260
	1. Jumlah saham dan/atau opsi; 1. Number of shares and/or options;	
	2. Jangka waktu pelaksanaan; 2. Implementation period;	
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 3. Requirements for eligible employees and/or management; and	
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. 4. Execution price or determination of exercise price.	
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi Brief description of Information disclosure policy	1. Kepemilikan saham anggota direksi dan anggota Dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka; dan 1. Share ownership of members of the board of directors and members of the board of commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company; and 2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; 2. Implementation of the policy;	259

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran; 1. How to submit a violation report; 2. Perlindungan bagi pelapor; 2. Protection for whistleblowers; 3. Penanganan pengaduan; 3. Handling of complaints; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 4. The party managing the complaint; and 5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: 5. The results of the handling of complaints, at least: a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku; dan a. Number of complaints received and processed in the financial year; and b. Tindak lanjut pengaduan; b. Follow-up on complaints;	261
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the issuer or public company did not have a whistleblowing system, then this should be disclosed.	
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik Description of the Issuer's or Public Company's anti-corruption policy	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), Fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan 1. Programs and procedures implemented in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/ or gratuities in Issuers or Public Companies; and 2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies;	257
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company did not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy should be explained.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.		208
	Policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Description of the Company's written policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender. Note: if there was no such policy, the reasons and considerations should be disclosed.	
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik Implementation of Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/ atau 1. Statement of recommendations that had been implemented; and/or 2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). 2. Explanation of recommendations that had not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	159-162
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2023 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi GCG Implementation Assessment for the financial year 2023 which included at least aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Memuat uraian mengenai: It contained a description of:	159-163
	1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian 1. Criteria used in the assessment	
	2. Pihak yang melakukan penilaian 2. The party conducting the assessment	
	3. Skor penilaian masing-masing kriteria 3. The assessment score of each criterion	
	4. Rekomendasi hasil penilaian 4. Recommended assessment results	
	5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. 5. Reasons for not yet/not implemented recommendations.	

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Informasi Keuangan Financial Information		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Statement Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations regarding Responsibility for Financial Statements.	329–330
Opini auditor independen atas laporan keuangan Independent auditor's opinion on financial statements		331
Deskripsi Auditor Independen di Opini Description of Independent Auditor in Opinion	Deskripsi memuat tentang: The description contained about:	331
	1. Nama dan tanda tangan; 1. Name and signature;	
	2. Tanggal Laporan Audit; dan 2. Date of the Audit Report; and	
	3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. 3. KAP license number and Public Accountant license number.	
Laporan keuangan yang lengkap Complete financial reports	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: It completely contained the elements of the financial statements:	LK 1–117
	1. Laporan posisi keuangan; 1. Statement of financial position;	
	2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 2. Statement of profit or loss and other comprehensive income;	
	3. Laporan perubahan ekuitas; 3. Statement of changes in equity;	
	4. Laporan arus kas; 4. Cash flow statement;	
	5. Catatan atas laporan keuangan; 5. Notes to financial statements;	
	6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 6. Comparative information about the previous period; and	
	7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membubuntyai kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). 7. Statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).	
Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability level comparison	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya Comparison of performance/profit (loss) for the current year with the previous year	LK1–2

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Laporan Arus Kas Cash flow statement	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: It should meet the following conditions:	LK 5–6
	1. 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 1. 1. Grouping into three categories of activities: operating, investing, and financing;	
	2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 2. Using the direct method to report cash flows from operating activities;	
	3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 3. Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and	
	4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 4. Disclosure of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.	
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting Policy Overview	Meliputi sekurang-kurangnya: It included at least:	LK 16
	1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 1. Statement of compliance with SAK;	
	2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 2. Basis of measurement and preparation of financial statements;	
	3. Pajak penghasilan; 3. Income tax;	
	4. Imbalan kerja; dan 4. Work benefits; and	
	5. Instrumen Keuangan. 5. Financial Instruments.	
Pengungkapan transaksi pihak berelasi Disclosure of related party transactions	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: The things that were disclosed included:	LK 23
	1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 1. Name of the related party, as well as the nature and relationship with the related party;	
	2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 2. Transaction value and its percentage to the total related revenues and expenses; and	
	3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. 3. Total balance and its percentage to the total related assets or liabilities.	
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Disclosures related to taxation	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	LK 43, 79–92

Daftar Indeks SEOJK16/2021
SEOJK Index List 16/2021

Daftar Indeks SEOJK16/2021
SEOJK Index List 16/2021

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 1. Fiscal reconciliation and calculation of current tax burden;	
	2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 2. Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit;	
	3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 3. A statement that the reconciled Taxable Profit (LKP) was used as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return;	
	4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 4. Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized in profit or loss if the amount was not reflected in the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of position. finance; and	
	5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. 5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.	
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Disclosures relating to fixed assets	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	LK 34
	1. Metode penyusutan yang digunakan; 1. The depreciation method used;	
	2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi an model biaya; 2. A description of the accounting policy chosen between the revaluation model and the cost model;	
	3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 3. The significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for the revaluation model) or the disclosure of the fair value of property, plant and equipment (for the cost model); and	
	4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangandan reklasifikasi. 4. Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of property, plant and equipment at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosures relating to operating segments	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	LK 106–108
	1. Informasi umum yang mencakup faktor–faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 1. General information covering the factors used to identify the reported segments;	
	2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 2. Information on the reported segment’s profit or loss, assets and liabilities;	
	3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 3. Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other material segment elements to the related amounts within the entity; and	
	4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. 4. Disclosure at the entity level, which included information about products and/or services, geographic areas and key customers.	
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosures relating to Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan: The things that were disclosed included:	LK 23, 24–32, 108
	1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 1. Details of financial instruments owned based on their classification;	
	2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Fair values and their hierarchy for each group of financial instruments;	
	3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 3. Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;	
	4. Kebijakan manajemen risiko; dan 3. Risk management policy; and	
	5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. 3. Analysis of the risks associated with financial instruments quantitatively.	
Penerbitan laporan keuangan Issuance of financial statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: The things that were disclosed included :	LK 116–117
	1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 1. The date on which the financial statements were authorized for issue; and	
	2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. 2. The party responsible for authorizing the financial statements.	

06.

Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Solusi Tunas Pratama Tbk
dan Anak Perusahaan

Consolidated Financial Statements
PT Solusi Tunas Pratama Tbk
and Its Subsidiaries

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan Keuangan Konsolidasian
Dengan Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2023 and
For The Year
Then Ended
(Indonesian Rupiah Currency)



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(MATA UANG RUPIAH INDONESIA)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(INDONESIAN RUPIAH CURRENCY)**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		Board of Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	Consolidated Statement of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statement of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5 - 6	Consolidated Statement of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 117	Notes to the Consolidated Financial Statements

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Juliawati Gunawan Halim
Alamat Kantor : Menara BCA Lantai 49,
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Alamat Domisili : Perum Citra 3 Blok E-5/3A
Pegadungan, Kalideres
Jakarta Barat
Nomor Telepon : (021) 23585555
Jabatan : Direktur Utama

- Nama : Hartono Tanuwidjaja
Alamat Kantor : Menara BCA Lantai 49,
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Alamat Domisili : Jl. Sugi Waras
Duri Utara, Tambora
Jakarta Barat
Nomor Telepon : (021) 23585555
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

We, the undersigned:

- Name : Juliawati Gunawan Halim
Office address : Menara BCA Lantai 49,
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Residential address : Perum Citra 3 Blok E-5/3A
Pegadungan, Kalideres
Jakarta Barat
Telephone : (021) 23585555
Title : President Director

- Name : Hartono Tanuwidjaja
Office address : Menara BCA Lantai 49,
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Residential address : Jl. Sugi Waras
Duri Utara, Tambora
Jakarta Barat
Telephone : (021) 23585555
Title : Director

Declare that:

- We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries;
- The consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;
 - The consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;

**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

**TJAHJADI & TAMARA**

Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Centennial Tower 15/F, Suite 15B
Jl. Gatot Subroto Kav. 25, Jakarta 12930, Indonesia
Phone : (62 -21) 2295 8350
Fax : (62 -21) 2295 8351

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya.

4. We are responsible for the internal control system of the PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 28 Maret 2024/ March 28, 2024


Juliawati Gunawan Halim
Direktur Utama / President Director


Hartono Tanuwidjaja
Direktur / Director



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00126/2.0853/AU.1/06/0264-2/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00126/2.0853/AU.1/06/0264-2/1/III/2024

The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors
PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("the Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Evaluasi penurunan nilai piutang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mencatat saldo piutang usaha sebesar Rp 754,55 miliar yang merupakan 7,6% dari total aset konsolidasian Grup. Seperti dibahas pada Catatan 2h, 2j, 3 dan 6 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian ("KKE") piutang usaha, dengan menetapkan matriks penyisihan yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historisnya, analisa umur piutang usaha, dan disesuaikan dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*) yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi terkait.

Evaluasi penurunan nilai piutang usaha ini merupakan hal signifikan dalam audit kami karena melibatkan penerapan pertimbangan manajemen yang signifikan dan nilainya yang material seperti disebutkan di atas.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami memperoleh pemahaman atas proses penilaian penurunan nilai piutang usaha Grup, termasuk pengendalian-pengendalian dalam proses review asumsi-asumsi signifikan yang dijabarkan di atas.
- Kami menguji evaluasi penurunan nilai piutang usaha Grup dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang terutama meliputi penelaahan atas dasar yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan KKE yang mencakup metode, asumsi, dan data yang digunakan, pengujian variabel makroekonomi termasuk informasi masa depan yang digunakan oleh manajemen dengan melakukan verifikasi ke sumber data terkait dan memastikan hubungannya dengan kerugian historis piutang usaha.
- Kami melakukan pengujian keakuratan laporan umur piutang usaha dengan melakukan penelusuran ke dokumen pendukung dan catatan keuangan yang relevan serta menguji akurasi matematis atas laporan umur piutang usaha tersebut.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan atas evaluasi penurunan nilai piutang usaha pada laporan keuangan konsolidasian.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Impairment assessment of trade receivables

As of December 31, 2023, the Group recognized trade receivables of Rp 754.55 billion, which represents 7.6% of the Group's consolidated total assets. As discussed in Notes 2h, 2j, 3 and 6 to the accompanying consolidated financial statements, the Group applies the simplified approach in calculating expected credit losses ("ECL") on trade receivables, whereby the Group established a provision matrix based on its historical credit losses experience, aging analysis of trade receivables, and adjusted for forward-looking information specific to the debtors and the economic environment.

The impairment assessment of trade receivables is significant to our audit as it involves the exercise of significant management judgment and significant amount as described above.

How our audit addressed the key audit matter

- We obtained an understanding of the Group's trade receivables impairment assessment process which includes control over management's review of the significant assumptions described above.*
- We tested the Group's impairment assessment of trade receivables by performing audit procedures that primarily comprised of reviewing management's basis in determining ECL, which included method, assumptions and data used, testing the macroeconomic variables and forward-looking information used by management through verification to the source of data and corroboration of their relationship with historical losses of trade receivables.*
- We tested the accuracy of the trade receivable aging schedule report by tracing to the relevant supporting document financial records and testing the mathematical accuracy of the trade receivables aging schedule report.*
- We also assessed the adequacy of the impairment assessment of trade receivables disclosures in the consolidated financial statements.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas jika tersedia dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

TJAHJADI & TAMARA



Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264
Public Accountant Registration No. AP. 0264

28 Maret 2024/March 28, 2024



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2e,2g,2h, 4,38			Cash on hand and in banks
Pihak ketiga		4.299	1.891	Third parties
Pihak berelasi	2f,34	954	470	Related party
Bank yang dibatasi penggunaannya	2g,2h,5,38	8	-	Restricted cash in bank
Piutang usaha - neto	2h,2j,6,38	754.552	512.434	Trade receivables - net
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	2h,7,38	34.218	18.879	Accrued income - net
Piutang lain-lain	2h,2j,38			Other receivables
Pihak ketiga		2.612	752	Third parties
Pihak berelasi	1c,2f,34	2	2	Related party
Persediaan - neto	2k,8	5.732	8.371	Inventories - net
Beban dibayar di muka - jangka pendek	2l,2w,9	3.032	11.924	Prepaid expenses - current
Pajak dibayar di muka	2s,18a	131.822	152.940	Prepaid taxes
Uang muka	10	8.969	20.301	Advances
JUMLAH ASET LANCAR		946.200	727.964	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Beban dibayar di muka - jangka panjang	2l,2w,9	-	23.905	Prepaid expenses - non-current
Aset tetap - neto	2m,2p,11	7.814.095	7.743.300	Fixed assets - net
Aset hak-guna - neto	2n,2p,12a	1.098.887	1.078.908	Right-of-use assets - net
Goodwill	2c,2d,2p,13	17.257	17.257	Goodwill
Aset takberwujud - neto	2o,2p,14	8.382	9.430	Intangible asset - net
Aset tidak lancar lainnya	2h,2p,15,38	761	751	Other non-current assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		8.939.382	8.873.551	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		9.885.582	9.601.515	TOTAL ASSETS

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2023 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)				PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2023 (Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)				PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)				PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For The Year Ended December 31, 2023 (Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)			
	Catatan/ Notes	2023	2022						Catatan/ Notes	2023	2022				
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY				REVENUES							
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES				COST OF REVENUES							
Utang bank	2h, 16, 38			Bank loans				Depreciation and amortization				Other cost of revenues			
Pihak ketiga		2.092.580	545.558	Third parties											
Pihak berelasi	2f, 34	110.000	270.000	Related party											
Utang usaha	2h, 17, 38			Trade payables											
Pihak ketiga		57.021	34.646	Third parties											
Pihak berelasi	2f, 34	13.343	-	Related parties											
Utang lain-lain	2h, 38			Other payables											
Pihak ketiga		35.027	17.081	Third parties											
Pihak berelasi	2f, 34	518	1.866	Related party											
Utang pajak	2s, 18b	70.626	43.625	Taxes payable											
Beban akrual	2h, 19, 38	48.622	117.549	Accrued expenses											
Pendapatan ditangguhkan	2r, 20	766.874	581.430	Unearned revenues											
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2q, 21a	18.678	19.154	Short-term employee benefits liabilities											
Utang derivatif	2h, 2x, 22, 38	7.595	-	Derivative payable											
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current maturities of long-term debts:											
	2h, 2n, 2w,														
Liabilitas sewa	12b, 38	59	19.508	Lease liabilities											
Utang bank	2h, 2w, 16, 38	142.783	495.384	Bank loans											
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		3.363.726	2.145.801	TOTAL CURRENT LIABILITIES											
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES											
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term debts - net of current maturities:											
	2h, 2n, 2w,														
Liabilitas sewa	12b, 38	943	168.610	Lease liabilities											
Utang bank	2h, 2w, 16, 38	248.102	2.060.081	Bank loans											
Provisi jangka panjang	2z, 23	24.407	22.796	Long-term provision											
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2s, 18c	515.403	597.782	Deferred tax liabilities - net											
Liabilitas imbalan pasca kerja	2q, 21b	21.352	25.370	Post-employment benefits liability											
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		810.207	2.874.639	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES											
JUMLAH LIABILITAS		4.173.933	5.020.440	TOTAL LIABILITIES											
EKUITAS				EQUITY											
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity											
Modal saham - nilai nominal				Share capital - par value of											
Rp 100 (angka penuh) per saham				Rp 100 (full amount) per share											
Modal dasar - 2.000.000.000 saham				Authorized - 2,000,000,000 shares											
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.137.579.698 saham	24	113.758	113.758	Issued and fully paid - 1,137,579,698 shares											
Tambahan modal disetor	2d, 2t, 25	4.900.723	4.900.723	Additional paid-in capital											
Penghasilan komprehensif lain	2c, 2q, 26	17.117	14.884	Other comprehensive income											
Saldo laba (rugi):				Retained earnings (deficit):											
Telah ditentukan penggunaannya		22.900	22.900	Appropriated											
Belum ditentukan penggunaannya		657.148	(471.188)	Unappropriated											
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		5.711.646	4.581.077	Total equity attributable to owners of the parent entity											
Kepentingan nonpengendali	2c	3	(2)	Non-controlling interests											
JUMLAH EKUITAS		5.711.649	4.581.075	TOTAL EQUITY											
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		9.885.582	9.601.515	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY											
								PENDAPATAN							
								BEBAN POKOK PENDAPATAN							
								Penyusutan dan amortisasi							
								Beban pokok pendapatan lainnya							
								Jumlah beban pokok pendapatan							
								LABA BRUTO							
								Beban penjualan dan pemasaran							
								Beban umum dan administrasi							
								LABA USAHA							
								Pendapatan keuangan							
								Biaya keuangan							
								Pendapatan (beban) lain-lain - neto							
								LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN							
								PAJAK FINAL							
								LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN							
								MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
								LABA TAHUN BERJALAN							
								PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
								Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							
								Pengkukuran kembali program imbalan pasti							
								JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN							
								Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
								Pemilik entitas induk							
								Kepentingan nonpengendali							
								Jumlah							
								Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:							
								Pemilik entitas induk							
								Kepentingan nonpengendali							
								Jumlah							
								Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)							

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent Entity									
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Laba (Rugi)/ Retained Earnings (Deficit)		Kepentingan Nonpengendali/ Non-Controlling Interests	Jumlah/ Total	Balance, January 1, 2022	Disposal of interest in a subsidiary as part of restructuring entities under common control
				Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Ditentukan Belum Penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo 1 Januari 2022	113.758	4.050.261	16.283	22.900	(1.409.466)	2.793.736	416.808	3.210.544	
Pelepasan kepemilikan pada entitas anak sebagai bagian dari restrukturisasi entitas sepengendali	1c,2d,25, 26	-	850.462	-	1.935	850.462	(416.810)	433.652	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	2q	-	536	-	936.343	936.879	-	936.879	
Saldo 31 Desember 2022	113.758	4.900.723	14.884	22.900	(471.188)	4.581.077	(2)	4.581.075	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	2q	-	2.233	-	1.128.336	1.130.569	5	1.130.574	
Saldo 31 Desember 2023	113.758	4.900.723	17.117	22.900	657.148	5.711.646	3	5.711.649	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		2.033.165	2.039.143	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(101.800)	(276.690)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(65.156)	(71.637)	Cash paid to employees
Kas dihasilkan dari operasi		1.866.209	1.690.816	Cash generated from operations
Penerimaan restitusi pajak		102.131	22.770	Receipt from tax refund
Penerimaan bunga		269	1.829	Interest received
Pembayaran pajak final dan pajak penghasilan serta pajak lainnya		(329.363)	(107.056)	Payments of final tax, income tax and other taxes
Penempatan pada bank yang dibatasi penggunaannya		(8)	-	Placement in restricted cash in bank
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		1.639.238	1.608.359	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan aset tetap	11	781	898	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	11	(246.134)	(315.111)	Acquisition of fixed assets
Penjualan penyertaan saham pada entitas anak - neto	1c,2d	-	1.430.120	Proceeds from sale of investment in shares of a subsidiary - net
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurangi kas di bank yang diperoleh dan utang lain-lain terkait	1c	-	(83.270)	Payments for business acquisition net of cash in banks acquired and related other payables
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(245.353)	1.032.637	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek	16	6.097.550	1.702.592	Receipts of short-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka panjang	16	1.475.000	-	Receipts of long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	16	(4.703.265)	(1.917.034)	Payments of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	16	(3.644.196)	(2.675.000)	Payments of long-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa	12b	(386.711)	(159.867)	Payments of lease liabilities
Pembayaran biaya keuangan		(229.370)	(185.019)	Payments of finance costs
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(1.390.992)	(3.234.328)	Net Cash Used in Financing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS (continued)
For The Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		2.893	(593.332)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
DAMPAK NETO PERUBAHAN SELISIH KURS PADA KAS DAN BANK		(1)	2.278	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		2.361	593.415	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	4	5.253	2.361	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Catatan:
Informasi atas transaksi non-kas diungkapkan dalam Catatan 40.

Note:
Information on non-cash activities is disclosed in Note 40.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ridjqi Nurdiani, S.H. No. 5 tanggal 25 Juli 2006. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241/2007.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 10 tanggal 1 Maret 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup aktivitasnya adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan aktivitas perusahaan *holding*. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008.

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) adalah entitas induk Perusahaan dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut “Grup”).

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Kabupaten Kudus di Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA, Lantai 49, Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“Company”) was established based on Notarial Deed No. 5 of Ridjqi Nurdiani, S.H. dated July 25, 2006. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W8-00259HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241/2007.

The Company’s articles of association has been amended several times, the latest of which is covered by Notarial Deed No. 10 of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn. dated March 1, 2022 concerning the changes of the Company’s purposes and objectives. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 10, 2022.

In accordance with article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its business activities involves in central telecommunication construction, self-owned or leased real estate and holding company activities. The Company started its commercial operations in March 2008.

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) is the parent entity of the Company and its Subsidiaries (collectively referred to as the “Group”).

The Company’s head office is located in Kudus Regency at Jalan Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon Village, Jati District, Kudus, Central Java, Indonesia and its branch office is located at Menara BCA 49th floors, Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 29 September 2011, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. S-10636/BL/2011 untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat sejumlah 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (angka penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 3.400 (angka penuh) per saham. Pada tanggal 11 Oktober 2011, Perusahaan telah mencatatkan sebanyak 600.000.000 saham (terdiri dari 100.000.000 saham merupakan saham baru dan 500.000.000 saham milik pemegang saham lama) pada Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas I

Pada tanggal 8 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. S-9825/BL/2012 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas ("PUT") I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sejumlah 135.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (angka penuh) dan harga penawaran sebesar Rp 4.800 (angka penuh) per saham serta menerbitkan Waran Seri I sejumlah 59.400.000. Setiap pemegang saham yang memiliki 40 saham lama berhak mendapatkan 9 HMETD. Setiap pemegang saham yang memiliki 20 saham baru berhak untuk memperoleh 11 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perusahaan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 4.800 per saham selama jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015.

Waran mengalami penyesuaian dengan adanya PUT II sehingga menjadi 59.415.534 waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 3.367 (angka penuh) per saham dan sampai dengan berakhirnya masa berlaku pelaksanaan, jumlah waran yang dilaksanakan adalah sejumlah 59.414.674 waran.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares

Initial Public Offering

On September 29, 2011, the Company obtained an effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through its Letter No. S-10636/BL/2011 to conduct initial public offering of 100,000,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share and with offering price of Rp 3,400 (full amount) per share. On October 11, 2011, the Company listed its 600,000,000 shares (consisting of 100,000,000 new shares and 500,000,000 current shares already owned by existing shareholders) in the Indonesia Stock Exchange.

Limited Public Offering I

On August 8, 2012, the Company obtained an effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through its Letter No. S-9825/BL/2012 to conduct Limited Public Offering ("LPO") I to its shareholders with Pre-emptive Rights ("HMETD") of 135,000,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) and with offering price of Rp 4,800 (full amount) per share and issued 59,400,000 Series I Warrant. Each shareholder who has 40 old shares is entitled to get 9 HMETD. Each shareholder which has 20 new shares entitles to get 11 Series I Warrant, and 1 Series I Warrant entitles the holder to buy 1 new share of the Company with exercise price of Rp 4,800 during the exercise period from March 6, 2013 until August 28, 2015.

Warrant has been adjusted in connection with LPO II to be 59,415,534 warrants with exercise price of Rp 3,367 (full amount) per share and until the end of exercise period, total exercised warrants are 59,414,674 warrants.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan
(lanjutan)

Penawaran Umum Terbatas II

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-550/D.04/2014 untuk melakukan PUT II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan saham dengan HMETD sejumlah 343.165.024 saham dengan nilai nominal Rp 100 (angka penuh) dan harga penawaran sebesar Rp 7.000 (angka penuh) per saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 125 saham lama berhak mendapatkan 54 HMETD.

Jumlah saham Perusahaan yang dicatat sejak penawaran umum perdana saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham/ Number of Shares	Tanggal/ Date	Description
Penawaran umum perdana saham dan pencatatan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia	600.000.000	11 Oktober 2011/ October 11, 2011	Initial public offering and listing of the Company's shares in Indonesia Stock Exchange
Penawaran Umum Terbatas I	135.000.000	28 Agustus 2012/ August 28, 2012	Limited Public Offering I
Eksekusi Waran Seri I	59.414.674	6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015/ March 6, 2013 until August 28, 2015	Execution of Series I Warrants
Penawaran Umum Terbatas II	343.165.024	7 Januari 2015/ January 7, 2015	Limited Public Offering II
Jumlah	1.137.579.698		Total

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares
(continued)

Limited Public Offering II

On December 19, 2014, the Company obtained an effective statement from the Board of Commissioners of Financial Services Authority ("OJK") through its Letter No. S-550/D.04/2014 to conduct LPO II to its shareholders with HMETD of 343,165,024 shares with par value of Rp 100 (full amount) and with offering price of Rp 7,000 (full amount) per share. Each shareholder who has 125 old shares is entitled to get 54 HMETD.

The Company's number shares listed since the initial public offering until December 31, 2023 is as follows:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak

Kepemilikan saham Perusahaan pada entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Business Activities	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				2023	2022	2023	2022
Pemilikan langsung/Direct ownership							
PT Sarana Inti Persada ("SIP")	Kudus, Jawa Tengah/ Kudus, Central Java	Pengelolaan dan penyewaan menara BTS/ Management and leasing of BTS towers	2005	99,87%	99,87%	116.182	118.935
PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK")	Kudus, Jawa Tengah/ Kudus, Central Java	Pengelolaan dan penyewaan menara BTS/ Management and leasing of BTS towers	2010	99,99%	99,99%	89.100	84.765

Pelepasan Kepemilikan Saham PT Platinum
Teknologi ("PTI")

- Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 14 Januari 2022, Perusahaan dengan PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") dan PT Komet Infra Nusantara ("KIN") (keduanya merupakan entitas sepengendali) telah menandatangani akta jual beli atas masing-masing 45% dan 55% kepemilikan saham PTI dan transaksi tersebut dibukukan sebagai transaksi dengan entitas sepengendali seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries

The Company's share ownerships, directly or indirectly, in its consolidated subsidiaries are as follows:

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
2023	2022	2023	2022
99,87%	99,87%	116.182	118.935
99,99%	99,99%	89.100	84.765

Disposal of Share Ownership in PT Platinum
Teknologi ("PTI")

- The Company

As of December 31, 2021 and January 14, 2022, the Company has signed deed of sales and purchase of 45% and 55% PTI's stake ownership, respectively, with PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") and PT Komet Infra Nusantara ("KIN") (both entities under common control) therefore the transactions are accounted for under common control and following the Statement of Financial Accounting Standards 38, "Business Combination of Entities Under Common Control".

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Pelepasan Kepemilikan Saham PT Platinum
Teknologi ("PTI") (lanjutan)

- Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham ("AJB") No. 333 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui untuk menjual 17.110.684 saham atau 21,35% kepemilikan saham PTI kepada PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") dengan harga jual sebesar Rp 415.276. Pembayaran atas penjualan saham sebesar Rp 360.000 dilakukan pada tanggal penandatanganan AJB dan sisa pembayaran sebesar Rp 55.276 dibayar pada tanggal 7 Januari 2022 dan saham tersebut telah dialihkan dan menjadi milik Iforte sejak tanggal AJB ditandatangani.

Berdasarkan AJB No. 334 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui untuk menjual 18.953.440 saham atau 23,65% kepemilikan saham PTI kepada PT Komet Infra Nusantara ("KIN") dengan harga jual sebesar Rp 460.000. Pembayaran atas penjualan saham sebesar Rp 100.000 dilakukan pada tanggal penandatanganan AJB dan sisa pembayaran sebesar Rp 360.000 dibayar pada tanggal 7 Januari 2022 dan saham tersebut telah dialihkan dan menjadi milik KIN sejak tanggal AJB ditandatangani.

Berdasarkan AJB No. 94 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui menjual seluruh sisa kepemilikan saham PTI sebanyak 44.078.375 saham atau 55% kepemilikan saham kepada Iforte dengan harga jual sebesar Rp 1.069.782 dan telah dibayar oleh Iforte pada berbagai tanggal di tahun 2022. Sebagai akibat dari transaksi penjualan tersebut, Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas PTI dan entitas anaknya, dan selanjutnya PTI dan entitas anaknya telah didekonsolidasi dari laporan keuangan konsolidasian Grup.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Disposal of Share Ownership in PT Platinum
Teknologi ("PTI") (continued)

- The Company (continued)

Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares ("AJB") No. 333 dated December 31, 2021 as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notary in Jakarta, the Company agreed to sell 17,110,684 shares or 21.35% share ownership of PTI to PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") with selling price of Rp 415,276. Payment for the sale of shares of Rp 360,000 is made at the signing date of AJB and the remaining balance of Rp 55,276 paid on January 7, 2022 and the shares has been transferred and owned by Iforte since the date of signed AJB.

Based on AJB No. 334 dated December 31, 2021 as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notary in Jakarta, the Company agreed to sell 18,953,440 shares or 23.65% share ownership of PTI to PT Komet Infra Nusantara ("KIN") with selling price of Rp 460,000. Payment for the sale of shares of Rp 100,000 is made at the signing date of AJB and the remaining balance of Rp 360,000 paid on January 7, 2022, and the shares has been transferred and owned by KIN since the date of signed AJB.

Based on AJB No. 94 dated January 14, 2022 as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notary in Jakarta, the Company agreed to sell the whole of its remaining share ownership in PTI of 44,078,375 shares or 55% share ownership to Iforte with selling price of Rp 1,069,782 and has already paid by Iforte on various dates in 2022. As a result of the transaction, the Company has no longer had control over PTI and its subsidiaries, and furthermore PTI and its subsidiaries had been deconsolidated from the Group's consolidated financial statements.

***PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)***

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of Shares of GLK

Based on Deed of Sale and Purchase ("AJB") No. 59 dated February 11, 2022 as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company agreed to acquire 7,500 shares or 75% share ownership of GIK from PT Multi Inti Aliansi (a third party) with acquisition cost of Rp 750.

Based on AJB No. 60 dated February 11, 2022 as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company agreed to acquire 2,500 shares or 25% share ownership of GIK from PT Mekar Hijau Permai (a third party) with acquisition cost of Rp 250.

The fair value of GIK's identifiable assets and liabilities as of February 11, 2022 are as follows:

	Nilai wajar/ Fair value	
Aset lancar	4.665	Current assets
Aset tidak lancar	24.686	Non-current assets
Aset tetap	86.563	Fixed assets
Jumlah aset	115.914	Total assets
Liabilitas	(36.353)	Liabilities
Jumlah aset neto teridentifikasi pada nilai wajar	79.561	Total net identifiable assets at fair value
Hubungan pelanggan (Catatan 14)	10.390	Customer relationship (Note 14)
Goodwill yang timbul dari akuisisi (Catatan 13)	797	Goodwill arising from acquisition (Note 13)
Biaya imbalan yang dialihkan	90.748	Purchase price consideration transferred
Dikurangi kas di bank	(2.458)	Less cash in banks
Dikurangi utang lain - lain	(5.020)	Less other payables
Pembayaran untuk akuisisi saham dan bisnis setelah dikurangi kas di bank yang diperoleh	83.270	Payments for shares and business acquisition net of cash in banks acquired

The net identifiable assets at fair value which recognized as of acquisition date were based on an assessment from independent valuer reports.

Goodwill recognized is primarily attributed to the expected synergies and other benefits from combining the assets of GIK with the assets of the Company.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Akuisisi Saham GIK (lanjutan)

Pada tanggal 4 Agustus 2022, Perusahaan melakukan pengalihan kepemilikan saham miliknya pada GIK sebanyak 1 saham kepada Protelindo sehingga persentase kepemilikan saham Perusahaan ada GIK menjadi 99,99%.

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham GIK No. 59 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham GIK menyetujui untuk meningkatkan modal dasar menjadi Rp 200.000 dan modal disetor dan ditempatkan penuh sebesar Rp 120.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan dengan melakukan konversi pinjaman yang diberikan Perusahaan kepada GIK menjadi saham baru GIK.

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham GIK No. 2 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, para pemegang saham GIK menyetujui untuk meningkatkan modal dasar menjadi Rp 300.000 dan modal disetor dan ditempatkan penuh sebesar Rp 204.605 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan atas hasil konversi pinjaman yang diberikan Perusahaan kepada GIK menjadi saham baru GIK.

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. 31 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama

(Komisaris Independen) :

Komisaris Independen :

Komisaris :

Kusmayanto Kadiman

Harry Mozarta Zen

Eko Santoso Hadiprodjo

Direksi:

Direktur Utama :

Direktur :

Direktur :

Direktur :

Juliawati Gunawan Halim

Wong Tjin Tak

Hartono Tanuwidjaja

Wellington

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Acquisition of Shares of GIK (continued)

On August 4, 2022, the Company transferred its ownership of 1 share in GIK to Protelindo therefore the percentage of the Company's share ownership in GIK become 99.99%.

Based on Deed of Resolution Meeting of Shareholder of GIK No. 59 dated October 5, 2022 as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, GIK's shareholders agreed to increase the authorized capital to Rp 200,000 and issued and fully paid capital to Rp 120,000 which was fully subscribed by the Company by conversion loan from the Company to GIK's new shares.

Based on Deed of Resolution Meeting of Shareholder of GIK No. 2 dated December 6, 2023 as covered by Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, GIK's shareholders agreed to increase the authorized capital to Rp 300,000 and issued and fully paid capital to Rp 204,605 which was fully subscribed by the Company by conversion loan from the Company to GIK's new shares.

d. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Based on Deed of Statement of Resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No. 31 dated May 5, 2023, as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 are as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner

(Independent Commissioner)

Independent Commissioner

Commissioner

Board of Directors:

President Director

Director

Director

Director

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. 167 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama

(Komisaris Independen) :

Komisaris Independen :

Komisaris :

Kusmayanto Kadiman

Harry Mozarta Zen

Eko Santoso Hadiprodjo

Direksi:

Direktur Utama :

Direktur :

Direktur :

Direktur :

Juliawati Gunawan Halim

Wong Tjin Tak

Hartono Tanuwidjaja

Wellington

Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023
Ketua	Harry Mozarta Zen
Anggota	Stefanus Ginting
Anggota	Jennywati Soewito

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Juliawati Gunawan Halim.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup memiliki masing-masing sejumlah 181 dan 204 karyawan (tidak diaudit).

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Maret 2024.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. GENERAL (continued)

d. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Based on Deed of Statement of Resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No. 167 dated May 27, 2022, as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2022 are as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner

(Independent Commissioner)

Independent Commissioner

Commissioner

Board of Directors:

President Director

Director

Director

Director

Composition of the Company's audit committee as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	2023	2022
Ketua	Harry Mozarta Zen	Harry Mozarta Zen
Anggota	Stefanus Ginting	Sujoko Martin
Anggota	Jennywati Soewito	Anwar Muljadi Arif

The Company's corporate secretary as of December 31, 2023 and 2022 is Juliawati Gunawan Halim, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group has 181 and 204 employees (unaudited), respectively.

e. Completion of the Consolidated Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Company on March 28, 2024.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

**a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

**Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, dan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi keuangan baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION**

**a. Statement of Compliance and Basis of
Preparation of the Consolidated Financial
Statements**

Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consists of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK IAI") and the Regulations and Guidelines on Consolidated Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK").

**Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1, "Presentation of Financial Statements". The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the relevant notes herein.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised financial accounting standards as disclosed in Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern entity.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan
Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

**Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian (lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi:

- Penerapan kebijakan akuntansi;
- Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi dan tahun yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup diungkapkan pada Catatan 3.

Tahun buku Grup adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rupiah") yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**a. Statement of Compliance and Basis of
Preparation of the Consolidated Financial
Statements (continued)**

**Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements (continued)**

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of judgments, estimates and assumptions that affects:

- *The application of accounting policies;*
- *The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements;*
- *The reported amounts of revenues and expenses during the reporting year.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the year which the estimate is revised and in any future year affected.

Significant accounting estimates, assumptions and judgments applied in the preparation of the Group's consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

The Group's financial reporting period is from January 1 to December 31.

The accounts included in the Group's consolidated financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (functional currency). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rupiah") which is the functional currency of the Group.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Standar akuntansi keuangan baru dan revisi berikut telah diterbitkan dan efektif untuk tahun buku 2023, namun dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya; dan
- Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal yang diadopsi dari Amandemen IAS 12, "Income Tax" regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 1c. Kendali diperoleh bila Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Secara khusus, Perusahaan mengendalikan investee jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas investee, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Perusahaan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari investee,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk memengaruhi jumlah imbal hasil.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

b. Changes in Accounting Policies

The following new and revised financial accounting standards were issued and effective in 2023, but did not result in a significant effect on the consolidated financial statements:

- Amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies;
- Amendment to PSAK 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- Amendment to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations; and
- Amendment to PSAK 46, "Income Tax" regarding deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction which adopted from Amended IAS 12, "Income Tax" regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise of the Company's financial statements and its subsidiaries as mentioned in Note 1c. Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Company controls an investee if and only if the Company has all of the following:

- i) Control over the investee, that is existing rights that give the Company current ability to direct the relevant activities of investee,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Bila Perusahaan tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu investee, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas investee termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari investee,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perusahaan.

Perusahaan menilai kembali apakah mereka mengendalikan investee bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada periode tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perusahaan memperoleh kendali sampai tanggal Perusahaan tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit.

Seluruh saldo akun, transaksi, penjualan dan beban antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi dan deviden dieliminasi pada saat konsolidasi

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset (termasuk goodwill), liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

When the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Company's voting rights and potential voting rights.

The Company re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the period are included in the consolidated financial statements from the date of the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the parent of the Company and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

All significant intra-group balances, transactions, sales and expenses, and unrealized profits or losses resulting from intra-group transactions and dividends are eliminated on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Company loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while any resulting gain or loss is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. KHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis dan Goodwill

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi.

Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas suatu bisnis, Grup mengevaluasi aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih serta mengklasifikasikan dan menentukan penyajian berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi pos yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi dimana Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

d. Business Combination and Goodwill

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets.

Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh (termasuk aset takberwujud berupa hubungan pelanggan yang teridentifikasi dari hasil valuasi penilai independen) dan liabilitas yang diambil alih.

Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**d. Business Combination and Goodwill
(continued)**

The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable, but shall not exceed one year from the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired (including intangible assets in the form of customer relationships identified from the results of independent appraiser valuations) and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the acquired subsidiary, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of Cash Generating Unit ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut, karenanya transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Entitas yang menerima bisnis mencatat selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai buku aset neto entitas yang diakuisisi dari setiap transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan kurs tengah pada tanggal transaksi perbankan terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada usaha tahun berjalan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**d. Business Combination and Goodwill
(continued)**

Business Combination Under Common Control

Business combination transaction of entities under common control, in the form of transfer of business within the framework of reorganization of entities under the same business group is not a change of ownership in economic substance, therefore it would not result in a gain or loss for the business group as a whole or to the individual entity within the same business group, hence the transactions are recorded using the pooling-of-interests method.

In applying the pooling-of-interests method, the components of the financial statements for the period during which the business combination occurred and for other periods presented for comparison purposes, are presented in such a manner as if the combination has already occurred since the beginning of the period in which the entities were under common control. The entity that received business records the difference between the consideration value transferred and book value of net assets of acquired entity of any business combination transaction in equity and presents it in "Additional Paid-in Capital" account.

e. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah currency at the exchange rates prevailing at the time of transactions are made. At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Indonesian Rupiah using the middle exchange rates at the last bank transaction date as published by Bank Indonesia. Exchange rate gains or losses arising from the foreign currency transactions and from the translation of foreign currency denominated monetary assets and liabilities are recognized in the current year operations.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
(lanjutan)**

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 15.416 dan Rp 15.731 untuk setiap 1 Dolar Amerika Serikat.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan saldo rekening bank yang tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya disajikan sebagai "Bank yang dibatasi penggunaannya".

h. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

e. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the rates of exchange used were Rp 15,416 and Rp 15,731 for 1 United States Dollar, respectively.

f. Transactions with Related Parties

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 7, "Related Party Disclosure".

The transactions with related parties are made based on terms agreed upon by the parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

g. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks consists of cash on hand and bank accounts balance that are not used as collateral and are not restricted in use.

Cash in bank which is pledged and restricted for use is presented as "Restricted cash in bank".

h. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Aset keuangan pada NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

i. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Financial assets at FVTPL.*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

i. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

i. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang) (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya.

ii. Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di penghasilan komprehensif lain ("PKL"). Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

i. Financial assets at amortized cost (debt instruments) (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets measured at amortized cost includes cash on hand and in banks, restricted cash in bank, trade receivables, accrued income, other receivables and other non-current assets.

ii. Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in other comprehensive income ("OCI"). Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is reclassified to profit or loss.

The Group does not have financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

- iii. Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tak terbatalan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas).

iv. Aset keuangan pada NWLR

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada NWLR.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

- iii. *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)*

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in profit or loss when the right of payment has been established.

The Group has no financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

iv. Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in profit or loss.

The Group has no financial assets designated at FVTPL.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dimiliki oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired, or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima dan piutang lain-lain tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade receivables, accrued income and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the customers and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang derivatif dan utang jangka panjang.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

i. Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, derivative payable and long-term debts.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

i. Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

i. Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai biaya keuangan pada laba rugi.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

i. Financial liabilities at FVTPL (continued)

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

ii. Financial liabilities at amortized cost (loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in profit or loss.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

ii. Financial liabilities at amortized cost (loans and borrowings) (continued)

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for trade payables, other payables and accrued expenses are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman) (lanjutan)

(ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan, pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada NWPKL.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

i. Fair Value Measurement

The Group measures financial assets and financial liabilities at fair value at each reporting date. The Group also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. The Group also measures certain recoverable amounts of the Cash Generating Units ("CGU") using fair value less cost of disposal and certain financial assets at FVOCI.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or*
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participants that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, by maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

i. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

j. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Cadangan kerugian kredit ekspektasian dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang yang mengalami penurunan nilai dihapusbukkan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Grup menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

i. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market price in active markets for identical assets or liabilities.*
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

j. Trade and Other Receivables

Trade and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, except where the effect of discounting is immaterial, less allowance for expected credit losses.

Allowance for expected credit losses is established when there is objective evidence that the outstanding amounts can not be collected. The impaired receivables are written-off during the year in which they are determined to be not collectible.

k. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined by the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Group provides allowance for obsolescence and/or decline in value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable value of inventories.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

l. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap, selain hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Nilai sisa aset adalah estimasi jumlah yang akan diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tersebut sudah dalam kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Menara dan sarana penunjang	40
Bangunan	20
Menara bergerak	8
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	4 - 25
Peralatan dan perabotan kantor	4 - 8
Kendaraan bermotor	4
Antena indoor	8

Jumlah tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

m. Fixed Assets

The Group chooses the cost model as the accounting policy for measuring its fixed assets.

Fixed assets, except landrights, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are satisfied. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Group would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already in the condition expected at the end of its useful life.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful life of the assets as follows:

Towers and supporting equipments
Buildings
Transportable towers
Networks, fiber optic and infrastructures
Office equipment and furnitures
Motor vehicles
Indoor antenna

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

m. Fixed Assets (continued)

The residual values, useful life and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial year. Changes in the expected useful life of assets are considered to modify the depreciation period and are treated as changes in accounting estimates.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of fair value less cost to sell and value in use.

Constructions in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs until the date when the asset is completed and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been completed and ready for use.

n. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognize lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir tahun pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur manfaat aset yang diharapkan menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

n. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Lessee

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Lessee (lanjutan)

a. Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	(Tahun/Years)	
Tanah dan peralatan	2 - 20	Land and equipments
Bangunan	2 - 10	Buildings

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

b. Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residual.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

n. Leases (continued)

Group as Lessee (continued)

a. Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

	(Tahun/Years)	
Tanah dan peralatan	2 - 20	Land and equipments
Bangunan	2 - 10	Buildings

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

b. Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentive receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Lessee (lanjutan)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa juga mencakup harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti akan dieksekusi oleh Grup, dan pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Grup mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada tahun di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

c. Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)

n. Leases (continued)

Group as Lessee (continued)

b. Lease liabilities (continued)

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the year in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses their incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

c. Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Lessor

Sewa dimana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada tahun perolehannya.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan hubungan pelanggan yang diperoleh dari kombinasi bisnis yang diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 5 sampai 11 tahun.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

n. Leases (continued)

Group as Lessor

Leases in which the Group do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the year in which they are earned.

o. Intangible Asset

Intangible asset representing of customer relationships acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Customer relationships have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of customer relationships over their estimated useful life of 5 to 11 years.

p. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each of reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika keadaan yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai tercatat. Penurunan nilai *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat setiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Ketika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**p. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)**

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses from continuing operations are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets.

These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future year.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual. Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pasca kerja

Grup memberikan imbalan pasca kerja sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ("PP 35/2021") untuk mengimplementasikan provisi pada ayat 81 dan ayat 185 (b) dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. PP 35/2021 menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, sehingga pada dasarnya, program pensiun berdasarkan PP 35/2021 adalah program manfaat pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan. Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba atau rugi.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees. Short-term employee benefits include wages, salaries, bonuses and incentive.

Post-employment benefits

The Group provides post-employment benefits in accordance with the provisions of Government Regulation No. 35 Year 2021 ("PP 35/2021") to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation. PP 35/2021 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under PP 35/2021 represent defined benefit plans.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

The defined benefit liability recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined pension benefits plan is the present value of the defined benefits obligation at reporting date. The present value of defined benefits obligation is calculated by independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefits obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Past service costs are recognized immediately in profit or loss.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

q. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam tahun terjadinya. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan pada akun saldo laba belum ditentukan penggunaannya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Grup mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Grup, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are immediately recognized in other comprehensive income in the year in which they arise. Accumulated remeasurements balance is reported in unappropriated retained earnings.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

A curtailment occurs when an entity either:

- Demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
- Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A settlement occurs when the Group enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Group changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in PSAK 24 for the general fact pattern of pension programs based on the Job Creation Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Group, therefore the impact of the changes is recorded entirety in the consolidated financial statements for the current year.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi setelah dikurangi diskon, retur, insentif dan pajak pertambahan nilai yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atas jasa tersebut).

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian barang atau jasa diterima oleh pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Grup dalam pertukaran barang atau jasa tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa Grup merupakan prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada pertimbangan yang diterima Grup sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, setelah dikurangi potongan pendapatan dan disesuaikan dengan pengembalian yang diharapkan serta penyesuaian harga.

Untuk potongan pendapatan, pengembalian dan penyesuaian harga, Grup menggunakan metode yang paling mungkin dalam memperkirakan jumlah tersebut.

Jasa yang sudah diberikan tapi belum dilakukan penagihan dibukukan sebagai "Pendapatan yang masih akan diterima" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

r. Revenue and Expense Recognition

The Group have adopted PSAK 72, "Revenue from Contract with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer goods or services to a customer that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods or services are received by the customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expect to be entitled in exchange for those goods or services. The Group have generally concluded that the Group is the principal in regulating its revenue.

The amount of revenue recognized is based on the consideration that the Group received in exchange for transferring promised goods or services to the customers, net of the revenue discount and adjusted for expected returns and price adjustments.

For revenue discount, returns and price adjustment, the Group uses most likely method in estimating the amount.

Services have rendered but not yet billed is recorded as "Accrued income" in the consolidated statement of financial position.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Penerimaan uang dari pelanggan dimana jasa belum dilakukan maka dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan. Uang muka ini dibukukan sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Penghasilan atau beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan dan beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset dan liabilitas keuangan.

s. Perpajakan

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK 46, "Pajak Penghasilan", pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Grup memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan sewa menara telekomunikasi sebagai pos tersendiri.

Pada tanggal 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima oleh orang pribadi atau badan, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**r. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

Receipts of money from customers in which services has not yet provided are recorded as unearned revenues. These advances are recorded as revenue at the time of delivery of the related services to customers.

Expenses are recognized when incurred using the accrual basis.

Interest income or expenses

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

s. Taxation

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK 46, "Income Tax", final tax is no longer governed by PSAK 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from telecommunication tower rental income as separate line item.

On September 6, 2017, Indonesian Government issued Government Regulation No. 34 Year 2017 related with Income Tax from Land and Building Lease. In accordance with those regulation, effective from January 2, 2018, income from land and/or building lease, either partly or all of the building, which received by individual or corporate, will be charged of final income tax by 10% from gross amount of the land and/or building lease value.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak final (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian sewa tersebut. Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa menara telekomunikasi dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan selesainya periode sewa.

Selisih antara jumlah pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak final pada laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Grup menyajikan beban pajak final sebagai pos tersendiri.

Selisih nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak final dengan dasar pengenaan pajaknya, tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Final tax (continued)

In accordance with Article 5 paragraph 1, income from rental which has started before this Government Regulation was enacted, will be charged with non-final income tax until the end of rental period in accordance with the rental agreement. Management believes that telecommunication tower rental income is charged by non-final income tax until the end of lease period.

The difference between the final tax paid and the amount charged as final tax expenses in profit or loss is recognized as prepaid tax or tax payable. The Group presents final tax expense as separate line item.

The differences between the carrying amounts of assets and liabilities related to final tax and their respective tax bases, are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Current tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the tax rates and tax regulation that has been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions when appropriate.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Group, when the result of the appeal is determined.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari Beban Pajak Penghasilan Kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari Beban Pajak Penghasilan Kini.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui berdasarkan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan atas aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan basis pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Current tax (continued)

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of Current Income Tax Expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of Current Income Tax Expense.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax assets to be utilized. At each reporting date, the Group reassessed unrecognized deferred tax assets and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak ini terhadap liabilitas pajak ini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Grup bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak ini dengan dasar neto.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang berkaitan dengan transaksi dengan PPN disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

t. Biaya Emisi Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan saham Perusahaan kepada masyarakat dan penawaran umum terbatas dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

u. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tahun ketika dividen tersebut disetujui atau dideklarasikan oleh para pemegang saham.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Value Added Tax ("VAT")

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *VAT incurred from a purchase of assets or services which not recoverable from the tax office, is recognized as part of the acquisition cost of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables relating to transactions with VAT are presented including the amount of VAT.*

The net amount of VAT which recoverable from, or payable to, the tax office is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

t. Share Issuance Costs

Costs incurred in connection with the Company's issuance of new share to the public and limited shares offering or rights issues were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the consolidated statement of financial position.

u. Dividend

Dividend to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated statement of financial position in the year in which the dividends are approved or declared by the shareholders.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan oleh karenanya, rugi per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Apabila jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya, maka jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari tahun sajian paling awal.

w. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar.

Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) Akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) Untuk diperdagangkan,
- iii) Akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas dan bank kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) Akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) Untuk diperdagangkan,
- iii) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) Tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

v. Earnings per Share

Earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of shares during the year.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2023 and 2022, and accordingly, no diluted loss per share is calculated and presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the number of ordinary shares outstanding is increased without an increase in resources, the number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as of the event had occurred at the beginning of the earliest year presented.

w. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:

- i) *Expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- ii) *Held primarily for the purpose of trading,*
- iii) *Expected to be realized within 12 months after the reporting date, or cash on hand and in banks unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date.*

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) *Expected to be settled in the normal operating cycle,*
- ii) *Held primarily for the purpose of trading,*
- iii) *Due to be settled within twelve months after the reporting date, or*
- iv) *There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.*

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

w. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar (lanjutan)

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

**x. Instrumen Keuangan Derivatif dan Akuntansi
Lindung Nilai**

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap atas perubahan kurs dan tingkat suku bunga untuk melindungi nilai masing-masing risiko mata uang asing dan risiko suku bunga. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif dan sebagai liabilitas keuangan jika nilai wajarnya negatif.

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri.

Pada permulaan hubungan lindung nilai, Grup secara resmi menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang ingin diterapkan akuntansi lindung nilai serta tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melaksanakan lindung nilai.

Dokumentasi tersebut mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi lindung nilai, sifat risiko yang dilindungi nilai dan bagaimana entitas akan menilai efektivitas perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dalam mengimbangi eksposur terhadap perubahan nilai wajar item lindung nilai. atau arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilainya. Lindung nilai tersebut diharapkan menjadi sangat efektif dalam mencapai saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas dan dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sebenarnya sangat efektif selama periode pelaporan keuangan yang ditetapkan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**w. Current and Non-current Classification
(continued)**

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**x. Derivative Financial Instruments and Hedge
Accounting**

The Group uses derivative financial instruments, such as cross currency swap and interest rate swap to hedge the foreign currency risks and interest rate risks. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as fair value hedge, cash flows hedge and hedge of a net investment in a foreign operation.

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designate and document the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess the effectiveness of changes in the hedging instrument's fair value in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that they actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which they were designated.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**x. Instrumen Keuangan Derivatif dan Akuntansi
Lindung Nilai (lanjutan)**

Lindung nilai arus kas

Lindung nilai arus kas digunakan untuk lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko mata uang asing atau risiko tingkat suku bunga yang terkait dengan suatu aset atau liabilitas yang diakui.

Bagian efektif atas laba atau rugi instrumen lindung nilai atas arus kas diakui langsung pada penghasilan komprehensif lain, sementara bagian yang tidak efektif diakui segera dalam laba rugi.

Jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ditransfer ke laba rugi ketika transaksi yang dilindung nilai mempengaruhi laba rugi, seperti ketika pendapatan keuangan yang dilindung nilai atau biaya keuangan diakui atau ketika penjualan perkiraan terjadi. Ketika item yang dilindung nilai adalah biaya aset atau kewajiban non-keuangan, jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ditransfer ke jumlah tercatat awal dari aset atau kewajiban non-keuangan.

Grup mempunyai kontrak swap antar mata uang yang digunakan sebagai lindung nilai atas eksposur perubahan dalam arus kas atas pembayaran bunga dan pinjaman. Kontrak swap tersebut dicatat dengan menggunakan akuntansi lindung nilai.

y. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari entitas yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu dan jasa (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**x. Derivative Financial Instruments and Hedge
Accounting (continued)**

Cash flows hedge

Cash flows hedge is used to hedge the exposure to variability in cash flows that is attributable to foreign currency risk or interest rate risk associated with a recognized asset or liability.

The effective portion of the gain or loss on the cash flow hedging instrument is recognized directly in other comprehensive income, while any ineffective portion is recognized immediately in profit or loss.

Amounts recognized as other comprehensive income are transferred to profit or loss when the hedged transaction affects profit or loss, such as when the hedged financial income or financial expense is recognized or when a forecast sale occurs. When the hedged item is the cost of a non-financial asset or liability, the amounts recognized as other comprehensive income are transferred to the initial carrying amount of the non-financial asset or liability.

The Group entered into cross-currency swap contracts that are used as a hedge for the exposure to changes in cash flows relating to interest payments and loans repayment due to changes in foreign exchange rates. Such swap contracts are accounted for under hedge accounting.

y. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment element reported is the measure that is reported to the chief operating decision maker for the purpose of making decisions to allocate resources to the segment and assessing its performance.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

y. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Rincian informasi segmen tersebut diungkapkan dalam Catatan 37.

z. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling akhir. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dipulihkan.

aa. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomis.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

y. Segment Information (continued)

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intra-group transactions are eliminated.

The financial information reported is based on information used by management in evaluating the performance of each segment and determining the allocation of resources. Details of the segment information are disclosed in Note 37.

z. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each of end reporting year and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

aa. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

bb. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas serta pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang memengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah Indonesia.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

bb. Events After the Reporting Period

Post reporting date events that provide additional information about the financial position of the Group as of consolidated statement of financial position date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post reporting date events which are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at end of reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future year.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency from primary economic environment where the entity operates. It is the currency that mainly influences revenue and cost of rendering services of each respective entity. Based on the management's assessment, the Group's functional currency is the Indonesian Rupiah.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan pada Catatan 2h.

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Sewa

Grup menyewakan menara berdasarkan perjanjian sewa operasi, dengan sewa yang dinegosiasikan dalam jangka waktu tertentu. Grup telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari syarat dan ketentuan dari perjanjian, bahwa tidak terjadi perpindahan atas semua risiko yang signifikan dan hak kepemilikan menara yang disewakan atas sewa operasi.

Opsi Pembaruan dan Penghentian dalam Kontrak -
Grup sebagai Lessee

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies as disclosed in Note 2h.

Uncertain Tax Exposure

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Leases

The Group leases its towers under an operating lease arrangement, with the lease negotiated for a specific terms. The Group have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of the towers which are leased out on operating leases.

Renewal and Termination Options in the Contract -
Group as Lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi Pembaruan dan Penghentian dalam Kontrak -
Grup sebagai Lessee (lanjutan)

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan memengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir tahun pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang
Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokkan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Renewal and Termination Options in the Contract -
Group as Lessee (continued)

The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at end of reporting year that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for Expected Credit Losses of Trade
Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate Expected Credit Loss ("ECL") for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang
Usaha (lanjutan)

Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif gagal bayar yang diamati Grup secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor usaha Grup, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan. Informasi tentang KKE pada piutang usaha Grup diungkapkan dalam Catatan 6.

Nilai tercatat piutang usaha Grup sebelum cadangan kerugian kredit ekspektasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 756.739 dan Rp 514.557. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 6.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Grup sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 7.840 dan Rp 10.572. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 8.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Expected Credit Losses of Trade
Receivables (continued)

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast for economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about ECLs on the Group's trade receivables is disclosed in Note 6.

The carrying amount of the Group's trade receivables before allowance for expected credit losses as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 756,739 and Rp 514,557, respectively. Further details are disclosed in Note 6.

Allowance for Impairment Losses of Inventories

Allowance for impairment losses of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices and estimated costs to sell. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Group's inventories before allowance for impairment losses as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 7,840 and Rp 10,572, respectively. Further details are disclosed in Note 8.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai buku neto atas aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 7.814.095 dan Rp 7.743.300. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 11.

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Grup melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir tahun pelaporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah liabilitas pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir tahun pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 23.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Useful Life of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management properly estimates the useful life of these fixed assets to be within 4 to 40 years. These are common life expectations applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The net book value of the Group's fixed assets as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 7,814,095 and Rp 7,743,300, respectively. Further details are disclosed in Note 11.

Estimated Cost of Dismantling of Towers

The Group assesses its estimated cost of dismantling of towers at end of reporting year. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost of dismantling of towers as there are numerous factors that will affect the ultimate liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting year represents management's best estimate of the present value of the future dismantling costs required. Further details are disclosed in Note 23.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Sewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman tambahan

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman tambahan ("IBR") untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi (seperti untuk entitas-entitas anak yang tidak mengadakan transaksi pembiayaan) atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa.

Grup menetapkan estimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan membuat estimasi spesifik jika diperlukan.

Penyusutan Aset Hak-Guna

Grup melakukan penelaahan atas perhitungan penyusutan aset hak-guna pada akhir periode pelaporan, selanjutnya manajemen menentukan masa manfaat ekonomis atas aset hak-guna atas tanah berubah dari 2 sampai 26 tahun menjadi 2 sampai dengan 20 tahun. Grup telah menerapkan perubahan ini secara prospektif, efektif tanggal 1 Oktober 2023.

Dampak dari perubahan estimasi akuntansi atas perhitungan penyusutan aset hak-guna tanah untuk periode berjalan dan periode berikutnya adalah sebagai berikut:

**Kenaikan (penurunan)
dalam beban penyusutan/
Increase (decrease)
In depreciation**

2023 (Oktober-Desember)
2024 - 2028
2029 - 2079

10.555
(45.541)
(30.407)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, the Group use their incremental borrowing rate ("IBR") to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease (for example, the subsidiaries that do not enter into financing transactions).

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and make certain specific estimates as necessary.

Depreciation of Right-of-Use Assets

The Group reviewed the depreciation calculation of right-of-use assets at the end of the reporting period, then management determined that the economic useful life of right-of-use assets of land changed from 2 to 26 years to 2 to 20 years. The Group has implemented these changes prospectively, effective on October 1, 2023.

The impact of changes in accounting estimates on the calculation of depreciation of right-of-use assets of land for the current and following period are as follows:

2023 (October-December)
2024 - 2028
2029 - 2079

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai Goodwill

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perusahaan menimbulkan goodwill dan aset takberwujud. Sesuai PSAK 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", goodwill tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Sedangkan aset takberwujud diamortisasi sesuai estimasi masa manfaat aset tersebut.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Imbalan Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial dan menggunakan asumsi termasuk tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang diharapkan. Perubahan asumsi ini akan memengaruhi nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun pelaporan dengan menggunakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi-asumsi penting lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Nilai tercatat atas liabilitas imbalan pasca kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 21.352 dan Rp 25.370. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 21b.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible asset. Certain business acquisitions of the Company have resulted in goodwill and also an intangible asset. Under PSAK 22 (Revised 2010), "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing. While intangible asset is being amortized over the estimated useful life of the asset.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill, such assets are subjected to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired. Management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

Post-employment Benefits

The present value of post-employment benefits liability depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions including the discount rate and expected salary increment rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits liability.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting year using interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflow expected to be required to settle the pension obligations.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions are in part based on the current market conditions

The carrying amount of the Group's post-employment benefits liability as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 21,352 and Rp 25,370, respectively. Further details are disclosed in Note 21b.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 18c.

4. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari:

	2023	2022	
Kas	300	625	Cash on hand
Bank - pihak ketiga			Cash in banks - third parties
Rupiah Indonesia			Indonesian Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.489	1.163	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	418	7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 250)	62	64	Others (each below Rp 250)
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk	30	32	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah bank - pihak ketiga	3.999	1.266	Total cash in banks - third parties
Jumlah kas dan bank - pihak ketiga	4.299	1.891	Total cash on hand and in banks - third parties
Bank - pihak berelasi (Catatan 34)			Cash in bank - related party (Note 34)
Rupiah Indonesia			Indonesian Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	954	470	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	5.253	2.361	Total

Pendapatan bunga yang berasal dari saldo penempatan di bank disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATIONS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profit together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 18c.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

Cash on hand and in banks consists of:

	2023	2022	
Cash on hand	300	625	Cash on hand
Cash in banks - third parties			Cash in banks - third parties
Indonesian Rupiah			Indonesian Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.489	1.163	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	418	7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Others (each below Rp 250)	62	64	Others (each below Rp 250)
United States Dollar			United States Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk	30	32	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total cash in banks - third parties	3.999	1.266	Total cash in banks - third parties
Total cash on hand and in banks - third parties	4.299	1.891	Total cash on hand and in banks - third parties
Cash in bank - related party (Note 34)			Cash in bank - related party (Note 34)
Indonesian Rupiah			Indonesian Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	954	470	PT Bank Central Asia Tbk
Total	5.253	2.361	Total

Interest income from cash in banks is presented as part of "Finance Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

4. KAS DAN BANK (lanjutan)

Tingkat suku bunga tahunan untuk penempatan di bank dengan pihak ketiga adalah berkisar antara 0% sampai 0,5% untuk rekening Rupiah Indonesia dan 0% sampai 0,2% untuk rekening Dolar Amerika Serikat.

Tingkat suku bunga tahunan untuk penempatan di bank dengan pihak berelasi adalah sebesar 0,01% untuk tahun 2023 dan 0,08% untuk tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kas dan bank tidak dijaminkan kepada pihak manapun.

5. BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Bank yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

	2023	2022
Rupiah Indonesia		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8	-

Akun ini merupakan uang jaminan yang diterima dari PT Perkebunan Nusantara IV.

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
PT XL Axiata Tbk	682.755	499.352	PT XL Axiata Tbk
PT Indosat Tbk	38.336	2.593	PT Indosat Tbk
PT Telekomunikasi Selular	33.923	7.392	PT Telekomunikasi Selular
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	1.725	5.220	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah	756.739	514.557	Total
Dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	(2.187)	(2.123)	Less allowance for expected credit losses
Neto	754.552	512.434	Net

4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)

The annual interest rates for placements in third parties banks are ranging from 0% to 0.5% for Indonesian Rupiah accounts and 0% to 0.2% for United States Dollar accounts.

The annual interest rates for placement in related party bank is 0.01% for 2023 and 0.08% for 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, cash on hand and in banks are not pledged to any party.

5. RESTRICTED CASH IN BANK

Restricted cash in bank consists of:

	2023	2022	
Indonesian Rupiah			Indonesian Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

This account represents guarantee received from PT Perkebunan Nusantara IV.

6. TRADE RECEIVABLES

Details of trade receivables are as follows:

a. By customers

	2023	2022	
Third parties			Third parties
PT XL Axiata Tbk	682.755	499.352	PT XL Axiata Tbk
PT Indosat Tbk	38.336	2.593	PT Indosat Tbk
PT Telekomunikasi Selular	33.923	7.392	PT Telekomunikasi Selular
Others (each below Rp 10,000)	1.725	5.220	Others (each below Rp 10,000)
Total	756.739	514.557	Total
Less allowance for expected credit losses	(2.187)	(2.123)	Less allowance for expected credit losses
Net	754.552	512.434	Net

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

b. Berdasarkan umur

	2023
Belum jatuh tempo	745.577
Telah jatuh tempo:	
1 - 30 hari	8.979
31 - 60 hari	-
61 - 90 hari	9
Lebih dari 90 hari	2.174
Jumlah	756.739
Dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	(2.187)
Neto	754.552

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan.

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal tahun	2.123
Reklasifikasi (Catatan 7 dan 15)	64
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	-
Pelepasan entitas anak	-
Saldo akhir tahun	2.187

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekpektasian adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

*Details of trade receivables are as follows:
(continued)*

b. By aging

	2022	
508.696		<i>Not yet due</i>
141		<i>Past due:</i>
-		<i>1 - 30 days</i>
-		<i>31 - 60 days</i>
-		<i>61 - 90 days</i>
5.720		<i>More than 90 days</i>
514.557		<i>Total</i>
(2.123)		<i>Less allowance for expected credit losses</i>
512.434		Net

All trade receivables are denominated in Indonesian Rupiah.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no trade receivables which are pledged as collateral.

Movements of allowance for expected credit losses of trade receivables are as follows:

	2022	
5.248		<i>Balance at beginning of year</i>
(4.311)		<i>Reclassification (Notes 7 and 15)</i>
2.123		<i>Provision during the year (Note 32)</i>
(937)		<i>Disposal of a subsidiary</i>
2.123		Balance at end of year

Management believes that allowance for expected credit losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollected of trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk on trade receivables.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

7. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan yang masih akan diterima merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dan lainnya yang belum ditagih karena proses transaksi dan kelengkapan dokumen penagihan sedang dalam verifikasi persetujuan oleh pelanggan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Rincian pendapatan yang masih akan diterima berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	2023
PT Indosat Tbk	16.017
PT Telekomunikasi Selular	14.794
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	4.691
Jumlah	35.502
Dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	(1.284)
Neto	34.218

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian atas pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal tahun	1.348
Reklasifikasi (Catatan 6)	(64)
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	-
Pelepasan entitas anak	-
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	-
Saldo akhir tahun	1.284

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekpektasian adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pendapatan yang masih akan diterima. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas pendapatan yang masih akan diterima.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. ACCRUED INCOME

Accrued income represents unbilled rental income of telecommunication towers and others due to the transaction process and completeness of billing documents were in the approval verification process by its customers as of December 31, 2023 and 2022.

Details of accrued income by customer is as follows:

	2022	
8.937		<i>PT Indosat Tbk</i>
8.344		<i>PT Telekomunikasi Selular</i>
2.946		<i>Others (each below Rp 10,000)</i>
20.227		<i>Total</i>
(1.348)		<i>Less allowance for expected credit losses</i>
18.879		Net

Movements of allowance for expected credit losses of accrued income are as follows:

	2022	
6.578		<i>Balance at beginning of year</i>
-		<i>Reclassification (Note 6)</i>
1.344		<i>Provision during the year (Note 32)</i>
(5.033)		<i>Disposal of a subsidiary</i>
(1.541)		<i>Recovery during the year (Note 32)</i>
1.348		Balance at end of year

Management believes that allowance for expected credit losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollected of accrued income. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk on accrued income.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2023
Material konstruksi menara dan sarana penunjang, peralatan komunikasi dan suku cadang	7.840
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.108)
Neto	5.732

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal tahun	2.201
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	-
Pelepasan entitas anak	-
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	(93)
Saldo akhir tahun	2.108

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, pencurian, kerusakan dan risiko lainnya kepada PT Sunday Insurance Indonesia dan PT Chubb General Insurance Indonesia, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 173 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul.

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rincian beban dibayar di muka adalah sebagai berikut:

	2023
Perizinan dan lain-lain	3.032
Dikurangi bagian jangka pendek	(3.032)
Bagian jangka panjang	-

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. INVENTORIES

This account consists of:

	2022	
Construction materials for towers and supporting equipments, telecommunication equipment and spare parts	10.572	
Less allowance for impairment losses	(2.201)	
Net	8.371	

Movements of allowance for impairment losses of inventories are as follows:

	2022	
Balance at beginning of year	6.053	
Provision during the year (Note 32)	1.449	
Disposal of a subsidiary	(4.110)	
Recovery during the year (Note 32)	(1.191)	
Balance at end of year	2.201	

Inventories have been insured against fire, earthquake, thieves, damages and other risks to PT Sunday Insurance Indonesia and PT Chubb General Insurance Indonesia, third parties, with total coverage amounted to Rp 173 as of December 31, 2023 and 2022, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from the insured risks.

Management believes that allowance for impairment losses of inventories is adequate to cover possible impairment losses that may arise.

9. PREPAID EXPENSES

Details of prepaid expenses are as follows:

	2022	
Permits and others	35.829	
Less current portion	(11.924)	
Non-current portion	23.905	

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

Akun ini terutama merupakan pemeliharaan perangkat lunak dan sisanya adalah perizinan dan lain-lain merupakan biaya perolehan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") untuk menara dan sarana penunjang yang diamortisasi sesuai masa berlaku IMB.

10. UANG MUKA

Akun ini terutama merupakan uang muka yang diberikan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pengurusan aktivitas operasional Grup masing-masing sebesar Rp 8.969 dan Rp 20.301 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

11. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Hak atas tanah	6.110	-	-	(1.203)	4.907	Landrights Towers and supporting equipments
Menara dan sarana penunjang	10.244.341	11.313 231 ¹⁾	97.417	278.803	10.437.271	Buildings Transportable towers Networks, fiber optic and infrastructures
Bangunan Menara bergerak	11.319	-	-	1.203	12.522	Office equipment and furnitures
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	18.547	4.279	810	-	22.016	Motor vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	4.106	-	432	1.540	5.214	Indoor antenna
Kendaraan bermotor	65.549	1.659	9.074	(1.156)	56.978	Sub total
Antena indoor	2.401	1.500	-	171	4.072	Construction in progress
Sub jumlah	20.248	180	373	249	20.304	
Aset dalam penyelesaian	10.372.621	18.931 231 ¹⁾	108.106	279.607	10.563.284	
Jumlah	20.678	227.203 40.098 ²⁾	297	(279.607)	8.075	
	10.393.299	246.134 231 ¹⁾ 40.098 ²⁾	108.403	-	10.571.359	Total

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023 (lanjutan/continued)				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi Penyusutan					
Menara dan sarana penunjang	2.368.253	177.490	37.760	-	2.507.983
Bangunan	5.977	1.396	-	-	7.373
Menara bergerak	15.162	618	401	-	15.379
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	4.098	1	429	1.229	4.899
Peralatan dan perabotan kantor	57.458	3.557	8.965	(1.351)	50.699
Kendaraan bermotor	934	852	-	122	1.908
Antena indoor	18.717	526	367	-	18.876
Jumlah	2.470.599	184.440	47.922	-	2.607.117
Rugi Penurunan Nilai					
Menara dan sarana penunjang	176.063	1.616	30.869	(1.388)	145.422
Menara bergerak	3.337	-	-	1.388	4.725
Jumlah	179.400	1.616	30.869	-	150.147
Nilai Buku Neto	7.743.300				7.814.095

	2022						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Penambahan/ Additions	Pelepasan Entitas Anak/ Disposal of a Subsidiary	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan							
Hak atas tanah	6.110	-	-	-	-	-	6.110
Menara dan sarana penunjang	10.123.930	153.849	30.537 359 ¹⁾ 6.043 ³⁾	312.856	51.060	278.412 15.127 ³⁾	10.244.341
Bangunan	10.969	-	350	-	-	-	11.319
Menara bergerak	21.297	-	-	-	2.750	-	18.547
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	932.498	-	-	928.392	-	-	4.106
Peralatan dan perabotan kantor	75.427	464	1.882	10.471	1.753	-	65.549
Kendaraan bermotor	3.252	-	1.159	263	1.747	-	2.401
Antena indoor	35.968	-	211	11.906	4.162	137	20.248
Sub jumlah	11.209.451	154.313	34.139 359 ¹⁾ 6.043 ³⁾	1.263.888	61.472	278.549 15.127 ³⁾	10.372.621
Aset dalam penyelesaian	80.314	-	280.972	62.059	-	(278.549)	20.678
Jumlah	11.289.765	154.313	315.111 359 ¹⁾ 6.043 ³⁾	1.325.947	61.472	15.127 ³⁾	10.393.299

Accumulated Depreciation
Towers and supporting equipments
Buildings
Transportable towers
Networks,
fiber optic and infrastructures
Office equipment and furnitures
Motor vehicles
Indoor antenna
Total

Impairment Losses
Towers and supporting equipments
Transportable towers
Total
Net Book Value

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2022 (lanjutan/continued)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Penambahan/ Additions	Pelepasan Entitas Anak/ Disposal of a Subsidiary	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi Penyusutan							
Menara dan sarana penunjang	2.233.038	60.918	158.611	68.319	15.995	-	2.368.253
Bangunan	5.079	-	898	-	-	-	5.977
Menara bergerak	16.731	-	780	-	2.349	-	15.162
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	448.952	-	27	444.881	-	-	4.098
Peralatan dan perabotan kantor	58.882	292	8.104	8.082	1.738	-	57.458
Kendaraan bermotor	1.953	-	455	163	1.311	-	934
Antena indoor	29.610	-	1.412	8.654	3.651	-	18.717
Jumlah	2.794.245	61.210	170.287	530.099	25.044	-	2.470.599
Rugi Penurunan Nilai							
Menara dan sarana penunjang	261.177	6.541	396	62.679	32.692	3.320	176.063
Menara bergerak	3.337	-	-	-	-	-	3.337
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	16.586	-	-	16.586	-	-	-
Antena indoor	1.999	-	-	1.523	476	-	-
Aset dalam penyelesaian	7.577	-	-	4.257	-	(3.320)	-
Jumlah	290.676	6.541	396	85.045	33.168	-	179.400
Nilai Buku Neto	8.204.844						7.743.300

Accumulated Depreciation
Towers and supporting equipments
Buildings
Transportable towers
Networks,
fiber optic and infrastructures
Office equipment and furnitures
Motor vehicles
Indoor antenna
Total

Impairment Losses
Towers and supporting equipments
Transportable towers
Networks,
fiber optic and infrastructures
Indoor antenna
Construction in progress
Total
Net Book Value

Catatan/Notes:
1) Kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran menara (Catatan 23)/Capitalization of the estimated cost of dismantling of tower (Note 23).
2) Penambahan aset tetap melalui utang usaha/Addition of fixed assets through trade payables
3) Penambahan aset tetap melalui beban akrual/Addition of fixed assets through accrued expenses.
4) Reklasifikasi dari persediaan/Reclassification from inventories.

Rincian rugi pembongkaran/penghapusan/pelepasan aset tetap - neto adalah sebagai berikut: Details of loss on dismantling/written-off/disposal of fixed assets - net are as follows:

	2023	2022	
Harga perolehan	108.403	61.472	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(47.922)	(25.044)	Accumulated depreciation
Akumulasi penurunan nilai	(30.869)	(33.168)	Accumulated impairment
Nilai buku neto	29.612	3.260	Net book value
Hasil penjualan aset tetap	(781)	(898)	Proceeds from sale of fixed assets
Rugi pembongkaran/ penghapusan/pelepasan aset tetap - neto (Catatan 32)	28.831	2.362	Loss on dismantling/ written-off/disposal of fixed assets - net (Note 32)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dibebankan pada operasi sebagai berikut:

	2023
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	178.637
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	5.803
Jumlah	184.440

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tetap Grup dengan menentukan jumlah terpulihkan melalui perhitungan atas nilai yang dihasilkan dari penggunaan aset tetap yang dimiliki Grup dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.616 dan Rp 396 yang dibebankan ke laba rugi tahun berjalan (Catatan 32).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh aset tetap (kecuali hak atas tanah dan aset dalam penyelesaian) telah diasuransikan kepada PT Chubb General Insurance Indonesia dan PT KSK Insurance Indonesia, dan PT Lippo General Insurance Tbk, pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.822.657 dan Rp 2.900.904. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 58.550 dan Rp 63.115.

Rincian aset dalam penyelesaian dengan persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak serta estimasi penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

2023	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	2023
Menara dan sarana penunjang	25% - 75%	8.075	2024	Towers and supporting equipments
2022	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	2022
Menara dan sarana penunjang	25% - 75%	20.678	2023	Towers and supporting equipments

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. SEWA

a. Aset hak-guna

Akun ini merupakan aset hak-guna atas sewa tanah dan peralatan serta bangunan. Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama masa sewa.

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut:

2023							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pembatalan/ Termination	Rugi Penurunan Nilai/ Impairment Losses	Perubahan Estimasi Akuntansi/ Change in Accounting Estimate	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan							Acquisition cost
Tanah dan peralatan	1.659.983	404.596	(50.317)	7.359	6.576	2.028.197	Land and equipments
Bangunan	15.262	2.004	(14.262)	-	-	3.004	Buildings
Jumlah	1.675.245	406.600	(64.579)	7.359	6.576	2.031.201	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Tanah dan peralatan	583.516	228.508	(38.511)	-	157.460	930.973	Land and equipments
Bangunan	12.821	2.426	(13.906)	-	-	1.341	Buildings
Jumlah	596.337	230.934	(52.417)	-	157.460	932.314	Total
Nilai buku neto	1.078.908					1.098.887	Net book value
2022							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of a Subsidiary	Penambahan/ Additions	Pembatalan/ Termination	Rugi Penurunan Nilai/ Impairment Losses	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan							Acquisition cost
Tanah dan peralatan	1.763.342	31.543	223.634	(358.298)	(238)	1.659.983	Land and equipments
Bangunan	36.952	-	247	(21.937)	-	15.262	Buildings
Jumlah	1.800.294	31.543	223.881	(380.235)	(238)	1.675.245	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Tanah dan peralatan	412.020	10.117	215.242	(53.863)	-	583.516	Land and equipments
Bangunan	9.650	-	6.228	(3.057)	-	12.821	Buildings
Jumlah	421.670	10.117	221.470	(56.920)	-	596.337	Total
Nilai buku neto	1.378.624					1.078.908	Net book value

Penyusutan aset hak-guna dibebankan pada operasi dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	228.508	215.242	Cost of revenues (Note 28)
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	2.426	6.228	General and administrative expenses (Note 30)
Jumlah	230.934	221.470	Total

Depreciation of right-of-use assets was charged to operations with details as follows:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

12. SEWA (lanjutan)

a. Aset hak-guna (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset hak-guna Grup dengan menentukan jumlah terpulihkan melalui perhitungan atas nilai yang dihasilkan dari penggunaan aset hak-guna yang dimiliki Grup dan mengakui pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 7.359 untuk tahun 2023 serta membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset hak-guna sebesar Rp 238 untuk tahun 2022 yang dibukukan ke laba rugi (Catatan 32).

b. Liabilitas sewa

Berikut adalah nilai tercatat neto dari liabilitas sewa dan mutasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022	
Saldo awal	188.118	411.999	Beginning balance
Penambahan	406.600	223.881	Addition
Penambahan bunga (Catatan 31 dan 40)	14.627	18.317	Additional of interest (Notes 31 and 40)
Pembayaran	(386.711)	(159.867)	Payment
Perubahan estimasi akuntansi	(202.302)	-	Change in accounting estimate
Pembatalan (Catatan 40)	(19.330)	(127.987)	Termination (Note 40)
Akuisisi entitas anak (Catatan 40)	-	12.858	Acquisition of a subsidiary (Note 40)
Pelepasan entitas anak (Catatan 40)	-	(191.083)	Disposal of a subsidiary (Note 40)
Saldo akhir	1.002	188.118	Ending balance
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(59)	(19.508)	Less current maturities
Bagian jangka panjang	943	168.610	Non-current portion

Berikut adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sehubungan dengan sewa Grup:

	2023	2022	
Penyusutan (Catatan 28 dan 30)	230.934	221.470	Depreciation (Notes 28 and 30)
Beban bunga (Catatan 31)	14.627	18.317	Interest expense (Note 31)
Jumlah	245.561	239.787	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di tahun mendatang sebesar Rp 59 untuk satu tahun kedepan dan Rp 943 dalam 5 tahun mendatang.

12. LEASES (continued)

a. Right-of-use assets (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Group performed impairment testing on right-of-use assets by determining the recoverable amount by calculating the value in use of right-of-use assets owned by the Group and recognized recovery of impairment losses of Rp 7,359 for 2023 and providing provision for impairment losses for right-of-use assets of Rp 238 for 2022 which was recorded to profit or loss (Note 32).

b. Lease liabilities

The following are the carrying amount of lease liabilities and movements for the years ended December 31, 2023 and 2022:

	2023	2022	
Saldo awal	188.118	411.999	Beginning balance
Penambahan	406.600	223.881	Addition
Penambahan bunga (Catatan 31 dan 40)	14.627	18.317	Additional of interest (Notes 31 and 40)
Pembayaran	(386.711)	(159.867)	Payment
Perubahan estimasi akuntansi	(202.302)	-	Change in accounting estimate
Pembatalan (Catatan 40)	(19.330)	(127.987)	Termination (Note 40)
Akuisisi entitas anak (Catatan 40)	-	12.858	Acquisition of a subsidiary (Note 40)
Pelepasan entitas anak (Catatan 40)	-	(191.083)	Disposal of a subsidiary (Note 40)
Saldo akhir	1.002	188.118	Ending balance
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(59)	(19.508)	Less current maturities
Bagian jangka panjang	943	168.610	Non-current portion

The following are the amounts recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2023 and 2022 in connection with leases of the Group:

	2023	2022	
Penyusutan (Catatan 28 dan 30)	230.934	221.470	Depreciation (Notes 28 and 30)
Beban bunga (Catatan 31)	14.627	18.317	Interest expense (Note 31)
Jumlah	245.561	239.787	Total

As of December 31, 2023, the total estimated future minimum lease payments are Rp 59 for next one year and Rp 943 for 5 years.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

13. GOODWILL

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan bagian pihak pengakuisisi atas nilai wajar aset neto entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, goodwill disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai, apabila ada.

Rincian goodwill pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Entitas Anak:			Subsidiaries:
PT Sarana Inti Persada	16.460	16.460	PT Sarana Inti Persada
PT Global Indonesia			PT Global Indonesia
Komunikatama (Catatan 1c)	797	797	Komunikatama (Note 1c)
Jumlah	17.257	17.257	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen melakukan uji penurunan nilai atas unit penghasil kas dari entitas yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas goodwill tersebut.

Details of goodwill as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

As of December 31, 2023 and 2022, management performed impairment test on the cash generating unit of the acquired entity based on fair value less cost to sell and value in use using discounted cash flow projections.

As of December 31, 2023 and 2022, management believes that there was no impairment in the value of goodwill.

14. ASET TAKBERWUJUD

Akun ini terdiri dari:

14. INTANGIBLE ASSET

This account consists of:

	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Nilai tercatat					Carrying value
Hubungan pelanggan	49.047	-	-	49.047	Customer relationship
Akumulasi amortisasi					Accumulated amortization
Hubungan pelanggan	39.617	1.048	-	40.665	Customer relationship
Nilai Buku Neto	9.430			8.382	Net Book Value

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

2022					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Akuisisi Entitas Anak/ <i>Acquisition of a Subsidiary</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan Entitas Anak/ <i>Disposal of a Subsidiary</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Nilai tercatat					<i>Carrying value</i>
Hubungan pelanggan	58.436	10.390	-	(19.779)	49.047 <i>Customer relationship</i>
					<i>Accumulated amortization</i>
Akumulasi amortisasi					
Hubungan pelanggan	57.246	960	-	(18.589)	39.617 <i>Customer relationship</i>
Nilai Buku Neto	1.190				9.430 <i>Net Book Value</i>

Amortisasi aset takberwujud yang dibebankan sebagai beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.048 dan Rp 960 (Catatan 30).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset takberwujud.

14. INTANGIBLE ASSET (continued)

This account consists of: (continued)

Amortization of intangible asset charged to general and administrative expenses for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 1,048 and Rp 960, respectively (Note 30).

As of December 31, 2023 and 2022, management believes that there was no indication of impairment in the value of intangible asset.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022	
Piutang usaha tidak lancar:			<i>Non-current trade receivables:</i>
PT Internux	299.466	299.466	<i>PT Internux</i>
PT Bakrie Telecom Tbk	123.797	123.797	<i>PT Bakrie Telecom Tbk</i>
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Catatan 6)	4.311	4.311	<i>PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Note 6)</i>
Setoran jaminan	761	751	<i>Security deposits</i>
Jumlah	428.335	428.325	<i>Total</i>
Dikurangi: cadangan atas kerugian penurunan nilai	(427.574)	(427.574)	<i>Less: allowance for impairment losses</i>
Neto	761	751	<i>Net</i>

Piutang usaha tidak lancar

Piutang usaha tidak lancar merupakan piutang kepada PT Internux, PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang telah diputuskan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga. Grup telah membentuk cadangan penuh atas penurunan nilai piutang usaha tidak lancar tersebut.

15. OTHER NON-CURRENT ASSETS

This account consists of:

Non-current trade receivables

Non-current trade receivables represent receivables from PT Internux, PT Bakrie Telecom Tbk and PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia which has been granted under Temporary Suspension of Payment by the Commercial Court. The Group has been provide full provision for impairment on those non-current trade receivables.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. UTANG BANK

Rincian utang bank adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Utang bank jangka pendek			<i>Short-term bank loans</i>
<u>Pihak ketiga</u>			<u><i>Third parties</i></u>
Rupiah Indonesia			<i>Indonesian Rupiah</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	775.000	-	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
PT Bank BTPN Tbk	731.000	490.000	<i>PT Bank BTPN Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	156.000	-	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank HSBC Indonesia	14.348	-	<i>PT Bank HSBC Indonesia</i>
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	-	55.558	<i>JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch</i>
Dolar Amerika Serikat			<i>United States Dollar</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	416.232	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Jumlah pihak ketiga	2.092.580	545.558	<i>Total third parties</i>
<u>Pihak berelasi (Catatan 34)</u>			<u><i>Related party (Note 34)</i></u>
Rupiah Indonesia			<i>Indonesian Rupiah</i>
PT Bank Central Asia Tbk	110.000	270.000	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Jumlah	2.202.580	815.558	<i>Total</i>
Utang bank jangka panjang			<i>Long-term bank loans</i>
Rupiah Indonesia			<i>Indonesian Rupiah</i>
<u>Fasilitas Pinjaman</u>			<u><i>Special Transaction Loan</i></u>
<u>Transaksi Khusus</u>			<u><i>Facility</i></u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	405.804	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
<u>Fasilitas Term Loan</u>			<u><i>Term Loan Facility</i></u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	515.000	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta	-	515.000	<i>MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch</i>
PT Bank Mizuho Indonesia	-	515.000	<i>PT Bank Mizuho Indonesia</i>
PT Bank Permata Tbk	-	515.000	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank BTPN Tbk	-	515.000	<i>PT Bank BTPN Tbk</i>
Jumlah	405.804	2.575.000	<i>Total</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(14.919)	(19.535)	<i>Unamortized transaction costs</i>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(142.783)	(495.384)	<i>Less current maturities</i>
Bagian jangka panjang	248.102	2.060.081	<i>Non-current portion</i>

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek

- PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho")

Perusahaan, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"), PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), PT Komet Infra Nusantara ("KIN") dan Mizuho telah menandatangani Perjanjian Perubahan No. 1319/AMD/MZH/1221 tanggal 10 Desember 2021 sehubungan penambahan Perusahaan sebagai pihak peminjam pada fasilitas pinjaman *revolving* yang diperoleh dari Mizuho sebesar USD 34.500.000 atau jumlah yang setara dalam Rupiah Indonesia, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan oleh Perusahaan, Protelindo, Iforte dan KIN. Selanjutnya, perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Surat Perubahan No. 300/AMD/MZH/0423 tanggal 14 April 2023 sehubungan dengan perubahan limit fasilitas menjadi Rp 1.000.000 atau jumlah yang setara dalam Dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2024 dan dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo dan Perusahaan serta dikenakan suku bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 775.000 dan Rp Nihil.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman bergulir dari Mizuho sebesar Rp 400.000 melalui Perjanjian Fasilitas No. 487/LN/MZH/0523. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2025 dan dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo serta dikenakan suku bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas pinjaman tersebut belum digunakan oleh Perusahaan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans

- PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho")

The Company, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"), PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), PT Komet Infra Nusantara ("KIN") and Mizuho has signed the Amendment Agreement No. 1319/AMD/MZH/1221 dated December 10, 2021 in connection with the additional of the Company as a borrower for a revolving loan facility which obtained from Mizuho amounting to USD 34,500,000 or equivalent amounts in Indonesian Rupiah, so that the facility can be used by the Company, Protelindo, Iforte and KIN. Furthermore, this agreement has been amended several times, most recently by Amendment Letter No. 300/AMD/MZH/0423 dated April 14, 2023 in connection with the amendment of limit facility to become Rp 1,000,000 or equivalent amounts in United States Dollar. This facility will be due on April 14, 2024 and secured by corporate guarantee from Protelindo and the Company and bears annual interest rate of specific margin over JIBOR.

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp 775,000 and Rp Nil, respectively.

On May 30, 2023, the Company obtained revolving loan facility from Mizuho amounting Rp 400,000 through Facility Agreement No. 487/LN/MZH/0523. This facility will due on May 30, 2025 and secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate of specific margin over JIBOR.

As of December 31, 2023, the loan facility has not been used by the Company.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")

Pada tanggal 8 Desember 2021, Perusahaan, Protelindo dan Iforte memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* dari BTPN yang dapat digunakan bersama oleh Perusahaan, Protelindo dan Iforte sebesar Rp 1.500.000 dengan jumlah fasilitas yang dapat digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp 500.000. Selanjutnya, perjanjian tersebut telah diubah melalui Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0122 masing-masing tertanggal 24 Februari 2023 dan 4 September 2023, sehubungan dengan penambahan PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT") dan PT Varnion Technology Semesta ("VTS") sebagai pihak peminjam dan peningkatan nilai fasilitas menjadi Rp 2.500.000 dengan jumlah fasilitas yang dapat digunakan oleh Perusahaan sebesar Rp 750.000. Atas fasilitas ini, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan VTS bertanggung jawab secara tanggung renteng dan pinjaman ini juga memperoleh jaminan perusahaan dari Protelindo untuk pelunasan fasilitas pinjaman ini. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2024 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sado fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 731.000 dan Rp 490.000.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman bergulir dari BTPN sebesar Rp 900.000 melalui Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0819 yang dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas ini belum digunakan oleh Perusahaan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")

On December 8, 2021, the Company, Protelindo and Iforte obtained revolving loan facility from BTPN which jointly available for the Company, Protelindo and Iforte amounting to Rp 1,500,000 and total facility can be used by the Company amounting to Rp 500,000. Furthermore, the agreement was amended and restated through the Amendment and Restatement Agreement of Facility Agreement No. BTPN/NS/0122 dated February 24, 2023 and September 4, 2023, respectively, in connection with addition of PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT") and PT Varnion Technology Semesta ("VTS") as the borrowers and increase of loan limit facility to become Rp 2,500,000 with total facility can be used by the Company amounting to Rp 750,000. For this facility, the Company, Protelindo, Iforte, BIT and VTS are jointly and severally liable and this loan also covered with corporate guarantee from Protelindo for settlement of this loan facility. The loan facility will be due on February 29, 2024 and bears annual interest rate of specific margin over JIBOR.

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp 731,000 and Rp 490,000, respectively.

On May 30, 2023, the Company obtained revolving loan facility from BTPN amounting to Rp 900,000 through Facility Agreement No. BTPN/NS/0819 which secured by corporate guarantee from Protelindo. This loan facility will be due on December 31, 2026 and bears annual interest rate of specific margin over JIBOR.

As of December 31, 2023, this loan facility has not been used by the Company.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 13 Juni 2023, Perusahaan, Protelindo dan lforte memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari BNI sebesar Rp 1.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2025 dan dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo serta dikenakan suku bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 156.000.

- PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Pada tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan, Protelindo, lforte, BIT dan HSBC telah efektif menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211884/U/230310 sehubungan perpanjangan jangka waktu fasilitas, peningkatan nilai fasilitas menjadi Rp 850.000 dan penambahan Perusahaan serta BIT sebagai pihak peminjam pada seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh dari HSBC. Jangka waktu atas fasilitas tersebut adalah 1 (satu) tahun dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 14.348.

- JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta ("JPM")

Pada tanggal 9 November 2021, Perusahaan, Protelindo, lforte, KIN dan JPM telah efektif menandatangani Surat Perubahan Ketujuh sehubungan perpanjangan jangka waktu fasilitas dan penambahan Perusahaan sebagai pihak peminjam pada seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh dari JPM. Selanjutnya, perjanjian tersebut telah diubah melalui Surat Perubahan Kedelapan atas Surat Penawaran Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen tanggal 12 April 2022, sehubungan perpanjangan jangka waktu fasilitas dan penambahan BIT sebagai pihak peminjam pada seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh dari JPM.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

On June 13, 2023, the Company, Protelindo and lforte obtained short-term loan facility from BNI amounting to Rp 1,000,000. This facility is valid until June 13, 2025 and secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate of specific margin over JIBOR.

As of December 31, 2023, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp 156,000.

- PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

On June 23, 2023, the Company, Protelindo, lforte, BIT and HSBC have effectively signed the Corporate Facility Agreement No. JAK/211884/U/230310 in connection with the extension of loan period, increment facility amount to become Rp 850,000 and addition of the Company and BIT as borrowers to the whole loan facilities obtained from HSBC. The terms of this facility is 1 (one) year and bears annual interest rate of specific margin over JIBOR.

As of December 31, 2023, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp 14,348.

- JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch ("JPM")

On November 9, 2021, the Company, Protelindo, lforte, KIN and JPM have effectively signed the Seventh Amendment Agreement in connection with the extension of loan period and addition of the Company as borrowers to all loan facilities obtained from JPM. Furthermore, this facility was amend through the Eight Amendment Letter to the Uncommitted Bank Facilities Offer Letter dated April 12, 2022, in connection with the extension of loan period and addition of BIT as borrower to loan facilities obtained from JPM.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch ("JPM") (continued)

Furthermore, this facility was amended through the Ninth Amendment Letter to the Uncommitted Bank Facilities Offer Letter dated April 14, 2023, in connection with extension of loan period with the total amount of the facility shall not exceed Rp 700,000 and can be used by the Company, Protelindo, lforte, KIN and BIT. This facility will due on April 14, 2024. For this facility, the Company, Protelindo, lforte, KIN and BIT are jointly and severally liable for settlement of this loan facility. The interest rate for this facility is 125 basis points over the IndONIA or rate as notify by the Bank from time to time and agreed by the debtor.

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp Nil and Rp 55,558, respectively.

- PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga")

On November 2, 2023, the Company obtained short-term special transaction loan facility from Niaga amounted to Rp 475,000 or equivalents value under various currency. This facility is valid until June 5, 2027 and secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate of specific margin over BI 7-Days Reverse Repo.

As of December 31, 2023, the balance of loan facility used by the Company amounting to USD 27,000,000 or equivalent with Rp 416,232 which will be due on January 16, 2024.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta ("JPM") (lanjutan)

Selanjutnya, perjanjian tersebut telah diubah melalui Surat Perubahan Kesembilan atas Surat Penawaran Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen tanggal 14 April 2023, sehubungan dengan perpanjangan fasilitas dengan jumlah tidak melebihi Rp 700.000 dan dapat digunakan oleh Perusahaan, Protelindo, lforte KIN dan BIT. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2024. Atas fasilitas ini, Perusahaan, Protelindo, lforte, KIN dan BIT bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini. Suku bunga untuk fasilitas ini adalah 125 basis points di atas IndONIA atau suku bunga sebagaimana diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu yang disetujui oleh peminjam.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan Rp 55.558.

- PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga")

Pada tanggal 2 November 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman transaksi khusus jangka pendek dari Niaga sebesar Rp 475.000 atau nilai yang setara dalam berbagai mata uang. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2027 dan dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo serta dikenakan suku bunga tahunan sebesar BI 7-Days Reverse Repo ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebesar USD 27.000.000 atau setara dengan Rp 416.232 yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2024.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 9 Desember 2021, Perusahaan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT dan BCA telah efektif menandatangani Surat Perubahan Perjanjian Kesepuluh sehubungan dengan penambahan Perusahaan dan BIT sebagai pihak peminjam pada Fasilitas Pinjaman Money Market sebesar Rp 750.000 sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan oleh Perusahaan, Protelindo, Iforte, KIN dan BIT. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Kelimabelas atas Perjanjian Fasilitas No. 352/Add-KCK/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sehubungan dengan peningkatan nilai fasilitas keseluruhan menjadi sebesar Rp 9.400.000 dengan penambahan PT Quattro International ("QTR"), PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK") dan PT Varnion Technology Semesta ("VTS") sebagai pihak peminjam. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 September 2024 dan dikenakan suku bunga tahunan berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman BCA.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 110.000 dan Rp 270.000.

Atas fasilitas-fasilitas yang diterima dari BCA tersebut di atas, Perusahaan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR, GIK dan VTS bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini.

- MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta ("MUFG")

Pada tanggal 4 Oktober 2023, Perusahaan, Protelindo dan Iforte memperoleh fasilitas pinjaman bergulir dari MUFG sebesar Rp 1.350.000. Jangka waktu atas fasilitas tersebut adalah 1 (satu) tahun dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar ongkos pendanaan MUFG ditambah margin tertentu. Perusahaan, Protelindo dan Iforte, bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

On December 9, 2021, the Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT and BCA have effectively signed the Tenth Amendment Agreement in connection with the addition of the Company and BIT as borrowers to the Money Market Loan Facility amounting to Rp 750,000 so that the facility can be used by the Company, Protelindo, Iforte, KIN and BIT. The agreement has amended several times, the most recent by the Fifteenth Amendment to the Facility Agreement No. 352/Add-KCK/2023 dated October 5, 2023, in connection with increment total facility amount to become Rp 9,400,000 and the addition of PT Quattro International ("QTR"), PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK") and PT Varnion Technology Semesta ("VTS") as debtors. This facility shall valid until September 16, 2024 and bears annual interest rate based on BCA's interest rate.

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp 110,000 and Rp 270,000, respectively.

For those facilities from BCA above, the Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT, QTR, GIK and VTS are jointly and severally liable for settlement of those loan facilities.

- MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch ("MUFG")

On October 4, 2023, the Company, Protelindo and Iforte obtained revolving loan facility from MUFG amounting Rp 1,350,000. The terms of facility is 1 (one) year and bears annual interest rate of specific margin over MUFG's cost of fund. The Company, Protelindo and Iforte are jointly and severally liable for settlement of those loan facilities.

As of December 31, 2023, this loan facility has not been used by the Company.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 12 Desember 2023, Perusahaan, Protelindo, Iforte dan BIT memperoleh fasilitas pinjaman berulang dari Permata sebesar Rp 1.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku sampai dengan 17 Desember 2024 dan dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo serta dikenakan suku bunga tahunan berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman Permata.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan.

b. Utang bank jangka panjang

- Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, SH, Mcorp Admin, MCom, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 2 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman transaksi khusus dari PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga") sebesar Rp 441.667. Jangka waktu atas fasilitas tersebut adalah 48 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar BI 7-Days Reverse Repo ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 405.804.

- Fasilitas Term Loan

Pada tanggal 1 Desember 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk, MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank BTPN Tbk, masing-masing sebagai kreditur awal (mandated lead arrangers), dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen, dimana para kreditur awal menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Berjangka sejumlah Rp 5.250.000 yang dikenakan suku bunga sebesar JIBOR ditambah margin tertentu per tahun.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- PT Bank Permata Tbk ("Permata")

On December 12, 2023, the Company, Protelindo, Iforte and BIT obtained revolving loan facility from Permata amounting to Rp 1,000,000. This loan facility is valid until December 17, 2024 and secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate based on Permata's interest rate.

As of December 31, 2023, this loan facility has not been used by the Company.

b. Long-term bank loans

- Special Transaction Loan Facility

Based on Deed of Credit Agreement No. 44 dated May 29, 2023 as covered by Veronica Nataadmadja, SH, Mcorp Admin, MCom, Notary in Jakarta, which subsequently amended by Deed of Amendment and Restatement of Credit Agreement No. 02 dated November 2, 2023 as covered by the same Notary, the Company obtained special transaction loan facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga") amounted to Rp 441,667. The terms of this facility is 48 months after the first utilisation date of the facility. This loan facility is secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate of specific margin over BI 7-Days Reverse Repo.

As of December 31, 2023, the balance of loan facility used by the Company amounting to Rp 405,804.

- Term Loan Facility

On December 1, 2021, the Company signed a Facility Agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk, MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Permata Tbk and PT Bank BTPN Tbk, each as original lenders (mandated lead arrangers), and PT Bank CIMB Niaga Tbk as an agent, whereby the original lenders agreed to provide a Term Loan Facility of Rp 5,250,000 which bears an interest rate of specific margin over JIBOR per annum.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

16. UTANG BANK (lanjutan)

b. Utang bank jangka panjang (lanjutan)

- Fasilitas *Term Loan* (lanjutan)

Fasilitas pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran setiap 6 bulan mulai Juni 2022 sampai Desember 2026. Tujuan pinjaman ini terutama untuk pembayaran kembali seluruh saldo utang bank dan pembiayaan dari tahun 2020 yang tersisa pada tanggal pelunasan. Pelunasan seluruh pinjaman lama tersebut telah direalisasikan pada tanggal 8 Desember 2021. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah saldo fasilitas pinjaman yang digunakan oleh Perusahaan dari masing-masing bank kreditur di atas adalah sebesar Rp 2.575.000. Selanjutnya, Perusahaan telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 5 Juni 2023 dan memperoleh Surat Keterangan Lunas No. 519/S/LACT/LA/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, Perusahaan harus memenuhi pembatasan terhadap tindakan tertentu (*negative covenant*) serta harus memenuhi rasio keuangan seperti *running EBITDA to interest expense*.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Perusahaan sebagai bagian dari Grup Protelindo telah menandatangani Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi pada berbagai tanggal di tahun 2023 dan 2022 sehubungan dengan jaminan perusahaan yang diberikan Perusahaan kepada para kreditur terkait pinjaman yang diperoleh Grup Protelindo dari para kreditur antara lain yaitu Bank of China (Hong Kong) Limited, Mizuho, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, BCA, JPM, BTPN, BNI dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Biaya transaksi merupakan biaya ditanggungkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya transaksi yang dibebankan sebagai bagian "Biaya Keuangan" untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 4.851 dan Rp 4.400 (Catatan 31).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

16. BANK LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

- Term Loan Facility (continued)

The loan facility will be installed every 6 months starting from June 2022 until December 2026. The purpose of this loan is primarily for repayment of all outstanding banks and financing loans balance from 2020 which outstanding on the settlement date. The old outstanding loans have been fully settled on December 8, 2021. This loan facility is secured by corporate guarantee from Protelindo.

As of December 31, 2022, the total of loan facility used by the Company from each bank creditors above amounting to Rp 2,575,000. Furthermore, the Company has fully settled those loan facility on June 5, 2023 and obtain the Loan Settlement Letter No. 519/S/LACT/LA/VI/2023 dated June 19, 2023.

Based on loan agreement, the Company should comply with the restrictions on certain covenants (*negative covenants*) and has to meet certain financial ratios such as *running EBITDA to interest expense*.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has complied with the credit term and condition as stated in the loan agreement.

The Company as part of Protelindo Group has signed into a Corporate Guarantee and Indemnity Agreements on various date in 2023 and 2022 concerning the corporate guarantee provided by the Company to the respective lenders for the loans obtained by Protelindo Group from the lenders which are among others, Bank of China (Hong Kong) Limited, Mizuho, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, BCA, JPM, BTPN, BNI and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Transaction costs represents deferred charges arising from commitment fees, upfront fees and provision fees in relation to obtaining loans and is amortized over the respective life of the loan.

Amortization of transaction costs which charged as part of "Finance Costs" for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 4,851 and Rp 4,400, respectively (Note 31).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

17. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang usaha dari:

	2023	2022
Pihak ketiga		
PT Baruna Tele Nusa	4.879	1.265
PT Katrina Luxindo	3.142	906
PT Bumen Dutacipta Sarana	2.542	9.000
PT Anugerah Putera Sembilan	2.327	684
PT Citra Perdana Muda	2.067	-
PT Duta Hita Jaya	2.021	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2.000)	40.043	22.791
Jumlah pihak ketiga	57.021	34.646
Pihak berelasi (Catatan 34)	13.343	-
Jumlah	70.374	34.646

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat jaminan yang diberikan Grup atas utang usaha tersebut di atas.

18. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Lebih bayar pajak penghasilan badan: Perusahaan		
Tahun 2023 (Catatan 18c)	14.531	-
Tahun 2022 (Catatan 18c)	18.843	18.843
Tahun 2021	-	23.015
Entitas Anak		
Tahun 2023 (Catatan 18c)	82	-
Tahun 2022 (Catatan 18c)	275	275
Tahun 2021	209	610
Sub jumlah	33.940	42.743
Klaim restitusi pajak: Perusahaan		
Pajak pertambahan nilai: Tahun 2016	-	45.945
Pajak penghasilan pasal 26: Tahun 2015	83.439	57.749
Tahun 2016	5.260	-
Pajak lainnya	310	56
Sub jumlah	89.009	103.750

17. TRADE PAYABLES

This account represent trade payables from:

	2023	2022
Third parties		
PT Baruna Tele Nusa	1.265	906
PT Katrina Luxindo	906	9.000
PT Bumen Dutacipta Sarana	9.000	684
PT Anugerah Putera Sembilan	684	-
PT Citra Perdana Muda	-	-
PT Duta Hita Jaya	-	-
Others (each below Rp 2,000)	22.791	22.791
Total third parties	34.646	34.646
Related parties (Note 34)	-	-
Total	34.646	34.646

As of December 31, 2023 and 2022, there were no guarantee provided by the Group on the trade payables above.

18. TAXATION

a. Prepaid Taxes

This account consists of:

	2023	2022
Overpayment of corporate income tax: The Company		
Year 2023 (Note 18c)	-	-
Year 2022 (Note 18c)	18.843	18.843
Year 2021	23.015	23.015
Subsidiaries		
Year 2023 (Note 18c)	-	-
Year 2022 (Note 18c)	275	275
Year 2021	610	610
Sub total	42.743	42.743
Claim for tax refund: The Company		
Value added tax: Year 2016	45.945	45.945
Income tax article 26: Year 2015	57.749	57.749
Year 2016	-	-
Other tax	56	56
Sub total	103.750	103.750

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Akun ini terdiri dari (lanjutan):

	2023	2022	
Klaim restitusi pajak (lanjutan):			Claim for tax refund (continued):
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Tahun 2021	1.624	-	Year 2021
Tahun 2020	93	113	Year 2020
Tahun 2019	308	308	Year 2019
Tahun 2018	345	345	Year 2018
Tahun 2016	3.256	3.256	Year 2016
Pajak penghasilan pasal 23:			Income tax article 23:
Tahun 2021	423	-	Year 2021
Tahun 2020	263	263	Year 2020
Pajak penghasilan pasal 4(2):			Income tax article 4(2):
Tahun 2020	115	150	Year 2020
Pajak pertambahan nilai:			Value added tax:
Tahun 2021	2	-	Year 2021
Tahun 2020	1.968	2.012	Year 2020
Sub jumlah	97.406	110.197	Sub total
Pajak pertambahan nilai - Entitas Anak	476	-	Value added tax - Subsidiaries
Jumlah	131.822	152.940	Total

Perusahaan

- Tahun 2022

Pada tanggal 21 Juli 2023, Perusahaan telah menerima surat perintah pemeriksaan pajak untuk Pajak Penghasilan ("PPh") Badan tahun 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil pemeriksaan pajak belum diterima oleh Perusahaan.

- Tahun 2021

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh Badan tahun 2021 sebesar Rp 23.070 dan Surat Ketetapan Kurang Bayar ("SKPKB") atas PPh pasal 23 sebesar Rp 4.

Pada tanggal 11 September 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian SKPLB tersebut sebesar Rp 23.066 (setelah dikurangkan dengan SKPKB sebesar Rp 4).

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

This account consists of (continued):

	2023	2022	
Klaim restitusi pajak (lanjutan):			Claim for tax refund (continued):
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Tahun 2021	1.624	-	Year 2021
Tahun 2020	93	113	Year 2020
Tahun 2019	308	308	Year 2019
Tahun 2018	345	345	Year 2018
Tahun 2016	3.256	3.256	Year 2016
Pajak penghasilan pasal 23:			Income tax article 23:
Tahun 2021	423	-	Year 2021
Tahun 2020	263	263	Year 2020
Pajak penghasilan pasal 4(2):			Income tax article 4(2):
Tahun 2020	115	150	Year 2020
Pajak pertambahan nilai:			Value added tax:
Tahun 2021	2	-	Year 2021
Tahun 2020	1.968	2.012	Year 2020
Sub jumlah	97.406	110.197	Sub total
Pajak pertambahan nilai - Entitas Anak	476	-	Value added tax - Subsidiaries
Jumlah	131.822	152.940	Total

The Company

- Year 2022

On July 21, 2023, the Company received the tax audit instruction letter of Corporate Income Tax ("CIT") for 2022. Until the completion date of these consolidated financial statements, the result of tax audit has not yet received by the Company.

- Year 2021

On August 4 2023, the Directorate General of Taxes ("DGT") issued Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for 2021 CIT amounted to Rp 23,070 and Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") of income tax article 23 amounted to Rp 4.

On September 11, 2023, the Company has received the refund of these SKPLB of Rp 23,066 (after deducted with SKPKB of Rp 4).

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- Tahun 2017

Pada tanggal 26 April 2019, DJP menerbitkan SKPKB atas PPh pasal 26 periode Desember 2017 sebesar Rp 9.951 (termasuk denda sebesar Rp 2.412). SKPKB ini belum dibayar oleh Perusahaan.

Pada tanggal 21 Juni 2019, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2020, Perusahaan menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPKB tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2020.

Pada tanggal 28 Juli 2023, Perusahaan telah menerima hasil putusan banding yang mengabulkan seluruhnya atas permohonan banding yang diajukan atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 13 November 2023, Perusahaan telah menerima Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 November 2023 yang diajukan oleh DJP melalui Pengadilan Pajak atas hasil putusan banding PPh Pasal 26 tahun 2017.

Pada tanggal 8 Desember 2023, Perusahaan telah mengajukan Surat Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan Peninjauan Kembali belum diterima.

- Tahun 2016

Pada tanggal 29 Agustus 2018, DJP menerbitkan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan PPh pasal 26 periode Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 45.945 (termasuk denda sebesar Rp 22.972) dan Rp 67.214 (termasuk denda sebesar Rp 19.204). Perusahaan telah membayar sebesar Rp 45.945 dan sisa atas SKPKB sebesar Rp 67.214 belum dibayar.

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

The Company (continued)

- Year 2017

On April 26, 2019, the DGT issued SKPKB of December 2017 income tax article 26 amounting to Rp 9,951 (include penalty of Rp 2,412). This SKPKB has not yet paid by the Company.

On June 21, 2019, the Company has submitted its objection letter for the SKPKB. Furthermore, on May 11, 2020, the Company received letter from DGT which rejected the objection of the SKPKB.

For the tax objection rejection, the Company has submitted an appeal request to the Tax Court on July 13, 2020.

On July 28, 2023, the Company received the results of the appeal decision which fully approved the appeal request on those SKPKB.

On November 13, 2023, the Company received a Notice of Judicial Review and Delivery of Judicial Review Memorandum dated November 10, 2023 which was submitted by the DGT through the Tax Court regarding the results of the 2017 income tax article 26 appeal decision.

On December 8, 2023, the Company submitted a Letter of Counter-Review Memorandum to the Supreme Court through the Tax Court. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Judicial Review decision has not been received.

- Year 2016

On August 29, 2018, the DGT issued SKPKB of Value Added Tax ("VAT") and income tax article 26 for December 2016, which amounting to Rp 45,945 (include penalty of Rp 22,972) and Rp 67,214 (include penalty of Rp 19,204), respectively. The Company has paid of Rp 45,945 and the remaining balance of SKPKB of Rp 67,214 has not yet paid.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- Tahun 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 26 November 2018, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 2019, Perusahaan menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPKB tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2020.

Pada tanggal 28 Juli 2023, Perusahaan telah menerima hasil putusan banding yang menerima sebagian banding dan menyesuaikan nilai SKPKB PPh pasal 26 menjadi sebesar Rp 5.260 dan mengabulkan seluruhnya atas banding SKPKB PPN menjadi Rp Nihil.

Pada tanggal 15 September 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian atas SKPKB PPN sebesar Rp 40.635 (setelah dikurangkan dengan hasil banding atas SKPKB PPh pasal 26 sebesar Rp 5.260).

Pada tanggal 13 November 2023, Perusahaan telah menerima Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 November 2023 yang diajukan oleh DJP melalui Pengadilan Pajak atas hasil putusan banding PPh Pasal 26 dan PPN tahun 2016.

Pada tanggal 8 Desember 2023, Perusahaan telah mengajukan Surat Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan Peninjauan Kembali belum diterima.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. TAXATION (continued)

a. *Prepaid Taxes (continued)*

The Company (continued)

- Year 2016 (continued)

On November 26, 2018, the Company has submitted its objection letter for the SKPKB. Furthermore, on November 20, 2019, the Company received letter from DGT which rejected the objection of SKPKB.

For the tax objection rejection, the Company has submitted the request for appealing process to the Tax Court on February 18, 2020.

On July 28, 2023, the Company received the results of the appeal decision which partially approved the appeal and adjusting the amount of SKPKB of income tax article 26 to become of Rp 5,260 and fully approved the appeal on SKPKB of VAT to become of Rp Nil.

On September 15, 2023, the Company received a refund of the SKPKB of VAT amounting to Rp 40,635 (after deducted with the appeal results on SKPKB of income tax article 26 of Rp 5,260).

On November 13, 2023, the Company received a Notice of Judicial Review and Delivery of Judicial Review Memorandum dated November 10, 2023 which was submitted by the DGT through the Tax Court regarding the results of the 2016 income tax article 26 and VAT appeal decision.

On December 8, 2023, the Company submitted a Letter of Counter-Review Memorandum to the Supreme Court through the Tax Court. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Judicial Review decision has not been received.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- Tahun 2015

Pada tanggal 28 Oktober 2019, DJP menerbitkan SKPKB atas PPh pasal 26 periode Maret sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp 101.635 (termasuk denda sebesar Rp 32.963). Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk SKPKB tersebut sebesar Rp 37.972 pada tanggal 16 Januari 2020.

Selain itu, Perusahaan juga menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") atas PPh pasal 26 bulan Agustus 2015 sebesar Rp 19.777 yang telah dibayar melalui pemotongan atas pengembalian SKPLB PPh Badan tahun 2011 sebesar Rp 34.972 sehingga jumlah pengembalian neto SKPLB PPh Badan tahun 2011 menjadi sebesar Rp 15.195.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB dan STP dengan jumlah sebesar Rp 57.749. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2021, Perusahaan menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPKB dan STP tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Maret 2021. Pada tanggal 29 Maret 2023, Perusahaan telah menerima hasil putusan banding yang menerima sebagian banding atas SKPKB sebesar Rp 37.972. Selanjutnya, Perusahaan telah menerima pengembalian hasil banding pada tanggal 25 Mei 2023 dan 13 Juni 2023 serta melakukan pembayaran sisa SKPKB yang tidak disetujui sebesar Rp 63.662 pada tanggal 5 April 2023.

Pada tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan banding tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menerima keputusan Peninjauan Kembali.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. TAXATION (continued)

a. *Prepaid Taxes (continued)*

The Company (continued)

- Year 2015

On October 28, 2019, the DGT issued SKPKB of income tax article 26 for period from March to December 2015 amounting to Rp 101,635 (including penalty of Rp 32,963). The Company has paid these SKPKB amounting to Rp 37,972 on January 16, 2020.

In addition, the Company also received the Tax Collection Letter ("STP") of income tax article 26 for August 2015 amounting to Rp 19,777 which has been paid through the deduction of 2011 CIT SKPLB refund of Rp 34,972 therefore the total net refund of 2011 CIT SKPLB become to Rp 15,195.

On December 31, 2019, the Company has submitted an objection to the SKPKB and STP with total amount of Rp 57,749. Subsequently, on January 7, 2021, the Company received a letter from the DGT which rejected the objection to those SKPKB and STP.

For the tax objection rejection, the Company has submitted an appeal request to the Tax Court on March 10, 2021. On March 29, 2023, the Company received the results of the appeal decision which partially approved an appeal on SKPKB of Rp 37,972. Furthermore, the Company has received the refund on appeal result on May 25, 2023 and June 13, 2023 and paid the remaining unapproved SKPKB of Rp 63,662 on April 5, 2023.

On June 23, 2023, the Company has submitted a Judicial Review to the Supreme Court on those appeal decision. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not received the Judicial Review decision.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Entitas Anak

- Tahun 2022

Surat perintah pemeriksaan telah diterbitkan oleh DJP pada tanggal 22 Juni 2023 untuk pemeriksaan PPh Badan GIK tahun 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil pemeriksaan pajak belum diterima oleh GIK.

- Tahun 2021

Pada tanggal 26 April 2022, SIP telah melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2021 dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp 209.

Pada tanggal 24 Juli 2023, SIP telah menerima hasil pemeriksaan pajak berupa SKPKB PPh Badan tahun 2021 sebesar Rp 1.624, SKPKB PPh pasal 23 sebesar Rp 423 dan SKPKB PPN sebesar Rp 2. Pada tanggal 22 Agustus 2023, SIP telah membayar seluruh SKPKB tersebut.

Pada tanggal 11 Oktober 2023, SIP telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2023, SIP juga mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan PPN. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan keberatan belum diterima.

Pada tanggal 26 Oktober 2023, GIK telah menerima hasil pemeriksaan pajak tahun 2021 berupa SKPLB PPh Badan sebesar Rp 401 dan SKPKB PPh pasal 26 sebesar Rp 41. Pengembalian SKPLB sebesar Rp 360 (setelah dikurangkan dengan SKPKB) telah diterima oleh GIK pada tanggal 8 November 2023.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

Subsidiaries

- Year 2022

Tax audit instruction letter has been issued by the DGT on June 22, 2023 for the audit of GIK's CIT year 2022. As of the completion date of the consolidated financial statements, the tax audit results have not been received by GIK.

- Year 2021

On April 26, 2022, SIP has reported its Annual CIT Return year 2021 with overpaid amount of Rp 209.

On July 24, 2023, SIP has received the tax audit results of SKPKB of 2021 CIT of Rp 1,624, SKPKB of income tax article 23 of Rp 423 and SKPKB of VAT of Rp 2. On August 22, 2023, all the outstanding SKPKB has been fully paid by SIP.

On October 11, 2023, SIP has submitted a letter of objection regarding the SKPKB of CIT. Afterwards, on October 16, 2023, SIP also submitted a letter of objection over the SKPKB of income tax article 23 and VAT. As of the completion date of the consolidated financial statements, the objection decision has not been received.

On October 26, 2023, GIK received the results of the 2021 tax audit of SKPLB of CIT of Rp 401 and SKPKB of income tax article 26 of Rp 41. The refund of SKPLB of Rp 360 (after deducted with SKPKB) has been received by GIK on November 8, 2023.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

- Tahun 2020

Pada tanggal 15 Agustus 2022, SIP menerima SKPLB PPh Badan tahun 2020 sebesar Rp 327 dan SKPKB PPN, STP PPN, SKPKB PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4(2) masing-masing sebesar Rp 1.903, Rp 109, Rp 263 dan Rp 150.

Pada tanggal 1 September 2022, SIP telah menerima pengembalian atas PPh Badan 2020 sebesar Rp 218 setelah dikurangi STP PPN sebesar Rp 109. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2022, SIP telah melunasi SKPKB PPN, PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4(2) tersebut.

Pada tanggal 3 Oktober 2022, SIP telah mengajukan keberatan atas SKPLB dan SKPKB tersebut di atas.

Pada tanggal 5 Juli 2023, SIP telah menerima hasil keberatan SKPLB PPh Badan yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan dan menyesuaikan lebih bayar PPh Badan dari Rp 327 menjadi Rp 347. SIP telah menerima pengembalian sebesar Rp 20 pada tanggal 22 Agustus 2023.

Pada tanggal yang sama, SIP telah menerima hasil keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan SKPKB PPh pasal 4(2) dari Rp 150 menjadi Rp 115 dan SKPKB PPN dari Rp 1.903 menjadi Rp 1.859 serta menolak keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan STP PPN. Pada tanggal 22 Agustus 2023, SIP telah menerima pengembalian atas hasil keberatan tersebut.

Pada tanggal 2 Oktober 2023, SIP mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas hasil keberatan yang ditolak dan diterima sebagian. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding belum diterima oleh SIP.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

Subsidiaries (continued)

- Year 2020

On August 15, 2022, SIP received SKPLB of 2020 CIT amounting to Rp 327 and SKPKB of VAT, STP VAT, SKPKB of income tax article 23 and income tax article 4(2) which amounting Rp 1,903, Rp 109, Rp 263 and Rp 150, respectively.

On September 1, 2022, SIP received tax refund of CIT 2020 amounting Rp 218 after deducted with STP VAT amounting Rp 109. Afterwards, on September 8, 2022, SIP has fully paid the SKPKB VAT, income tax article 23 and income tax article 4(2).

On October 3, 2022, SIP has been submitted objection on those SKPLB and SKPKB.

On July 5, 2023, SIP has received the result of objection on SKPLB CIT which partially approved the objection request and adjusting the overpayment of CIT from Rp 327 to become Rp 347. SIP has received a refund of Rp 20 on August 22, 2023.

On the same date, SIP has received the result of objections which partially approved the objections of SKPKB of income tax article 4(2) from Rp 150 to become of Rp 115 and SKPKB of VAT from Rp 1,903 to become of Rp 1,859 and rejected the objection of SKPKB of income tax article 23 and STP VAT. On August 22, 2023, SIP has received the refund on the objection results.

On October 2, 2023, SIP has submitted an appeal to the Tax Court regarding the rejected and partially approved objections. As of the completion date of the consolidated financial statements, the appeal decision has not been received by SIP.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

- Tahun 2019

Pada tanggal 30 Juni 2021, SIP menerima SKPLB PPh Badan tahun 2019 yang menyesuaikan tagihan restitusi PPh Badan dari Rp 1.931 menjadi Rp 1.623, sehingga sisa restitusi pajak tersebut sebesar Rp 308. Pada tanggal 23 Agustus 2021, SIP telah menerima pengembalian atas PPh Badan 2019 sebesar Rp 1.602 setelah dikurangi utang pajak sebesar Rp 21. Pada tanggal 31 Agustus 2021, SIP telah mengajukan keberatan atas SKLPB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2022, SIP menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPLB tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, SIP telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Agustus 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding belum diterima oleh SIP.

- Tahun 2018

Pada tanggal 24 Juni 2020, SIP menerima SKPLB PPh Badan tahun 2018 yang menyesuaikan tagihan restitusi PPh Badan dari Rp 1.119 menjadi Rp 774. Pada tanggal 17 Juli 2020, SIP telah menerima pengembalian atas PPh Badan 2018.

Pada tanggal 1 September 2020, SIP telah mengajukan keberatan atas selisih nilai restitusi pajak sebesar Rp 345. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2021, SIP menerima surat dari DJP yang menolak keberatan tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, SIP telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 13 September 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding belum diterima oleh SIP.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. TAXATION (continued)

a. *Prepaid Taxes (continued)*

Subsidiaries (continued)

- Year 2019

On June 30, 2021, SIP has received SKPLB of 2019 CIT which adjusting claim of CIT refund from Rp 1,931 to Rp 1,623, thus the remaining tax refund is Rp 308. On August 23, 2021, SIP has received refund of CIT 2019 amounted to Rp 1,602 after deducted with tax payable of Rp 21. On August 31, 2021, SIP has submitted its objection letter on the SKPLB. Furthermore, on July 1, 2022, SIP received letter from the DGT which rejected the objection of those SKPLB.

For the tax objection rejection, SIP has submitted an appeal request to the Tax Court on August 31, 2022. As of the completion date of the consolidated financial statements, the appeal decision has not been received by SIP.

- Year 2018

On June 24, 2020, SIP received SKPLB of 2018 CIT which adjusting claim of CIT refund from Rp 1,119 to Rp 774. On July 17, 2020, SIP has received refund of CIT 2018.

On September 1, 2020, SIP has submitted its objection letter on the difference between claim and tax refund received amounting to Rp 345. Furthermore, on July 1, 2021, SIP received letter from DGT which rejected the above objection.

For the tax objection rejection, SIP has submitted an appeal request to the Tax Court on September 13, 2021. Until the completion date of these consolidated financial statements, the result of tax appeal is not yet received by SIP.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. TAXATION (continued)

a. *Prepaid Taxes (continued)*

Subsidiaries (continued)

- Year 2016

On November 30, 2021, GIK has received SKPKB of 2016 CIT which amounting to Rp 3,256. These SKPKB has been paid by GIK on January 19, 2022.

On February 24, 2022, GIK has submitted an objection on those SKPKB. Furthermore, on December 22, 2022, the DGT has rejected the objection on the SKPKB.

For the tax objection rejection, on March 21, 2023, GIK has submitted an appeal request to the Tax Court. As of the completion date of the consolidated financial statements, the appeal decision has not been received by GIK.

b. *Taxes Payable*

This account represents taxes payable as follows:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

- Tahun 2016

Pada tanggal 30 November 2021, GIK menerima SKPKB atas PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp 3.256. SKPKB tersebut telah dibayar oleh GIK pada tanggal 19 Januari 2022.

Pada tanggal 24 Februari 2022, GIK telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2022, DJP menolak keberatan atas SKPKB tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, pada tanggal 21 Maret 2023, GIK telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding belum diterima oleh GIK.

b. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak sebagai berikut:

	2023	2022	
Perusahaan:			<i>The Company:</i>
Pajak pertambahan nilai	65.734	39.020	<i>Value added tax</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
Pasal 4(2)	4.512	2.082	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	168	1.079	<i>Article 21</i>
Pasal 23	32	56	<i>Article 23</i>
Sub jumlah	70.446	42.237	<i>Sub total</i>
Entitas Anak:			<i>Subsidiaries:</i>
Pajak pertambahan nilai	-	922	<i>Value added tax</i>
Pajak penghasilan			<i>Income tax</i>
Pasal 4(2)	79	433	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	100	31	<i>Article 21</i>
Pasal 23	1	2	<i>Article 23</i>
Sub jumlah	180	1.388	<i>Sub total</i>
Jumlah	70.626	43.625	Total

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan terdiri dari:

	2023	2022
Pajak kini:		
Perusahaan	-	-
Entitas Anak	-	-
Jumlah pajak kini	-	-
Pajak tangguhan:		
Perusahaan	80.114	(49.397)
Entitas Anak	2.265	3.299
Jumlah pajak tangguhan	82.379	(46.098)
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	82.379	(46.098)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.147.404	1.065.439
Eliminasi	1.783	668.691
Laba konsolidasian sebelum pajak final dan pajak penghasilan	1.149.187	1.734.130
Dikurang:		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan Entitas Anak	(11.901)	(485)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - Perusahaan	1.137.286	1.733.645
Beda temporer:		
Penyusutan aset tetap	512.269	261.098
Beda temporer tanpa pajak tangguhan:		
Amortisasi dan penyusutan yang dapat dikurangkan	(548.549)	(882.341)
Imbalan pasca kerja	(584)	3.895
Sub jumlah	(549.133)	(878.446)

18. TAXATION (continued)

c. Income Tax

Income tax benefit (expense) consists of:

Current tax:	
The Company	-
Subsidiaries	-
Total current tax	-
Deferred tax:	
The Company	(49.397)
Subsidiaries	3.299
Total deferred tax	(46.098)
Income tax benefit (expense) - net	(46.098)

Current tax

Reconciliation between income before final tax and income tax, as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Income before final tax and income tax as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	1.147.404
Eliminations	1.783
Consolidated income before final tax and income tax	1.149.187
Less:	
Income before final tax and income tax of Subsidiaries	(11.901)
Income before final tax and income tax - the Company	1.137.286
Temporary difference:	
Depreciation of fixed assets	512.269
Temporary differences with no deferred tax:	
Deductible amortization and depreciation	(548.549)
Post-employment benefits	(584)
Sub total	(549.133)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023	2022
Beda tetap:		
Pendapatan yang dikenakan pajak yang bersifat final	(994.165)	(808.446)
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak yang bersifat final	408.708	610.208
Gaji dan kesejahteraan karyawan	9.134	19.682
Lain-lain	1.702	2.828
Sub jumlah	(574.622)	(175.728)

Taksiran laba kena pajak tahun berjalan - Perusahaan	525.801	940.569
Akumulasi rugi fiskal awal tahun - Perusahaan	(1.045.225)	(1.985.794)
Penyesuaian rugi fiskal	(198.243)	-
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun - Perusahaan	(717.667)	(1.045.225)
Taksiran rugi fiskal tahun berjalan - Entitas Anak	-	(6.308)
Beban pajak penghasilan kini		
Perusahaan	-	-
Entitas Anak	-	-
Jumlah	-	-

Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:		
Perusahaan		
Pasal 23	14.531	18.843
Entitas Anak		
Pasal 23	82	275
Jumlah	14.613	19.118
Lebih bayar pajak penghasilan badan (Catatan 18a):		
Perusahaan	14.531	18.843
Entitas Anak	82	275
Jumlah	14.613	19.118

Permanent differences:
Income subjected to final tax
Expenses related to income subjected to final tax
Salaries and employee welfare
Others
Sub total

Estimated taxable income for current year - the Company
Accumulated fiscal loss at beginning of year - the Company
Adjustment on fiscal loss
Accumulated fiscal loss at end of year - the Company

Estimated fiscal loss for current year - Subsidiaries

Current income tax expense
The Company
Subsidiaries

Total

Less prepaid income tax:
The Company
Article 23
Subsidiaries
Article 23

Total

Overpayment of corporate income tax (Note 18a):
The Company
Subsidiaries

Total

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023	2022	
Pajak final:			Final tax:
Perusahaan	99.416	80.845	The Company
Entitas Anak	2.026	2.153	Subsidiaries
Jumlah	101.442	82.998	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.147.404	1.065.439	Income before final tax and income tax as presented In the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Eliminasi	1.783	668.691	Eliminations
Laba konsolidasian sebelum pajak final dan pajak penghasilan	1.149.187	1.734.130	Consolidated income before final tax and income tax
Dikurang: laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan Entitas Anak	(11.901)	(485)	Less: income before final tax and income tax of Subsidiaries
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - Perusahaan	1.137.286	1.733.645	Income before final tax and income tax - the Company
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif efektif	(250.203)	(381.402)	Income tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak penghasilan dari beda tetap	126.417	38.660	Effect of income tax from permanent differences
Pengaruh pajak penghasilan dari beda temporer tanpa pajak tangguhan	120.809	193.258	Effect of income tax from temporary differences with no deferred tax
Pengaruh pajak penghasilan dari beda temporer dengan pajak tangguhan	198.768	(106.838)	Effect of income tax from temporary differences with deferred tax
Kompensasi rugi fiskal	(115.677)	206.925	Fiscal loss compensation

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023	2022	
Manfaat (beban) pajak penghasilan:			Income tax (expense) benefit:
Perusahaan	80.114	(49.397)	The Company
Entitas Anak	2.265	3.299	Subsidiaries
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	82.379	(46.098)	Income tax benefit (expenses) - net

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Rincian liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	31 Desember/ December 31, 2023	
Liabilitas pajak tangguhan:				Deferred tax liabilities:
Perusahaan				The Company
Penyusutan aset tetap	(824.772)	195.791	(628.981)	Depreciation of fixed assets
Rugi fiskal	229.950	(115.677)	114.273	Fiscal loss
Entitas Anak				Subsidiaries
Penyusutan aset tetap	(2.960)	2.265	(695)	Depreciation of fixed assets
Jumlah	(597.782)	82.379	(515.403)	Total

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Pelepasan entitas anak/Disposal of a subsidiary	31 Desember/ December 31, 2022	
Liabilitas pajak tangguhan:					Deferred tax liabilities:
Perusahaan					The Company
Penyusutan aset tetap	(882.213)	57.441	-	(824.772)	Depreciation of fixed assets
Rugi fiskal	336.788	(106.838)	-	229.950	Fiscal loss
Entitas Anak					Subsidiaries
Imbalan pasca kerja	2.012	-	(2.012)	-	Post-employment benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	826	-	(826)	-	Allowance for impairment losses of inventories
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	199	-	(199)	-	Allowance for expected credit losses of trade receivables
Penyusutan aset tetap	(19.520)	3.299	13.261	(2.960)	Depreciation of fixed assets
Perbedaan aset hak guna dan liabilitas sewa	(593)	-	593	-	Difference of right-of-use assets and lease liabilities
Jumlah	(562.501)	(46.098)	10.817	(597.782)	Total

Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semula 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

18. TAXATION (continued)

c. Income Tax (continued)

Deferred tax (continued)

Details of deferred tax liabilities of the Group as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self assessment. Consolidated tax returns are not permitted under the taxation laws in Indonesia. Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, the Directorate General of Tax may assess and amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

Tax Rates

On October 29, 2021, the Government issued a Law of the Republic Indonesia Number 7 Year 2021 about “Harmonization of Tax Regulations” which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax (VAT) from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, revoke the reduction of the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously down to 20% to become fixed at 22% starting from fiscal year 2022.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. BEBAN AKRUAL

Akun ini merupakan akrual untuk:

	2023	2022	
Bunga dan biaya keuangan	10.190	49.965	Interest and financing costs
Estimasi biaya penyelesaian pembangunan aset tetap	9.346	47.962	Estimated completion cost of construction of fixed assets
Pemeliharaan dan perbaikan	8.452	7.575	Repair and maintenance
Jasa profesional	1.936	1.292	Professional fees
Lain-lain	18.698	10.755	Others
Jumlah	48.622	117.549	Total

20. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022	
PT XL Axiata Tbk	606.679	438.422	PT XL Axiata Tbk
PT Indosat Tbk	137.632	122.949	PT Indosat Tbk
PT Telekomunikasi Selular	19.510	19.101	PT Telekomunikasi Selular
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	3.053	958	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah	766.874	581.430	Total

21. IMBALAN KERJA

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 18.678 dan Rp 19.154 merupakan liabilitas atas gaji, bonus dan tunjangan.

b. Liabilitas imbalan pasca kerja

Grup membukukan liabilitas imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup menghitung liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk mengimplementasikan provisi pada ayat 81 dan ayat 185 (b) dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

19. ACCRUED EXPENSES

This account represents accruals for:

20. UNEARNED REVENUES

This account represents cash received from customers related to tower lease agreement and recognized as revenue upon service provided to customers with details as follows:

21. EMPLOYEE BENEFITS

a. Short-term employee benefits liability

Short-term employee benefits liabilities as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp 18,678 and Rp 19,154, respectively, which represents salaries, bonuses and allowances.

b. Post-employment benefits liability

The Group records post-employment benefits liability to its entitled employees based on prevailing regulation.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group's post-employment benefits liability is calculated in accordance with the Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

21. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagaimana berdasarkan penilaian aktuarial independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Steven & Mourits, berdasarkan laporannya masing-masing tanggal 4 Maret 2024 untuk tahun 2023 dan 24 Februari 2023 untuk tahun 2022, dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban (manfaat) imbalan pasca kerja

	2023	2022
Biaya jasa kini	3.808	3.419
Biaya bunga	1.693	1.797
Biaya jasa lalu	5	331
Biaya terminasi	13	2.982
Penyesuaian atas penerapan IFRIC AD	-	(2.073)
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - masuk	3.901	689
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - keluar	(10.020)	(3.172)
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	66	-
Jumlah	(534)	3.973

Liabilitas imbalan pasca kerja

	2023	2022
Nilai kini kewajiban	21.352	25.370

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Post-employment benefits liability (continued)

The following tables summarize the Group's post-employment benefits expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and post employment benefits liability recognized in the consolidated statement of financial position, as determined by independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") Steven & Mourits, based on its report dated March 4, 2024 for 2023 and February 24, 2023 for 2022, respectively, using the projected unit credit method.

Post-employment benefits expense (benefit)

	2023	2022	
Biaya jasa kini	3.419	3.419	Current service cost
Biaya bunga	1.797	1.797	Interest cost
Biaya jasa lalu	5	331	Past service cost
Biaya terminasi	2.982	2.982	Termination cost
Penyesuaian atas penerapan IFRIC AD	(2.073)	(2.073)	Adjustment due to IFRIC AD implementation
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - masuk	689	689	Adjustment of employees transfer in liabilities
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - keluar	(3.172)	(3.172)	Adjustment of employees transfer out liabilities
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	-	-	Adjustment of past services liabilities
Jumlah	3.973	3.973	Total

Post-employment benefits liability

	2023	2022	
Nilai kini kewajiban	21.352	25.370	Present value of obligation

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

21. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	25.370	38.473
Pelepasan entitas anak	-	(10.204)
Biaya jasa kini	3.808	3.419
Biaya bunga	1.693	1.797
Biaya jasa lalu	5	331
Biaya terminasi	13	2.982
Pembayaran manfaat	(1.251)	(6.336)
Penyesuaian atas penerapan IFRIC AD	-	(2.073)
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	66	-
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - masuk	3.901	689
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - keluar	(10.020)	(3.172)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:		
Penyesuaian pengalaman	(1.081)	1.795
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1.152)	(2.331)
Saldo akhir	21.352	25.370

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	25.370	38.473
Pelepasan entitas anak	-	(10.204)
Beban (manfaat) tahun berjalan (Catatan 30)	(534)	3.973
Pembayaran manfaat	(1.251)	(6.336)
Keuntungan aktuarial	(2.233)	(536)
Saldo akhir	21.352	25.370

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Post-employment benefits liability (continued)

Movements of the present value of obligation for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	38.473	38.473	Beginning balance
Pelepasan entitas anak	(10.204)	(10.204)	Disposal of a subsidiary
Biaya jasa kini	3.419	3.419	Current service cost
Biaya bunga	1.797	1.797	Interest cost
Biaya jasa lalu	331	331	Past service cost
Biaya terminasi	2.982	2.982	Termination cost
Pembayaran manfaat	(6.336)	(6.336)	Benefits payment
Penyesuaian atas penerapan IFRIC AD	(2.073)	(2.073)	Adjustment due to IFRIC AD implementation
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	-	-	Adjustment of past services liabilities
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - masuk	689	689	Adjustment of employees transfer in liabilities
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - keluar	(3.172)	(3.172)	Adjustment of employees transfer out liabilities
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:			Remeasurement of net defined benefits obligation:
Penyesuaian pengalaman	1.795	1.795	Experience adjustment
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.331)	(2.331)	Actuarial gain arising from change in financial assumptions
Saldo akhir	25.370	25.370	Ending balance

Movements of post-employment benefits liability for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	38.473	38.473	Beginning balance
Pelepasan entitas anak	(10.204)	(10.204)	Disposal of a subsidiary
Beban (manfaat) tahun berjalan (Catatan 30)	3.973	3.973	Current year expense (benefits) (Note 30)
Pembayaran manfaat	(6.336)	(6.336)	Benefits payment
Keuntungan aktuarial	(536)	(536)	Actuarial gain
Saldo akhir	25.370	25.370	Ending balance

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

21. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Keuntungan aktuarial kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal	14.884
Pelepasan entitas anak	-
Keuntungan aktuarial tahun berjalan	2.233
Saldo akhir	17.117

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023
Tingkat diskonto	6,00% - 7,05%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	8%
Usia pensiun normal	57 Tahun/Years
Tingkat mortalita	TMI IV 2019
Tingkat cacat	10% TMI IV 2019

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 13,71 sampai dengan 16,72 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2023
Kurang dari satu tahun	814
Antara satu dan lima tahun	7.752
Antara lima dan sepuluh tahun	15.715
Lebih dari sepuluh tahun	139.098
Jumlah	163.379

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023
Kenaikan 1%	(1.861)
Penurunan 1%	2.220

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Post-employment benefits liability (continued)

The accumulated actuarial gain which are recognized in other comprehensive income are as follows:

	2022	
Saldo awal	17.112	Beginning balance
Pelepasan entitas anak	(2.764)	Disposal of a subsidiary
Keuntungan aktuarial tahun berjalan	536	Actuarial gain for current year
Saldo akhir	14.884	Ending balance

The principal assumptions used in determining post-employment benefits liability as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2022	
Tingkat diskonto	7,30% - 7,50%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	7%	Annual rate of salary increase
Usia pensiun normal	57 Tahun/Years	Normal pension age
Tingkat mortalita	TMI IV 2019	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMI IV 2019	Disability rate

The weighted average duration of the defined benefits obligation is 13.71 to 16.72 years.

The expected maturity analysis of the present value of defined benefits obligation is as follows:

	2022	
Kurang dari satu tahun	1.782	Less than one year
Antara satu dan lima tahun	14.297	Between one and five years
Antara lima dan sepuluh tahun	15.347	Between five and ten years
Lebih dari sepuluh tahun	166.011	More than ten years
Jumlah	197.437	Total

The following table illustrates the sensitivity of a possible change in market interest rate, with other variables considered as constant, of present value of obligation as of December 31, 2023 and 2022:

	2022	
Kenaikan 1%	(2.058)	Increase 1%
Penurunan 1%	2.339	Decrease 1%

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

21. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Grup telah mereviu asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan pasca kerja Grup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

22. UTANG DERIVATIF

Pada tanggal 14 November 2023, Perusahaan menandatangani kontrak swap valuta asing dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai sarana lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang asing sehubungan dengan pinjaman bank (Catatan 16).

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2023:

Kontrak swap valuta asing	Jumlah nosional (USD)/ Notional amount (USD)	Nilai wajar/ Fair value	Cross currency swap contracts
PT Bank CIMB Niaga Tbk	27.000.000	(7.595)	PT Bank CIMB Niaga Tbk

23. PROVISI JANGKA PANJANG

Grup mengakui liabilitas diestimasi atas biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi atas menara dan sarana penunjang pada saat berakhirnya periode sewa atas tanah dan bangunan, dimana menara tersebut berada.

Mutasi provisi jangka panjang adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo awal	22.796	20.907	Ending balance
Provisi tahun berjalan	231	359	Provision during the year
Beban bunga (Catatan 31)	1.667	612	Interest expense (Note 31)
Realisasi tahun berjalan	(287)	(47)	Realization during the year
Akuisisi entitas anak	-	2.316	Acquisitions of a subsidiary
Pelepasan entitas anak	-	(1.351)	Disposal of a subsidiary
Saldo akhir	24.407	22.796	Ending balance

22. DERIVATIVE PAYABLE

On November 14, 2023, the Company entered into cross currency swap contract with PT Bank CIMB Niaga Tbk to hedge fluctuation on foreign currency in relation to the bank loan (Note 16).

Information related to the cross currency swap contract and its fair values as of December 31, 2023 are as follows:

23. LONG-TERM PROVISION

The Group recognized the estimated liability for dismantling, removing and site restoration costs of towers and supporting equipment at the end of the lease period of the land and building, where these towers are located.

Movements of long-term provision are as follows:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PROVISI JANGKA PANJANG (lanjutan)

Provisi estimasi biaya pembongkaran menara masing-masing sebesar Rp 231 pada tahun 2023 dan Rp 359 pada tahun 2022 dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap (Catatan 11).

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 7,43% dan 31,25 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

24. MODAL SAHAM

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan (PT Raya Saham Registra), susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/Total	Shareholders
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.137.099.654	99,96%	113.710	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	480.044	0,04%	48	Public (each below 5%)
Jumlah	1.137.579.698	100,00%	113.758	Total

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022	
Agio saham	3.589.495	3.589.495	Share premium
Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali (Catatan 1c)	1.310.952	1.310.952	Difference in value of transactions with entities under common control (Note 1c)
Aset pengampunan pajak	276	276	Tax amnesty assets
Jumlah	4.900.723	4.900.723	Total

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Rincian penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo awal	14.884	16.283	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan	2.233	536	Additional during the year
Pelepasan entitas anak	-	(1.935)	Disposal of a subsidiary
Saldo akhir	17.117	14.884	Ending balance

27. PENDAPATAN

Akun ini merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dari pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 1.892.085 pada tahun 2023 dan Rp 1.888.257 pada tahun 2022.

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Pendapatan/Revenues		Persentase dari jumlah pendapatan/Percentage of total revenues		
	2023	2022	2023	2022	
Pelanggan					Customers
PT XL Axiata Tbk	683.861	705.451	36%	37%	PT XL Axiata Tbk
PT Indosat Tbk	662.634	630.953	35%	33%	PT Indosat Tbk
PT Telekomunikasi Selular	342.165	348.636	18%	19%	PT Telekomunikasi Selular
PT Smart Telecom	185.651	190.968	10%	10%	PT Smart Telecom
Jumlah	1.874.311	1.876.008	99%	99%	Total

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Penyusutan dan amortisasi:			Depreciation and amortization:
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	228.508	215.242	Depreciation of right-of-use assets (Note 12)
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	178.637	160.772	Depreciation of fixed assets (Note 11)
Lain-lain	1.194	11.388	Others
Sub jumlah	408.339	387.402	Sub total

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023	2022
Beban pokok pendapatan lainnya:		
Pemeliharaan dan perbaikan	38.672	38.505
Jasa keamanan dan lain-lain	18.225	17.294
Sub jumlah	56.897	55.799
Jumlah	465.236	443.201

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian.

29. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

Rincian beban penjualan dan pemasaran adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Jamuan dan representasi	2.058	1.453
Perjalanan dinas	1.418	2.712
Sewa kendaraan	-	1.030
Lain-lain	458	1.426
Jumlah	3.934	6.621

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Gaji dan kesejahteraan karyawan	64.903	76.868
Perlengkapan kantor	6.568	5.554
Jasa profesional	6.406	2.047
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	5.803	9.515
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	2.426	6.228
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 14)	1.048	960
Amortisasi asuransi	168	2.522
Imbalan pasca kerja (Catatan 21b)	(534)	3.973
Lain-lain	11.566	21.352
Jumlah	98.354	129.019

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

28. COST OF REVENUES (continued)

Detail of cost of revenues are as follows: (continued)

	2023	2022
Other cost of revenues:		
Repair and maintenance	38.672	38.505
Security services and others	18.225	17.294
Sub total	56.897	55.799
Total	465.236	443.201

For the years ended December 31, 2023 and 2022, there were no purchases made from any single supplier with a total cumulative amount exceeding 10% of the consolidated revenues.

29. SELLING AND MARKETING EXPENSES

Details of selling and marketing expenses are as follows:

	2023	2022
Entertainment and representation	2.058	1.453
Business trip	1.418	2.712
Vehicle rental	-	1.030
Others	458	1.426
Total	3.934	6.621

30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Details of general and administrative expenses are as follows:

	2023	2022
Salaries and employee welfare	64.903	76.868
Office supplies	6.568	5.554
Professional fees	6.406	2.047
Depreciation of fixed assets (Note 11)	5.803	9.515
Depreciation of right-of-use assets (Note 12)	2.426	6.228
Amortization of intangible asset (Note 14)	1.048	960
Amortization of insurance	168	2.522
Post-employment benefits (Note 21b)	(534)	3.973
Others	11.566	21.352
Total	98.354	129.019

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

31. BIAYA KEUANGAN

Rincian biaya keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Beban bunga pinjaman bank:		
Pihak ketiga	176.892	210.599
Pihak berelasi (Catatan 34)	10.058	4.204
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 12)	14.627	18.317
Amortisasi biaya transaksi (Catatan 16)	4.851	4.400
Beban bunga provisi jangka panjang (Catatan 23)	1.667	612
Jumlah	208.095	238.132

32. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO

Rincian pendapatan (beban) lain-lain - neto adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Pemulihan kerugian penurunan nilai aset hak-guna (Catatan 12)	7.359	-
Pemulihan kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	93	1.191
Rugi pembongkaran/ penghapusan pelepasan aset tetap - neto (Catatan 11)	(28.831)	(2.362)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset tetap (Catatan 11)	(1.616)	(396)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(262)	1.460
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha (Catatan 6)	-	(2.123)
Penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	-	(1.449)
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian pendapatan yang masih akan diterima (Catatan 7)	-	(1.344)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset hak-guna (Catatan 12)	-	(238)
Pemulihan kerugian kredit ekspektasian pendapatan yang masih akan diterima (Catatan 7)	-	1.541
Lain-lain - neto	53.926	(3.787)
Jumlah	30.669	(7.507)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)			PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2023 and For The Year Then Ended (Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)		
33. LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			33. BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY		
Perhitungan laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebagai berikut:			The computation of basic earnings per share attributable to owners of the parent entity are as follows:		
	2023	2022			
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.128.336	936.343	Income for the year attributable to owners of the parent entity		
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)	1.137.579.698	1.137.579.698	Weighted average number of shares outstanding (shares)		
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	992	823	Basic earnings per share attributable to owners of the parent entity (full amount)		
34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI			34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES		
Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.			In the normal course of business, the Group entered into transactions with related parties in view of their common ownership and management. All transactions with related parties are conducted based on policies and terms agreed upon by both parties.		
Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi			Nature of relationship with related parties		
a. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") adalah entitas induk Perusahaan. b. PT Bank Central Asia Tbk adalah entitas di bawah pengendalian yang sama. c. PT BIT Teknologi Nusantara adalah entitas di bawah pengendalian yang sama. d. PT Bach Multi Global ("BMG") adalah entitas asosiasi dari Protelindo Grup. e. PT Bach Multi Infrastruktur adalah entitas anak dari BMG. f. Manajemen kunci meliputi Direksi Grup.			a. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") is the Company's parent entity. b. PT Bank Central Asia Tbk is an entity under common control. c. PT BIT Teknologi Nusantara is an entity under common control. d. PT Bach Multi Global ("BMG") is an associate entity of Protelindo Group. e. PT Bach Multi Infrastruktur is a subsidiary of BMG. f. Key management includes the members of the Group's Board of Directors.		
Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi			Balances and transactions with related parties		
	2023	2022			
Kas dan bank (Catatan 4)			Cash on hand and in banks (Note 4)		
PT Bank Central Asia Tbk	954	470	PT Bank Central Asia Tbk		
Persentase dari jumlah aset	0,01%	0,00%	Percentage to total assets		
Piutang lain-lain			Other receivables		
PT BIT Teknologi Nusantara	2	2	PT BIT Teknologi Nusantara		
Persentase dari jumlah aset	0,00%	0,00%	Percentage to total assets		

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)			PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2023 and For The Year Then Ended (Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)		
34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)			34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)		
Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)			Balances and transactions with related parties (continued)		
	2023	2022			
Utang bank (Catatan 16)			Bank loans (Note 16)		
PT Bank Central Asia Tbk	110.000	270.000	PT Bank Central Asia Tbk		
Persentase dari jumlah liabilitas	2,64%	5,38%	Percentage to total liabilities		
Utang usaha (Catatan 17)			Trade payables (Note 17)		
PT Bach Multi Global	10.305	-	PT Bach Multi Global		
PT Bach Multi Infrastruktur	3.038	-	PT Bach Multi Infrastruktur		
Total	13.343	-	Total		
Persentase dari jumlah liabilitas	0,32%	-	Percentage to total liabilities		
Utang lain-lain			Other payables		
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	518	1.866	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia		
Persentase dari jumlah liabilitas	0,01%	0,04%	Percentage to total liabilities		
Beban pokok pendapatan lainnya			Other cost of revenues		
PT Bach Multi Global	15.801	-	PT Bach Multi Global		
PT Bach Multi Infrastruktur	5.027	-	PT Bach Multi Infrastruktur		
Total	20.828	-	Total		
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan	4,48%	-	Percentage to total cost of revenue		
Biaya keuangan (Catatan 31)			Finance costs (Note 31)		
PT Bank Central Asia Tbk	10.058	4.204	PT Bank Central Asia Tbk		
Persentase dari jumlah biaya keuangan	4,83%	1,77%	Percentage to total finance costs		
Kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi:			Compensation to Boards of Commissioners and Directors:		
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits		
Dewan Komisaris	410	715	Board of Commissioners		
Direksi	9.665	8.115	Board of Directors		
Sub jumlah	10.075	8.830	Sub total		
Imbalan kerja jangka panjang			Long-term employee benefits		
Imbalan pasca kerja	(5.586)	829	Post-employment benefits		
Jumlah	4.489	9.659	Total		

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

All transactions with related parties have been disclosed in the consolidated financial statements.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

35. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perjanjian Sewa

- PT Indosat Tbk (“Indosat”)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 sampai 2021, Grup dan Indosat menandatangani beberapa perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengenai penyewaan perangkat telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pada berbagai tanggal antara 2010 sampai 2021, Grup mengadakan perjanjian dengan Indosat dimana Grup akan menyediakan lokasi dan fasilitas untuk pengoperasian peralatan komunikasi Indosat. Perjanjian ini berlaku 10 (sepuluh) tahun untuk infrastruktur *in building coverage* dan 10 sampai 12 (sepuluh sampai dua belas) tahun untuk penyewaan menara dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

- PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 sampai 2023, Grup dan Telkomsel menandatangani perjanjian sewa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengenai sewa menara milik Grup. Perjanjian-perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

- PT Smartfren Telecom Tbk (“Smart”)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 sampai 2019, Grup dan Smart menandatangani perjanjian utama, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengenai sewa menyewa fasilitas infrastruktur telekomunikasi. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun untuk infrastruktur *in building coverage* dan 10 (sepuluh) tahun untuk penyewaan menara terhitung sejak tanggal Berita Acara yang disepakati kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Lease Agreements

- PT Indosat Tbk (“Indosat”)

On various dates between 2009 up to 2021, the Group and Indosat signed agreements, as amended several times, regarding lease of telecommunication equipments owned by the Group. This agreement is valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

On various dates between 2010 up to 2021, the Group entered into agreement with Indosat whereas the Group shall provide locations and facilities to Indosat for the operations of its communication equipments. The agreement is valid for 10 (ten) years for in building coverage infrastructures and 10 until 12 (ten until twelve) years for tower lease and can be extended with the consent of both parties.

- PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”)

On various dates between 2009 up to 2023, the Group and Telkomsel signed lease agreement, as amended several times, regarding the leasing of the Group's towers. These agreements are valid for 8 (eight) to 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

- PT Smartfren Telecom Tbk (“Smart”)

On various dates between 2009 up to 2019, the Group and Smart entered into master agreement, as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure facilities. The agreement is valid for 5 (five) years for infrastructure in building coverage and 10 (ten) years for tower lease from the date of Agreed Minutes (Berita Acara) by both parties and can be extended with the consent of both parties.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Lease Agreements (continued)

- PT XL Axiata Tbk (“XL”)

On various dates between 2009 up to 2022, the Group and XL entered into lease agreements, as amended several times, of telecommunication infrastructure owned by the Group. The agreements are valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

- PT Dayamitra Telekomunikasi (“Mitratel”)

Based on Asset Purchase Agreement dated December 31, 2014 between the Company and XL, XL's entitlement based on Master Lease Agreement for Tower Infrastructures to lease the space to Mitratel was assigned to Company. The Site Lease Agreement is for 10 (ten) years and can be extended for 5 (five) years additional term based on mutual consent of the parties.

- PT Primacom Interbuana (“Primacom”)

Based on the Master Lease Agreement dated October 9, 2023 between the Company and Primacom regarding the lease of space at the Company's site. The term of the agreement commenced on June 10, 2022 and will remain in effect unless terminated earlier.

Total estimated future minimum rental receivables for the preceding lease agreements are as follows:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

35. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perjanjian Sewa (lanjutan)

- PT XL Axiata Tbk (“XL”)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 sampai 2022, Grup dan XL mengadakan perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dalam rangka sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

- PT Dayamitra Telekomunikasi (“Mitratel”)

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Aset pada tanggal 31 Desember 2014 antara Perusahaan dengan XL, hak-hak XL berdasarkan Perjanjian Utama Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk menyewakan ruang kepada Mitratel dialihkan kepada Perusahaan. Jangka Waktu Perjanjian Sewa Site adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.

- PT Primacom Interbuana (“Primacom”)

Berdasarkan Perjanjian Sewa Induk pada tanggal 9 Oktober 2023 antara Perusahaan dengan Primacom mengenai sewa ruang pada site milik Perusahaan. Jangka waktu perjanjian dimulai pada tanggal 10 Juni 2022 dan akan tetap berlaku kecuali diakhiri lebih awal.

Jumlah estimasi piutang sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa di atas adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Sampai dengan satu tahun	1.716.561	2.182.909	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun	5.923.735	4.478.514	More than one year to five years
Lebih dari lima tahun	4.747.806	1.479.963	More than five years
Jumlah estimasi piutang sewa minimum di masa depan	12.388.102	8.141.386	Total estimated future minimum rental receivables

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	Mata Uang/ Currency	2023		2022		
		Jumlah/ Amount	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	Jumlah/ Amount	Setara dengan Rupiah/ Equivalent to Rupiah	
Aset Moneter						Monetary Asset
Kas dan bank	USD	1.975	30	2.051	32	Cash on hand and in banks
Liabilitas Moneter						Monetary Liabilities
Utang bank	USD	(27.000.000)	(416.232)	-	-	Bank loans
Utang lain-lain	USD	-	-	(350.000)	(5.506)	Other payables
Liabilitas moneter - neto			(416.202)		(5.474)	Monetary liabilities - net

37. INFORMASI SEGMENT

Grup memiliki satu segmen yaitu penyewaan menara telekomunikasi. Tidak ada segmen operasi yang digabung untuk membentuk segmen operasi yang dilaporkan di atas.

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antara segmen operasi dan dicatat sebesar nilai pasar.

37. SEGMENT INFORMATION

The Group have one segment that is telecommunication tower rental. No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segment.

Management as the operating decision maker monitors the operating results of business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the consolidated financial statements. Segment revenues and expenses include transactions between operating segments and are accounted at market value.

	2023			
	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya/ Other Service	Jumlah/ Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan sewa	1.892.085	-	1.892.085	Rental income
Jasa lainnya	-	-	-	Other services
Jumlah pendapatan	1.892.085	-	1.892.085	Total revenues
Laba bruto	1.426.849	-	1.426.849	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(3.934)	-	(3.934)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(98.354)	-	(98.354)	General and administrative expenses
Laba usaha	1.324.561	-	1.324.561	Income from operations
Pendapatan keuangan	269	-	269	Finance income
Biaya keuangan	(208.095)	-	(208.095)	Finance costs
Beban lain-lain - neto	30.669	-	30.669	Other operating expenses - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	1.147.404	-	1.147.404	Income before final tax and income tax

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

37. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2023 (lanjutan/continued)			
	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya/ Other Service	Jumlah/ Total	
Pajak final	(101.442)	-	(101.442)	Final tax
Laba sebelum pajak penghasilan	1.045.962	-	1.045.962	Income before income tax
Pajak penghasilan	82.379	-	82.379	Income tax
Laba tahun berjalan	1.128.341	-	1.128.341	Income for the year
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Jumlah aset segmen	9.885.582	-	9.885.582	Total segment assets
Jumlah liabilitas segmen	4.173.933	-	4.173.933	Total segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	1.639.238	-	1.639.238	Net cash flows provided by operating activities
Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(245.353)	-	(245.353)	Net cash flows used in investing activities
Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1.390.992)	-	(1.390.992)	Net cash flows used in financing activities
	2022			
	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya/ Other Service	Jumlah/ Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan sewa	1.888.257	-	1.888.257	Rental income
Jasa lainnya	-	-	-	Other services
Jumlah pendapatan	1.888.257	-	1.888.257	Total revenues
Laba bruto	1.445.056	-	1.445.056	Gross income
Beban penjualan dan pemasaran	(6.621)	-	(6.621)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	(129.019)	-	(129.019)	General and administrative expenses
Laba usaha	1.309.416	-	1.309.416	Income from operations
Pendapatan keuangan	1.662	-	1.662	Finance income
Biaya keuangan	(238.132)	-	(238.132)	Finance costs
Beban lain-lain - neto	(7.507)	-	(7.507)	Other operating expenses - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	1.065.439	-	1.065.439	Income before final tax and income tax
Pajak final	(82.998)	-	(82.998)	Final tax
Laba sebelum pajak penghasilan	982.441	-	982.441	Income before income tax
Pajak penghasilan	(46.098)	-	(46.098)	Income tax
Laba tahun berjalan	936.343	-	936.343	Income for the year

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

37. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

37. SEGMENT INFORMATION (continued)

	2022 (lanjutan/continued)			
	Sewa Menara/ Tower Rental	Jasa Lainnya/ Other Service	Jumlah/ Total	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Jumlah aset segmen	9.601.515	-	9.601.515	Total segment assets
Jumlah liabilitas segmen	5.020.440	-	5.020.440	Total segment liabilities
INFORMASI LAINNYA				OTHER INFORMATION
Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	1.608.359	-	1.608.359	Net cash flows provided by operating activities
Arus kas netto diperoleh dari aktivitas investasi	1.032.637	-	1.032.637	Net cash flows provided by investing activities
Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(3.234.328)	-	(3.234.328)	Net cash flows used in financing activities

38. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Kas dan bank, bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual mendekati estimasi nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek.

Aset keuangan tidak lancar dan liabilitas keuangan jangka panjang

- Nilai wajar aset tidak lancar lainnya - setoran jaminan diasumsikan sama dengan nilai terutanganya karena tidak mempunyai persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tahun pelaporan.
- Nilai wajar utang bank dan liabilitas sewa dinilai menggunakan arus kas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar.

38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair values, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of the Group's financial instruments:

Current financial assets and current financial liabilities

Cash on hand and in banks, restricted cash in bank, trade receivables, accrued income, other receivables, trade payables, other payables and accrued expenses approximate their carrying values due to their short-term nature.

Non current financial assets and long-term financial liabilities

- The fair value of other non-current assets - security deposits are assumed to be the same as their original principal amounts because they have no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the reporting year.
- The fair value of bank loans and lease liabilities are calculated using discounted cash flows at market interest rate.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022	
Aset Keuangan			Financial Assets
Aset keuangan lancar			Current financial assets
Kas dan bank	5.253	2.361	Cash on hand and in banks
Bank yang dibatasi penggunaannya	8	-	Restricted cash in bank
Piutang usaha - neto	754.552	512.434	Trade receivables - net
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	34.218	18.879	Accrued income - net
Piutang lain-lain	2.614	754	Other receivables
Jumlah aset keuangan lancar	796.645	534.428	Total current financial assets
Aset keuangan tidak lancar			Non-current financial asset
Aset tidak lancar lainnya	761	751	Other non-current assets
Jumlah aset keuangan	797.406	535.179	Total financial assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek			Current financial liabilities
Utang bank	2.202.580	815.558	Bank loans
Utang usaha	70.364	34.646	Trade payables
Utang lain-lain	35.545	18.947	Other payables
Beban akrual	48.622	117.549	Accrued expenses
Utang derivatif	7.595	-	Derivative payable
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			Current maturities of long-term debts:
Liabilitas sewa	59	19.508	Lease liabilities
Utang bank	142.783	495.384	Bank loans
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	2.507.548	1.501.592	Total current financial liabilities
Liabilitas keuangan jangka panjang			Non-current financial liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			Long-term debts - net of current maturities:
Liabilitas sewa	943	168.610	Lease liabilities
Utang bank	248.102	2.060.081	Bank loans
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	249.045	2.228.691	Total non-current financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	2.756.593	3.730.283	Total financial liabilities

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN

Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan utama Grup terdiri dari utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas sewa. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk mendukung operasi Grup. Grup memiliki kas dan bank, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya - setoran jaminan yang timbul dari kegiatan usahanya.

Grup terpengaruh terhadap risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Grup mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Manajemen senior Grup didukung oleh Komite Risiko Keuangan yang memberikan saran atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Grup. Komite Risiko Keuangan memberikan kepastian kepada manajemen senior Grup bahwa aktivitas keuangan Grup dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan profil risiko yang ada. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank dan pembiayaan dengan suku bunga mengambang. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif, jika diperlukan.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

	2023	2022
Liabilitas keuangan		
Tanpa bunga	154.531	163.839
Bunga mengambang	2.601.060	3.371.023
Bunga tetap	1.002	195.421
Jumlah liabilitas keuangan	2.756.593	3.730.283

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES

Risk Management

The main financial liabilities of the Group include bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and lease liabilities. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the Group operations. The Group also has cash on hand and in banks, trade receivables, accrued income, other receivables and other non-current assets - security deposits that raise directly from their operations.

The Group are exposed to interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group's senior management oversees the management of these risks. The Group's senior management is supported by a Financial Risk Committee that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. The Financial Risk Committee provides assurance to the Group's senior management that the Group's financial activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk profile. The Board of Directors reviews and approves the policies for managing these risks which are summarized below.

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to bank and financing loans with floating interest rates. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis and entering into agreements for derivatives transactions, if needed.

The following table presents an analysis of financial liabilities by type of interest:

	Financial liabilities
	Non-interest bearing
	Floating interest bearing
	Fixed interest bearing
Total financial liabilities	

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/increase/ decrease in basis point
31 Desember 2023	
Rupiah Indonesia	+100
Rupiah Indonesia	-100
31 Desember 2022	
Rupiah Indonesia	+100
Rupiah Indonesia	-100

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan Grup, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang usaha dan pendapatan yang masih akan diterima dari pelanggan dipantau secara teratur.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Grup kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha dan pendapatan yang masih akan diterima sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

a. Interest rate risk (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the consolidated income before income tax is affected by the impact on floating rate loans as follows:

	Dampak terhadap laba sebelum pajak penghasilan/ Effect on income before income tax
December 31, 2023	
Indonesian Rupiah	(26.084)
Indonesian Rupiah	26.084
December 31, 2022	
Indonesian Rupiah	(33.905)
Indonesian Rupiah	33.905

b. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group are exposed to credit risk from their operating activities related to tower rent. Customer credit risk is managed by a Credit Committee subject to the Group's established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer trade receivables and accrued income are regularly monitored.

The Group's maximum exposure of the credit risk approximates net carrying amounts of trade receivables and accrued income as disclosed in Notes 6 and 7.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen Risiko (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh Direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha dan pendapatan yang masih akan diterima yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan piutang usaha dan pendapatan yang masih akan diterima yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta saldo di bank:

2023						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub jumlah/ <i>Sub total</i>	Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ <i>Allowance for expected credit losses</i>	Jumlah - neto/ <i>Total - net</i>
Saldo di bank	4.953	-	-	4.953	-	4.953
Bank yang dibatasi penggunaannya	8	-	-	8	-	8
Piutang usaha	743.390	11.162	2.188	756.740	(2.188)	754.552
Pendapatan yang masih akan diterima	34.218	-	1.284	35.502	(1.284)	34.218
Jumlah	782.569	11.162	3.472	797.203	(3.472)	793.731
2022						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Sub jumlah/ <i>Sub total</i>	Cadangan kerugian kredit ekspektasian/ <i>Allowance for expected credit losses</i>	Jumlah - neto/ <i>Total - net</i>
Saldo di bank	1.736	-	-	1.736	-	1.736
Piutang usaha	508.696	3.738	2.123	514.557	(2.123)	512.434
Pendapatan yang masih akan diterima	18.879	-	1.348	20.227	(1.348)	18.879
Jumlah	529.311	3.738	3.471	536.520	(3.471)	533.049

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Risk Management (continued)

b. Credit risk (continued)

Credit risk arising from placements of current accounts is managed in accordance with the Group' policies. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the Board of Directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

The following table presents the impaired trade receivables and accrued income, trade receivables past due but not impaired and trade receivables and accrued income neither past due nor impaired and cash in banks:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan bank yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Grup menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang usaha serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pembiayaan untuk mengelola risiko likuiditas.

Grup memonitor risiko likuiditas dengan menggunakan alat perencanaan likuiditas. Kebijakan Grup adalah menjaga rasio-rasio sebagai berikut:

- *Net debt to running EBITDA* (maksimum 5,00)
- *Running EBITDA to interest expense* (minimum 1,5)

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

2023					
Jatuh tempo/Maturity period					
	Dalam 1 tahun/ <i>Within 1 year</i>	1 - 3 tahun/ <i>1 - 3 years</i>	3 - 5 tahun/ <i>3 - 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	
Jumlah/Total	Jumlah/Total	Jumlah/Total	Jumlah/Total	Jumlah/Total	
Utang bank	2.593.465	2.345.363	248.102	-	-
Utang usaha	70.364	70.364	-	-	-
Utang lain-lain	35.545	35.545	-	-	-
Beban akrual	48.622	48.622	-	-	-
Utang derivatif	7.595	7.595	-	-	-
Liabilitas sewa	1.002	59	943	-	-
Jumlah liabilitas keuangan	2.756.593	2.507.548	249.045	-	-
2022					
Jatuh tempo/Maturity period					
	Dalam 1 tahun/ <i>Within 1 year</i>	1 - 3 tahun/ <i>1 - 3 years</i>	3 - 5 tahun/ <i>3 - 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	
Jumlah/Total	Jumlah/Total	Jumlah/Total	Jumlah/Total	Jumlah/Total	
Utang bank	3.371.023	1.310.942	990.768	1.069.313	-
Utang usaha	34.646	34.646	-	-	-
Utang lain-lain	18.947	18.947	-	-	-
Beban akrual	117.549	117.549	-	-	-
Liabilitas sewa	188.118	19.508	73.584	73.584	21.442
Jumlah liabilitas keuangan	3.730.283	1.501.592	1.064.352	1.142.897	21.442

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Risk Management (continued)

c. Liquidity risk

Liquidity risk arise in situations where the Group have difficulties in fulfilling financial liabilities when they become due.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash on hand and in banks to support business activities on a timely basis. The Group maintain a balance between continuity of trade receivables collections and flexibility through the use of bank and financing loans in order to manage liquidity risk.

The Group monitor their risk of a shortage of funds by using a recurring liquidity planning tool. The Group maintain the following ratios:

- *Net debt to running EBITDA* (maximum 5.00)
- *Running EBITDA to interest expense* (minimum 1.5)

The following table summarizes the maturity profile of the Group' financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Manajemen Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Selain itu, Grup dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perusahaan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk berkontribusi sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Grup pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran deviden kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tahun berjalan.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

40. TRANSAKSI NON-KAS

Rincian transaksi non-kas Grup adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	40.098	-
Penambahan aset tetap melalui beban akrual	-	6.043
Liabilitas sewa:		
Penurunan liabilitas sewa terkait perubahan estimasi akuntansi	(202.302)	-
Penurunan liabilitas sewa terkait pembatalan aset hak-guna	(19.330)	(127.987)
Penambahan liabilitas sewa melalui biaya keuangan	14.627	18.317
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	406.600	223.881
Penambahan liabilitas sewa melalui akuisisi entitas anak	-	12.858
Penurunan liabilitas sewa melalui pelepasan entitas anak	-	(191.083)

114

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders value.

In addition, the Group are also required by the Corporate Law effective August 16, 2007 to contribute and to maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. These externally imposed capital requirements are considered by the Group at the Annual Shareholders' General Meeting.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital for current year.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

40. NON-CASH TRANSACTIONS

Details of non-cash transactions of the Group are as follows:

	2023	2022
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	40.098	-
Penambahan aset tetap melalui beban akrual	-	6.043
Liabilitas sewa:		
Decrease in lease liabilities due to change in accounting estimate	(202.302)	-
Decrease in lease liabilities due to termination of right-of-use assets	(19.330)	(127.987)
Addition of lease liabilities through finance costs	14.627	18.317
Addition of right-of-use assets through lease liabilities	406.600	223.881
Addition of lease liabilities through acquisition of a subsidiary	-	12.858
Decrease in lease liabilities due to disposal of a subsidiary	-	(191.083)

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

40. TRANSAKSI NON-KAS (lanjutan)

Rincian transaksi non-kas Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023	2022	
Utang bank:			Bank loans:
Kenaikan utang bank atas amortisasi biaya transaksi	4.851	4.400	Increase in bank loans on amortization of transaction costs
Penurunan utang bank melalui pelepasan entitas anak	-	(320.000)	Decrease in bank loans due to disposal of a subsidiary
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran menara	231	359	Addition of fixed assets through capitalization of the estimated cost of dismantling of tower

41. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

41. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas neto/ Net cash flows	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Perubahan lain/Other changes	31 Desember/ December 31, 2023	
Utang bank jangka pendek	815.558	1.394.285	(7.263)	-	2.202.580	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	2.555.465	(2.169.196)	-	4.616	390.885	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	188.118	(386.711)	-	199.595	1.002	Lease liabilities
Jumlah	3.559.141	(1.161.622)	(7.263)	204.211	2.594.467	Total
	1 Januari/ January 1, 2022	Arus kas neto/ Net cash flows	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Perubahan lain/Other changes	31 Desember/ December 31, 2022	
Utang bank jangka pendek	1.350.000	(214.442)	-	(320.000)	815.558	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	5.227.238	(2.675.000)	-	3.227	2.555.465	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	411.999	(159.867)	-	(64.014)	188.118	Lease liabilities
Jumlah	6.989.237	(3.049.309)	-	(380.787)	3.559.141	Total

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**42. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian:

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari International Financial Reporting Standards ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED
BUT NOT YET EFFECTIVE**

The financial accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of the date of issuance of the consolidated financial statements:

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International Financial Accounting Standards,*
2. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),*
3. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and*
4. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.*

International Financial Accounting Standards

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)**

**42. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF
(lanjutan)**

Standar akuntansi keuangan baru, revisi dan efektif
pada tahun 2024 - 2025

- Amandemen PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok (sebelumnya PSAK 60);
- Amandemen PSAK 116, "Sewa" tentang sewa pada transaksi jual dan sewa-balik (sebelumnya PSAK 73);
- PSAK 117, "Kontrak Asuransi" (sebelumnya PSAK 74);
- Amandemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan liabilitas jangka panjang dengan kovenan (sebelumnya PSAK 1);
- Amandemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" tentang pengaturan pembiayaan pemasok (sebelumnya PSAK 2); dan
- Amandemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran (sebelumnya PSAK 10).

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Fasilitas Kredit dari PT Bank QNB Indonesia Tbk
("QNB")

Pada tanggal 26 Maret 2024, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan PT Iforte Energi Nusantara ("IEN") dengan QNB telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit No. 019/PK-1114/III/2024, dimana QNB menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp 500.000 yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan IEN selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar ongkos pendanaan QNB ditambah margin tertentu. Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan IEN bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini.

**42. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED
BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)**

New, revised and effective financial accounting
standards in 2024 - 2025

- *Amendment to PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosures" regarding to supplier finance arrangements (previously PSAK 60);*
- *Amendment to PSAK 116, "Lease" regarding to leases on sale and leaseback (previously PSAK 73);*
- *PSAK 117, "Insurance Contract" (previously PSAK 74);*
- *Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" regarding to classification of liabilities as current or non-current and non-current liabilities with covenants (previously PSAK 1);*
- *Amendment to PSAK 207, "Statement of Cash Flows" regarding to supplier finance arrangements (previously PSAK 2); and*
- *Amendment to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding to lack of exchangeability (previously PSAK 10).*

43. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Credit Facility from PT Bank QNB Indonesia Tbk
("QNB")

On March 26, 2024, the Company, Protelindo, Iforte, BIT and PT Iforte Energi Nusantara ("IEN") with QNB has signed the Credit Facility Agreement No. 019/PK-1114/III/2024, whereby QNB agreed to provide revolving loan facility amounted to Rp 500,000 which can be used by the Company, Protelindo, Iforte, BIT and IEN for the period of 12 (twelve) months. The loan facility is bears annual interest rate of specific margin over QNB's cost of fund. The Company, Protelindo, Iforte, BIT and IEN are jointly and severally liable for settlement of those loan facilities.



Head Office

📍 : Jl. Tanjung Karang No. 11
Jati Kulon, Jati, Kudus
Jawa Tengah, 59347

☎ : +62 291 431905

@ : marketing@stptower.com
corporate.secretary@stptower.com

Operational Office

📍 : Menara BCA, Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia

☎ : +62 21 2358 5555

@ : marketing@stptower.com
corporate.secretary@stptower.com